

**BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN AKHIR

2017



**PROSPEK KERJASAMA PROVINSI BERSAUDARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN PEMERINTAH DAERAH BELGIA, BELANDA, SUDAN,
MAROKO, RUSIA DAN KOREA SELATAN**

**PROSPEK KERJASAMA PROVINSI BERSAUDARA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH
DAERAH DI BELGIA, BELANDA, RUSSIA, SUDAN, MAROKO DAN
KOREA SELATAN**



**SEBAGAI LAPORAN AKHIR KAJIAN AKADEMIS UNTUK BAGIAN KERJA
SAMA BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

TIM PENELITI

ANDRIAS DARMAYADI

ONIN NAJMUDIN

RIZKY AMANULOH

KETUA PENELITI

ANGGOTA PENELITI

ANGGOTA PENELITI

PT. BINTANG MULTI WIGRAHA

2017

PENGANTAR

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat dokumen *Grand Design* Kerjasama Daerah (GDKD) yang berisi Program, Kegiatan, strategi dan model kerjasama daerah untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Grand Design ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam merencanakan dan melaksanakan kerjasama daerah

Untuk kerjasama luar negeri, beberapa Pemerintah Daerah diluar negeri saat ini menjadi perhatian dan prioritas untuk ditingkatkan bentuk kerjasamanya menjadi kerjasama yang lebih konkrit. Pemerintah Daerah di Belgia, Belanda, Rusia, Sudan, Maroko, dan Korea Selatan saat ini menjadi perhatian dan prioritas karena telah adanya kunjungan dan peninjauan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tim kami mendapatkan kesempatan untuk membuat kajian akademis untuk melihat peluang kerjasama/ kemitraan luar negeri antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan 9 Pemerintah Daerah setingkat Provinsi yaitu Wallonia Region Belgia, Provinsi Gelderland Belanda, Republik Bashkortostan Rusia, Khartoum State Sudan, Souss Massa Region Maroko serta 4 Pemerintah Daerah di Korea Selatan yaitu, Kota Metropolitan Incheon, Kota Metropolitan Ulsan, Provinsi Gyeongsangbuk-Do dan Provinsi Jeollanam-Do.

Output dari kajian akademis ini untuk memberikan input mengenai potensi-potensi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah setingkat Provinsi di Belgia, Belanda, Rusia, Sudan, Maroko dan Korea Selatan, guna mempersiapkan dan membentuk kerjasama yang substantif, efektif, dan efisien.

Semoga Laporan Kajian Akademis ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu acuan dalam pemetaan Potensi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk membangun kerjasam dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah di Belgia, Belanda, Rusia, Sudan, Maroko dan Korea Selatan

Bandung, September 2017
Ketua Tim Peneliti

Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D

DAFTAR ISI

	Hal
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sasaran	7
1.5 Ruang Lingkup Kajian.....	7
1.6 Tahap Pelaksanaan Kajian.....	8
1.7 Jadwal Kajian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Desentralisasi Kebijakan Luar Negeri.....	10
2.2 Kerjasama Daerah Dengan Mitra Luar Negeri.....	13
2.2.1 Paradiplomasi.....	16
2.2.2 Otonomi Daerah Dalam Hubungan Internasional.....	21
BAB III METODE PELAKSANAAN KAJIAN	
3.1 Metode Pendekatan yang Dilakukan	24

3.2 Teknik Pengumpulan Data	25
3.3 Rancangan Analisis. Data	26
3.4 Batasan Kajian.....	27
3.5 Tahap Pelaksanaan Kajian	28
3.6 Sistem Pelaporan	28

BAB IV GAMBARAN UMUM POTENSI PEMERINTAH DAERAH DI JAWA BARAT

4.1 Potensi Daerah Provinsi Jawa Barat	30
4.1.1 Gambaran Umum	30
4.1.2 Sektor Pertanian.....	31
4.1.3 Sektor Perikanan	32
4.1.4 Sektor Perkebunan.....	34
4.1.5 Sektor Pendidikan dan Tenaga Kerja	35

BAB V GAMBARAN UMUM & POTENSI PEMERINTAH DAERAH DI BELGIA, BELANDA, RUSIA, SUDAN MAROKO DAN KOREA SELATAN

5.1 Wallonia Region, Belgia.....	38
5.1.1 Gambaran Umum	38
5.1.2 Letak Geografi.....	39
5.1.3 Sejarah Singkat	40
5.1.4 Demografi.....	43
5.1.5 Politik dan Pemerintahan.....	45
5.1.6 Potensi Sosial dan Ekonomi	48
5.1.6.1 Riset dan Pengembangan Potensi	54
5.1.6.2 Pariwisata dan Konservasi Budaya	56
5.2 Provinsi Gelderland, Belanda.	58

5.2.1	Gambaran Umum	58
5.2.2	Letak Geografis	59
5.2.3	Sejarah Singkat	60
5.2.4	Demografi	62
5.2.5	Politik dan Pemerintahan.....	63
5.2.5.1	Sekilas Wajah Arnhem	65
5.2.6	Potensi Sosial dan Ekonomi	67
5.2.6.1	Sektor Pariwisata	71
5.3	Republik Bashkortostan	72
5.3.1	Gambaran Umum	72
5.3.2	Letak Geografis	73
5.3.3	Sejarah Singkat	74
5.3.4	Demografi	77
5.3.5	Politik dan Pemerintahan.....	78
5.3.6	Potensi Sosial dan Ekonomi	79
5.4	Khartoum State, Republik Sudan.....	82
5.4.1	Gambaran Umum	82
5.4.2	Letak Geografis	83
5.4.3	Sejarah Singkat	84
5.4.4	Demografi	86
5.4.5	Politik dan Pemerintahan.....	87
5.4.6	Potensi Sosial dan Ekonomi	90
5.5	Provinsi Souss Massa, Maroko	94
5.5.1	Gambaran Umum	94
5.5.2	Letak Geografis	95
5.5.3	Sejarah Singkat	96

5.5.4 Politik dan Pemerintahan.....	97
5.5.5 Potensi Sosial dan Ekonomi.....	98
5.6 Kota Metropolitan Incheon, Korea Selatan	107
5.6.1 Gambaran Umum.....	107
5.6.2 Letak Geografis	107
5.6.3 Sejarah Singkat.....	109
5.6.4 Politik dan Pemerintahan.....	112
5.6.5 Potensi Sosial dan Ekonomi.....	116
5.7 Kota Metropolitan Ulsan, Korea Selatan.....	120
5.7.1 Gambaran Umum.....	120
5.7.2 Letak Geografis	122
5.7.3 Sejarah Singkat.....	123
5.7.4 Politik dan Pemerintahan.....	124
5.7.5 Potensi Sosial dan Ekonomi.....	125
5.8 Provinsi Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan	130
5.8.1 Gambaran Umum.....	130
5.8.2 Letak Geografis	131
5.8.3 Sejarah Singkat.....	131
5.8.4 Politik dan Pemerintahan.....	133
5.8.5 Potensi Sosial dan Ekonomi.....	138
5.9 Provinsi Jeollanam-Do, Korea Selatan	141
5.9.1 Gambaran Umum.....	141
5.9.2 Letak Geografis	142
5.9.3 Sejarah Singkat.....	143
5.9.4 Politik dan Pemerintahan.....	144
5.9.5 Potensi Sosial dan Ekonomi.....	151

**BAB VI ANALISA PROSPEK KERJASAMA PROVINSI BERSAUDARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH
DAERAH DI BELGIA, BELANDA, RUSIA, SUDAN MAROKO DAN KOREA
SELATAN**

6.1 Wallonia Region, Belgia.....	154
6.1.1 Hubungan Bilateral Indonesia – Belgia.....	154
6.1.2 Analisis Target Kerjasama.....	161
6.2 Provinsi Gelderland, Belanda.	171
6.2.1 Hubungan Bilateral Indonesia – Belanda	171
6.2.2 Analisis Target Kerjasama.....	178
6.3 Republik Bashkortostan, Rusia	185
6.3.1 Hubungan Bilateral Indonesia – Rusia	185
6.3.2 Analisa Target Kerjasama	187
6.3.2.1 Industri Manufaktur.....	193
6.3.2.1.1 Industri Pertahanan/Militer	199
6.3.2.1.2 Industri Petrokimia	201
6.3.2.1.3 Industri Pertambangan dan Energi	202
6.3.2.2 Pertanian – Peternakan.....	204
6.3.2.3 Pendidikan dan Sosial Budaya.....	206
6.3.2.3.1 Inovasi Teknologi.....	207
6.3.2.3.2 Pariwisata	207
6.4 Khartoum State, Republik Sudan	209
6.4.1 Hubungan Indonesia – Sudan	209
6.4.2 Analisa Potensi Kerjasama	214
6.5 Souss Massa Region, Maroko	219
6.5.1 Hubungan Bilateral Indonesia – Maroko.....	219
6.5.2 Analisa Potensi Kerjasama.....	224

6.6 Kota Metropolitan Incheon, Korea Selatan.....	229
6.6.1 Analisa Potensi Kerjasama.....	229
6.6.1.1 Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.....	230
6.6.1.1.1 Kondisi Ekoomi Kreatif Jawa Barat.....	230
6.6.1.1.2 Kondisi Ekoomi Kreatif Incheon.....	233
6.6.1.1.3 Bentuk Kerjasama yang dapat dilakukan ..	237
6.6.1.2 Investasi	238
6.6.1.2.1 Iklim Investasi Korea Selatan di Indonesia	238
6.6.1.2.2 Iklim dan Peluang Investas di Jawa Barat .	240
6.6.1.2.3 Bentuk Kerjasama yang dapat dilakukan...	243
6.6.1.3 Perdagangan.....	244
6.6.1.3.1 Kondisi Perdangan Indonesia – Korsel.....	244
6.6.1.3.2 Kondisi Perdagangan/Ekspor Jawa Barat.	246
6.6.1.3.3 Perekonomian dan Perdagangan Kota Metropolitan Incheon	250
6.6.1.3.4 Potensi Perdagangan Jawa Barat dengan Kota Metropolitan Incheon.....	252
6.6.1.3.5 Bentuk Kerjasama yang Dapat Dilakukan .	255
6.7 Kota Metropolitan Ulsan, Korea Selatan.....	256
6.7.1 Analisis Potensi Kerjasama	256
6.7.1.1 Kerjasama dan Investasi Galangan Kapal	256
6.7.1.1.1 Kondisi Industri Galangan Kapal Nasional	256
6.7.1.1.2 Kondisi Industri Galangan Kapal Korsel....	260
6.7.1.1.3 Bentuk Kerjasama yang Dapat Dilakukan	262
6.7.1.2 Penataan Lingkungan Wilayah Perindustrian.....	263
6.7.1.2.1 Kondisi Wilayah Perindustrian Jawa Barat	263

6.7.1.2.2 Kondisi Lingkungan Perindustrian Kota	
Metropolitan Ulsan	269
6.7.1.2.3 Kerjasama yang Dapat Dilakukan	273
6.7.1.3 Pariwisata.....	274
6.7.1.3.1 Kondisi Pariwisata Ulsan Metropolitan City	274
6.7.1.3.2 Kondisi Pariwisata Jawa Barat	278
6.7.1.3.3 Kerjasama yang Dapat Dilakukan	280
6.8 Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan	281
6.8.1 Analisa Potensi Kerjasama	281
6.8.1.1 Kerjasama Sektor Agrikultur.....	282
6.8.1.1.1 Kondisi Agrikultur Provinsi Jawa Barat	282
6.8.1.1.2 Kondisi Agrikultur Gyeongsangbuk-do	289
6.8.1.1.3 Bentuk Kerjasama yang Dapat Dilakukan .	295
6.8.1.2 Kerjasama Pariwisata	296
6.8.1.2.1 Kondisi Pariwisata Provinsi Jawa Barat.....	296
6.8.1.2.2 Kondisi Pariwisata Gyeongsangbuk-do	300
6.8.1.2.3 Bentuk Kerjasama yang Dapat Dilakukan .	301
6.8.1.3 Kerjasama di Bidang Perikanan	302
6.8.1.3.1 Kondisi Perikanan Provinsi Jawa Barat	302
6.8.1.3.2 Kondisi Perikanan Gyeongsangbuk-do	305
6.8.1.3.3 Bentuk Kerjasama yang Dapat Dilakukan .	309
6.9 Provinsi Jeollanam-do, Korea Selatan.....	309
6.9.1 Analisa Potensi Kerjasama	309
6.9.1.1 Kerjasama Sektor Agrikultur.....	310
6.9.1.1.1 Perbandingan Kondisi Agrikultur	
Jeollanam-Do dan Jawa Barat.....	310

6.9.1.1.2 Bentuk Kerjasama yang Dapat Dilakukan .	319
6.9.1.2 Kerjasama Perikanan Tangkap	321
6.9.1.2.1 Perbandingan Kondisi Perikanan Tangkap	
Jeollanam-do & Jawa Barat.....	321
6.9.1.2.2 Bentuk Kerjasama yang Dapat Dilakukan..	327
6.9.1.3 Kerjasama Sektor Pariwisata	328
6.9.1.3.1 Perbandingan Kondisi Pariwisata di	
Jeollanam-do dan Jawa Barat	328
6.9.1.3.2 Bentuk Kerjasama yang Dapat Dilakukan. .	332
6.9.1.4 <i>Research and Develpoment</i> Energi Terbarukan ..	333
6.9.1.4.1 Perbandingan Kondisi Pengembangan	
Energi Terbarukan Provinsi Jeollanam-do	
dengan Provinsi Jawa Barat	334
6.9.1.4.3 Bentuk-Bentuk Kerjasama Bidang R&D	
Energi Terbarukan.....	339
BAB VII KESIMPULAN	340
7.1 Wallonia Region, Belgia.....	340
7.2 Provinsi Gelderland, Belanda	341
7.3 Republik Bashkortostan, Rusia.....	343
7.4 Khartoum, Sudan.....	344
7.5 Souss Massa Region, Maroko	345
7.6 Kota Metropolitan Incheon, Korea Selatan	346
7.7 Kota Metropolitan Ulsan, Korea Selatan.....	349
7.8 Provinsi Gyeongsangbuk-do.....	351
7.9 Provinsi Jeollanam-do	353

DAFTAR PUSTAKA xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal pelaksanaan kegiatan	9
Tabel 4.1 Lapangan Pekerjaan Utama dari Penduduk pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.....	36
Tabel 5.1 Sejarah Incheon Metropolitan City	110
Tabel 5.2 Nama Distrik dan Kabupaten Incheon Metropolitan City	112
Tabel 5.3 Tabel <i>Incheon Free Economic zone</i>	117
Tabel 5.4 Iklim Kota Metropolitan Ulsan.....	122
Tabel 5.5 Petumbuhan Perekonomian Ulsan.....	127
Tabel 5.6 Jumlah Wisatawan Masuk ke Ulsan.....	129
Tabel 5.7 Sejarah Provinsi Gyeongsangbuk-do	132
Tabel 5.8 Wilayah Administratif Selatan.....	134
Tabel 5.9 Nama Kota dan Kabupaten Provinsi Gyeongsangbuk-do	135
Tabel 5.10 Jumlah dan Jenis Industri Manufaktur di Provinsi Gyeongsangbuk-do	139
Tabel 5.11 Jumlah Produksi Komoditas Unggul Gyeongsangbuk-do	141
Tabel 5.12 Kabupaten di Provinsi Jeollanam-do	145
Tabel 5.13 Persentase Industri Utama di Jeollanam-do.....	151
Tabel 6.1 Industri Bashkorkostan	196
Tabel 6.2 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif dan Tenaga Kerja, Korsel	233
Tabel 6.3 Serapan Tenaga Kerja Industri Ekonomi Kreatif Bidang Manufaktur Kota Metropolitan Incheon.....	235
Tabel 6.4 Realisasi Investasi di Indonesia Triwulan II	238
Tabel 6.5 Total Nilai Investasi PMDN Kuartal II 2017	241

Tabel 6.6 Total Nilai Investasi PMA Kuartal II 2017	242
Tabel 6.7 Nilai Ekspor Indonesia ke Korea Selatan Januari – Mei 2017..	245
Tabel 6.8 Perubahan Nilai Ekspor Non Migas Indonesia ke Korsel	246
Tabel 6.9 Ringkasan Perkembangan Ekspor Jawa Barat	247
Tabel 6.10 Ringkasan Perkembangan Impor Jawa Barat	248
Tabel 6.11 Nilai Ekspor Jawa Barat ke Korea Selatan	248
Tabel 6.12 Nilai Imor Jawa Barat dari Korea Selata	249
Tabel 6.13 Ancaman Kerusakan Lingkungan di Jawa Barat	266
Tabel 6.14 Pencemaran Sungai di Ulsan	271
Tabel 6.15 Objek Wisata Industri Ulsan Metropolitan City	277
Tabel 6.16 Luas Lahan Pertanian Jawa Barat	283
Tabel 6.17 Produksi Pertanian Jawa Barat	284
Tabel 6.18 Luas Lahan Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Barat	285
Tabel 6.19 Penyusutan Lahan Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Barat	286
Tabel 6.20 Peningkatan Lahan Pertanian Kabupaten/Kota Jawa Barat..	288
Tabel 6.21 Luas Lahan Agrikultur Provinsi/Kota di Korea Selatan	291
Tabel 6.22 Penyusutan Luas Lahan Agrikultur di Provinsi/Kota di Korsel	293
Tabel 6.23 Luas Lahan Produktif Provinsi Gyeongsangbuk-do.....	294
Tabel 6.24 Jumlah Wisatawan Asing Menurut Negara Asal.....	297
Tabel 12 Jumlah Wisatawan Asing Masuk ke Indonesia.....	298
Tabel 6.25 Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Barat	302
Tabel 6.26 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Jawa Barat	303
Tabel 6.27 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Jawa Barat	304
Tabel 6.28 Jumlah Produksi Perikanan Provinsi Gyeongsangbuk-do ...	307

Tabel 6.29 Jenis Perikanan Provinsi Gyeongsangbuk-do	308
Tabel 6.30 Luas Lahan Agrikultur Provinsi/Kota di Korea Selatan	311
Tabel 6.31 Produksi Utama Agrikultur Jeollanam-do Tahun 2013	312
Tabel 6.32 Jumlah Industri Rumah Tangga Sektor Perikanan per Provinsi Tahun 2015	323
Tabel 6.33 Peningkatan/Penurunan Jumlah Industri Rumah Tangga 2010-2015 Per Provinsi	324
Tabel 6.34 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Peringkat 10 Besar tahun 2015	325
Tabel 6.35 Status Produksi Energi baru terbarukan di Jeollanam-do	335

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman	27
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	37
Gambar 5.1 Peta Wilayah Wallonia Region	40
Gambar 5.2 Peta Demografi	45
Gambar 5.4 Simbol Wallonia Region	48
Gambar 5.5 Namur, Wallonia.....	57
Gambar 5.6 Provinsi Gelderland	59
Gambar 5.7 Peta Gelderland	60
Gambar 5.8 Jembatan Arnhem	62
Gambar 5.9 Bendera dan Lambang Gerderland	64
Gambar 5.10 Wilayah Negara Bagian Federasi Rusia.....	73
Gambar 5.11 Peta Bashkorkostan	74
Gambar 5.12 Lambang dan Bendera Republik Bashkorkostan	79
Gambar 5.13 Peta Sudan.....	82
Gambar 5.14 Silbol Khartoum	90
Gambar 5.15 Peta Souss-Massa	95
Gambar 5.16 Peta Incheon	108
Gambar 5.17 Letak Geografis Distrik dan Kabupaten Kota Metropolitan Incheon	113
Gambar 5.18 Incheon Free Economic Zone	116
Gambar 5.19 Statistik Total Volume Kargo Pelabuhan Incheon/Tahun ..	119
Gambar 5.20 Statistik Volume Kontainer Pelabuhan per Tahun	119

Gambar 5.21 Kawasan Industri Kota Metropolitan Ulsan.....	126
Gambar 5.22 Struktur Organisasi Provinsi Gyeongsangbuk-do	137
Gambar 5.23 Komoditas Unggulan Provinsi Gyeongsangbuk-do	140
Gambar 5.24 Letak Geografis Provinsi Jeollanam-do	143
Gambar 5.25 Letak Geografis Kota/Kabupaten di Provinsi Jeollanam-do	146
Gambar 5.26 Struktur Organisasi Pemerintahan Jeollanam-do	150
Gambar 5.27 Persentase Sektor Ekonomi Jeollanam-do.....	152
Gambar 6.1 Presiden Joko Widodo dan Putri Astrid	157
Gambar 6.2 Kunjungan Misi Belgia ke Jawa Barat	166
Gambar 6.3 Sektor Prospektif Kerjasama	168
Gambar 6.4 Kunjungan PM mark Rutte Kepada Presiden Joko Widodo ..	172
Gambar 6.5 Potensi Gelderland.....	179
Gambar 6.6 Sektor Kemitraan.....	181
Gambar 6.7 Akses Bashkorkostan	189
Gambar 6.8 Diagram Prioritas Industri	195
Gambar 6.9 Pesawat Tempur Sukhoi	200
Gambar 6.10 Potensi Kerjasama dengan Khartoum	217
Gambar 6.11 Presiden Soekarno dan Raja Muhammad V di Rabat	220
Gambar 6.12 Geografi Maroko.....	226
Gambar 6.13 Penghasilan per Individu Masyarakat Incheon	251
Gambar 6.14 Total Gross Regional Income Incheon	251
Gambar 6.15 Struktur Organisasi GARES	290
Gambar 6.16 Komoditas Ekspor Provinsi Gyeongsangbuk-do	306
Gambar 6.17 Jumlah Industri Rumah Tangga Agrikultur Provinsi/Korea	

Selatan	314
Gambar 6.18 Struktur Organisasi JNARES.....	316
Gambar 6.19 Grafik Peningkatan Hasil Produksi Tangkap Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011-2015	326
Gambar 6.20 Peningkatan Jumlah Wisatawan Asing asal Korea Selatan (2014-2016).....	331
Gambar 6.21 Sistem Pemasokan Energi Listrik Tenaga Surya untuk Pertanian di Provinsi Jeollanam-do	336

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma hubungan internasional semula berfokus pada negara sebagai subjek hukum internasional. Negara adalah aktor utama dengan kekuasaan dan kewenangannya memainkan peran penting di dunia global. Namun, saat ini fokus hubungan internasional telah bergeser ke *non-state actor*, yang salah satunya yaitu pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri telah diberikan kewenangan oleh regulasi nasional, meskipun masih dalam keterbatasan dan berada dalam pengawasan Pemerintah Pusat. Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah menjalin kerja sama internasional dalam skema kerja sama bersaudara, kerja sama teknik, *joint venture* dan skema lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Seiring dengan prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling

menguntungkan. Pada kenyataannya daerah memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menghambat upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam mencari sumber serta memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang kompeten.

Salah satu bentuk kerja sama dan kemitraan adalah kerja sama *Sister Province*, dimana daerah, dengan mempertimbangkan potensinya dapat melakukan kerja sama dengan provinsi di negara lain, untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemilihan mitra kerja sama dari luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan, diantaranya kesetaraan status administrasi, kesamaan karakteristik, kesamaan permasalahan, upaya saling melengkapi dan peningkatan hubungan antar masyarakat, serta adanya kepentingan lain seperti perdagangan dan alih teknologi, yang dirasa belum cukup terakomodasi jika kerja sama dilakukan dengan pihak-pihak lain dalam tataran domestik.

Pentingnya peningkatan dan pengembangan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud di atas, telah menjadi agenda Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan potensi daerah. Namun demikian, beberapa dokumen kerja sama yang telah dibuat belum terimplementasi dengan baik dan hasil serta manfaatnya belum dirasakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Letter of Intent* yang telah dibuat tidak meningkat menjadi sebuah Memorandum saling Pengertian atau bentuk perjanjian lainnya,

sedangkan MoUnya seringkali menjadi sebuah *sleeping agreement/dormant*. Adapun salah satu yang menjadi kendala adalah sistem perencanaan yang lemah.

Salah satu langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat dokumen *Grand Design* Kerja sama Daerah (GDKD) yang berisi program, kegiatan, strategi dan model kerja sama daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. *Grand Design* ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merencanakan dan melaksanakan kerja sama daerah.

Grand Design Kerja sama Daerah Provinsi Jawa Barat dirancang untuk menjadi konsep dasar yang mendasari pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan dan pengembangan potensi daerah melalui kerja sama daerah yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jabar Tahun 2013-2018 termasuk penentuan mitra kerja sama luar negeri yang disesuaikan dengan tipologi daerah, potensi, karakteristik daerah dan kebutuhan nyata daerah sehingga kerja sama pada akhirnya dapat memberikan manfaat dan efek positif bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Dokumen ini telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Kerja sama Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2015-2018.

Dalam rangka realisasi GDKD tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2017 akan mengadakan kegiatan pengembangan rencana dan implementasi kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri setingkat provinsi, diantaranya Wallonia Region Belgia, Provinsi Gelderland Belanda, Bashkortostan Rusia, Khartoum State Sudan, Souss Massa Region Maroko, Provinsi Gyeongsangbuk do,

Provinsi Jeollanamdo, Ulsan Metropolitan City, Incheon Metropolitan City Korea Selatan.

1.2 Dasar Hukum

Dalam Konteks Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang ini kemudian diperkuat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.

Perangkat-perangkat hukum ini menjadi landasan yang kuat dalam perubahan paradigma kerjasama luar negeri, terutama yang berkaitan dengan mewujudkan terciptanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan prefektur Pemerintah di luar negeri yang setingkat kedudukannya dengan Pemerintah Daerah di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara lainnya di dunia dalam menghadapi tantangan global. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kajian Akademis Kerjasama Provinsi Bersaudara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah daerah di Belgia, Belanda, Rusia, Sudan, Maroko dan Korea Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
3. Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.03 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah daerah dengan Pihak Luar Negeri
8. Pokok-Pokok Rencana Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013 – 2018
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat No.44 Tahun 2015 Tentang *Grand Design* Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari kajian akademis memberikan Input mengenai potensi-potensi Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah daerah di Belgia, Belanda, Rusia, Sudan, Maroko dan Korea Selatan, guna mempersiapkan dan membentuk kerjasama yang substantif, efektif dan efisien bagi daerah-daerah tersebut. Dalam kajian akan dikaji 9 (Sembilan) Pemerintah Daerah setingkat Provinsi yaitu Wallonia Region Belgia, Provinsi Gelderland Belanda, Bashkortostan Rusia, Khartoum State Sudan, Souss Massa Region Maroko, Provinsi Gyeongsangbuk do, Provinsi Jeollanamdo, Ulsan Metropolitan City, Incheon Metropolitan City Korea Selatan

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari kajian akademis ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi bagi proyeksi kerjasama internasional/ kerjasama Provinsi Bersaudara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah dari Negara lain guna mengembangkan rencana, menindaklanjuti serta mengimplementasikan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di luar negeri tahun anggaran 2017 sehingga kerjasama internasional / kerjasama Provinsi Bersaudara dapat berjalan secara efektif dan efisien serta berdaya manfaat tinggi terhadap masyarakat yaitu dengan :

1. Memberikan gambaran prospek dinamika dan eksistensi Pemerintah Daerah setingkat Provinsi di Wallonia Region Belgia, Provinsi Gelderland Belanda, Bashkortostan, Khartoum State Sudan, Souss Massa Region Maroko, Provinsi Gyeongsangbuk do, Provinsi Jeollanamdo, Ulsan Metropolitan City, Incheon Metropolitan City Korea Selatan.
2. Memberikan masukan mengenai strategi kerjasama luar negeri di tingkat pemerintah daerah yang disesuaikan dengan perubahan konstelasi ekonomi maupun politik internasional dikawasan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam meningkatkan hubungan antar Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah di ke-sembilan Provinsi tersebut.
3. Memberikan gambaran mengenai kesamaan profil / potensi pemerintah daerah di ke-sembilan Provinsi tersebut dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Mengidentifikasi proyeksi program/kegiatan kerjasama luar negeri dengan Pemerintah Daerah di 9 Provinsi tersebut dengan *Grand Design* Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kajian Akademis “Kerjasama Provinsi Bersaudara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah daerah di Belgia, Belanda, Rusia, Sudan, Maroko dan Korea Selatan” ini adalah tersedianya rekomendasi, data potensi yang akurat guna pemetaan kerjasama luar negeri Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang substantif, efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.5 Ruang Lingkup Kajian

Kajian yang dilakukan melingkupi gambaran dinamika kawasan peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah serta terciptanya pemetaan prospek kerjasama internasional yang bisa secara mudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya kajian akademis ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat ketepatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pemilihan calon mitra yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan daerah. Adapun ruang lingkup kajian dibatasi pada 9 Provinsi di 5 negara (Belgia, Belanda, Rusia, Sudan, Maroko, Korea Selatan), dimana Provinsi-Provinsi tersebut adalah :

1. Wallonia Region, Belgia,
2. Provinsi Gelderland, Belanda
3. Bashkortostan, Rusia

4. Khartoum State, Sudan
5. Souss Massa Region, Maroko
6. Provinsi Gyeongsangbuk do, Korea Selatan
7. Provinsi Jeollanamdo, Korea Selatan
8. Ulsan Metropolitan City, Korea Selatan
9. Incheon Metropolitan City, Korea Selatan.

1.6 Tahap Pelaksanaan Kajian

Berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kajian, kajian ini dibagi dalam 4 (empat) tahapan utama penyusunan rencana sebagai berikut :

- a) Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data
- b) Tahap Pemetaan
- c) Tahap Analisa Pemetaan
- d) Tahap Penyempurnaan

1.7 Jadwal Kajian

- a. Waktu Pelaksanaan :

Waktu Pelaksanaan Kajian akademis ini akan dilaksanakan mulai bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017.

- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

TABEL 1.1
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	TAHUN 2017		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	Penerimaan TOR Kajian Akademis			
2	Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data			
3	Penyusunan dan penyampaian <i>inception report</i> (Laporan Pendahuluan)			
4	Tahap Pemetaan dan Analisa Pemetaan			
5	Penyusunan dan Penyampaian Draft Laporan Akhir			
6	Tahap Penyempurnaan			
7	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akhir			

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi Kebijakan Luar Negeri

Hubungan Luar Negeri dalam bentuk kerja sama internasional pada dasarnya merupakan suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi setiap negara. Secara tradisional, kebijakan luar negeri dianggap sebagai *domain* pemerintah nasional atau pemerintah pusat yang merepresentasikan negara. Presiden, Parlemen dan Kementerian Luar Negeri dalam hal ini merupakan *agent* penting dalam struktur dan proses pengambilan kebijakan luar negeri serta diplomasi internasional untuk mewujudkan apa yang didefinisikan sebagai 'kepentingan nasional'.

Seiring dengan tekanan globalisasi, meningkatnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh setiap negara di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik, telah membuat saling ketergantungan antar negara di dunia juga semakin meningkat. Secara logis karenanya aktor kerja sama internasional pun tidak mungkin lagi didominasi oleh pemerintah pusat suatu negara.

Ledakan penduduk, arus urbanisasi, laju industrialisasi serta krisis ekologis dan sosial yang menggejala di kawasan urban dewasa ini telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pusat perhatian dunia dewasa ini karena menjadi pemain kunci dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. (Patterson, 2008 dalam Rosyadi 2010, 3). Menurut Garesche (2007), pertumbuhan dan perkembangan pesat Provinsi-provinsi di berbagai belahan dunia dalam dua dekade terakhir ini telah memperkuat kembali fenomena lama '*paradiplomacy*'.

dimana Provinsi dan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mempengaruhi hubungan internasional suatu negara. Jenis aktivitas diplomatik ini disebut juga '*low diplomacy*'. Berbeda dengan '*high diplomacy*' yang merupakan domain pemerintah nasional, '*low diplomacy*' merupakan arena Pemda dan biasanya mencakup beragam bentuk kerja sama di seputar masalah perkotaan dan kaum urban (Hsu 2003, 19 dalam de Villiers 2006, 2).

Meskipun maraknya inisiatif kerja sama antar provinsi antar negara di dunia ini semakin mengukuhkan jejaring kerja sama provinsi-provinsi di seluruh dunia, hal ini tidak serta merta merefleksikan versi kecil dari hubungan internasional tradisional. Jejaring kerja sama antar provinsi antar negara ini lebih dimaksudkan sebagai suatu cara yang efektif untuk memperkuat kapasitas provinsi dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dan lingkungan, memberikan pelayanan publik yang lebih memadai bagi masyarakatnya, serta mengembangkan tata kelola dan struktur manajemen provinsi.

Pengaruh jejaring kerja sama ini bahkan mampu mendorong munculnya fenomena baru yang disebut "*glocal governance*". Menurut de Villiers (2010), sasaran utama dari kerja sama provinsi bersaudara pada hakekatnya adalah seluruh komunitas provinsi itu, baik kelompok masyarakat sipil maupun komunitas bisnis. Lebih lanjut de Villiers (2010) berpendapat bahwa Pemda memainkan peran sebagai fasilitator, namun penyimpul utamanya adalah antara sesama komunitas itu sendiri.

Oleh karenanya model kerja sama provinsi bersaudara ini tujuannya Hubungan internasional yang berkembang lewat model ataupun mekanisme kerja sama atau kemitraan antar provinsi antar negara di dunia pada dasarnya memiliki

banyak terminologi. Bukan hanya 'provinsi bersaudara' (*sister provinces*) tetapi juga *friendship partnerstadt*, *jumelage*, *decentralized cooperation*, *municipal international cooperation*, dan *stedenbanden*. Sangat variatif, mulai dari pertukaran kebudayaan dan persahabatan sampai dengan pemasaran produk-produk provinsi dan pembangunan ekonomi.

Menurut Garesche (2007, 20), kerja sama provinsi bersaudara pada akhirnya dapat menjadi pembentuk jejaring transnasional antar warga kota di seluruh dunia yang memperkuat '*global citizenship*'. Eropa merupakan ladang yang subur bagi tumbuh kembangnya kerja sama provinsi bersaudara ini. Kern (2009) dalam studinya menyorot bagaimana jejaring kerja sama antar Pemda di Eropa, yang diistilahkan dengan "*Horizontal Europeanization*" telah berperan dalam mewujudkan integrasi Eropa. Keberadaan Pemda telah memberi kontribusi bagi terbentuknya *multilevel governance* di Eropa, yang tidak hanya berbasis pada *national and supranational system of governance* tetapi juga *local governance*.

Studi menarik lainnya mengaitkan bagaimana jejaring kerja sama transnasional provinsi-provinsi di seluruh dunia telah memunculkan fenomena yang disebut sebagai '*milieux of innovation*' (Castells dalam Vertovec and Posey 2003, 74-86). Fenomena ini merujuk pada kemampuan provinsi untuk menjadi sumber-sumber kemakmuran baru di era informasi melalui kompleksitas aktivitas produksi, proses informasi, riset dan kreativitas di wilayahnya.

Dengan penguasaan teknologi informasi yang berbasis pada *intellectual innovation* dan *entrepreneurship*, Amerika Serikat dan Eropa merupakan tempat tumbuh suburnya kota-kota baru yang menjadi pusat kekuatan industri telekomunikasi, bisnis jasa modern, dan budaya-*art, fashion, entertainment*,

publishing di dunia abad ini. The Silicon Valley, the San Fransisco Bay area dan the North Atlanta di Amerika Serikat, misalnya, adalah beberapa di antaranya yang mampu mendampingi dominasi New York, Los Angeles dan London.

2.2 Kerjasama Daerah Dengan Mitra Luar Negeri

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa fenomena gobalisasi telah membuka peluang interaksi dan transaksi yang lebih luas antar actor di dunia, baik aktor negara (*state actor*), sub-negara (*sub-state*), maupun non-negara (*non-state actor*). meningkatnya intensitas interaksi tersebut mencakup segala dimensi dan bidang. Hal inilah yang membuka peluang bagi actor sub-negara (*sub-state*), dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk menjalin kerjasama dengan mitra luar negerinya guna meng-optimalisasi pembangunan daerahnya. Mitra luar negeri tersebut dapat berupa Pemerintah daerah asing, organisasi non-pemerintah, swasta dan perseorangan. Fenomena tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut dengan “paradiplomasi”.

Ketika diplomasi Pemerintah pusat kesulitan mengurus seluruh kepentingan nasional sehingga rincian kepentingan sub-nasional dan atau lokal tercecer dan terabaikan, maka paradiplomasi pemerintah daerah diharapkan dapat menjembatani hal tersebut dengan merujuk kepada perbandingan antara politik luar negeri dengan politik dalam negeri mengenai fungsi bantuan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tujuan dilakukannya diplomasi didunia internasional adalah untuk memenuhi ataupun memperjuangkan kepentingan nasional. Lebih jauh daripada hal tersebut tujuan lain dilakukannya diplomasi adalah menginjak kepada tahapan

bagaimana kepentingan Indonesia tersebut mampu merujuk dan memenuhi kebutuhan dari daerah-daerah di wilayah Indonesia.

Isu atau *trend* tentang paradiplomasi membuat peluang dan harapan baru bagi Pemerintah Provinsi / kabupaten / Kota di Indonesia dengan memanfaatkan sumber-sumber internasional / multinasional /transnasional secara lebih proposional. Pada dasarnya hal ini mengarah kepada kritisi mutakhir atau dominasi *nation-state* serta diskursus partisipasi *sub-state actor* dan *sub-national governance* yang termajinailsasikan.

Pada hakikatnya, tidak ada satupun negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. salah satunya adalah urusan sosial (pada analisis kebijakan luar negeri atau perspektif politik dunia tersaji makna *societal* sama dengan *social* dikurangi *governmental*) yang selalu bersifat kompleks sehingga tidak mustahil ada bias simplifikasi dari masalah-masalah ilmiah, termasuk kompleksitas pembagian tanggung jawab dalam mencapai kepentingan nasional yang diteorikan untuk diplomasi.

Mekanisme yang ditempuh untuk menata keadilan dan atau pemerataan dari prosesnya serta atas hasilnya, tidaklah sesederhana manipulasi *scientific*. Kita tidak dapat begitu saja memberi pemaknaan mengenai 'kepentingan' nasional menurut totalitas (versi pusat) yang menindas parsialitasnya (versi daerahnya), atau menurut parsialitas yang merusak totalitasnya. terobosan paradiplomasi diharapkan dapat melengkapi acuan *diplomasi public* dan hubungan-hubungan intermestik sedangkan penguatan semangat atau pemberdayaan khasanah ke-Indonesiaan pun

tidak terlepas dari sikap atau penalaran yang saling tarik menarik diantara kosmopolitanisme, nasionalisme dan primodialisme sebagai lingkup penghayatan studi hubungan internasional.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya di Indonesia, meningkatnya peran aktor non-negara khususnya aktor sub-nasional dalam hubungan internasional pertama kali didorong oleh lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang mengartur perluasan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. Begitupun Undang-Undang penggantinya yaitu UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

Seiring dengan prinsip tersebut, maka penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pola pelayanan birokrasi dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar masyarakat. Saat ini telah banyak pemerintah daerah, baik itu ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang menjalin kerjasama luar negeri, termasuk diantaranya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada umumnya praktek kerjasama antara pemerintah daerah di Indonesia dengan mitranya di luar negeri ditujukan dalam kerangka otonomi daerah yang memicu daerah untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri.

Dalam kerjasama luar negeri dikenal bentuk kerjasama *sister* , yaitu kerjasama antara dua wilayah yang memiliki status wilayah administrasi setara dan

kerjasama ini merupakan payung besar bagi kerjasama sektor karena ruang lingkungannya akan terdiri dari berbagai sektor pembangunan.

Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, khususnya pada konteks kerjasama *sister* di Indonesia, Pemerintah Daerah harus mengacu pada aturan dan prinsip-prinsip yang berlakumeliputi persamaan kedudukan, memberikan manfaat, tidak mengganggu stabilitas politik, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, transparan dalam pelaksanaan program, tidak menimbulkan ketergantungan, terencana, dan mempunyai hasil yang dapat dirasakan secara jangka panjang.

Dalam ruang lingkup ekonomi, sosial, politik dan budaya, pelaksanaan otonomi daerah dalam hubungan luar negeri, penerapannya merupakan jawaban dari adanya tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, tertama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada didaerahnya masing-masing, desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan Pemerintah Pusat kepada daerah.

2.2.1 Paradiplomasi

Diplomasi mempunyai arti yang sangat luas dan mencakup berbagai kegiatan, dalam kamus Terminologi Hukum Internasional yang diterbitkan Universitas Sorbonne Prancis, diplomasi mempunyai banyak arti diantaranya secara luas adalah kepintaran, keterampilan, kelihaihan dan kehati-hatian yang dianggap perlu bagi seorang pejabat dalam menangani masalah-masalah luar negeri. Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan

administrative dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, Institusi politik dan kebijakan public untuk suatu pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk yang nyata dari implementasi kebijakan public (Michelmann, 2009:1977).

Paradiplomasi adalah salah satu sumber kekuatan nasional, yang dalam pelaksanaannya merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan institusi sub-nasional, regional dan local guna mencapai tujuannya. Dalam era globalisasi, fenomena ini begitu kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh actor non-negara dalam arena hubungan internasional. Daerah memiliki kesempatan untuk mempromosikan perdagangan, investasi dan berbagai potensi kerjasama yang melewati batas yurisdiksi negara. (Darmayanti, 2011:2)

Dalam bukunya *A Dictionary of Diplomacy*, Berridge dan Alan James menerangkan bahwa Paradiplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan dalam ruang lingkup internasional yang membawa tujuan politis dari aktor sub-nasional dalam suatu pemerintahan (Berridge & James, 2003-199).

Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan suatu negara, diplomasi regional tidak berusaha untuk mewakili kepentingan nasional yang lebih umum dan luas, kepentingannya lebih untuk menunjukkan pada masalah yang lebih khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu kedaulatan Negara, dan berada pada pengawasan Negara, akan tetapi untuk mengembangkan daerahnya para actor tersebut mempunyai kebebasan dalam menentukan isu dan tujuan yang ingin dicapai,

dalam menjalankan mekanismenya, para aktor diplomasi regional berada di bawah kedaulatan Negara dan mengikuti sistem internasional yang berlaku yang menjadikan aktor Negara sebagai penghubung untuk terciptanya hubungan tersebut, hal ini disebut Paradiplomasi (Keating, 2000:2).

Dalam acuan kerjasama *Intergovernmental Cooperation* dan *Intrastate Cooperation* yang dilakukan aktor non-negara, kerjasama antar sub-pemerintahan didefinisikan sebagai susunan antara dua pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, dan determinasi penyediaan suatu pelayanan atau memecahkan satu sama lain secara bersama-sama baik di dalam ataupun di luar negeri (Geldenhyus, 2009:31).

Joseph Nye menjelaskan hubungan *trans-nasional* merupakan interaksi yang melewati tapal batas Negara dimana didalamnya terdapat lebih dari satu aktor non-negara, interaksi aktor non-negara yang melewati batas Negara tersebut dapat berupa pemerintah daerah maupun Provinsi, Organisasi Internasional, maupun Perusahaan Multinasional, yang termasuk paradiplomasi (Nye, 2000:2).

John Ravenhill dalam *Paradiplomacy In Action, The Foreign Relations of Subnational Governments* menjelaskan bahwa pengertian Paradiplomasi merupakan pengembangan dari adanya hubungan luar negeri secara langsung yang dilakukan oleh aktor sub-nasional, yang mempunyai tujuan tertentu dalam berbagai bidang, yang biasanya ditujukan untuk kesejahteraan daerah yang dinaungi pemerintah sub-nasional tersebut dibawah pengawasan pemerintah nasional dalam rangka menghadapi globalisasi (Ravenhill, 1999:134).

Steffan Wolf dalam *Bologna Center Journal of Internasional Affairs*, berpendapat bahwa paradiplomasi mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri

yang dilakukan aktor sub-negara dimana partisipasinya, terlepas dari aktor negara, dan dalam arena internasional ditunjukkan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, bukan untuk mendapatkan kepentingan nasional.

Merujuk Ivo Duchacek pada "*Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations*" dalam *Federalism and International Relations; The Role of Sub-national Units*, Hans Michelmann paradiplomasi *Sister City Bandung* dan *Braunschweig* merupakan:

"Global Paradiplomasi yaitu paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan pemerintah sub-nasional di negara lain, baik kedua wilayah sub-nasional maupun kedua wilayah negara tersebut tidak berbatasan". (Duchacek, 1999:68).

Sedangkan Panayotis Soldatos dalam *An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-Policy Actors* dalam *Federalism and International Relations: The Role of Sub-national Units*, Hans Michelmann, menjelaskan faktor-faktor pendorong paradiplomasi yang meliputi:

1. Dorongan dan upaya-upaya segmentasi baik atas dasar objektif (*objective segmentation*) antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub-nasional tersebut berada, maupun atas dasar persepsi (*perceptual segmentation* atau *electoralism*) yang meskipun
2. terkait dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.

3. Adanya ketidakseimbangan dan keterwakilan unit-unit sub-nasional serta pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (*asymmetry of federated/sub national units*).
4. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub-nasional mampu mendorong pemerintah sub-nasional untuk mengembangkan perannya.
5. Kegiatan paradiplomasi juga bisa dilatarbelakangi oleh gejala internasional yang secara mudah dapat diartikan mengikuti hal-hal yang dilakukan unit sub-nasional lainnya.
6. Adanya kesenjangan institusional dalam perumusan kebijakan hubungan luar negeri dan in-efisiensi pelaksanaan hubungan luar negeri pada pemerintahan nasional.
7. Masalah-masalah yang terkait dengan *nation-building* dan konstitusional (*constitutional uncertainties*) juga dapat mendorong pemerintah sub-nasional melakukan paradiplomasi.
8. Domestikasi politik luar negeri sebagai dampak dari mengemukakan isu-isu politik tingkat rendah telah memotivasi pemerintah sub-nasional yang mempunyai kepentingan (*vested systemic interest*) dan kompetensi paradiplomasi (Soldatos, 1999:102).

Begitu besarnya peran yang dilakukan aktor non-negara terhadap perkembangan suatu Negara menjadikan perlunya pemerintah untuk melakukan pendekatan dan membantu aktor non-negara lebih mendalam demi terciptanya integritas bersama.

2.2.2 Otonomi Daerah Dalam Hubungan Internasional

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri yang sebelumnya diatur dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun seiring dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut, kebijakan hubungan luar negeri dan diplomasi oleh pemerintah pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah.

Dasar hukum yang melandasi otonomi daerah dalam hubungan internasional di Indonesia, tertulis dalam UU No. 37 tahun 1999 dimana Pemerintah daerah merupakan salah satu aktor dalam hubungan luar negeri dimana dalam UU No.37 pasal 1 ayat 1 tahun 1999 menyebutkan :

“Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”

Hubungan Internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari hubungan internasional yang dilakukan oleh Negara dan tunduk pada UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, sebagai mandat bahwa politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 hanya mengatur mengenai mekanisme internal pada hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah,

dikarenakan DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah dan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada UU No.37 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik luar negeri pada pasal 5 dan 6:

1. Pasal 5 ayat 1, Hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional
2. Pasal 5 ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara hubungan luar negeri, baik pemerintah maupun non pemerintah.
3. Pasal 6 ayat 1 Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada ditangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat.
4. Pasal 6 ayat 2, Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dalam pelaksanaan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada menteri.
5. Pasal 6 ayat 3, Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

Sementara kewenangan otonomi daerah pada hubungan luar negeri didasarkan pada UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional :

1. Pasal 1 ayat 1, “Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
2. Pasal 5 ayat 1, “Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, ditingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri

BAB III

METODE PELAKSANAAN KAJIAN

3.1 Metode Pendekatan yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis, metode ini adalah metode yang menyeluruh, dimaksudkan mencari data komprehensif terhadap semua objek kajian yang kemudian analisa serta melakukan perbandingan secara substansial. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjala.

Metode kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Jadi dalam penelitian kualitatif tidak hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung.

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan /lebih , hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lainnya. Masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif,

studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah kajian korelasional satu unsur bersama unsur lainnya . biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisaan data tersebut.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu :

- A. Studi Kepustakaan (pengumpulan data sekunder)** , adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data atau keterangan melalui penelaahan teori, opini, buku, jurnal yang relevan dengan masalah yang dikaji, juga data-data pendukung dari media internet serta media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam kajian akademis ini sumber-sumber kepustakaan yang digunakan menggunakan literatur yang berkaitan dengan topik kajian akademis ini.
- B. Wawancara (pengumpulan data primer)**, adalah metode pengumpulan data dapat secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan responden yang diwawancarai ataupun juga bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi, misalnya melalui telephone, internet dan sebagainya. Dalam kajian akademis ini yang menjadi target informan adalah para PNS terkait yang berasal dari Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat serta beberapa informan dari pihak Kedutaan Besar baik Belgia, Belanda, Rusia, Sudan , Maroko dan Korea Selatan serta

beberapa informan dari Kementerian luar negeri yang berelasi dengan Negara-negara yang dikaji yang lebih banyak bersifat pada wawancara lepas.

3.3 Rancangan Analisis Data

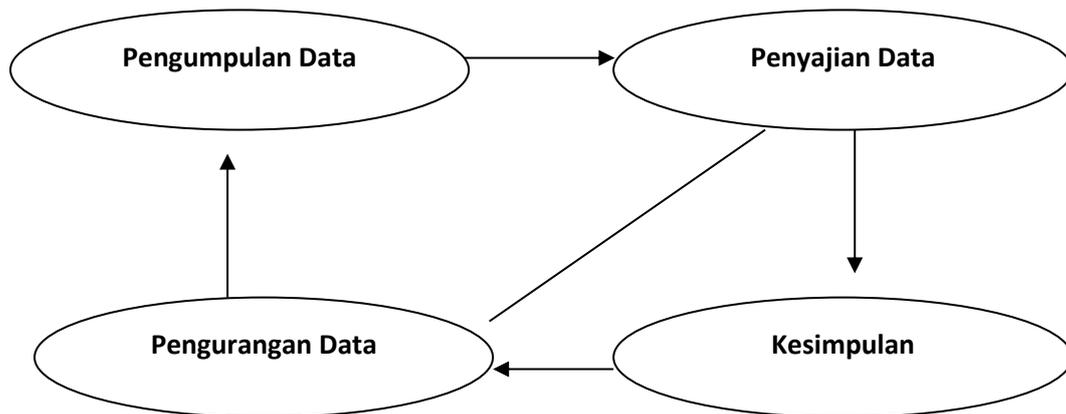
Teknis analisa data ini dimaksudkan untuk memaknai sumber data yang telah ada, dengan menggunakan reduksi data , kemudian melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika, estetika dan etika. Khusus untuk nilai kepustakaan, sangat ditentukan oleh sifat kebaruan pustaka dan luasnya publikasi. Internet memungkinkan pencarian informasi terkait dengan topik menjadi sangat mudah. Informasi data tersedia dalam berbagai format, oleh karena itu memilih sumber pustaka harus teliti sesuai dengan tema penelitian.

Dalam analisis kajian akademis ini, Setelah terkumpulnya data yang diperlukan (pengumpulan data) maka data tersebut digunakan untuk mencari fokus kajian. Setelah itu data yang terpilih yang telah dijadikan abstrak, menjadi sebuah kajian yang valid dan dapat direduksi (paparan data). Dari paparan data tersebut kita dapat membuat kesimpulan tentang hubungan antara fenomena yang dikaji menjadi proses pengesahan, perbincangan atau peniruan dalam penentuan data (gambaran kesimpulan).

Terdapat tiga komponen analisis yang dapat diselesaikan bersama-sama dengan kumpulan data pada proses pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data dilakukan, diteruskan dengan penghasilan penurunan data,

paparan data, dan gambaran kesimpulan. Model analisis seperti ini disebut model analisis interaktif yang digambarkan pada bahagian dibawah ini:

GAMBAR 3.1¹
Analisis Data Model interaktif dari Miles dan Huberman



3.4 Batasan Kajian

Kajian akademis “Prospek Kerjasama Provinsi Bersaudara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah di Belgia, Belanda, Rusia, Sudan, Maroko dan Korea Selatan” ini dibatasi pada jumlah daerah kajian dengan 9 (sembilan) pemerintah daerah setingkat Provinsi yaitu, Wallonia Region Belgia, Provinsi Gelderland Belanda, Khartoum State Sudan, Souss Massa Region Maroko, Provinsi Gyeongsangbuk do, Korea Selatan, Provinsi Jeollanamdo, Korea Selatan, Ulsan Metropolitan City, Korea Selatan, Incheon Metropolitan City Korea Selatan

dengan kajian yang melingkupi pada potensi ekonomi dengan berbagai subsektornya, sejarah , politik, dan pemerintahan.

¹ Prawito, 2007:105

3.5 Tahap Pelaksanaan Kajian

Berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kajian, kajian ini dibagi dalam 4 (empat) tahapan utama penyusunan rencana sebagai berikut :

- a) Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data
- b) Tahap Pemetaan
- c) Tahap Analisa Pemetaan
- d) Tahap Penyempurnaan

3.6 Sistem Pelaporan

Pelaporan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pekerjaan . laporan yang akan diserahkan pada pemberi kerja dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan (*Inception Report*)

Laporan pendahuluan meliputi deskripsi umum mengenai perencanaan pelaksanaan pekerjaan.

2. Laporan Akhir (*Final Report*)

a. Draft laporan Akhir

Draft Laporan Akhir terdiri dari konsep laporan akhir dari laporan dari seluruh rangkaian pelaksanaan serta hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan

b. Laporan Akhir

Laporan akhir terdiri atas dokumen data dan informasi, serta dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan setelah dilakukan

perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan dan saran-saran pada waktu diskusi draft laporan akhir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM POTENSI

PEMERINTAH DAERAH DI JAWA BARAT

Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum, profil, potensi unggulan dari Propinsi Jawa Barat secara umum.

4.1 Potensi Daerah Provinsi Jawa Barat

4.1.1 Gambaran Umum

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50'- 7°50' Lintang Selatan dan 104° 48'- 108° 48' Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan 3.710.061,32 hektar. Jumlah penduduknya pada tahun 2011 mencapai 46.497.175 jiwa atau 18,24 % penduduk Indonesia (*Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2011*).

Secara administratif Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 27 kabupaten/kota terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Jawa Barat terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (Bakor PP) Wilayah, sebagai berikut : Wilayah I Bogor meliputi Kab.Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Sukabumi, Kota sukabumi dan Kab. Cianjur. Wilayah II Purwakarta meliputi Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi. Wilayah III Cirebon meliputi Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, dan Kab. Kuningan. Wilayah IV Priangan meliputi Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi,

Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar dan Kab. Pangandaran

4.1.2 Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor dominan ketiga terbesar dalam struktur perekonomian Jawa Barat, setelah sektor industri dan perdagangan. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi pada sektor pertanian merupakan hal sangat penting yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani dan mensukseskan pemerataan pembangunan pedesaan. Upaya yang sudah dijalankan pemerintah ke arah itu adalah dengan menerapkan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.

Provinsi Jawa Barat merupakan sentra produksi padi utama di Indonesia, dengan kapasitas produksinya sekitar 11,285 juta GKG (Gabah Kering Giling) atau penyumbang sekitar 17-18% terhadap produk beras nasional. Pada dasarnya di semua Kabupaten di Jawa Barat menghasilkan padi, jagung, kedele, nanas dan sayuran adalah sebagai berikut:

- Sentra utama padi Jawa Barat adalah di Kabupaten Karawang, Indramayu, Subang dan Cirebon yang dikenal sebagai daerah pantura;
- Sentra produksi jagung Jawa Barat adalah di Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Indramayu dan Sukabumi.
- Sentra produksi kedele Jawa Barat adalah di Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Cianjur, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Cirebon.
- Sentra produksi nanas Jawa Barat di Kabupaten Subang.

- Sentra produksi sayuran Jawa Barat adalah di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Cianjur dan Majalengka.

Pada tahun 2008, produsen jagung terbesar di Jawa Barat adalah Kabupaten Garut yang menghasilkan 290,569 ton, disusul oleh Kabupaten Majalengka sebesar 62.299 ton. Penghasil ubi kayu terbesar di Jawa Barat adalah Kabupaten Garut sebanyak 525.055 dan disusul oleh Kabupaten Tasikmalaya sebesar 368.245 ton. Sementara itu, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut merupakan kabupaten produsen kedelai terbesar yang menghasilkan 8.932 dan 7.796 ton. Sementara itu produsen kacang hijau dan kacang tanah terbesar di Jawa Barat adalah Kabupaten Garut dengan produksi sebesar 3.038 dan 22.144 ton. Sementara produsen ubi jalar terbesar adalah Kabupaten Kuningan dengan produksi sebesar 110.428 ton.

4.1.3 Sektor Perikanan

Jawa Barat memiliki dua garis pantai dengan panjang hampir 1000 km Laut Jawa di utara dan Samudera Hindia di selatan sehingga potensi perikanan lautnya cukup besar. Kelautan dan Perikanan dikategorikan sebagai salah satu sektor industri utama untuk Jawa Barat dan mencakup layanan laut, pelabuhan, transportasi laut, sumber daya kelautan serta pariwisata. Saat ini sedang direncanakan secara terpadu pengembangan pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan bongkar muat. Ekspor ikan tuna beku dan kaleng, mackarel dan Udang dan rencana untuk berinvestasi secara substansial dalam pengembangan industri perikanan modern. Saat ini, 75 persen dari potensi perikanan di Provinsi potensi perikanan di Provinsi Jawa Barat berasal dari area pantai.

Potensi dan Pemanfaatan Sumber daya perikanan di Pantai Utara Jawa

Barat:

- ❖ Panjang pantai 399,32 Km;
- ❖ Potensi produksi 137 ribu/tahun, JTB 109 ribu ton/tahun
- ❖ Pelabuhan perikanan: 1 PPN, 5 PPP dan 51 PPI
- ❖ Karakteristik Pantura : *Over Fishing*, *Over Capacity*, Tingginya Intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir (Pemukiman dan Industri), Rusaknya Ekosistem Pantai (Menyusutnya Hutan Mangrove, Abrasi Pantai), Kejenuhan Lapangan Kerja di Bidang Penangkapan Ikan. Sumberdaya Ikan (SDI) Menurun.
- ❖ Pemanfaatan : 133.169,30 (121,63% JBT) – Overfishing
- ❖ Jumlah Armada : 13.059 Unit - didominasi perahu kecil
- ❖ Jenis & Jumlah Alat Tangkap : Pukat kantong (6.012 Unit), Pukat Cincin (187 Unit), Jaring Insang (7.218 Unit), Jaring Angkat (412 Unit), Pancing (1.394 Unit), Perangkap (3.216 Unit), Alat Pengumpul Kerang (223 Unit);
- ❖ Potensi dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Pantai Selatan Jawa Barat:
 - Panjang pantai 417,50 Km
 - Potensi produksi 155 ribu/tahun, JTB 125 ribu ton/tahun
 - Pelabuhan perikanan: 1 PPN, 1 PPP dan 28 PPI
 - Karakteristik Pantai Selatan Jabar : *Under Exploited* (terutama ZEE), kondisi laut cukup berbahaya (Laut dalam, gelombang tinggi, angin kencang, pantai berkarang dan curam), potensi ikan masih melimpah, RTP Nelayan masih rendah, intensitas pemanfaatan ruang masih rendah, kualitas air masih baik, ekosistem pantai masih cukup lestari.
 - Pemanfaatan : 14.584,8 Ton (11, 72% JBT) -Under Exploited

- Jumlah Armada : 4.830 Unit - semuanya perahu kecil
- Jenis & Jumlah Alat Tangkap : Pukat kantong (364 Unit), Pukat Cincin (39 Unit), Jaring Insang (3.739 Unit), Jaring Angkat (311 Unit), Pancing (2.628 Unit), dan Alat Pengumpul Rumput Laut (624 Unit)

Adapun Permasalahan Perikanan Tangkap di Jawa Barat antara lain:

- ❖ Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan tangkap seperti: fasilitas pelabuhan, rekayasa teknologi alat tangkap dan terbatasnya kapasitas armada penangkapan;
- ❖ Pelaksanaan pembangunan masih bersifat parsial, dan belum sinergi sehingga manfaat bagi masyarakat belum optimal;
- ❖ Rendahnya penguasaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia (nelayan dan petugas);
- ❖ Terbatas dan semakin jauhnya *fishing ground* akibat semakin rusaknya ekosistem pantai dan makin maraknya *illegal fishing*;
- ❖ Terbatasnya kapasitas kelembagaan nelayan dalam akses permodalan bagi usaha perikanan tangkap; dan
- ❖ Sistem pendataan perikanan tangkap masih perlu dibenahi.

4.1.4 Sektor Perkebunan

Sub sektor perkebunan mempunyai peranan yang cukup besar dalam pengembangan sektor pertanian. Oleh sebab itu pembangunan di sektor perkebunan juga terus mengalami peningkatan. Salah satu tujuan utama pembangunan di sub sektor ini adalah meningkatkan mutu dan produksi. Provinsi Jawa Barat memiliki perkebunan yang dikelola oleh Perkebunan Besar Milik Negara

dan Swasta serta Perkebunan Rakyat. Komoditi potensialnya adalah teh, kelapa, kelapa sawit, tebu dan karet. Pada tahun 2008, persentase areal Perkebunan Besar Milik Negara menghasilkan hanya sebesar 87,11 persen sedangkan areal Perkebunan Swasta hanya sebesar 73,55 persen. Areal sisanya kurang menghasilkan karena masih baru ditanam ulang atau memiliki tanaman yang rusak.

4.1.5 Sektor Pendidikan dan Tenaga Kerja

A. Sektor Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh sebab itu pemerintah berusaha secara konsisten meningkatkan SDM penduduk melalui jalur pendidikan. Jawa Barat juga merupakan barometer nasional pendidikan. Salah satu institusi pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya yang siap memasuki dunia kerja secara profesional dan berwirausaha yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

TABEL 4.1
Lapangan Pekerjaan Utama dari Penduduk
Pada Kabupaten / Kota di Jawa Barat²

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama					Total
	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	Industri	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Bogor	266.492	575.770	511.351	274.020	367.399	1.995.032
Kab. Sukabumi	322.664	170.364	184.956	95.536	185.435	958.955
Kab. Cianjur	404.273	71.811	176.348	122.130	124.940	899.502
Kab. Bandung	205.258	483.917	267.825	130.469	235.697	1.323.166
Kab. Garut	357.561	91.761	203.994	154.107	129.129	936.552
Kab. Tasikmalaya	237.360	195.798	169.237	102.015	106.913	811.323
Kab. Ciamis	253.082	148.095	168.755	83.929	94.768	748.629
Kab. Kuningan	157.747	42.517	132.966	62.103	58.049	453.382
Kab. Cirebon	194.794	60.637	285.346	80.894	140.394	762.065
Kab. Majalengka	198.967	71.065	118.818	80.082	88.154	557.086
Kab. Sumedang	177.502	59.607	87.931	79.686	82.913	487.639
Kab. Indramayu	279.556	44.664	208.519	107.656	91.884	732.279
Kab. Subang	309.570	103.107	145.975	60.227	74.424	693.303
Kab. Purwakarta	86.542	76.412	78.015	45.106	89.884	375.959
Kab. Karawang	168.224	242.865	277.808	122.253	106.406	917.556
Kab. Bekasi	117.205	449.608	253.198	144.030	142.961	1.107.002
Kab. Bandung Barat	151.498	109.696	101.330	88.605	132.825	583.954
Kota Bogor	6.198	67.674	115.406	113.108	80.725	383.111
Kota Sukabumi	4.337	12.906	40.914	24.067	27.025	109.249
Kota Bandung	10.540	261.794	377.626	210.078	204.129	1.064.167
Kota Cirebon	805	11.992	57.218	24.605	21.985	116.605
Kota Bekasi	4.155	231.057	235.819	289.361	216.651	977.043
Kota Depok	15.677	97.987	239.640	214.050	183.466	750.820
Kota Cimahi	4.318	65.457	63.438	55.915	36.635	225.763
Kota Tasikmalaya	21.770	100.321	73.245	39.881	39.097	274.314
Kota Banjar	10.455	16.510	19.830	14.729	15.128	76.652
Total	3.966.550	3.863.392	4.595.508	2.818.642	3.077.016	18.321.108

Berkaitan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Data Pokok SMK dari Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional RI, jumlah SMK yang terdata di Jawa Barat hingga saat ini terbanyak se-Indonesia. SMK di Jawa Barat berjumlah 2100 sekolah yang menyelenggarakan 115 program keahlian, termasuk bidang pertanian, perikanan dan peternakan sebanyak 23 sekolah tersebar di 27 kabupaten/kota.

Kekayaan bahari Indonesia khususnya yang ada Jawa Barat, memerlukan SDM yg mampu mengembangkan industri kelautan, maka penguatan pendidikan industri perikanan dan kelautan mulai serius dilakukan.

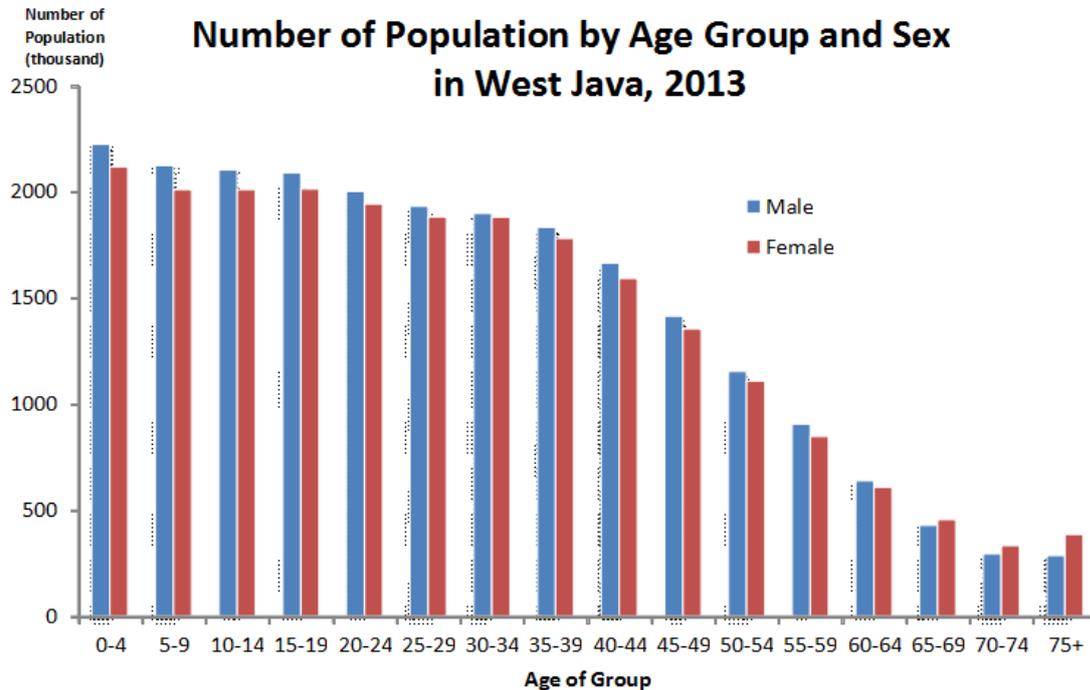
² Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro Otda & Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat (2015).

B. Sektor Tenaga Kerja

Jawa Barat mengalami penambahan jumlah angkatan kerja yang pesat dalam satu *decade* terakhir. Pada bulan Februari 2013 angkatan kerja berjumlah 20.388.637 orang dominan di sektor perdagangan, industri dan khusus pada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan menjadi penampung terbesar tenaga kerja pada Februari 2013.

Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang berdasarkan struktur umur, proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi. dibandingkan jumlah penduduk di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

GAMBAR 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin³



³ <http://www.westjavainc.org/wp-content/uploads/2014/10/Picture11.png?bf98dc>

BAB V

GAMBARAN UMUM & POTENSI PEMERINTAH DAERAH DI BELGIA, BELANDA, RUSIA, SUDAN, MAROKO DAN KOREA SELATAN

Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum, profil, potensi unggulan dari sembilan Pemerintah Daerah di Belgia, Belanda, Rusia, Sudan, Maroko dan Korea Selatan yang menjadi fokus kajian ini yaitu, Wallonia Region Belgia, Provinsi Gelderland Belanda, Republik Bashkortostan Rusia, Khartoum State Sudan, Souss Massa Region Maroko, Provinsi Gyeongsangbuk do, Provinsi Jeollanamdo, Ulsan Metropolitan City, Incheon Metropolitan City Korea Selatan.

5.1 WALLONIA REGION, BELGIA

5.1.1 Gambaran Umum

Wallonia adalah bagian provinsi dari Kerajaan Belgia yang berasal dari kosakata Perancis 'Wallonie', wilayah berbahasa Perancis yang merupakan 55% dari total wilayah Belgia. Meski berbahasa Perancis, Wallonia tidak tergabung dalam Komunitas Belgia Berbahasa Perancis, tak seperti halnya Flanders yang berbahasa Belanda, dan wilayah timur tempat komunitas berbahasa Jerman. Belgia adalah negara yang unik di Eropa karena isu etnisitas dan bahasa (khususnya antara mereka yang berbahasa Perancis dan Belanda) masih menjadi bagian dari realita serta dinamika isu sosial-politik hingga hari ini, bahkan pernah memicu krisis politik dan pemerintahan. Kosakata 'Walloon' secara spesifik adalah terminologi yang

diberikan kepada provinsi-provinsi Belgia, Hainaut, Namur, Luxembourg, Liege, dan distrik Nivelles. Meskipun Bahasa Perancis secara luas menjadi bahasa ibu di Wallonia, namun Bahasa Walloon ‘lokal’ masih digunakan sebagian kecil komunitas, khususnya di desa-desa.⁴

5.1.2 Letak Geografis

Wallonia adalah wilayah *landlocked* seluas 17 ribu kilometer persegi atau 55% dari total luas wilayah Belgia, dan beribukota di Namur. Mayoritas penduduk tinggal di wilayah Charleroi dan di sekitar lembah Sambre dan Meuse. Wallonia berbatasan dengan Belanda dan wilayah Flanders di utara, Perancis di selatan, Jerman dan Luxemburg di di timur. Provinsi Wallonia memiliki kontur dataran tinggi dan berbukit-bukit, serta dialiri dua sungai terpenting yaitu Escaut dan Meuse, dengan iklim sejuk dan hujan hampir sepanjang tahun.

⁴ *Ensiklopedia Britannica*

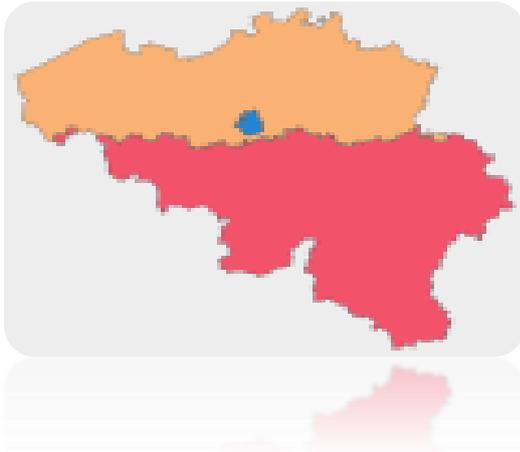
Gambar 5.1
Peta Wilayah Wallonia Region



5.1.3 Sejarah Singkat

Belgia adalah wilayah takhlukan Romawi yang berdampak pada pengaruh kuat akar budaya Romawi, termasuk khususnya di wilayah Wallonia. Akar kata dari Wallonia adalah dari bahasa Jerman kuno 'Walha' atau 'orang asing'. Nama Wallonia pertama kali diadopsi oleh orang-orang Belanda pada era Burgundi yang berbahasa Romawi. Mereka yang berbahasa Perancis juga menggunakan istilah Wallon. Kata 'Walha' merupakan makna yang diadopsi pada saat Romawi menakhlukan Galia (Perancis), yang mengakibatkan proses percampuran sehingga orang Galia disebut Galo-Roman. Makna 'Walha' digunakan oleh orang Jerman (*Teutonic*) untuk menyebut Galo Roman. Pada saat itu wilayah Wallonia diapit oleh wilayah Teutonic dan wilayah berbudaya latin.⁵

⁵ Genicot, Leopold & Hasquin, Herve, review, Toudi number 01, 1987



Sebagai dampak dari pendudukan Romawi, Wallonia banyak menerima pengaruh latin hingga saat ini yang teridentifikasi pada simbol-simbol serta situs budaya yang ada di Wallonia. Bahkan ibukota Wallonia, Liege, pernah menjadi salah satu situs agama Katolik pada sekitar abad tujuh

masehi. Dalam versi historis yang lain menurut Fernand Braudel, Wallonia menjadi batas dari dikotomi bahasa wilayah yang pada awalnya antara mereka yang berbahasa latin (Romawi) dan yang berbahasa Jerman (*sprachraum*). Fakta sejarah yang terjadi ternyata tidak berhenti oleh waktu tatkala pembagian bahasa wilayah terjadi hingga masa kini, antara Flemish yang berbahasa Belanda, Wallonia yang berbahasa Perancis, dan beberapa kawasan yang berbahasa Jerman, khususnya sejak Belgia memisahkan diri dari Belanda tahun 1830.

 [Flemish Region](#)

 [Brussels-Capital Region](#)

 [Walloon Region](#)

Raja Clovis dari Dinasti Merovingian mengambil alih Belgia pada sekitar abad 5 Masehi sebelum akhirnya mengalami fragmentasi akibat perpecahan yang terjadi pada Kekaisaran Romawi. Wallonia terpecah menjadi tiga bagian yaitu Picard, Walloon dan Lorrain. Pembagian wilayah berbasis bahasa seperti yang sampai hari ini bisa disaksikan sudah berlangsung pada masa Merovingian dan Carolingian, dan bahkan pada masa Renaissance pada saat kota-kota seperti Tongeren, Aachen, dan

Maastricht (Belanda) mengalami jermanisasi. Setelah 200 tahun Pemerintahan Habsburg dan Austria, Wallonia mengalami perluasan wilayah oleh Raja Charles V dari Kekaisaran Holy Roman. Menjelang akhir abad 18, Belgia/ Wallonia menjadi bagian Perancis di era Pemerintahan Napoleon.⁶

Proses pemisahan dari Belanda pada tahun 1830 terjadi yang mana salah satu wilayah yang paling berperan bagi berdirinya Negara Belgia merdeka adalah Wallonia. Sejak lepas dari Belanda itu pula friksi berlatar-belakang bahasa berawal hingga saat ini. Wilayah Wallonia juga yang pertama kali melakukan proses industrialisasi di Eropa yang pada gilirannya pernah menempatkan Belgia sebagai kekuatan industri tidak hanya di kawasan Eropa tapi juga dunia. Pesatnya industrialisasi menjadi daya tarik bagi datangnya gelombang migrasi ke Wallonia sekaligus menjadikan wilayah ini sebagai tempat tersebarnya pemikiran-pemikiran liberalisme dan sosialisme. Setelah Perang Dunia 2 masa kejayaan industri di Wallonia mulai redup, dan sentra ekonomi dan perdagangan berpindah ke wilayah Flanders yang berbahasa Belanda.

Kecenderungan menurunnya potensi industri dan ekonomi malangnya berlanjut hingga dekade-dekade setelahnya. Sekalipun sudah diaplikasikan UU Bahasa yang mengakui empat bahasa resmi dalam konstitusi nasional pada tahun 1964, konflik beraroma ekonomi, sosial dan budaya pecah antara mereka yang berbahasa Perancis dan Bahasa Belanda. Sejak awal, tak berselang lama pasca berdirinya Kerajaan Belgia, persoalan-persoalan bermotif ekonomi, sosial dan budaya menjadi wajah politik nasional Belgia, khususnya terkait dengan isu-isu persaingan dan interaksi konflikual antara Wallonia dan komunitas Flemish.

⁶ *Rousseau, Felix, 'la Wallonie, Terre Romane'*

Komunitas Wallonia memiliki persepsi bahwa mereka mengalami diskriminasi dan represi dari mayoritas Flemish.

Rentetan peristiwa demonstrasi di wilayah Wallonia yang beberapa diantaranya dimotori oleh para pekerja industri dan tambang terjadi dan sangat berpengaruh pada politik nasional –bahkan memaksa Raja Leopold turun tahta pada kesempatan unjuk rasa dan pemogokan masal tahun 1950-. Kejadian-kejadian ini menjadi awal motivasi Wallonia yang berbahasa Perancis untuk bergabung dalam kelompok negara-negara pengguna Bahasa Perancis sekaligus pembentukan wilayah Wallonia yang eksklusif terafiliasi pada *la Communauté Française (French Community) de la Belgique*. Menurut sejarawan Philippe Destatte bahwasanya gerakan etno-nasionalis Wallonia lebih dipicu oleh dorongan degradasi ekonomi, dan status faktual sebagai minoritas politik daripada gerakan yang berbasis pada tuntutan budaya sebagai prioritas.⁷

5.1.4 Demografi

Secara keseluruhan populasi Belgia berjumlah kurang lebih 11 juta berdasarkan data statistik 2016 dari Direktorat Jenderal Statistik dan Informasi Ekonomi Belgia, dengan tingkat kepadatan sekitar 360 jiwa per kilometer persegi yang mana wilayah utara memiliki tingkat kepadatan lebih tinggi dibandingkan selatan. Distribusi populasi per wilayah masih menempatkan wilayah Flemish sebagai yang terbesar dengan hampir 6,5 juta jiwa, disusul wilayah Wallonia dengan

⁷ Hervé Hasquin *Historiographie et politique en Belgique, 1995; History of Wallon Economy: Portal Wallonia*

total populasi 3,6 juta jiwa, termasuk hampir 80 ribu komunitas berbahasa Jerman, dan hampir 2 juta populasi tinggal di wilayah Brussels.

Secara etnisitas, komunitas Flemish yang berbahasa Belanda menempati peringkat pertama terbanyak dengan jumlah total 6,4 juta jiwa, diikuti oleh sekitar 4,1 juta jiwa dari komunitas Wallon yang berbahasa Perancis. Meskipun komunitas berbahasa Belanda lebih dominan dibandingkan mereka yang berbahasa Perancis, namun mayoritas populasi di Brussels menggunakan Bahasa Perancis, yang diperkirakan sekitar 80%. Secara lingual 59% warga Belgia menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa ibu, dan hanya 40% berbahasa Perancis, sisanya berbahasa Jerman, khususnya yang mendiami sisi timur wilayah Wallonia.⁸

Sementara itu, dalam hal religiusitas, 58% warga Belgia mengaku beragama Katolik Roma, sekitar 15% lebih beragama Islam, Protestan dan lainnya, sisanya tidak terafiliasi pada agama tertentu. Populasi total Wallonia adalah sekitar 3,2 juta dengan kepadatan sekitar 190 jiwa per kilometer persegi. Hampir 15% populasi adalah para imigran yang sebagian besar datang dari wilayah Eropa Selatan dan Afrika Utara. Afiliasi bahasa Walloon adalah Gallo-Roman (Bahasa Perancis) dengan dialek Indo-Eropa. Walloon terbagi menjadi beberapa kawasan yaitu: bagian timur dengan ibukota di Liege, Walloon tengah beribukota di Namur, dan bagian barat beribukota di Charleroi.⁹

⁸ *Encyclopedia.com*

⁹ *Encyclopedia.com*

Gambar 5.2
Peta Demografi



5.1.5 Politik dan Pemerintahan

Wilayah Kerajaan Belgia secara keseluruhan terbagi menjadi tiga wilayah besar yaitu: Brussel sebagai ibukota, dan dua kawasan besar, Walloon dan Flemish. Sementara itu, Belgia juga memiliki beberapa provinsi yaitu: Antwerpen, East Flanders, Flemish-Brabant, Hainaut, Liege, Limburg, Luxemburg, Namur, Walloon Brabant, dan West Flanders. Terminologi makna Wallonia secara kontekstual seringkali dimaknai berbeda. Wallonia adalah salah satu dari tiga wilayah federal utama di Belgia yang berbentuk kerajaan yang secara konstitusional memiliki nomenklatura sebagai Walloon Region, kemudian dinamai kembali secara resmi sebagai Wallonia. Namun demikian, terkadang Wallonia merujuk pada wilayah di bawah Walloon Region merujuk secara spesifik pada definisi administratif. Secara praktis, perbedaan terminologi diantara keduanya tidak terlampau menjadi persoalan

-tidak sama tapi serupa -. Secara administratif, Wallonia terbagi beberapa wilayah provinsial yaitu Wallon Brabant (1), Hainaut (2), Namur (5), Liege (3), Luxemburg (4); 262 kota-praja (municipal).

Sebagai kerajaan federal, Belgia terdiri dari tiga wilayah komunitas dan tiga wilayah administratif yang masing-masing memiliki otonomi. Wallon Region di bawah administrasi Parlemen Wallonia dan Pemerintah Wilayah Walloon. Otonomi di Belgia memiliki karakter ekstensif yang ditandai dengan adanya keleluasaan dan kemudahan bagi daerah untuk menjalin hubungan langsung dengan luar negeri, atau daerah memiliki kewenangan dalam kebijakan luar negeri berdasarkan traktat yang ditandatangani antara pemerintah pusat dan wilayah otonom, termasuk Wallonia. Bahkan dalam sejumlah hal, pemerintah pusat di Brussels tidak akan bisa menandatangani traktat internasional tanpa sepersetujuan otoritas otonom.

Menjadi tempat bermukim lebih dari 80% komunitas berbahasa Perancis, dan minoritas berbahasa Jerman, Wallonia memiliki hak secara sosial-budaya di bawah skema aransemen politik yang dalam hal ini termasuk soal pendidikan. Dalam konsensus dan aransemen politik domestik di Belgia, parlemen terdiri dari kombinasi berbasis sosial-budaya, sehingga secara politik berimplikasi kepada apa yang disebut sebagai *'political sharing'* ketika perwakilan yang berbasis identitas sosial-budaya berbagi dalam institusi-institusi politik.

Sejak tahun 1993, Belgia menjadi negara kerajaan federal yang terbagi menjadi tiga wilayah dan tiga wilayah bahasa, Walloon yang berbahasa Perancis, Flemish yang berbahasa Belanda, dan ibukota Brussels yang menggunakan dua bahasa tersebut. Parlemen Wallonia didirikan tahun 1995 menggantikan Dewan Wilayah Wallonia (*Conseil Regional Wallon*) yang beranggotakan anggota parlemen

majelis tinggi dan rendah pada Parlemen Nasional. Parlemen Wallonia bersifat unicameral dan beranggotakan 75 senator yang memiliki masa tugas lima tahun yang berkedudukan di Saint Gilles, Namur.

Anggota parlemen wilayah dipilih parlemen nasional, membentuk parlemen komunitas berbahasa Perancis. Sejak 1999 pemilihan dilangsungkan bersama dengan mereka yang duduk di Parlemen Eropa. Parlemen Walloon memiliki kewenangan legislatif, memilih pemerintah lokal, dan menjalankan pengawasan kepada jalannya pemerintahan lokal, sekaligus menjatuhkan mosi terhadap setiap pengambilan kebijakan, serta meratifikasi traktat dan perjanjian internasional. Pemerintah wilayah Walloon beranggotakan sembilan orang yang secara nomenklatura disebut menteri Walloon, dan dipimpin oleh seorang 'menteri-presiden' wilayah Walloon. Pemerintah wilayah Wallonia yang berkedudukan di l'Elysette, Namur, bertanggung-jawab kepada parlemen untuk semua urusan, terkecuali masalah budaya dan pendidikan yang dikontrol oleh komunitas linguistik. Urusan-urusan wilayah tersebut mencakup kebijakan sosial-ekonomi, kesehatan, transportasi, perumahan, dan hal-hal lain terkait kepentingan publik atau yang biasa dinamakan *regional competencies*. Konstitusi Nasional Belgia memberikan kewenangan pada otoritas wilayah –legislatif dan eksekutif-, untuk menjalankan hajat pemerintahan lokal –*regional competencies*- dengan rincian: pertanian, pembangunan wilayah, ekonomi dan perdagangan luar negeri termasuk investasi, lapangan kerja, lingkungan hidup, sarana air bersih, konservasi alam, perumahan,

riset-ilmu pengetahuan –teknologi dan energi-, hubungan luar negeri, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan pekerjaan umum.¹⁰

Gambar 5.4
Simbol Wallonia Region



5.1.6 Potensi Sosial dan Ekonomi

Sejarah panjang industri Wallonia diawali pada masa setelah era Revolusi Industri di Inggris. Wallonia adalah salah satu sentra kekuatan industri di Eropa pada masa tersebut, utamanya industri logam-berat, dan industri pertambangan-mineral. Wallonia bahkan memiliki pengaruh pada proses industrialisasi di sejumlah negara Eropa, termasuk Swedia –Louis de Geer dari Wallonia dipandang sebagai salah satu Bapak Pendiri Industri Swedia, ketika membangun industri di Norrkoping, Swedia. Tak dapat dipungkiri, jejak sejarah menunjukkan bahwa Wallonia sebenarnya memiliki tradisi historis potensi industri, dan bahkan menjadi parameter ekonomi Belgia. Beberapa sejarawan –Herve Hasquin, Philippe Raxhon, Herbert Luthy- juga berpendapat bahwa sejak era berdirinya Belgia, Wallonia telah menjadi

¹⁰ *L'identite Wallonie, Philippe Destatte, 1997*

kekuatan industri terbesar kedua di Eropa setelah Birmingham dan beberapa wilayah di Inggris.¹¹

Menurut Professor sejarah di Universitas Liege, Michel de Coster, kekuatan industri Wallonia secara tradisional terkonsentrasi pada industri batubara, besi-baja, industri seng, industri wol, industri gelas, dan persenjataan. Potensi ini bahkan mengungguli Perancis sampai pada sebelum Perang Dunia Pertama.¹² Pembangunan rel kereta api, dan alat transportasi lainnya sangat mendorong performa industri besi-baja dan batubara Wallonia hingga menjadikan Wallonia sebagai pemasok terbesar kebutuhan industri di Perancis dan Jerman yang sedang juga memulai proses industrialisasi. Masa kejayaan yang mengantar Belgia sebagai salah satu negara termakmur di Eropa ini akhirnya perlahan meredup setelah usainya Perang Dunia 2.

Wallonia kaya kandungan besi dan batu bara, dua komoditas yang memegang peranan penting bagi industri Belgia. Dua komoditas tersebut memang menjadi penerus dari potensi Wallonia yang sudah dikenal sejak masa Romawi dan abad pertengahan. Pada penghujung abad 19 Wallonia menjadi sentra atau kawasan pengembangan industri secara massif di Eropa setelah Inggris. Potensi ekonomi Wallonia secara tradisional terpusat di sekitar Lembah Sambre dan Meuse yang menjadi sentra pertambangan dan mineral di Belgia dengan hasil-hasil batubara, besi, dan berbagai mineral logam lainnya. Pusat konsentrasi industri sudah dibangun sejak abad 18 yang menempatkan Liege, Charleroi, la Louviere dan Borinage sebagai sentra industri Belgia yang pernah mengantarkan Belgia sebagai

¹¹ *La Wallonie, Son Histoire, Herve Hasquin, 1979-1999-2009*

¹² *Les Enjeux des Conflicts Linguistiques, Michel de Coster, 2007*

negara industri utama di Eropa. Keempat kota tersebut adalah sentra produksi besi dan logam serta batubara. Perubahan terjadi pada dekade 1950-an hingga 1960-an ketika mulai terjadi defisit produksi disertai naiknya biaya produksi yang menempatkan Wallonia pada posisi sulit karena dua produk tersebut menjadi andalan komoditas tradisional.

Ekspor Wallonia didominasi oleh produk-produk kimia, logam, mesin, dan alat-alat berat dengan rata-rata mencapai berkisar 16-20 persen total ekspor nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dewasa ini, potensi ekonomi Wallonia relatif mengalami diversifikasi di tengah krisis serta defisit industri besi-baja. Wallonia memiliki sejumlah industri perangkat keras, termasuk peralatan militer dan aviasi/penerbangan. Tatkala komoditas utama, batubara dan baja, mengalami penurunan –Liege, Charleroi, Borinage dulunya adalah sentra industri baja dan batubara terkemuka di Eropa-, maka kegiatan perekonomian dan perdagangan juga beralih ke industri pertanian dan pengolahan makanan. Secara keseluruhan, ekonomi Wallonia –dan Belgia- mengalami perlambatan sejak dekade 1980-an yang akhirnya dalam beberapa sisi memicu stagnasi sosial-ekonomi, memicu kenaikan jumlah pengangguran –rata-rata mencapai 10 persen per tahun-, dan kemunduran secara umum diantara negara-negara Eropa. Namun demikian, berdasarkan laporan *Wallon Institute for Evaluation, Prospective Studies, and Statistic* pada tahun 2014, dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat catatan positif bagi Wallonia, bahwa produktifitas ekonomi Wallonia mengalami kenaikan rata-rata 0,4 persen per tahun dengan komparasi produktifitas ekonomi nasional 0,5 persen, dan Uni Eropa hanya sekitar 0,8 persen. Sebagai wilayah yang memiliki tradisi industri, dan dipandang sebagai termasuk yang pertama mengalami revolusi industri, Wallonia menjadi

sentra industri militer/pertahanan yang berlokasi di Herstal. Selain itu, spesialisasi sektor industri prioritas yang dimiliki Wallonia adalah industri obat-obatan, industri ekstratif, industri pengolahan karet dan produk plastik, alat-alat elektronik, metalurgi, serta produk-produk logam lainnya. Industri kimia merupakan substansi bisnis utama, termasuk *pharmaceutical*, yang merepresentasikan separuh total nilai investasi dan bisnis di Wallonia.

Pabrik pesawat dan teknologi dirgantara, serta alat-alat elektronik bisa mencapai total tambahan 5,1 dan 48 persen. Produk kimia, bahan plastik, dan bio-industri menjadi penyangga ekonomi Wallonia dengan lebih dari 40 persen total ekspor dan menyediakan kesempatan kerja untuk hampir 30 ribu pencari kerja; sekitar hampir 25 persen dari total kesempatan kerja sektor industri dengan kecenderungan naik dalam kurun lima tahun terakhir. Industri-industri jenis ini diperkirakan meraup keuntungan total hampir 15 miliar Euro pada tahun 2015/2016. Riset dan pengembangan untuk sektor-sektor ini juga mencapai perolehan signifikan dengan investasi sekitar 1,5 miliar Euro pada tahun 2016. Pada sub-sektor bio-industri, produk obat-obatan dan kesehatan juga berperan menopang ekonomi Wallonia saat ini hingga beberapa masa ke depan. Pada sektor manufaktur pengolahan makanan, produk-produk seperti gula bit, coklat/ cacao, kopi, minuman soda dan minuman beralkohol, gandum, kentang menjadi hasil produksi utama Wallonia. Seperti yang telah diketahui, Belgia adalah negara yang sangat terkenal dengan produk pengolahan coklat dan kopi, serta produk kentang olahan yang termasuk terbesar di Eropa.¹³

¹³ *European Commission, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs*

Partisipasi kreatif pelaku usaha kecil menengah seperti umumnya di negara-negara Benelux dan Skandinavia sangat berpengaruh pada penguatan performa perekonomian Wallonia. Selain kebijakan pemerintah setempat, dunia riset dan academia - Terdapat sembilan universitas besar dan 26 institut pendidikan tinggi - juga menjadi faktor pendukung penguatan dan pengembangan industri kimia dan bio-industri, berikut beberapa perusahaan besar seperti BASF, Total, Solvay dan GSK. Setiap tahunnya diperkirakan sekitar 30 ribu *scholar* mengambil bagian pada aktifitas riset dan eksperimen untuk menemukan produk-produk baru sektor industri kimia, dan bio-industri –kesehatan, obat-obatan, produksi makanan sehat berbasis teknologi dan sebagainya-. Dengan sektor-sektor tersebut, Wallonia berupaya untuk mengembalikan peranannya sebagai jantung industri Belgia melalui penguatan teknologi dan sains. Memasuki dekade 2010-an, Wallonia sangat intensif untuk membangun kerjasama antar-kawasan, utamanya dengan wilayah-wilayah sekitar, melalui upaya membangun *centres of excellence*, *bussiness parks*, dan *state of art technologies*.

Berdasarkan rilis *Regional Innovation Scoreboard (RIS)* tahun 2014/2015, capaian Wallonia masih ada di bawah rata-rata Uni Eropa dalam enam tahun belakangan. Namun demikian, saat dibandingkan dengan rata-rata Uni Eropa, maka performa Wallonia masih bisa dikategorikan bagus, utamanya untuk substansi pendidikan masyarakat, riset dan pengembangan sektor bisnis, serta inovasi usaha kecil menengah, dan kerjasama antara kelompok UKM dengan elemen ekonomi lainnya. Pemerintah Wallonia dalam beberapa tahun belakangan menekankan penguatan sektor ekonomi Wallonia pada usaha-usaha dan produk-produk berbasis teknologi seperti: Mecatech (teknik mesin), penerbangan dan luar angkasa (Skywin),

bio-produk –termasuk teknologi pengolahan makanan dan hasil pertanian (Wagralim), serta obat-obatan (Biowin), dan produk-produk kimia (Greenwin).

Penekanan tersebut ditujukan untuk bagaimana meningkatkan kemampuan kompetitif Wallonia melalui apa yang disebut sebagai kebijakan *Smart Specialisation Strategy* yang mencakup kolaborasi antar sektor, implementasi strategi tematik yang disesuaikan perubahan dan tantangan – mengacu pada proyek pembangunan ekonomi berkelanjutan (KTT Rio de Janeiro 1992); energi terbarukan; peningkatan kualitas hidup, termasuk kesehatan; dan, domain produk berbasis teknologi; serta kemungkinan investasi bersama. Untuk merealisasi hal tersebut, sejak tahun 2014 Wallonia adalah termasuk salah satu dari 17 mitra dari proyek Uni Eropa yang dikenal sebagai '*Vanguard Initiative New Growth through Smart Spacialisation*' yang dirancang dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas berikut upaya Uni Eropa untuk berkompetisi pada tataran global pada beberapa domain kunci, termasuk ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan isu-isu sosial.

Dengan menjadi bagian dari *Vanguard Initiative* tersebut, bersama-sama dengan 16 wilayah lain, Wallonia memiliki program untuk memperkuat sektor industri dan manufaktur berbasis teknologi maju, dan ikut serta dalam komitmen untuk membuat *roadmap* bagi sektor industri dan manufaktur berbasis sains dan teknologi di seluruh Eropa. Partisipasi Wallonia dalam program Uni Eropa ini juga bertujuan untuk membentuk kolaborasi dan kerjasama antar kawasan dan wilayah, khususnya untuk bidang industri dan manufaktur. Dalam koridor proyek lain, Wallonia juga menjadi bagian dari *the European Technology Platform (ETP), Manufuture, Manunet*, dan *SPIRE*, serta *INTERREG IV Projects* yang berkenaan dengan upaya untuk membentuk sektor manufaktur modern di kawasan 'Meuse-Rhine'. Selain itu,

masih terkait hal yang sama berikut pengadaan material modern, Wallonia juga menjadi bagian dari *Top Technology Cluster (TTC)* bersama dengan 19 wilayah lainnya; dan juga *Intermat GR*.¹⁴

Setelah mengalami masa stagnasi dan penurunan kapasitas ekonomi yang cukup lama, dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan terjadi kecenderungan positif yang ditandai dengan laju pertumbuhan usaha rata-rata mencapai kurang lebih dua persen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia Wallonia, kehidupan riset, inovasi teknologi, dan capaian pendidikan yang menjadi perhatian Pemerintah Wallonia, selain terfokus pada peningkatan dan penguatan sektor-sektor industri berbasis teknologi, termasuk industri kimia, bio dan agro-industri, serta industri instrumen berat, termasuk penerbangan dan pertahanan. Pencapaian untuk sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam sains dan teknologi rata-rata hampir mencapai 50 persen di Wallonia –sebanding dengan tingkat nasional dan Uni Eropa dengan tidak menutup masih terdapatnya kekurangan – diantaranya masih kurang optimalnya pengeluaran masyarakat untuk riset dan pengembangan-. Hal ini sudah barang tentu juga akan berdampak positif pada tingkat partisipasi aktif dunia usaha dan industri pada kegiatan riset dan pengembangan yang dapat mencapai rata-rata prosentase antara 60-70 persen setiap tahunnya.

5.1.6.1 Riset dan Pengembangan Potensi

Dalam sistem Pemerintahan Belgia, semua wilayah memiliki otonomi untuk menyelenggarakan riset, dan kegiatan inovasi berbasis sistem dan kebijakan. Di

¹⁴ *European Commission, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs*

wilayah Wallonia terdapat dua posisi menteri senior yang bertugas untuk mengurus hal-hal terkait pendidikan, riset, dan manajemen wilayah. Yang pertama adalah menteri yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi sektor-sektor kompetitif, dan mengurus isu pendidikan. Yang kedua, adalah kementerian yang bertugas mengurus riset ilmiah, pembangunan berkelanjutan, energi, perumahan rakyat, administrasi publik, infrastruktur wilayah. Adalah *Walloon Council of Science Policy* yang memberikan masukan dan saran kepada otoritas setempat terkait isu-isu kebijakan dalam hal sains, strategi, dan mekanisme pendanaan.

Seperti yang telah secara singkat disampaikan, bahwa langkah Pemerintah Walloon dalam hal riset dan pengembangan dan untuk memperkuat kapasitas domestik, terutama industri berbasis sains dan teknologi, mendapatkan dukungan dari elemen-elemen universitas, lembaga penelitian, pengusaha dan pelaku bisnis. Sebagai konsekuensi praktis dari langkah ini, untuk mendukung penguatan ekonomi domestik, khususnya dari industri kreatif berbasis teknologi, maka Pemerintah Wallonia membentuk *Academy of Research and Education (ARES)* yang bekerja bersama-sama dengan Direktorat Ekonomi dan Riset pada pemerintahan setempat.

Pemerintah Walloon juga membentuk beberapa lembaga untuk promosi, inovasi, dan pembangunan jaringan inovasi yaitu: *Agency for Technology Promotion (AST)*, *Economic Stimulation Agency (ASE)*, lembaga internasionalisasi dan investasi (*AWEX, SOWALFIN, SRIW*). Dua lembaga pertama yang dibentuk pada akhirnya digabung menjadi *Agency for Enterprise and Innovation*.¹⁵

¹⁵ *European Commission, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs*

5.1.6.2 Pariwisata dan Konservasi Budaya

Pariwisata adalah bagian penting dari ekonomi Wallonia. Wallonia juga dikenal memiliki situs bangunan dan arsitektur abad pertengahan pada masa *Renaissance* yang menjadi salah satu daya tarik bidang pariwisata. Di sebelah barat daya Namur, yang dikenal sebagai pintu masuk menuju Ardennes terdapat kawasan berhutan khas Eropa dengan vegetasi yang indah dan menjadi favorit para wisatawan yang menyukai wisata alam dan petualangan. Kawasan Ardennes dan Sungai Meuse menjadi kawasan wisata serta destinasi favorit turis bersama-sama dengan Bastogne, Durbuy yang merupakan situs budaya Wallonia. Wallonia termasuk salah satu situs pariwisata utama di Belgia yang dikunjungi rata-rata 15 persen dari total wisatawan yang berkunjung ke Belgia sebesar 6,5 wisatawan tiap tahun.

Dalam laporan yang dirilis pada 2014-2015 terdapat lebih dari 60 ribu yang bekerja di sektor pariwisata di Wallonia. Negara Bagian Wallonia memiliki institusi yang menangani sektor pariwisata domestik yaitu *Centre d'Ingenierie Touristique de Wallonie (CIWT)* yang berfungsi membuat kebijakan sektor pariwisata setempat, melakukan pengawasan, sekaligus sebagai konsultan manajemen pariwisata. Hal-hal terkait dengan potensi wisata dan konservasi budaya lokal sebagai aset utama ekonomi (eko-wisata) disatukan dengan pelibatan perguruan tinggi untuk membantu proses kajian sebagai masukan terhadap kebijakan bidang pariwisata.

Gambar 5.5
Namur, Wallonia



Manajemen dan kebijakan pariwisata di Wallonia memiliki referensi yang mengacu pada tiga hal pokok yaitu: kualitas pelayanan: kualitas manajemen, dan; sistem manajemen komprehensif yang berkelas internasional. Terkait dengan upaya penyelenggaraan sektor wisata yang berkelas dunia, Pemerintah Wallonia bersama dengan *CIWT* menyelenggarakan kolaborasi antar elemen di masyarakat termasuk dari lembaga swadaya masyarakat, peneliti, pelaku usaha, profesional, birokrat dan perguruan tinggi.

Model yang diterapkan oleh Wallonia ini tentu saja menarik untuk dijadikan bahan pelajaran dan studi plus komparasi terkait bagaimana menyelenggarakan manajemen pariwisata yang berkelas internasional yang pada gilirannya akan mampu menambah pendapatan daerah dengan basis profesionalitas.

Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak aset pariwisata yang sebagian besar berbasis wisata alam seyogianya mampu menangkap peluang kerjasama di bidang penguatan potensi wisata dengan Wallonia. Dengan wilayah yang relatif kecil

Belgia mampu menarik rata-rata sekitar 6-6,5 juta wisatawan yang 15 persen diantaranya mengunjungi Wallonia.

Hal ini tentu selayaknya menambah harapan bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat belajar dalam rangka memperkuat sektor wisata yang unggul secara nasional yang pada gilirannya akan dapat menjadi salah satu situs percontohan sektor wisata nasional dan kawasan sehingga memperkenalkan Jawa Barat tidak hanya sebagai daerah yang memiliki beragam kawasan wisata, namun juga sebagai provinsi yang unggul dan maju dalam manajemen pengelolaan pariwisata.

5.2 PROVINSI GELDERLAND, BELANDA

5.2.1 Gambaran Umum

Gelderland (baca: yelderlan) adalah salah satu dari 12 provinsi Kerajaan Belanda yang terletak di sebelah timur negara dengan luas hampir 5000 km persegi beribukota di Arnhem yang berpenduduk hampir 200 ribu jiwa dari keseluruhan total populasi Gelderland sekitar 2 juta jiwa. Kota-kota besar dan penting selain Arnhem adalah Nijmegen, Apeldoorn, Wageningen, Doetinchem, Zavenaar dan lainnya

Gambar 5.6
Provinsi Gelderland



5.2.2 Letak Geografis

Secara keseluruhan Gelderland terbagi menjadi empat potongan wilayah besar yaitu: Arnhem-Nijmegen, Graafschap atau Achterhoek di sebelah timur; Veluwe di utara, dan; Rivierenland di sebelah barat daya. Wilayah Gelderland sebagai provinsi di sebelah timur berbatasan langsung dengan Republik Federal Jerman dan enam provinsi lainnya. Sebagai sebuah provinsi, Gelderland memiliki sekitar 54 pemerintah kota (*municipality*).

Gelderland terbagi menjadi dua kawasan besar yaitu *Neder Rijn* dan *Oude IJsel* yang secara keseluruhan memiliki kontur lembah dan dataran tinggi –Veluwe- di

bagian barat, dan Achterhoek di sebelah timur. Kawasan Achterhoek adalah sentra penghasil produk pertanian. Sementara sekitar ibukota provinsi, Arnhem, dan wilayah Zutphen dan Dotinchem adalah basis industri Provinsi Gelderland. Kota terbesar provinsi ini adalah Nijmegen yang juga terkenal sebagai kota wisata, kota riset dan teknologi penting di Benua Eropa.

Gambar 5.7
Peta Gelderland



5.2.3 Sejarah Singkat

Terdapat setidaknya dua terminologi asal muasal dari Gelderland yaitu: pertama, berawal dari masa Kekaisaran *Holy Roman* dengan mengambil nama

Jerman ‘*Geldern*’, dan; kedua, ‘*Gelre*’ berasal dari hikayat *Wichard* tatkala *Lords of Pont* memberikan nama tersebut setelah berhasil mengalahkan seekor naga. Evolusi historis Provinsi Gelderland melintasi sejarah panjang mulai pada era Holy Roman, masa dominasi Burgundian, Burgundian-Habsburg, pendudukan Prussia, di bawah administrasi Perancis pada era Napoleon Bonaparte, hingga akhirnya menjadi bagian Republik Batavia, sebelum menjadi bagian dari Kerajaan Belanda.

Pada sekitar abad 11 Masehi, Bangsawan Gelre berhasil menyatukan wilayah Betuwe, Veluwe, dan mengontrol wilayah Rhine, Waal, dan Meuse untuk kepentingan perluasan kekuasaan Kekaisaran Holy Roman. Setelah hampir 300 tahun masa kekuasaan Holy Roman, dengan status duchy (wilayah bangsawan; beralih dari status countship), bersama-sama dengan wilayah duchy lainnya, Gelderland bergabung dalam Union of Utrecht pada tahun 1579 untuk mengusir Spanyol, dan Gelderland mendapatkan status berdaulat sebelum diduduki oleh Louis XIV pada tahun 1672, dan berlanjut di bawah pendudukan Prussia. Tidak lama setelah menjadi bagian dari Republik Batavia, dan di bawah kendali Perancis, Gelderland akhirnya menjadi provinsi Kerajaan Belanda pada tahun 1815.¹⁶

Pada saat menjelang akhir Perang Dunia 2, dan di tengah-tengah invansi sekutu ke Eropa untuk mengalahkan Jerman, wilayah Gelderland menjadi salah satu medan pertempuran paling sengit pada saat pasukan sekutu berupaya memasuki wilayah Jerman melalui wilayah tersebut yang memang berbatasan langsung dengan Jerman. Arnhem menjadi titik terpenting dari operasi militer sekutu yang terbesar dalam sejarah yaitu *Market Garden* yang mengkuir peristiwa pertempuran

¹⁶ Ensiklopedia Brittanica

dashyat memperebutkan jembatan Arnhem sebagai akses masuk ke wilayah Jerman.

Gambar 5.8
Jembatan Arnhem



5.2.4 Demografi

Negeri Belanda memiliki jumlah penduduk hampir 18 juta jiwa. Dari total 12 provinsi, *South Holland* yang beribukota di Rotterdam memiliki jumlah populasi terbesar sekitar 3,8 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 1100 jiwa per kilometer persegi. Merujuk data statistik tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi Gelderland kurang lebih sekitar 2,2 juta atau terbesar keempat setelah Provinsi *South Holland*, *North Holland* dan *North Brabant* –dengan kepadatan penduduk sebesar hampir 400 jiwa per kilometer persegi. Merujuk catatan demografi sosial, sekitar 31 persen

penduduk Gelderland mengaku beragama Kristen Protestan, dan sekitar 29 persen mengaku berkeyakinan Katolik Roma.

Provinsi Gelderland termasuk salah satu konsentrasi kaum Muslim di Belanda yang diperkirakan mencapai jumlah hampir 1,5 juta jiwa dari total penduduk sekitar 18 juta jiwa. Tidak diketahui angka pasti secara statistik jumlah muslim di Gelderland, namun diperkirakan sekitar hampir 75 persen imigran di Provinsi Gelderland adalah muslim yang kebanyakan datang dari wilayah Afrika Utara, dan Turki, serta Afrika sub-sahara.¹⁷

5.2.5 Politik dan Pemerintahan

Negeri Belanda dulunya pernah menjadi sebuah negara republik konfederasi yang terdiri dari tujuh provinsi independen dalam kerangka pemerintah federal. Sebagai salah satu provinsi independen, Gelderland diperintah oleh seorang bangsawan –Duchy- seperti halnya Utrecht, Friesland, Groningen, Zutphen, Flanders, Zeeland. Setelah penandatanganan Traktat Perdamaian di Westphalia tahun 1648, ketujuh provinsi tersebut melebur menjadi satu dan diperintah oleh seorang *Generality Lands*. Provinsi Gelderland pada saat itu bernama *Staats Opper-Gelre* dan menerima status yang sama seperti wilayah Brabant, Vlaanderen, dan Overmaas.

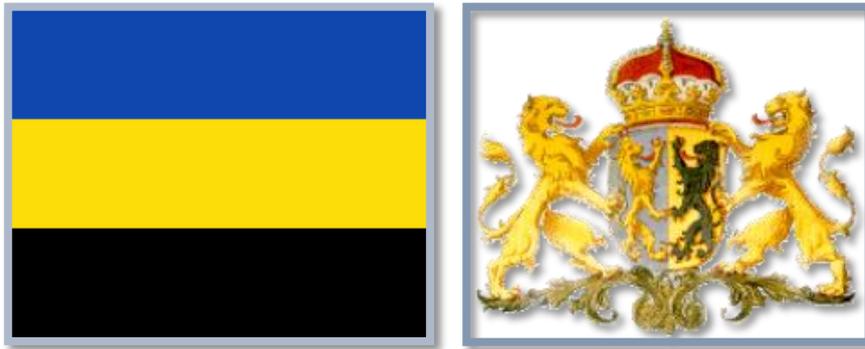
Secara administratif, semua provinsi di Kerajaan Belanda memiliki struktur yang terbagi menjadi tiga posisi dalam pemerintahan daerah yaitu: ¹⁸ *pertama, komisioner raja (Commisaris van de Koning)* yang mengepalai deputi-deputi wilayah

¹⁷ *UrbiStat-AdminStat; Netherlands Demography*

¹⁸ *Provincie Gelderland, Administration, 2014*

dan provinsi, atau dengan kata lain sebagai kepala pemerintah provinsi. Posisi komisioner raja dipilih oleh pemerintah pusat dengan masa jabatan enam tahun yang bisa dipilih kembali. Komisioner raja dijabat oleh seorang politisi, namun demikian pada saat setelah terpilih, pejabat tersebut dilarang merepresentasikan figur partai politik.

Gambar 5.9
Bendera dan Lambang Gerderland



Kedua, *State Provincial* atau *Provinciale Staten* adalah fungsi yang menjalankan parlemen daerah provinsi yang berperan mengawasi kinerja dan performa para deputi wilayah sekaligus memberikan masukan pada kebijakan publik. Jabatan ini dipilih setiap empat tahun sekali dalam sebuah pemilihan langsung oleh publik yang kandidatnya adalah para politisi di daerah provinsi dan untuk semua warga provinsi, kecuali anggota kabinet nasional, komisaris raja dan aparatur daerah di provinsi terkait. Jumlah total majelis daerah atau State Provincial adalah tergantung pada jumlah total populasi. *State Provincial* juga memiliki hak untuk memilih anggota parlemen nasional atau senator.

Ketiga, *Provincial Executive* atau *Gedeptueerde Staten/ GS* yang menjalankan fungsi sebagai konselor eksekutif di wilayah provinsi. Bersama dengan

Komisaris Raja, *Provincial Executive* membentuk apa yang disebut sebagai *College van Commisaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten* yang merupakan Dewan Eksekutif Provinsi. Anggota GS dipilih oleh *States Provincial* dan bertugas untuk mengkoordinasikan sekaligus merencanakan paket kebijakan daerah, serta membuat produk peraturan daerah. Lembaga ini adalah bersifat *collegial* sehingga keputusan yang diambil harus melalui sebuah konsensus dan kesepakatan bersama. Dalam sistem umum pemerintahan, otoritas provinsi memiliki ruang untuk menjalankan kebijakan dalam mekanisme *sharing* baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kota, khususnya untuk sektor yang mencakup kepentingan publik langsung seperti Pertanahan, infrastruktur provinsi, konservasi alam, kesejahteraan, keuangan daerah/kota, pengairan dan sektor-sektor dalam substansi ekonomi.

Dalam menjalankan fungsi administratif sehari-hari, Provinsi Gelderland memiliki sekitar 1500 pegawai yang terbagi dalam empat divisi yaitu: pertama, Lingkungan Hidup dan Masalah Air; kedua, Tata Ruang, Ekonomi dan Kesejahteraan; ketiga, Infrastruktur Jalan, Lalu-lintas dan Transportasi, dan; keempat, *Clerk Office* sebagai unit yang menjalankan fungsi manajemen pengawasan, termasuk kegiatan audit dan verifikasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan setempat.

5.2.5.1 Sekilas Wajah Arnhem

Ibukota Provinsi Gelderland, Arnhem terletak di tepi Sungai Rhine –Nederrijn dan Sint-Jansbeek dengan jumlah penduduk sekitar 150 ribu dan menjadi salah satu kota utama di Negeri Belanda. Secara wilayah, Arnhem digabungkan dengan

Nijmegen –yang terbesar di Gelderland- sehingga total populasi menjadi sekitar 750 ribu-an. Kota Arnhem adalah lokasi beberapa situs wisata dan pendidikan penting di Belanda seperti *Papendahl Sports Centre*, *Open Air Museum*, Kebun Binatang Kerajaan, Institute Seni ArtEZ, dan *Hogeschool van Arnhem en Nijmegen*.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Arnhem dikenal sebagai salah satu tujuan wisata populer di Belanda. Terdapat beberapa situs wisata historis dan wisata budaya seperti, *Museum voor Moderne Kunst* yang menjadi galeri seni bagi para artis Belanda; *Openluchtmuseum* yang dibuat sebagai wisata edukasi untuk para pengunjung yang tertarik pada pakaian tradisional Belanda; *The Kröller-Müller Museum* yang dikenal sebagai tempat menyimpan karya Vincent Van Gogh; *Airborne Museum* yang dibangun untuk mengenang *'bridge too far'* sebagai sebuah momentum historis dan dramatis penerjunan pasukan payung sekutu di Arnhem yang menjadi salah satu pintu masuk menuju daratan Jerman; museum anggur yang menyajikan berbagai varian anggur Eropa, dan; Kebun Binatang Burger dan Taman Nasional Hoge Veluwe yang populer sebagai tempat untuk bersepeda dan olah-raga *outdoor*.

Sebagai salah satu kota terkemuka di Belanda, Arnhem menjadi sentra potensi ekonomi terbesar bagi Provinsi Gelderland. Kota ini memiliki laboratorium riset energi listrik dengan berbagai instrumennya –DNV GL, serta operator distribusi energi lainnya seperti Tennet dan Alliander. Hal ini menjadi karakter penting bagi Gelderland sebagai lokasi bagi pengembangan teknologi listrik dan lingkungan yang pada saat yang sama didukung oleh komunitas akademik dan riset yang banyak berada di provinsi ini, seperti di Nijmegen, dan Wageningen.

Selain itu, Gelderland adalah wilayah dimana industri pengolahan makanan berada. Belum lama ini, tepatnya pada pertengahan tahun 2016, Arnhem dan Nijmegen disatukan dalam kerangka *new economic board* yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta potensi Provinsi Gelderland dalam hal teknologi kesehatan, energi, dan pengolahan makanan berbasis teknologi. Proyek penyatuan ini melibatkan kalangan peneliti dan akademika, otoritas setempat, maupun perusahaan-perusahaan besar Belanda yang berbasis di Provinsi Gelderland.¹⁹

5.2.6 Potensi Sosial dan Ekonomi

Terhampar di daratan dengan luas hampir 5000 km persegi, Gelderland menjadi Provinsi yang paling luas di Belanda atau setara dengan hampir 15% luas wilayah total. Populasi dengan jumlah sekitar 2,2 juta menjadikan provinsi ini menjadi tempat tinggal lebih dari 12 persen total populasi nasional. Secara keseluruhan, Gelderland memiliki lebih dari sepuluh persen *GDP* atau setara dengan 60 miliar Euro dengan tingkat pertumbuhan sekitar 0,3% yang berarti lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Belanda yang minus 0,2%. Sektor yang menjadi prioritas utama rata-rata di Provinsi Gelderland adalah kesehatan dengan prosentase mencapai 18,5% dan perdagangan dengan jumlah 17,3%.²⁰

Sektor-sektor lain yang juga menjadi penyokong ekonomi terbesar adalah industri, jasa komersial, dan disusul pertanian dan perikanan. Struktur ekonomi Gelderland banyak ditopang oleh usaha kecil dan menengah dengan total kegiatan

¹⁹ *An Economic Geography of the Netherlands; International Perspectives*

²⁰ *European Commission; Internal Market, Industry, Entrepreneurship, and SMEs; An Economic Geography of the Netherlands; International Perspectives*

komersial dan non-komersial pada sektor jasa sekitar 73% dari total nilai produk domestik. Provinsi Gelderland memiliki desain atau rancangan kebijakan terkait dengan arah dan fokus sektor ekonomi yang disebut sebagai '*Uitdagend Gelderland*' (*Challenging Gelderland*). Dalam desain tersebut ditetapkan sejumlah subyek prioritas bagi provinsi ini diantaranya: produk makanan dan kesehatan, serta energi, teknologi lingkungan, dan manufaktur. Sejumlah prioritas tersebut masuk dalam kerangka '*top sectors and innovation plus energy transition*'.

Provinsi ini memberikan subsidi pada perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang tersebut dalam koridor kegiatan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, riset, serta produksi, seperti yang dilakukan pada Novio-Tech Campus di Nijmegen. Sektor energi misalnya mendapatkan beberapa skema pendanaan untuk proyek-proyek usaha kecil dan menengah, plus bantuan pendanaan untuk promosi inovasi, partisipasi inovasi, khususnya untuk inovasi energi, dari pemerintah pusat (*MIT Oost, PPM Oost, 'Gelderland voor Innovatives'*). Provinsi Gelderland tidak memiliki program khusus secara spesifik untuk mendorong sektor manufaktur berbasis teknologi, namun sebaliknya dukungan untuk kegiatan manufaktur diberikan dalam konteks program prioritas untuk sektor-sektor tersebut.

Kegiatan-kegiatan terkait upaya mendukung sektor manufaktur diantaranya: **pertama**, melakukan percepatan inovasi melalui dukungan terhadap proses inovasi teknologi, termasuk produk-produk yang dihasilkan berikut proses uji; **kedua**, mendorong kewirausahaan melalui dukungan untuk memfasilitasi misi-misi perdagangan terkait produk-produk berbasis teknologi, dan; **ketiga**, mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta. Otoritas setempat dalam hal ini juga mendukung sekitar 150 unit usaha dalam hal pengembangan usaha, termasuk di

luar Belanda, asistensi, pendanaan untuk studi kelayakan dan riset, menjalin kemitraan, memberikan insentif, serta memudahkan kesempatan investasi.²¹

Pemerintah Gelderland secara reguler menyediakan dukungan finansial untuk mendorong iklim investasi dan usaha kecil-menengah, khususnya untuk pengolahan-produksi makanan dan produksi pertanian berbasis teknologi yang memang sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi Provinsi Gelderland. Untuk memberikan kemudahan serta dukungan lebih lanjut dilakukan upaya *sharing* ilmu pengetahuan dan praktek antara UKM dengan lembaga-lembaga riset serta academia di Gelderland dan mendorong kewirausahaan inovatif dengan menggerakkan usaha yang berbasis pada sektor-sektor prioritas dimaksud.

Upaya lain yang diberikan untuk manufaktur berbasis teknologi adalah mendukung secara organisasional maupun finansial terhadap aktifitas *sharing*, seperti yang dilakukan di Universitas Nijmegen –NXP (perusahaan mikro-elektronik multinasional). Universitas secara spesifik melakukan elaborasi dan studi tentang bidang-bidang terkait, termasuk bidang kesehatan, pengolahan makanan, energi dan sektor-sektor prioritas lainnya. Gelderland memiliki dua universitas terkemuka di Eropa yaitu Radboud Universiteit di Nijmegen dengan hampir 20 ribu mahasiswa pada semua strata, hampir 3000 peneliti dan profesor, serta menghasilkan hampir 7000 karya penelitian ilmiah pada tahun 2016; kemudian Universitas Wageningen dan Pusat Riset Wageningen yang memiliki sekitar 9000 mahasiswa pada semua

²¹ *European Comission; Internal Market, Industry, Entrepreneurship, and SMEs; An Economic Geography of the Netherlands; International Perspectives*

strata, dan sekitar 1600 staf pengajar dan peneliti. Kedua universitas tersebut sangat dikenal dengan program studi ilmu alam dan ilmu terapan.

Universitas Wageningen sangat terkemuka dalam studi teknologi pemrosesan-pengolahan makanan berbasis teknologi, teknologi kesehatan, serta agro-industri dan menempati peringkat 47 dunia pada tahun 2015/16 dari seratus universitas terbaik di dunia. Dalam kapasitas sains dan teknologi, Universitas Wageningen juga didukung oleh Radboud Universiteit di Nijmegen dan Universitas Twente di Overijssel –termasuk Provinsi Gelderland-. Universitas-universitas terkemuka lainnya yang dimiliki oleh Gelderland diantaranya: HAN, Saxion di Apeldoorn, CHE di Ede, dan Van Hall Larenstein yang terkenal dengan studi teknologi pertanian, tanaman pangan, dan teknologi lingkungan.

Provinsi Gelderland saat ini memiliki kurang lebih hampir 1500 unit usaha produk-produk makanan olahan industri pertanian yang didukung sekitar 90 lembaga riset terkait, termasuk dari perguruan tinggi. Produk-produk makanan dengan merk Friesland Campina, Heinz, Yili, Keygene, NIZO dan yang lain yang dikenal sebagai produk-produk makanan olahan berkualitas dibuat di Gelderland, demikian halnya dengan produk-produk Microos, Solynta dan Ceradis. Selain memiliki potensi kuat untuk agro-industri dan agro-bisnis –industri pertanian dan pengolahan makanan -, industri kesehatan, dan energi, Provinsi ini juga memiliki potensi ekonomi dari beberapa jenis industri di luar sektor prioritas seperti konstruksi, perkapalan (untuk transportasi sungai, danau), *garment*/tekstil di Achterhoek, kertas di Veluwe, besi di Oude IJsselstreek dan yang lain. Beberapa produk yang juga dibuat di beberapa kota seperti Grolsch di Groenlo, NXP di Nijmegen, Talens di Apeldoorn, Gispén di Culemborg, Aviko di Steenderen, dan Gazelle di Dieren.

Dapat dikatakan bahwa provinsi ini dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan mandiri karena semua hal dibuat di Gelderland mulai dari konstruksi, arsitektur, infrastruktur, serta keperluan-keperluan publik seperti instalasi energi, medis/ rumah sakit, dan bahkan infrastruktur untuk museum yang banyak terdapat di Gelderland. Untuk dapat mengenali produk-produk Provinsi Gelderland secara langsung bisa dijumpai pada perhelatan festival dan perayaan secara periodik yang difasilitasi Pemerintah Gelderland dan dalam hal ini mengikutsertakan perusahaan-perusahaan di seluruh Gelderland, termasuk usaha kecil-menengah, untuk turut berpartisipasi memperkenalkan produk-produk mereka kepada khalayak luas, termasuk proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan. Sebagai informasi, posisi Provinsi Gelderland dalam *innovation scoreboard* mencapai rata-rata yang cukup tinggi di Eropa yaitu antara 90%-120%.²²

5.2.6.1 Sektor Pariwisata

Industri pariwisata adalah hal yang secara tradisional dimiliki oleh Provinsi Gelderland seperti halnya banyak wilayah di Eropa dengan mengandalkan pada pariwisata sejarah dan pariwisata alam yang menawarkan panorama khas Eropa. Gelderland banyak memiliki situs-situs sejarah baik sejarah klasik/kuno maupun sejarah modern yang berupa bangunan, arsitektur, museum, taman nasional dan sebagainya. Dalam rilis Eurostat terkait destinasi favorit wisata, bersama dengan

²² European Commission; *Internal Market, Industry, Entrepreneurship, and SMEs; An Economic Geography of the Netherlands; International Perspectives*

Vzhodna, Slovenija, Gelderland dikategorikan termasuk salah satunya sebagai tujuan wisata non-pantai diantara kota dan wilayah dari 13 negara Uni Eropa.

Sebagai salah satu provinsi tua di Belanda, Gelderland memiliki kota-kota yang menawarkan potensi industri pariwisata seperti Apeldoorn, Wageningen dan Nijmegen sekaligus sebagai situs pendidikan, Zutphen, Tiel, dan Doesburg. Selain Nijmegen sebagai kota tertua, Zutphen juga memiliki karakteristik sejarah karena kota ini dulunya adalah desa yang pada akhirnya menerima hak-hak sebagai layaknya sebuah kota. Di Zutphen juga terdapat gereja-gereja tertua di Belanda, yang salah satunya adalah Saint Walburgiskerk –yang terbesar di Belanda. Doesburg adalah juga kota tua dengan nuansa sejarah abad pertengahan yang terletak di pinggiran Sungai Ijssel.

5.3 REPUBLIK BASHKORTOSTAN

5.3.1 Gambaran Umum

Negara Bagian Baskhortostan atau Republik Bashkortostan (Республика Башкортостán - *Respublika Bashkortostan* atau : Башкортостан Республикаһы, *Başqortostan Respublikahı*), lebih dikenal sebagai **Bashkiria**) dengan ibukota Ufa adalah salah satu negara bagian Republik Federasi Russia yang terbentuk setelah berakhirnya tujuh dekade eksistensi Uni Sovyet pada tahun 1991 bersama-sama dengan 21 negara bagian yang lain.

Gambar 5.10
Wilayah Negara Bagian Federasi Rusia



- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. <u>Adygea</u> | 8. <u>Kalmykia</u> | 15. <u>Ossetia Utara-Alania</u> |
| 2. <u>Altai</u> | 9. <u>Karachay-Cherkessia</u> | 16. <u>Tatarstan</u> |
| 3. <u>Bashkortostan</u> | 10. <u>Karelia</u> | 17. <u>Tuva</u> |
| 4. <u>Buryatia</u> | 11. <u>Komi</u> | 18. <u>Udmurtia</u> |
| 5. <u>Dagestan</u> | 12. <u>Mari El</u> | 19. <u>Khakassia</u> |
| 6. <u>Ingushetia</u> | 13. <u>Mordovia</u> | 20. <u>Chechnya</u> |
| 7. <u>Kabardino-Balkaria</u> | 14. <u>Sakha (Yakutia)</u> | 21. <u>Chuvashia</u> |
| | | 22. <u>Krimea</u> |

5.3.2 Letak Geografis

Republik Bashkortostan terletak di sekitar Pegunungan Ural dan sepanjang sungai Volga yang membatasi wilayah Benua Asia dan Eropa, dan menjadi salah satu konsentrasi wilayah populasi Muslim di Russia bersama-sama dengan Negara Bagian Tatarstan, Dagestan, Chechnya, Ingushetia dan yang lain.

Dengan area seluas 143.600 km persegi, Bashkortostan diapit oleh beberapa provinsi atau oblast yaitu Pem-Krai di utara, Sverdlovsk di timur laut, Chelyabinsk di

timur, Orenburg di tenggara dan barat daya, dan Negara Bagian/ Republik Tatarstan di sebelah barat dan Udmurtia di barat laut. Terletak di sisi Pegunungan Ural, secara umum wilayah Bashkirtia adalah wilayah dengan karakteristik pegunungan dan terdapat banyak perairan-sungai sebagai sarana transportasi dan lalu lintas ekonomi dengan akses ke Laut Hitam, Laut Kaspia serta Laut Baltik.

Gambar 5.11
Peta Bashkortostan



5.3.3 Sejarah Singkat

Secara komprehensif sejarah Bashkortostan tidak bisa dipisahkan dari evolusi perjalanan panjang Russia yang dapat diklasifikasikan dalam empat masa yaitu:

- Sejarah awal

- Masa Kekaisaran Russia
- Era Uni Sovyet
- Periode kontemporer pasca Uni Sovyet atau Federasi Russia

Berawal dari nama Bashkir pada awal abad 7 masehi yang merupakan nama suku yang mendiami wilayah sekitar Pegunungan Ural, lembah Sungai Volga, dan juga merujuk pada terminologi tempat *Fiyaqi Bashkyrt* atau padang steppa Bashkir, Bashkortostan pertama kali disebut sebagai negeri Bashgird oleh Ahmad ibn Fadlan pada sekitar abad 10 Masehi. Berdasarkan beberapa catatan sejarah yang ditulis oleh Enikeev dan Kuzeev, sistem pemerintahan lokal terbentuk pada sekitar abad 13 Masehi di masa kekuasaan *Thabyn Khanate*, yang kemudian secara administratif berafiliasi dengan Kesultanan Turki sebelum datangnya invasi Mongol. Bashkortostan pertama kali mengenal Islam pada sekitar abad 11 Masehi yang dibawa oleh suku Bulgars/ Bulgaria yang memiliki koneksi dengan Turki.²³ Interaksi dengan Mongol terjadi pada sekitar abad 13 Masehi yang diwarnai dengan hubungan konfliktual, sebelum akhirnya Bashkir menerima pengaruh hegemoni Mongol pada masa tersebut.

Bashkortostan bergabung dengan Kekaisaran Russia pada sekitar pertengahan abad 16 setelah Russia berhasil mengalahkan Negeri Kazan sebagai salah satu negeri induk Bashkir. Tatkala menjadi bagian Kekaisaran Russia, hubungan Bashkir dengan Russia ditandai dengan relasi konfliktual, khususnya terjadi pada saat pemberontakan pada tahun 1662-1664, dan 1704-1711 yang disebabkan oleh tiadanya komitmen Russia untuk memenuhi perjanjian dan konsesi yang dibuat sejak awal bergabungnya Bashkir dalam kekaisaran akibat watak

²³ *History of Bashkiria; Rudenko & Enikeev*

imperialistis Russia terhadap wilayah-wilayah takhlukkannya. Pada tahun 1798 Pemerintah Russia secara resmi mengakui hak-hak kelompok muslim di wilayah Ural dan Kaukasia, yang dilanjutkan dengan pembentukan pemerintah lokal Bashkiria di Ufa pada tahun 1865.²⁴

Pada era Pemerintahan Bolshevik, Bashkiria memperoleh status otonomi dengan nomenklatura *Bashkiria Autonomous Soviet Socialist Republic (BASSR)*. Di tengah berkecamuknya Perang Patriotik Besar atau Perang Dunia 2, wilayah Bashkiria memiliki kontribusi penting sebagai supplier minyak bumi bagi Tentara Merah, selain arsenal persenjataan dan bahan pangan bersama beberapa wilayah Ural lainnya. Relatif tidak terkena dampak kerusakan perang, wilayah Ural termasuk Bashkiria ditetapkan menjadi sala satu sentra industri strategis Russia, sehingga tidak mengherankan wilayah Bashkiria dan Ural menjadi situs pembangunan industri nasional sekaligus menjadi barometer pertumbuhan ekonomi domestik.

Setelah Traktat Belazeva yang menandai berakhirnya Uni Sovyet, dan pembentukan *Commonwealth Independent States (CIS)* tahun 1991, Bashkiria secara resmi ditetapkan sebagai Negara Bagian Federasi Russia setahun setelahnya dengan nomenklatur **Republik Bashkortostan**. Bersama-sama dengan 21 negara bagian lainnya, Pemerintah Federasi Russia menandatangani sebuah kesepakatan yang di-undang-undang-kan yang dikenal sebagai *Compact on Separation of Authorities and Powers among Federal Organs of the Russian Federation and the Organs of Power of the Republic of Bashkortostan*.

²⁴ *History of Bashkiria; Rudenko & Enikeev*

5.3.4 Demografi

Republik Bashkortostan adalah termasuk negara bagian dengan tingkat populasi terpadat di Federasi Russia dengan jumlah penduduk mencapai 4,5 juta jiwa. Dari total jumlah penduduk, prosentase mayoritas etnis adalah Russia sekitar 36%, disusul etnis Bashkir mencapai sekitar 30%, Tatar 25 %, dan sisanya dari etnis minoritas seperti Chuvash, Mari, Ukraina, Mordovian, Udmurt, dan Belarus.

Bahasa resmi yang digunakan selain Russia adalah Bashkir dan Tatar. Sementara itu, berdasarkan sensus nasional terakhir pada tahun 2014, Muslim adalah kelompok religius terbesar dengan prosentase hampir 40%, disusul Orthodox sekitar 25%, dan sisa presentase adalah selain dua kelompok penganut agama terbesar seperti kelompok agnostik, atheis, dan sekte-sekte Kristen non-Orthodox. Mayoritas penduduk yang beragama Islam adalah dari etnis Bashkiri, Tatars, dan sebagian kecil dari kelompok etnis Asia Tengah dan Russia yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah atau Hanafi.

Orthodox sebagian besar dianut oleh mereka dari etnis Russia, Ukraina dan Chuvash. Selain beberapa keyakinan tersebut, kelompok minoritas Yahudi juga mendiami wilayah Bashkiri sejak ratusan tahun silam, dan hingga kini diperkirakan terdapat sekitar 15 ribu komunitas Yahudi yang terkonsentrasi sebagian besar di Ufa, ibukota Republik Bashkortostan. Infrastruktur keagamaan berupa tempat ibadah cukup banyak ditemukan di Bashkiri dengan rincian sekitar 1200 masjid (dari total 7500 masjid di seluruh Russia), 200 gereja Orthodox, dan tempat-tempat ibadah lainnya termasuk sinagoga Yahudi berdasarkan laporan tahun 2012.

5.3.5 Politik dan Pemerintahan

Sebagai sebuah negara bagian atau republik, Bashkortostan dipimpin oleh seorang pejabat presiden yang memiliki masa jabatan empat tahun. Presiden memiliki otoritas untuk melindungi dan menjamin semua hak-hak sipil dari warga Bashkiria, menjalankan kebijakan-kebijakan terkait sektor sosial dan ekonomi, memastikan aspek keamanan serta kepastian hukum di seluruh yurisdiksi wilayah Republik Bashkortostan.

Negara bagian juga memiliki organ Majelis Negara atau Kurultai yang beranggotakan 120 orang deputi yang bisa dipilih tiap lima tahun. Atas jaminan dan merujuk pada undang-undang federal, semua negara bagian atau republik di Federasi Russia memiliki status berdaulat dalam Negara Russia, sehingga dalam beberapa aspek, kewenangan negara bagian relatif lebih besar dibandingkan federasi dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan disetujui secara internal berdasarkan Konstitusi Federal Russia dan Konstitusi Internal Bashkortostan, serta Traktat Federal yang bisa di-amandemen, berikut Kesepakatan Pemisahan Wewenang dan Kekuasaan dan pen-Delegasian Wewenang antara Organ Kekuasaan Republik Bashkortostan.

Gambar 5.12

Lambang dan Bendera Republik Bashkortostan



Sebagai implikasi dari referensi konstitusional dan yuridis, semua republik atau negara bagian memiliki kewenangan otonom untuk memiliki kekuatan hukum secara institusional berupa mahkamah negara bagian yang memiliki pengadilan otonom dan terpisah dari federasi. Konsekuensi dari mekanisme federal adalah bahwa semua republik atau negara bagian dalam Federasi Russia memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menangani semua isu-isu administratif secara otonom seperti yang termaktub dalam UU Republik/ Negara Bagian terkait Struktur Pemerintahan dan Wilayah setingkat kota/kabupaten (*municipality/ regency*)

5.3.6 Potensi Sosial dan Ekonomi

Republik Bashkortostan termasuk negara bagian yang paling maju secara ekonomi dan memiliki potensi besar dalam aspek dimaksud. Negara bagian menjadi tempat utama tujuan investasi karena tingkat resiko yang relatif rendah di Russia, menempati peringkat antara 7-9 produk domestik bruto, dan peringkat teratas dalam

kapasitas profitable entrepreneurship sehingga sangat baik untuk investasi dengan nilai rata-rata sekitar 70% untuk tingkat nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara bagian ini seringkali menjadi ‘obyek promosi’ bagi kepentingan Russia dalam setiap perhelatan investasi dan perdagangan. Secara historis dan sektoral, wilayah-wilayah Ural memang dipandang bermakna strategis bagi kepentingan nasional Russia, khususnya terkait sektor industri dan pengembangan teknologi. Wilayah Ural, termasuk Bashkiria memiliki makna keamanan bagi ketahanan nasional Russia mengingat letaknya yang relatif tidak terjangkau oleh potensi kerawanan atau ancaman keamanan eksternal, sehingga memungkinkan Russia untuk mengoptimalkan potensi industri dan ekonomi strategis.

Wilayah-wilayah Ural ini menjadi sentra pembangunan industri strategis yang menghasilkan berbagai teknologi perangkat keras, termasuk untuk keperluan militer, seperti otomotif, instrumen dirgantara, dan juga instrumen mekanis untuk sektor pertanian. Dari wilayah-wilayah Ural, Russia/ Uni Sovyet berhasil secara masif membangun dan memproduksi peralatan perang untuk kemudian memukul balik invasi Jerman pada Perang Dunia 2. Sentra industri dan ekonomi yang ada di wilayah Ural ini pula yang menghasilkan capaian ekonomi yang relatif lebih baik bagi diantaranya Bashkortostan dibanding wilayah negara bagian lainnya. Bashkortostan memiliki performa industri yang paling maju, demikian juga dengan produk pertanian, investasi yang berimplikasi pada tingkat pendapatan regional dan daya beli masyarakat yang relatif lebih baik.

Sektor industri sebagai motor penggerak ekonomi setempat pada gilirannya didukung oleh sektor energi dan mineral dan pertanian. Bashkortostan adalah salah

satu pemasok kebutuhan energi minyak bagi Russia yang pada akhirnya juga menjadi faktor strategis penentu asupan bahan bakar bagi kendaraan-kendaraan perang Russia pada Perang Dunia 2. Saat ini Bashkortostan memasok total hampir 30% kebutuhan energi Russia dengan komposisi bahan bakar diesel dan gasoline. Setelah berakhirnya perang, Bashkortostan tetap menjadi tempat relokasi industri Russia sekaligus penyedia pasokan energi Russia karena adanya tempat penyulingan minyak bumi di negara bagian ini. Sejak saat itu pula, Bashkortostan menjadi motor penggerak sekaligus barometer ekonomi nasional Russia bersama-sama wilayah Ural lainnya. Secara lebih spesifik, Bashkortostan memiliki varian potensi bidang pertambangan selain minyak, gas dan batubara. Diperkirakan terdapat deposit sekitar 3000 jenis produk pertambangan mulai dari bijih besi, tembaga, mangan, bauksit, berbagai varian mineral non-besi dan metal seperti fosfor, kristal, fluorite, silikat, asbestosis, silika, granit, permata, tungsten dan sebagainya. Industri petrokimia dan metalurgi serta agro-industri juga menjadi andalan dari negara bagian ini. Salah satu produk yang bisa diolah dalam industri metalurgi adalah lignite yang bisa digunakan untuk produksi resin, pupuk dan lain-lain.

Selain beberapa varian industri tersebut, Bashkortostan juga memiliki sentra industri kimia terbesar di Russia, termasuk teknologi bio-kimia, dan obat-obatan. Bashkortostan juga menjadi salah satu penghasil kayu karena hampir sepertiga luas wilayah (sekitar 60 ribu km persegi) adalah hutan dengan produk varian utama seperti kayu oak, kamper, maple, dan pohon-pohon persik serta timber. Berdasarkan rilis dari majalah *Forbes*, Bashkortostan juga menempati skala tinggi dalam sektor perumahan/ estate di Russia, berpotensi tinggi dalam sektor pariwisata, dan sektor

perlistrikan –oleh karena banyaknya sungai, dan danau sebagai basis *hydro electricity*. Forbes juga menetapkan Ufa, ibukota Bashkortostan, sebagai ibukota negara bagian yang paling ramah dan nyaman untuk membangun serta mengembangkan usaha di Russia.

5.4 KHARTOUM STATE, REPUBLIK SUDAN

5.4.1 Gambaran Umum

Sudan terbagi menjadi lima kawasan besar dengan 18 wilayah negara bagian (setelah terpisah dengan Sudan Selatan) yaitu Kesultanan Sennar, Otoritas Darfur, Wilayah Timur, Nubia, dan Kurdufan. Bersama-sama dengan negara bagian atau Ash-Shamaliyah dan Nahran Nil (Sungai Nil), ibukota Khartoum terletak di wilayah Nubia.

Gambar 5.13
Peta Sudan



5.4.2 Letak Geografis

Sudan terletak di sebelah timur laut Benua Afrika, dan berbagi batas wilayah dengan negara-negara tetangga; Chad dan Republik Afrika Tengah di sebelah barat; Mesir dan Libya di bagian utara; Ethiopia dan Eritrea di sebelah timur, dan; dengan Sudan Selatan, Kenya, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo di sebelah selatan. Sudan juga berada di tepi barat Laut Merah yang membentang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 500 mil laut, dan di tengah terbelah oleh Sungai Nil yang mengalir dari selatan ke utara.

Ibukota Khartoum terletak di tengah area dengan populasi yang sangat padat di sisi barat Sungai Nil. Khartoum diapit oleh sejumlah kawasan sepanjang aliran Nil; di utara Khartoum Bahri, Shendi, River Nile State; di sisi timur terdapat Kassala, Negara Bagian Kassala, Pelabuhan Sudan, Negara Bagian Laut Merah; Nil Biru di timur laut; Nil Putih bagian barat, Kordofan Utara, Omdurman di sisi barat; dan, Wad Madani, al Jazirah di selatan, serta Ed Dueim dan Negara Bagian Nil Putih di barat daya.

Sebagai kota terbesar sekaligus ibukota –kota tua di Afrika- Khartoum terletak di wilayah Nil Putih yang mengalir ke utara dan berhulu di Danau Victoria, dan Nil Biru yang mengalir ke arah Ethiopia. Titik pertemuan kedua Nil disebut sebagai *al Mogran* yang muaranya adalah di Laut Tengah. Khartoum yang berpenduduk lebih dari 5 juta jiwa terbagi menjadi tiga sub-wilayah yaitu Khartoum, Khartoum Bahri/utara (بحري الخرطوم *al-Kharṭūm Baḥrī*), dan Omdurman atau Umm Durman (أم درمان *Umm Durmān*).²⁵

²⁵ *Khartoum State Information Centre, 2011*

5.4.3 Sejarah Singkat

Secara etimologis, Khartoum dipercaya memiliki makna *'trunk'* atau *'hose'* atau *khurtum* dalam Bahasa Arab. Menurut terminologi Eropa yang pertama kali tiba di Khartoum pada pertengahan abad 19, nama Khartoum diperkirakan berasal dari kata *'qurtum'* –nama sejenis bunga- (*carthamus tinctorius*) yang banyak ditemui di Mesir dan dieksploitasi untuk diambil minyak-nya. Sedangkan menurut pendapat beberapa sejarawan, Khartoum berasal dari Bahasa Nubia, *Agartum* –*'Atum'*- nama dewa pencipta; atau dalam Bahasa Beja *'Hartoom'* yang berarti 'pertemuan'.

Khartoum didirikan pada tahun 1821 oleh Ibrahim Pasha, putra penguasa Mesir Muhammad Ali Pasha. Pada awalnya Khartoum adalah basis militer tentara Mesir yang kemudian tumbuh menjadi pusat perdagangan di Afrika Utara, termasuk perdagangan budak dari Afrika. Beberapa peristiwa bersejarah mewarnai perjalanan historis kota ini, diantaranya the Siege of Khartoum –pengepungan Kota Khartoum- oleh loyalis tokoh religius Mahdi Muhammad Ahmad antara tahun 1884-1885 yang berakhir dengan penghancuran kota secara masif, dan pembantaian besar-besaran penduduk Khartoum.

Peristiwa besar yang juga terjadi adalah Perang Omdurman ketika Inggris berhasil mengalahkan pasukan loyalis Mahdi, dan kemudian menguasai Khartoum. Dalam perjalanannya, Khartoum tidak bisa terlepas dari berbagai dinamika sosial-politik konfliktual baik yang bersifat domestik, kawasan, maupun global, termasuk menjadi saksi sejarah berdirinya negara Sudan Selatan yang terpisah dari Sudan sebagai konsekuensi berakhirnya perang saudara yang cukup lama antara keduanya sehingga memakan puluhan ribu korban jiwa. Khartoum juga menjadi titik tujuan pengungsi dari negara-negara sekitar Sudan yang dilanda konflik dan

peperangan panjang, seperti dari Ethiopia, Eritrea, Somalia, Chad, Uganda, dan Sudan Selatan.²⁶

Setelah berakhirnya perang saudara dan terjadi penandatanganan perdamaian antara Pemerintah Sudan dengan Sudanese People's Liberation Movement (SPLA), proyek pembangunan mulai gencar dilakukan. Pemerintah Sudan mulai mengundang para investor untuk membangun sarana infrastruktur di Khartoum diantaranya proyek *al Mogran Development Project*, pembangunan hotel-hotel berbintang lima, pelabuhan udara internasional, pembangunan jembatan Mc Nimir dan jembatan Tuti. Sudan sangat mengandalkan sektor ekonominya dari energi minyak. Pada pertengahan 1970-an jaringan pipa minyak pertama kali dibangun menuju ke Port Sudan yang berada di Laut Merah sebagai basis ekspor minyak Sudan.

Terpisahnya Sudan Selatan sangat berpengaruh terhadap komoditas energi Sudan, karena sumur minyak banyak terdapat di bagian selatan Sudan yang telah menjadi bagian dari Sudan Selatan. Pembangunan instalasi pendukung pembangunan ekonomi dilaksanakan di sejumlah wilayah seperti *Giad Industrial Complex* di wilayah negara bagian al Jazirah, pembangunan dam Merowe sebagai sarana irigasi pertanian terbesar, *White Nile Sugar Project*, dan eksplorasi minyak di selatan. Sebagai sentra konsentrasi kegiatan ekonomi, Khartoum juga memiliki instalasi penyulingan minyak terbesar selain beberapa sentra manufaktur produk pengolahan makanan dan hasil pertanian, tekstil, dan produk pecah belah.

²⁶ *Historical Background; Khartoum State Information Centre*

5.4.4 Demografi

Merujuk sensus penduduk tahun 2017, penduduk Sudan mencapai lebih dari 42 juta jiwa dengan hampir 70 persen berada di wilayah pedesaan. Konsentrasi pemusatan populasi adalah Khartoum, Omdurman dan Khartoum Utara dengan penduduk mencapai sekitar 6 hingga 7 juta jiwa sebagai lokasi pemusatan kegiatan administrasi pemerintahan, dan perekonomian. Diperkirakan sekitar 79 persen populasi Khartoum adalah masyarakat pendatang yang 74 persen diantaranya datang dari luar Khartoum, khususnya dari wilayah pinggiran dan pedesaan.

Sudan seperti kebanyakan negara-negara Afrika adalah negara yang memiliki banyak suku dan latar belakang sosial-budaya beragam – diperkirakan terdapat sekitar 600 suku di Sudan-. Dari total keseluruhan suku, 70 persen diantaranya memiliki akar sosial-budaya Arab, dan sisanya mengalami asimilasi dan akulturasi seperti Suku Nubia, Koptik dan Beja. Sejumlah suku seperti Masalit dan Zaghawa lebih memiliki kedekatan dengan budaya Arab-Chad yang hingga kini masih mempertahankan karakteristik sosial-budayanya.²⁷

Negara Bagian Khartoum menjadi wilayah dengan diversifikasi ragam sosial-budaya. Di kawasan selatan Khartoum, termasuk Omdurman, dihuni oleh Suku Gamowia dan Kardofani yang melakukan migrasi akibat kekeringan panjang dan desertifikasi di wilayah barat dan timur, khususnya pada dekade 1980-an. Diversifikasi demografis dan sosial juga dibentuk oleh dampak peperangan panjang di selatan dan Darfur sehingga memicu pergerakan demografis dan sosial, yaitu pengungsi internal. Di kawasan utara didiami oleh Suku Shiheinat sebagai mayoritas

²⁷ *World Population Review, 2017*

lokal, dan diikuti Suku Kababish dan Kawahla. Sedangkan di Khartoum dihuni oleh mayoritas Suku Abdallab dan Batahin.

Di kawasan timur Suku Abu Dileig, Batahin dan Kawahla membentuk mayoritas populasi. Mata pencaharian para populasi migran sebagian besar di sektor perdagangan, perbankan, dan pemerintahan, serta jenis-jenis pekerjaan informal. Di pinggiran Khartoum juga terdapat kawasan lahan pertanian yang memasok kebutuhan pangan seperti buah-buahan dan sayuran, serta produk peternakan untuk ibukota Khartoum. Selain itu, juga terdapat sejumlah mata kegiatan ekonomi lain seperti perikanan air tawar, produksi barang kerajinan dan pecah belah.

5.4.5 Politik dan Pemerintahan

Secara umum, seperti di kebanyakan negara yang menganut sistem demokrasi, Sudan memiliki tiga organ pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan Yudikatif. Sistem desentralisasi yang diberlakukan di Sudan telah memberikan ruang kepada wilayah negara-negara bagian untuk menyelenggarakan urusan-urusan tertentu terkait kebutuhan negara bagian seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Terdapat 18 negara bagian, dan tiga daerah otonom –Darfur, Sudan Timur dan wilayah Abyei yang dipimpin oleh Gubernur atau *wali*, serta dilengkapi dengan organ parlemen negara bagian dan kabinet negara bagian.

Gubernur negara bagian ditunjuk oleh Presiden, dan saat ini 18 negara bagian yang ada memiliki 133 distrik. Para pembantu Gubernur layaknya dewan meteri atau kabinet terbagi dalam beberapa posisi substantif yaitu: Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Umum, Menteri Pertanian, Peternakan dan

Pengairan, Menteri Perencanaan Ekonomi dan Keuangan, Menteri Kesejahteraan Sosial dan Budaya, Menteri Urusan Fasilitas Publik dan Infrastruktur serta Menteri Lingkungan Hidup dan Urusan Air.

Sejak tahun 1995 beberapa kelembagaan dewan dibentuk dan dipilih – seperti Dewan Perwakilan Daerah- untuk durasi tiga tahun dan memiliki yurisdiksi untuk melaksanakan fungsi legislasi, mobilisasi politik dan hak-hak sosial-budaya negara bagian. Dewan ini terdiri dari komite-komite khusus yang mengurus isu-isu hukum, keamanan, keuangan dan ekonomi, serta isu-isu sosial budaya. Sistem dan struktur administrasi yang berlaku sekarang adalah hasil perubahan setelah tidak kurang tiga kali mengalami perubahan dalam pemerintahan yang berbeda, khususnya terkait pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan pertama setelah kemerdekaan terjadi tahun 1961 tatkala pemerintah merilis kebijakan bernama *Local Government Act* yang intinya pemerintah memiliki komisioner provinsi yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengepalai administrasi pemerintahan di daerah. Pada masa ini pemerintah pusat masih sangat berpengaruh dalam melakukan kontrol kepada daerah. Tahun 1969 menjadi titik balik karena pemerintah memutuskan menghapus struktur pemerintah daerah. Dua tahun berselang, pemerintah memutuskan untuk membuat the *People's Local Government Act* yang diantaranya mengatur pembentukan dewan komunitas lokal beserta dewan eksekutif yang ada di sepuluh provinsi yang pada prakteknya menjadi tetap menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Sukses pemerintahan melalui sebuah kudeta pada tahun 1985 menjadi pintu masuk untuk melakukan perubahan sistem dan struktur sekali lagi. Kali ini, parlemen memberikan otoritas lebih kepada Dewan Komunitas Daerah (*Regional Community*

Council), dan melakukan reorganisasi kepada fungsi serta wewenang Komisi Provinsi. Enam tahun kemudian tahun 1961 pemberlakuan Dekrit Federal membagi Sudan menjadi enam negara bagian yang di dalamnya termasuk Negara Bagian Khartoum – sementara yang lain adalah Khurdufan, an Nil, Awsat, Istiwai, Shamali, Sharqi dan Bahr al Ghazal. Komisi Publik Regional (*Regional Public Commission*) pada saat bersamaan juga menetapkan pembagian 66 provinsi dan 218 pemerintah daerah setingkat distrik.

Komisi Publik Regional juga berwenang menunjuk gubernur, wakil gubernur, dan dewan menteri daerah di masing-masing negara bagian yang bertanggung-jawab atas jalannya roda pemerintahan daerah dan hal-hal terkait kebijakan ekonomi serta fungsi perencanaan, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.²⁸

Secara administratif, negara bagian Khartoum dibagi menjadi tujuh *localities/ municipalities* yaitu: Khartoum, Jebel Awlia, Khartoum Bahri (Khartoum Utara), Omdurman, Karari, Um Badda dan Shareg al-Niil (Nil Timur). Masing-masing *localities* memiliki tanggung jawab untuk mengurus pelayanan publik, memperkuat ekonomi setempat, dan memfasilitasi partisipasi publik. Terkait hal tersebut terdapat setidaknya sembilan departemen terkait yaitu: Administrasi Umum, Pembangunan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Tata-Kota, Pertanian dan Pangan, Urusan Sosial-Budaya, Kepemudaan dan Olahraga serta Keamanan. Setiap *localities* dikepalai oleh seorang komisioner dan terbagi dalam unit-unit administratif.

²⁸ *Encyclopedia.com*

Gambar 5.14
Simbol Khartoum



5.4.6 Potensi Sosial dan Ekonomi

Seperti umumnya negara berkembang, Sudan juga bertumpu pada sektor pertanian untuk pembangunan ekonomi –sekitar 90 persen ekspor. Letak negara bagian Khartoum yang ada di sisi Sungai Nil Biru dan Nil Putih sangat ideal untuk produksi pertanian dan tanaman pangan. Sektor pertanian menjadi andalan Khartoum dalam masa hampir enam dekade.

Sejak tahun 1958 lahan pertanian meluas 172 hektar setiap tahunnya. Negara bagian Khartoum sangat subur, sehingga lahan pertanian yang dimilikinya mencapai hampir 40 persen dari total keseluruhan lahan pertanian secara nasional, termasuk lahan untuk peternakan dan perikanan darat. Wilayah negara bagian Khartoum memiliki sejumlah proyek pengembangan pertanian diantaranya Proyek Sulait, Proyek Soba Timur, Proyek al Khogalab, dan Proyek Kuku untuk peternakan. Sedangkan proyek-proyek sejenis terkait dengan kebijakan pengembangan varian buah-buahan diantaranya Proyek al Gumulia, al Waha, al Ferdous dan proyek pertanian Sondos. Di kawasan Nil Timur (*Shareq al Nii*) terdapat empat proyek pertanian besar seperti halnya di Karari, Jirof, Abu Salih dan Khartoum Bahri.

Komoditas pertanian potensial yang menjadi andalan adalah kapas, kacang-kacangan, minyak goreng sekaligus menjadi ekspor utama.

Selain itu juga terdapat komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik yaitu gandum dan sorgum. Seperti halnya pertanian, peternakan juga memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi Sudan seperti sapi, domba, dan onta yang menjadi komoditas ekspor ke sekitar Timur Tengah. Meskipun demikian, secara keseluruhan Sudan masih sangat bergantung dari luar negeri untuk ketersediaan pangan nasional. Persoalan yang dihadapi memiliki kesamaan dengan kebanyakan negara berkembang yaitu keamanan investasi, ketersediaan infrastruktur transportasi untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan, dan kualitas produksi.

Dalam catatan statistik nasional, Sudan memiliki lahan potensial sebesar kurang lebih 80 juta hektar lebih, namun hanya sekitar 20 persen yang termanfaatkan. Dalam lima tahun belakangan Pemerintah Sudan mencoba untuk mengeluarkan kebijakan ketahanan pangan dengan fokus kemandirian pangan untuk mencukupi kebutuhan nasional. Sebagai negara dengan cakupan lahan pertanian yang termasuk paling luas di Timur Tengah dan Afrika Utara –sekitar 45 persen dari keseluruhan Timur Tengah- dan aliran Sungai Nil sebagai basis asupan air untuk lahan pertanian maka seharusnya Sudan sudah dapat merealisasi keinginan untuk ketahanan dan kemandirian pangan. Sudan juga menjadi salah satu eksportir garment dan konveksi terbesar di Timur Tengah, demikian pula dengan tebu untuk bahan pembuatan gula pasir, kurma, kacang-kacangan, kopi, mangga, tomat, mangga, dan juga tembakau. Sudan juga menjadi eksportir terbesar ketiga untuk minyak sayur dan minyak goreng setelah India dan China.

Dalam rilis data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi dan Perdagangan Sudan, komoditi kapas menghasilkan pemasukan utama bagi devisa nasional dengan rata-rata produksi mencapai 180 ribu ton, kemudian juga hasil pertanian kacang-kacangan sebesar satu juta ton, tebu mencapai 6 juta ton, kurma sekitar 200 ribu ton, dan sejumlah produk buah-buahan.²⁹

Sementara untuk sektor **Industri**, Negara Bagian Khartoum adalah kompleks industri terbesar di Sudan sehingga menjadi wilayah sandaran ekonomi nasional dengan kontribusi rata-rata mencapai angka sekitar 17-18 persen total ekonomi nasional dengan rincian sembilan jenis industri: industri bahan makanan, industri minyak goreng, industri sepatu dan penyamakan kulit, industri konveksi, industri farmasi dan parfum, industri petrokimia, industri tepung dan industri peternakan.³⁰ Sektor industri juga didominasi oleh industri pengolahan makanan dan hasil pertanian, kemudian disusul perakitan barang-barang elektronik, plastik, alat-alat rumah tangga, produksi gula, produksi daging olahan, semen, minyak goreng, dan sepatu.

Sebagai konsekuensi dari posisi sebagai salah satu tujuan pelayanan medis dan pengobatan, Sudan saat ini tercatat menjadi sentra industri obat dan medis di Afrika yang mampu mencukupi sekitar 70 persen kebutuhan di kawasan.³¹ Potensi industri berat juga ditemui seperti industri perakitan mobil dan truk, juga industri militer. Salah satu industri pertahanan terkemuka Perancis, GIAD, memiliki unit produksi di Sudan untuk pasar Afrika Timur dan sebagian Timur Tengah.

²⁹ *Sudan Data Portal – Socio-Economic Database of Sudan, 2015-2016*

³⁰ *Sudan Data Portal – Socio-Economic Database of Sudan, 2015-2016; Socio-Economic Studies of Business Opportunities*

³¹ *Sudan Data Portal – Socio-Economic Database of Sudan, 2015-2016; Socio-Economic Studies of Business Opportunities*

Dari Sektor **Pertambangan**, Untuk bidang energi dan pertambangan, emas dan minyak bumi masih menjadi produk andalan. Emas menjadi komoditas utama dengan produksi rata-rata mencapai lebih dari 30 ton per tahun, sehingga menarik banyak investor dari luar negeri, termasuk khususnya dari Eropa. Hasil-hasil pertambangan dan mineral lainnya yang menjadi komoditas ekspor adalah tembaga, bijih besi, tungsten, seng, kaolin, mica, asbestos, dan chromium. Pada tahun 2012 silam, Presiden Omar Hassan Bashir telah meresmikan instalasi penyaringan emas terbesar di kawasan Afrika dan mampu melakukan produksi sebesar rata-rata 300 ton per tahunnya. Pembangunan instalasi penyaringan emas ini menjadi bagian ambisi Sudan untuk menutupi kehilangan potensi pendapatan nasional dari minyak bumi setelah terlepasnya Sudan Selatan menjadi negara sendiri sejak tahun 2011. Instalasi ini juga dapat melakukan proses penyaringan produk perak yang bersama-sama emas diharapkan dapat menjadi hasil mineral utama Sudan.

Minyak bumi telah menjadi bagian dari ekonomi Sudan sejak dekade 1970-an sehingga menjadi andalan devisa Sudan – sekitar 80 persen ekspor Sudan - dengan ekspor ke sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia. Terpisahnya Sudan Selatan cukup mengurangi kapasitas produksi Sudan, karena sebagian lokasi tambang dan kilang minyak bumi terdapat di sejumlah wilayah yang sekarang termasuk Sudan Selatan seperti Muglad, Melut dan Heglig.³² Namun demikian, Sudan Selatan masih menggantungkan proses pengiriman dan pengolahan minyak bumi kepada Sudan. Jalur pipa minyak terbesar sepanjang 1600 kilometer menuju

³² *Sudan Data Portal – Socio-Economic Database of Sudan, 2015-2016; Socio-Economic Studies of Bussiness Opportunities*

Port Sudan harus melewati wilayah negara bagian Khartoum, demikian pula dengan instalasi penyulingan yang tersentra di Khartoum yang dikenal sebagai 'Nile Blend' yang mampu melakukan produksi hingga 100 ribu barel per hari.

Instalasi penyulingan lain terdapat di Port Sudan yang dikenal sebagai 'Dar Blend' dengan kapasitas produksi mencapai 25 ribu barel per hari. Untuk pengolahan produk minyak bumi dan sarana infrastruktur eksplorasi hingga transportasi, Petrochina dan Petronas diberikan hak untuk memegang konsesi. Di wilayah negara bagian Khartoum terdapat beberapa instalasi pengolahan minyak seperti di Sharja, Khartoum *Locality*, al Jaili, dan Khartoum Bahri.

Potensi lainnya adalah **Pariwisata**, Kekayaan sejarah dan sebagai negara terbesar di Dunia Arab menjadi instrumen pariwisata Sudan. Kedekatan sejarah dengan Mesir kuno dan peradaban Nubia kuno adalah situs pariwisata yang banyak ditawarkan oleh Sudan, khususnya bagi pasar pariwisata di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya, termasuk para turis Eropa. Pembangunan infrastruktur pariwisata sangat intensif dalam lima tahun belakangan seiring dengan usainya hingar bingar peperangan dan konflik bersenjata. Pemerintah Sudan juga sangat membuka diri terhadap investasi di sektor pariwisata.

5.5 PROVINSI SOUSS MASSA, Maroko

5.5.1 Gambaran Umum

Wilayah Sous-Massa adalah wilayah bentukan baru yang sebelumnya menjadi salah satu bagian dari 16 wilayah Marokko dari tahun 1997-2015. Wilayah ini seluas kurang lebih 71 ribu kilometer persegi ini beribukota di Agadir, salah satu kota historis Marokko dengan jumlah total populasi sekitar 3,7 juta jiwa. Terbentuk

pada Bulan September 2015 melalui penggabungan wilayah Provinsi Tata –bekas wilayah Guelmim-Es Samara, dengan lima provinsi yang sebelumnya adalah bagian wilayah Sous-Massa-Draa.

Gambar 5.15
Peta Sous-Massa



5.5.2 Letak Geografis

Wilayah Sous-Massa berbatasan dengan wilayah Marrakesh-Safi di sebelah utara; Draa Tafilalet di timur laut; Guelmim-Oued Noun di sebelah barat daya. Di sebelah tenggara berbatasan dengan Provinsi Tindouf yang menjadi wilayah Aljasair. Wilayah ini juga menghadap dan bertepian dengan Lautan Atlantik, dan ada di sisi atau pinggirannya Pegunungan Atlas dan di sepanjang bagian utaranya dibentengi oleh Taman Nasional Sous-Massa dan Toubkal. Wilayah Sous-Massa terletak di bagian tengah Kerajaan Marokko yang berbatasan dengan wilayah Prefektur Agadir Ida-Ou Tanane dan Inezgane-Ait Melloul, kemudian dengan Provinsi Tiznit, Taroudant, Ouarzazate, Zagora dan Chtouka-Ait Baha. Secara

administratif Wilayah Suss-Massa dibagi menjadi beberapa provinsi dan prefecture yaitu:³³

- Prefectur Agadir-Ida-Ou Tanane (menjadi bagian Suss-Massa)
- Préfectur Inezgane-Ait Melloul (menjadi bagian Suss-Massa)
- Provinsi Chtouka Ait Baha Province (menjadi bagian Suss-Massa)
- Provinsi Ouarzazate (menjadi bagian Draa-Tafilalet)
- Provinsi Sidi Ifni (menjadi bagian Guelmim-Oued Noun)
- Provinsi Taroudant (menjadi bagian Suss-Massa)
- Provinsi Tinghir (menjadi bagian Draa-Tafilalet)
- Provinsi Tiznit (menjadi bagian Suss-Massa)
- Provinsi Zagora (menjadi bagian Drâa-Tafilalet)

5.5.3 Sejarah Singkat

Tidak ada catatan sejarah spesifik Wilayah Sous-Massa. Oleh karena itu, pada bagian ulasan singkat sejarah diintegrasikan dengan sejarah nasional Kerajaan Marokko. Sejak 1912 hingga 1956, Maroko dibagi menjadi zona Prancis dan Spanyol. Tak lama kemudian Raja Maroko Sultan Mohammed V kembali ke negara yang memiliki nama resmi *al Mamlaka al Maghribiya*, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *the Western Kingdom* itu dari pengasingannya di Madagaskar.

Pada tahun 1956 seiring dengan proses dekolonisasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan kebangkitan nasionalisme bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, Marokko mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Perancis yang diikuti

³³ *Portail National des Collectivites Territoriales, 2015*

oleh penarikan Spanyol secara politik dan administratif dari Marokko. Seperti yang telah diketahui bahwa Perancis dan Spanyol membagi wilayah Marokko sebagai wilayah koloni –Spanyol mendapatkan wilayah Sahara.

5.5.4 Politik dan Pemerintahan

Maroko berbentuk monarki konstitusional dengan kepala negara yang dipimpin oleh raja. Negara ini berbeda dibanding negara-negara Afrika kebanyakan dengan menganut sistem kerajaan seperti halnya Spanyol. Raja dikenal sebagai figur karismatis yang populis sehingga situasi politik di Marokko relatif stabil di tengah bergolaknya Timur Tengah dari Tunisia hingga Suriah dan Yaman.

Raja juga merupakan pimpinan tertinggi militer, dan memegang gelar *Amir al-Moukminin* atau pemimpin bagi muslimin Maroko, atau sebagai pemimpin agama. Kepala Pemerintahan ditunjuk oleh Raja dari partai dengan suara terbesar di pemilu legislatif. Parlemen Maroko terdiri dari dua Majelis, yaitu *Majelis An Nuwwab/ House of Representatives* (Majelis Rendah) yang terdiri dari 395 anggota dan dipilih dalam sebuah pilihan langsung untuk masa tugas selama lima tahun; Majelis *Al Mustasharin/House of Councillors* (Majelis Tinggi) yang beranggotakan 120 orang yang dipilih dalam periode enam tahun dalam sebuah pilihan tak langsung.³⁴

Wilayah Sous-Massa dipimpin oleh seorang Presiden Dewan Regional seperti sebelas wilayah lainnya di Marokko. Sebagai salah satu dari dua belas kawasan atau wilayah, sesuai struktur administratif, Sous-Massa terbagi menjadi provinsi dan prefektur yang di dalamnya memiliki apa yang dinamakan *arrondissement (metropolitan area)*, *municipality* atau setingkat kota/kabupaten, dan

³⁴ *Regions of Marocco, Law Gwillim, 2015*

distrik atau setingkat dengan kecamatan. Setiap distrik terbagi menjadi lebih kecil yang dinamakan *commune rurale* atau kelurahan. Sistem administrasi pemerintahan Marokko memiliki bentuk similar kombinasi Perancis-Spanyol. Bentuk pemerintahan mengikuti monarkhi konstitusional, -seperti Spanyol- dan menjadi satu-satunya di kawasan Timur Tengah serta Afrika Utara. Sedangkan penjabaran praktis bentuk dan struktur pemerintahan mengikuti Perancis, juga dalam implementasi pembagian struktur administratif.

5.5.5 Potensi Sosial dan Ekonomi

Dimensi bisnis kawasan atau wilayah terkait bagaimana mengupayakan daya tarik dan daya saing dapat dibedakan atas tiga dimensi utama yaitu: **pertama**, dimensi residensial yang terkait bagaimana masyarakat memilih hunian berdasarkan sejumlah kriteria terkait seperti tingkat kenyamanan, tingkat keamanan, kemudahan dalam berusaha, adanya tempat tinggal yang layak dan sebagainya; **kedua**, dimensi komersial dan investasi terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, pasar yang sehat dengan indikator produksi maksimal, distribusi yang kuat, dan daya beli yang cenderung tinggi, dan; **ketiga**, dimensi pariwisata atau turisme yang terkait indikator dan parameter keamanan, stabilitas dan ketertiban dan lain sebagainya.

Dalam kasus Sous-Massa, wilayah tersebut koheren dengan tiga dimensi dimaksud. Wilayah Sous-Massa adalah penggerak kemajuan ekonomi Kerajaan Marokko. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Ekonomi dan Keuangan Marokko, wilayah Sous-Massa mampu memberikan kontribusi antara 13-15 persen total *GDP* Marokko meski wilayahnya hanya kurang lebih 10 persen dari luas total wilayah, dan populasinya juga hanya sekitar 10 persen total populasi.

Wilayah Sous-Massa adalah sentra ekonomi nasional yang memiliki tiga potensi prioritas yaitu pertanian, perikanan, dan pariwisata, Sedangkan, sektor industri dan jasa menjadi bagian penolong bagi tiga sektor utama. Tiga potensi ekonomi dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut: **pertanian** dengan konsentrasi di bagian barat laut; industri pertanian dan produk **perikanan** yang juga terletak di kawasan yang sama; dan, **pariwisata** yang situs utamanya di ibukota Agadir, Tiznit, Zagora dan Ouarzazate. Wilayah Sous Massa sangat mengandalkan sektor pertanian, dan dari sektor ini Sous Massa menjadi kawasan paling utama penghasil produk pertanian Marokko dengan total domestik bruto sekitar 18 persen keseluruhan secara nasional, dan lahan pertanian produktif sebesar 451.165 hektar.

Sektor pertanian Sous Massa menjadi bagian dari proyek nasional 'Marokko Hijau' –*le Plan Maroc Vert*- melalui instalasi-intalasi pendukung pengairan atau irigasi yang disebut perimeter *el Guerdane* –Program Ekonomi dan Pengairan Nasional, dan program pengembangan produk setempat. Pengembangan dan penguatan sektor pertanian setempat ditandai dengan beroperasinya *Agropole Agadir* dengan ambisi menciptakan platform regional untuk transformasi, komersialisasi dan distribusi produk-produk pertanian. Dalam proyek ini juga akan dibangun pusat pelayanan usaha kecil-menengah bidang pertanian, laboratorium dan pusat riset pertanian.³⁵

³⁵ Sumber: Situs Wilayah Sous-Massa – Kerajaan Marokko; *Morocco Bussiness News –Centre Marocain de Conjoncture*, 2016; *Anima Investment Network – Ensemble pour une Mediteranee Competitive*; *Morocco Data Portal (20150-2016)*

Kembali kepada kebijakan nasional *le Plan Maroc Vert* –Marokko hijau- yang menjadikan sektor pertanian salah satu ujung tombaknya, maka pemerintah Sous-Massa mencanangkan sejumlah langkah berikut:

- Mengupayakan sektor pertanian yang dinamis dan berkembang sesuai dengan spesifikasinya;
- Menekankan pada kemajuan dengan penguatan nilai potensial yang lebih baik atas produk pertanian;
- Menciptakan keseimbangan sektor sosial-ekonomi dalam menghadapi era persaingan global;
- Menyesuaikan dengan dinamika pergerakan sistem pertanian global dengan penekanan bahwa pembangunan pertanian modern akan disesuaikan dengan aturan main di pasar, iklim investasi sektor swasta, dan model-model baru dalam sistem pertanian modern. Terkait dengan fungsi sosial sektor pertanian, hal ini akan diarahkan untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan, meningkatkan bantuan kepada para petani untuk meningkatkan produk mereka, khususnya mereka yang *peripheric zone*.

Terkait target dan langkah tersebut, otoritas juga menekankan pada peran penting kenaikan produk pertanian dalam rangka mengurangi jumlah kemiskinan; Pelibatan investor dan eksportir swasta; Perang melawan kemiskinan secara lebih efektif; Peningkatan kekuatan daya beli dan kualitas produk Marokko pada pasar bebas, dan; Menyeimbangkan kembali defisit jangka pandang produk-produk pertanian. Sous-Massa secara tradisional memiliki potensi yang sangat besar untuk perikanan laut karena letak secara geografis yang ada di tepi Samudera Atlantik dengan panjang hampir 200 kilometer. Wilayah Sous-Massa berada pada peringkat

pertama penghasil produk perikanan laut secara nasional, dan termasuk yang ketiga terbesar pada total volume produksi. Sektor ini juga mempekerjakan hampir sekitar 700 ribu pekerja baik yang bersifat langsung maupun tak langsung, dengan sekitar 700 kapal serta 1450 unit usaha kecil-menengah di bidang perikanan yang sebanding dengan pendapatan daerah sebesar 6 persen, dan 42 persen nasional.³⁶

Souss-Massa juga memiliki kapasitas industri yang potensial Situs terkenal untuk kegiatan ekonomi perikanan laut di Sous-Massa adalah Parc Haliopolis yang memiliki area skitar 150 hektar yang di dalamnya terdapat unit industri pengolahan hasil laut, pelayanan kesehatan fauna laut, logistik dan penyimpanan hasil laut, pelayanan komersial, transportasi dan sebagainya. Potensi pariwisata di Marokko, termasuk di Sous-Massa sangat populer dan diminati, khususnya dari Eropa dan sekitarnya dengan jumlah kunjungan wisata rata-rata lebih dari satu juta wisatawan tiap tahunnya –jumlah yang cukup besar untuk wilayah sebesar Sous-Massa. Sektor pariwisata didukung oleh iklim yang menyenangkan dengan temperatur sedang, ditambah dengan potensi kekayaan tradisional, dan banyaknya tempat yang atraktif dan menarik minat para pelancong untuk berkunjung dan berlibur.

Wisata yang paling diminati adalah wisata pantai yang terletak di Agadir tempat yang juga memiliki kawasan wisata yang menarik untuk kegiatan olah raga alam. Terdapat sekitar 2500 hotel dari berbagai kategori dengan hampir 40 ribu

³⁶ Sumber: Situs Wilayah Sous-Massa – Kerajaan Marokko; *Morocco Bussiness News –Centre Marocain de Conjoncture*, 2016; *Anima Investment Network – Ensemble pour une Mediteranee Competitive*; *Morocco Data Portal (20150-2016)*

kamar. Aktifitas dan sektor pariwisata menyedot sekitar 120 ribu pekerja.³⁷ Sous-Massa juga memiliki tempat untuk eko-turisme dengan kawasan yang memiliki kontur pegunungan dan gurun pasir yang membentang dari wilayah utara ke selatan. Selain Agadir, situs destinasi wisata Sous-Massa juga terdapat di Lembah Draa, Zagora, dan Ouarzazate dengan berbagai sajian wisata menarik seperti Kasbah, Ait Benhaddou, Benteng Almoravid dan sebagainya.

Potensi bidang industri berkisar khususnya industri pertanian, pengolahan pangan, industri kimia dan petrokimia yang tersebar di beberapa tempat seperti Agadir, Ida Outanane, Tiznit Inezgane dan Ait Melloul. Terdapat tidak kurang 450 unit industri dan manufaktur di wilayah ini yang mempekerjakan sekitar 35 ribu pekerja. Untuk industri pertanian dan pangan, Sous-Massa menempati peringkat dua nasional setelah Casablanca, sedangkan potensi industri kimia dan petrokimia mencapai 24 persen dari total industri regional. Dalam rangka mempercepat pengembangan sektor industri, Sous-Massa memulai untuk membangun kawasan-kawasan industri baru di Ouled Teima dan Sidi Bidi serta di Tassila, Ait Melloul dan Tiznit.

Produk tradisional budaya Sous-Massa juga sangat menonjol dan memiliki karakteristik eksklusif. Produk setempat menjadi representasi produk budaya Amazighs, utamanya produk batu mulia yang khas dari wilayah ini yaitu batu permata Tiznit dan berbagai pernik-pernik kerajinan budaya, termasuk kain/ pakaian dengan motif tradisional asli Sous-Massa. Terdapat hampir sepuluh ribu unit usaha

³⁷ Sumber: Situs Wilayah Sous-Massa – Kerajaan Marokko; *Morocco Business News –Centre Marocain de Conjoncture, 2016; Anima Investment Network – Ensemble pour une Mediteranee Competitive: Morocco Data Portal (20150-2016)*

kerajinan lokal dengan jumlah tenaga sekitar 22 ribu pekerja. Untuk memperkuat dan mengembangkan potensi sosial ekonomi setempat, sejak tahun 2011 Pemerintah Sous-Massa merancang strategi pengembangan ekonomi regional melalui penguatan sektor produksi kerajinan lokal dalam wadah usaha kecil-menengah, membangun tempat atau wadah produksi dan pemasaran terpadu, memberikan sentuhan teknologi produksi, memberikan labelisasi yang sangat khas sebagai produk asli setempat. Beberapa alasan untuk berinvestasi di dan bermitra dengan Sous-Massa:³⁸

- Cuaca yang relatif sejuk – **faktor klimatologis;**
- Memiliki hub logistik dan letak antara Afrika, Eropa, Timur Tengah dan Afrika – **faktor geografis;**
- Interkoneksi dan fasilitas infrastruktur serta transportasi yang baik - **infrastruktur;**
- Kaya akan potensi sosial-budaya/ warisan budaya dan sejarah – **kekayaan sejarah-budaya;**
- Tingkat kompetitif peringkat satu untuk sektor primer termasuk pertanian, dan peringkat ketiga untuk produk tertier (nomor satu di Marokko untuk strategi pengembangan ekonomi dan nomor satu untuk iklim usaha dan investasi menurut Bank Dunia) – **daya saing;**
- Visi dan misi pengembangan ekonomi oleh pemerintah setempat – **komitmen dan kebijakan publik;**

³⁸ Sumber: Situs Wilayah Sous-Massa – Kerajaan Marokko; *Morocco Bussiness News –Centre Marocain de Conjoncture, 2016; Anima Investment Network – Ensemble pour une Mediteranee Competitive: Morocco Data Portal (20150-2016)*

- **Dinamika sosial- budaya;**
- **Infrastruktur telekomunikasi plus potensi lahan pertanian** untuk industri, seperti di Sidi Bidi (322 hektar), Tiznit (75 hektar), Ouled Teima (21 hektar), Ouarzazate (34 hektar), Parc Haliopolis (150 hektar); proyek dan potensi pariwisata.³⁹

Untuk melihat potensi Wilayah Soss Massa secara komprehensif, telah ada studi akademik yang proses pembuatannya selama lima tahun -2010-2015-, terkait berjudul *'Territory Attractiveness: Case of Souss-Massa-Draa Region'* yang dibuat oleh tim dari *National School of Trade and Management, Universitas Ibn-Zohr, Agadir* dan menjadi referensi lembaga promosi dan investasi Marokko.⁴⁰ Analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- **Kekuatan (*strength*)**– usaha kecil menengah tradisional yang kuat; jaringan kemitraan yang kuat; konsolidasi yang kuat antara sektor-sektor kunci dalam hal ini adalah sektor pertanian, perikanan, pariwisata; kekayaan sosial-budaya setempat dengan produk-produk yang khas;
- **Kelemahan (*Weakness*)** – kurangnya tenaga kerja yang berkualitas; ketergantungan yang kuat pada tiga sektor tradisional tersebut; nilai yang relatif rendah untuk kualitas produk dan pelayanan;
- **Ancaman (*threats*)** – akses sumber air pertanian; tekanan terhadap sektor tradisional (tambang dan industri perikanan); kerusakan wilayah pantai;

³⁹ Sumber: Situs Wilayah Sous-Massa – Kerajaan Marokko; *Morocco Bussiness News –Centre Marocain de Conjoncture, 2016*; *Anima Investment Network – Ensemble pour une Mediteranee Competitive: Morocco Data Portal (20150-2016)*

⁴⁰ Hicham Mohammed HAMRI; Ouafae ZEROUALI OUARITI; Abdelouahab SADIQUI

kurangnya aliran investasi dan kompetisi terbuka yang semakin tajam dengan Casablanca, Marrakesh, Tangiers dan wilayah lain di dunia;

- **Kesempatan (*Opportunity*)** –infrastruktur yang baik plus sarana transportasi, logistik, cinema, agroteknologi, usaha lepas pantai, energi, diversifikasi wisata.

Menurut data yang dilansir Kementerian Ekonomi Marokko, Wilayah Sous-Massa menempati peringkat kedua penyumbang *GDP* terbesar –sekitar hampir 13 persen meski hanya merepresentasikan 10 persen total wilayah dengan populasi 3 juta jiwa. Sous-Massa menempati peringkat kedua untuk infrastruktur transportasi pelabuhan laut, dan peringkat ketiga untuk pelabuhan udara penghubung. Terkait dengan implementasi rencana strategi pengembangan ekonomi Sous-Massa secara berkelanjutan, terdapat empat hal pokok sebagai berikut yaitu: ⁴¹

- **Pertama**, posisi Sous-Massa sebagai sentra ekonomi kedua terbesar di Marokko dengan tiga sektor utama penggerak yaitu pertanian, perikanan dan pariwisata. Sektor pertanian meakukan upaya konsolidasi pada ekspor sayuran, bunga, buah-buahan yang didampingi oleh penguatan riset pertanian; melakukan percepatan upaya pengembangan produksi berbasis pertumbuhan volume produksi dan peningkatan kualitas produk perikanan lokal; menambah kapasitas sektor pariwisata khususnya kapabilitas produk animasi. Ketiga sektor prioritas tersebut akan didukung oleh peningkatan kualitas layanan, industri kerajinan lokal melalui resturukturisasi sektor-sektor

⁴¹ Faktor-faktor penentu daya tarik suatu wilayah atau daerah adalah: atmosfer keuangan dan ekonomi; sumber daya manusia; kemampuan dan kapasitas organisasi dan elemen yang terkait dengan dunia ekonomi; kualitas hidup yang dalam hal ini termasuk lingkungan hidup; image/kesan dan persepsi terhadap wilayah.

pilihan –karpet dan batu-batu permata-, plus upaya pembangunan dan modernisasi layanan serta distribusi;

- **Kedua**, Wilayah Sous-Massa juga memberikan perhatian ekstra pada peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan yang menempati peringkat tiga tingkat nasional dalam rangka untuk mendongkrak kemampuan sumber daya manusia melalui langkah-langkah inovatif. Selain itu diupayakan pula untuk optimalisasi pengentasan kemiskinan dan hal-hal terkait dengan keamanan publik;
- **Ketiga**, mengupayakan penguatan posisi Sous-Massa sebagai representasi budaya nasional, dan warisan serta cagar alam nasional, termasuk terkait hal konservasi alam dan lingkungan hidup. Langkah praktis yang dilakukan terkait hal ketiga adalah menciptakan manajemen sumber daya air yang lebih baik dengan daya serap yang baik pula untuk mengatasi defisit air; upaya melawan desertifikasi melalui penanaman pohon dan memelihara sumber-sumber mata air oase; menerapkan kebijakan pencegahan kerusakan alam dan eko-sistem melalui upaya pemeliharaan dan peningkatan daya tarik wilayah –Kasbah dan Igoudars-;
- **Keempat**, membuka wilayah meningkatkan daya tarik wilayah melalui upaya peningkatan daya saing penyediaan logistik –termasuk penyelesaian jalur Marrakech-Ouarzazate; memperkuat hubungan/konektivitas melalui udara dengan wilayah-wilayah pelosok; mendesain ulang sistem logistik wilayah termasuk pelabuhan Agadir, termasuk secara komprehensif dalam perencanaan besar Kota Agadir sebagai kota bisnis.

5.6 KOTA METROPOLITAN INCHEON, KOREA SELATAN

5.6.1 Gambaran Umum

Incheon adalah kota metropolitan dan pelabuhan utama di pesisir barat Korea Selatan. Letak astronomis 37°29' LU 126°38' BT. Kota terbesar ketiga di Korea Selatan setelah Seoul dan Busan, Incheon adalah kota penting yang berfungsi sebagai kota pelabuhan dan transportasi di Asia Timur Laut.

Dalam bidang ekonomi, Incheon adalah salah satu kota penting dari dua Zona Ekonomi Bebas Korea Selatan. Incheon berfungsi sebagai zona bisnis dan finansial bersama dengan Zona Ekonomi Bebas Busan-Jinhae. Wilayah Incheon memiliki 42 buah pulau berpenghuni dan 112 tak berpenghuni. Pulau-pulau utama dihubungkan dengan jembatan, antara lain *Pulau Yongyu*, *Yeongheung* dan *Seonjae*. Pulau-pulau yang lebih jauh antara lain Pulau Baengnyeong, Yeonpyeong dan Daecheong. Incheon adalah satu-satunya kota di Korea yang memiliki pecinan. Orang Tionghoa pertama kali datang ke Incheon sejak tahun 1800-an, sejak Korea mulai membuka diri kepada dunia luar.

5.6.2 Letak Geografis

Secara geografis, Incheon Metropolitan City terletak pada 126 ° 37'E, 37 ° 28'N. Letak geografis tersebut menjadikan kota ini tepat berada ditengah-tengah Semenanjung Korea dan menghadap langsung ke Laut Kuning serta sungai Hangang. Incheon merupakan kota terbesar ketiga di Korea Selatan setelah Seoul dan Busan yang berpenduduk lebih dari 2,9 juta jiwa, Seperti yang telah diuraikan diatas Incheon adalah kota penting yang berfungsi sebagai kota pelabuhan dan transportasi di Asia Timur Laut. Karena letaknya yang berada di pesisir pantai, maka

suhu udara di Incheon Metropolitan City rata-rata 12.1 °C dengan suhu tertinggi biasanya terjadi pada bulan Agustus setiap tahunnya dengan temperatur tertinggi mencapai 38.9 °C dan suhu terendah tercatat pada bulan Januari, yaitu -22.0 °C.

Gambar 5.16
Peta Incheon



Luas wilayah Incheon Metropolitan City per 31 Januari 2015 mencapai 1,046.807 km². Luas wilayah tersebut dihuni oleh 2,836,080 penduduk dengan rincian 1,427,719 penduduk laki-laki dan 1,408,361 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk kota ini per tahun 2012 mencapai angka 2,59/km². Incheon merupakan kota ketiga terbesar di Korea Selatan.

5.6.3 Sejarah Singkat

Pada masa rezim kerajaan Goguryeo (475 SM) yang dipimpin oleh Raja Jangsu, Incheon merupakan daerah administratif distrik yang dikenal dengan nama 'Marsoholhyeon'. Setelah kerajaan Shilla menggabungkan tiga buah kerajaan, maka distrik tersebut berganti nama menjadi 'Soseonghyeon' dengan menggunakan huruf Kanji Cina selama kerajaan Shilla dipimpin oleh raja Gyeongdeok.

Pada periode Dinasti Joseon, tepatnya tanggal 15 Oktober 1413, masa pemerintahan Raja Taejong, ditingkatkan menjadi Kabupaten Incheon. Pada periode keenam masa pemerintahan Raja Sejo (1455-1468), status Kabupaten Incheon ditingkatkan menjadi Kota Incheon. Pada akhir periode Joseon, Incheon dijadikan sebagai kota pelabuhan yang bernama *Jemulpo*. Jemulpo berperan sebagai pintu masuk para pedagang dan orang asing ke Korea.

Pada saat ini pula jaringan telepon dan kereta api pertama kali dibuat di Korea. Setelah penjajahan Jepang berakhir, statusnya berubah menjadi kota otonomi. Pada tahun 1960-an dan 1970-an kota ini berfungsi sebagai salah satu pusat industri penting. Lalu, pada tahun 1981 dijadikan pemerintah sebagai kota khusus. Setelah beberapa kali berganti nama, distrik ini mengubah nama wilayahnya setelah adanya perintah dari raja Taejong untuk menambahkan kata 'gun' dan 'hyeon' bagi tiap daerah administratif di bawah 'dohobu' dengan kata 'ju' dan 'san' (gunung) atau 'cheon' (sungai). Dengan adanya perintah tersebut, maka 'Inju' berganti nama menjadi 'Incheon' sampai dengan saat ini. Tabel di bawah ini merupakan sejarah singkat terbentuknya kota Metropolitan Incheon dari masa ke masa.

Tabel 5.1
Sejarah Incheon Metropolitan City⁴²

TAHUN	KETERANGAN
1400	15 Oktober 1413 diganti nama dari 「Inju」 ke 「Incheon-gun」 Raja Taejong dari Joseo selama 13 tahun
1800	883. 10 distrik 'myeon (setingkat kabupaten)' termasuk 'Bunae', 'Meonugeum', 'Juan', 'Namchon', 'Jodong', 'Shinhyeon', 'Hwangdeungcheon', 'Jeonban', 'Yipo' Dan 'Daso' diintegrasikan ke dalam Incheon saat Joseon membuka diri terhadap orang asing. 23 Mei 1895 Incheon-bu didirikan pada saat sistem 'Buje' mulai diterapkan.
1910	1 April 1914 Bagian dari Incheon-bu dan Bupyeong-gun terintegrasi untuk mendirikan Bucheon-gun 1 September 1914 Pulau Wolmido tergabung dalam Incheon-bu 1 Oktober 1936 Bagian dari Daju-myeon dan Munhak-myeon di Bucheon-gun dimasukkan ke dalam Incheon-bu.
1940	1 April 1940 empat distrik Myeon termasuk Munhak, Namdong, Bunae, dan Seogot di Bucheon-gun terintegrasi ke dalam Incheon-bu. 15 Agustus 1949 Berganti nama dari Incheon-bu ke Incheon-si setelah diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
1960	1 Januari 1963 pulau Jakyakdo di Bucheon-gun dimasukkan ke dalam Incheon-si. 1 Januari 1968 empat distrik administratif dibentuk, yaitu distrik Jung-gu, Nam-gu, Dong-gu, dan Buk-gu sebagai akibat dari diberlakukannya sistem 'Guje'. <ul style="list-style-type: none"> • Songwol-dong di bawah yurisdiksi kantor lokal wilayah Utara diintegrasikan ke dalam kantor wilayah Timur untuk mendirikan Jung-gu. • Kantor lokal wilayah Utara dan kantor daerah Timur terintegrasi untuk mendirikan Dong-gu. • Empat kantor lokal di Nambu, Juan, Munhak, Namdong terintegrasi untuk mendirikan Nam-gu. • Kantor lokal Bupyeong dan kantor lokal Seogot diintegrasikan untuk mendirikan Buk-gu. • Tujuh distrik administratif (administratif distrik) distrik yang didirikan termasuk kantor lokal Namdong dan kantor lokal Seogot. "4 kabupaten, 2 kantor lokal, 66 kabupaten".
1970	1 Juli 1973 Pulau Wolmido di Dong-gu tergabung dalam Jung-gu.
1980	1 Juli 1981 Berpisah dari Provinsi Gyeonggi dan diubah menjadi kota yang berada dalam pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. 1 Januari 1989 3 distrik Myeon dari Provinsi Gyeonggi diintegrasikan ke dalam Kota Incheon.
1990	1 Januari 1995 Berganti nama dari Incheon Directly Governed City menjadi Incheon Metropolitan City. 1 Maret 1995 Penataan kembali wilayah Kota dan Provinsi. 10 Oktober ~ 10 November 1998 Penggabungan kabupaten dong kecil (dikurangi menjadi 1 distrik eup, 19 distrik myeon, 116 kabupaten dong).
2000	28 Desember 2001 Geomdan-dong di Seo-gu terbagi menjadi Geomdan 1-dong dan Geomdan 2-dong. 1 Maret 2003 Ongnyeon-dong di Yeonsu-gu terbagi menjadi Ongnyeon 1-dong dan Ongnyeon 2-dong. 12 Agustus 2005 Geomdan 1-dong dan Geomdan 2-dong di Seo-gu terbagi menjadi Geomdan 1-dong, Geomdan 2-dong, dan Geomdan 3-dong. 30 Desember 2005 Samsan-dong di Bupyeong-gu terbagi menjadi Samsan 1-dong

⁴² <http://english.incheon.go.kr>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2017

dan Samsan 2-dong.

1 Januari 2012 Songdo-dong di Yeonsu-gu terbagi menjadi Songdo 1-dong dan Songdo 2-dong.

Incheon Metropolitan City mempunyai beberapa peninggalan sejarah yang menjadi ciri khas kota ini. Beberapa peninggalan sejarah yang terkenal dari kota ini antara lain.⁴³

- 1) Mercusuar Palmido: Selesai dibangun pada tahun 1903 dan dinyalakan pertama kali pada tanggal 1 Juni di tahun yang sama. Saat ini tidak digunakan. (28, Palmi-ro, Jung-gu, Incheon (Mooeui-dong)).
- 2) Taman Jayu: Dibangun pada tahun 1888, ini adalah taman gaya modern pertama di Incheon. Chinatown terletak di depannya. (1-1, Songhak-dong, Jung-gu, Incheon).
- 3) Gereja Naeri: Dibuat pada tahun 1891, ini adalah gereja pertama di Incheon. Gedung gereja tua itu dibongkar dan direkonstruksi. (3-1, Uhyeon-ro 67beon-gil, Jung-gu, Incheon (Nae-dong))
- 4) Kantor Pos Incheon: Sebagai kantor pos pertama di Incheon, itu ditunjuk sebagai Aset Budaya Korea pada tahun 1982. (6-ga, Hang-dong, Jung-gu, Incheon)
- 5) Gonghwachun: Pada tahun 1920 ketika perdagangan berkembang, orang Cina perantauan dari China berpikir untuk menciptakannya Makanan yang terjangkau dan lezat yang menyebabkan kelahiran Jajangmyeon pertama (Mie dengan Hitam Soybean Sauce) di Gonghwachun. (56-14 Chinatown-ro, Jung-gu, Incheon (Seollin-dong))

⁴³ Scott Woo, Wynne Koh . Incheon Metropolitan City_Multi Cultural Family Policy Division. 2015.

5.6.4 Politik dan Pemerintahan

Incheon merupakan kota metropolitan ketiga setelah Busan dan Seoul. Kota ini memiliki keunggulan sebagai kota pesisir yang letaknya berdekatan dengan Seoul, Ibu Kota Korea Selatan. Incheon secara administratif terbagi menjadi 8 Distrik dan 2 Kabupaten. Adapun pembagian administratif ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

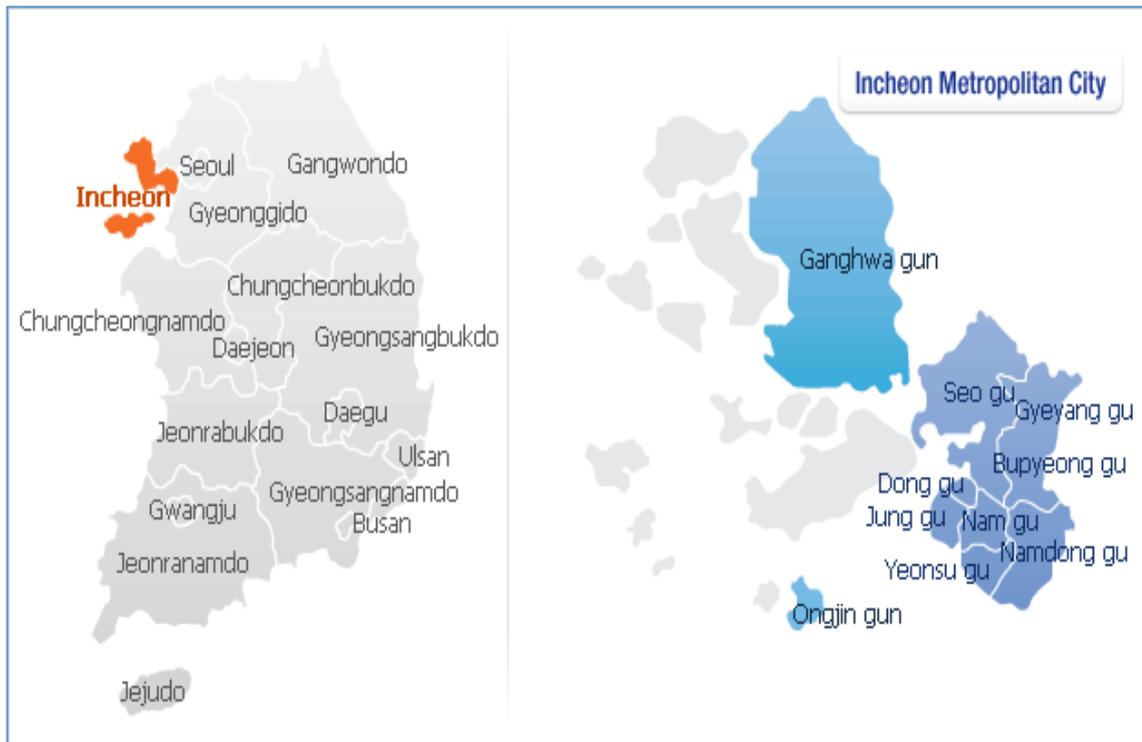
Tabel 5.2
Nama Distrik dan Kabupaten Incheon Metropolitan City

NO	DISTRIK	KABUPATEN
1.	Bupyeong-gu	Ganghwa-gun
2.	Gyeyang-gu	Ongjin-gun
3.	Jung-gu	
4.	Nam-gu	
5.	Namdong-gu	
6.	Seo-gu	
7.	Yeonsu-gu	
8.	Dong-gu	

Karena negara Korea Selatan menganut sistem pemerintahan demokrasi, maka setiap empat tahun sekali diadakan Pemilihan Umum untuk memilih seorang Gubernur, Walikota/Bupati, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Incheon Metropolitan City saat ini dipimpin oleh Walikota terpilih, yaitu Yoo Jeong-bok dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2014.

Gambar 5.17

Letak Geografis Distrik dan Kabupaten Kota Metropolitan Incheon



Walikota terpilih Incheon Metropolitan City saat ini adalah Yoo Jeong-bok yang terpilih sebagai Walikota pada Pemilihan Umum yang diadakan pada tahun 2014. Walikota Incheon, Yoo Jeong-bok, dalam sambutannya di laman resmi Incheon Metropolitan City, pada tahun 2017 ini berusaha untuk meningkatkan indeks kebahagiaan (happiness index) masyarakat Incheon. Oleh karena itu, tahun ini Pemerintah Kota Incheon mempunyai visi '*Dream of Incheon, the Vision of Korea*'. Untuk mewujudkan peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat Incheon, visi kota Incheon diimplementasikan melalui beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota melalui slogan '*A New Incheon, happy citizen*' dengan empat tujuan, yakni:

- 1) Mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat.
- 2) Kota modern yang dinamis.
- 3) Mewujudkan citra positif bagi kota Incheon.
- 4) Kebijakan yang pro rakyat.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Incheon pada tahun 2017 meliputi: 1) Membangun Incheon sebagai kota yang mandiri, 2) Mencapai target stabilitas fiskal, 3) Menciptakan lapangan pekerjaan serta merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam usahanya untuk menyukseskan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Incheon membuat langkah-langkah strategis guna mencapai target sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- 1) Guna mencapai target untuk membuat kondisi fiskal yang stabil, maka Pemerintah Kota Incheon akan menormalisasikan anggaran fiskal pada tahun 2018. Rencana tersebut akan digulirkan selama tiga tahun untuk menstabilkan kondisi fiskal perekonomian kota.
- 2) Untuk secepatnya menyelesaikan program kerja yang ada saat ini, maka Pemerintah Kota Incheon berusaha untuk memecahkan masalah satu per satu diantaranya dengan:
 - Menyelesaikan proyek-proyek yang mangkrak agar masyarakat segera menikmati hasil dari proyek tersebut.
 - Menciptakan jaringan transportasi dengan Incheon sebagai pusatnya.
 - Memperbaiki kebijakan TPA wilayah kota.

- Menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat dengan para pemegang kepentingan.
- 3) Dalam usahanya untuk mengembalikan martabat kota Incheon, Pemerintah Kota Incheon akan 'menyulap' semua aset yang ada di Incheon menjadi bernilai kembali. Usaha tersebut akan dilakukan melalui beberapa langkah strategis diantaranya adalah:
- Menciptakan keseimbangan antara pembangunan perkotaan dengan aset daerah berupa cagar budaya yang ada di Incheon.
 - Mengembalikan nilai dan daya tarik dari 168 pulau yang ada di Incheon.
 - Mengembalikan nilai dan daya tarik Incheon bersama seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Guna mewujudkan Incheon sebagai kota mandiri, maka Pemerintah Kota Incheon akan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melindungi cagar budaya, menjaga lingkungan, meningkatkan infrastuktur, dan menjaga kedaulatan maritim demi kemajuan Incheon. Untuk itu, Pemerintah beserta masyarakat bersama-sama agar Incheon Metropolitan City menjadi:
- Kota yang makmur dimana masyarakat saling berempati satu sama lain.
 - Kota budaya yang berkembang
 - Menciptakan sistem transportasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat
 - Mewujudkan Incheon sebagai kota yang ramah lingkungan

- Mewujudkan Incheon sebagai kota budaya maritim
- 5) Dalam usahanya untuk membuka lapangan pekerjaan baru serta merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, Pemerintah Kota Incheon berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik serta menciptakan pangsa pasar untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

5.6.5 Potensi Sosial dan Ekonomi

Sejak tahun 2003 Incheon ditunjuk secara resmi oleh pemerintah Korea sebagai pusat Free Economic Zone (IFEZ) pertama di Korea. The Free Economic Zone adalah kota internasional yang menawarkan dukungan perpajakan, kegiatan ekonomi bebas, pelayanan administrasi berkualitas tinggi, dan lingkungan hidup yang nyaman. IFEZ terdiri dari 3 wilayah yakni Songdo International City, District Yeongjong, dan Cheongna International City dengan luas area 132.9 km² termasuk Bandara dan Pelabuhan Incheon.

Gambar 5.18
Incheon Free Economic Zone



Incheon adalah kota pesisir yang terletak di pantai barat Korea yang menjadi pintu gerbang ke Seoul dan daerah metropolitan serta pusat pengembangan ekonomi, industri, dan pengembangan lahan Korea.

Tujuan IFEZ adalah untuk mengubah ketiga area ini menjadi pusat untuk logistik, bisnis internasional, liburan, dan pariwisata untuk wilayah Asia Timur Laut. Selain itu juga untuk memperbaiki lingkungan bisnis bagi perusahaan investasi asing dan kondisi kehidupan bagi orang asing. Kawasan ini merupakan kawasan yang ditunjuk khusus untuk menciptakan lingkungan bisnis dan kehidupan yang paling baik dimana warga negara asing dapat tinggal dan berinvestasi dengan bebas dan mudah. IFEZ dilengkapi dengan infrastruktur distribusi yang paling ideal. jaringan penerbangan kelas dunia di Bandara Incheon International menduduki peringkat pertama dalam pelayanan bandara dan kedua di dunia dalam transportasi kargo internasional. Jaringan maritim melalui Incheon New Port memiliki up-to-date terminal cerdas dan mengalami pertumbuhan pesat dalam kargo laut. Dan sistem transportasi modern menyediakan akses langsung ke pasar Korea.

Tabel 5.3

Incheon Free Economic Zone

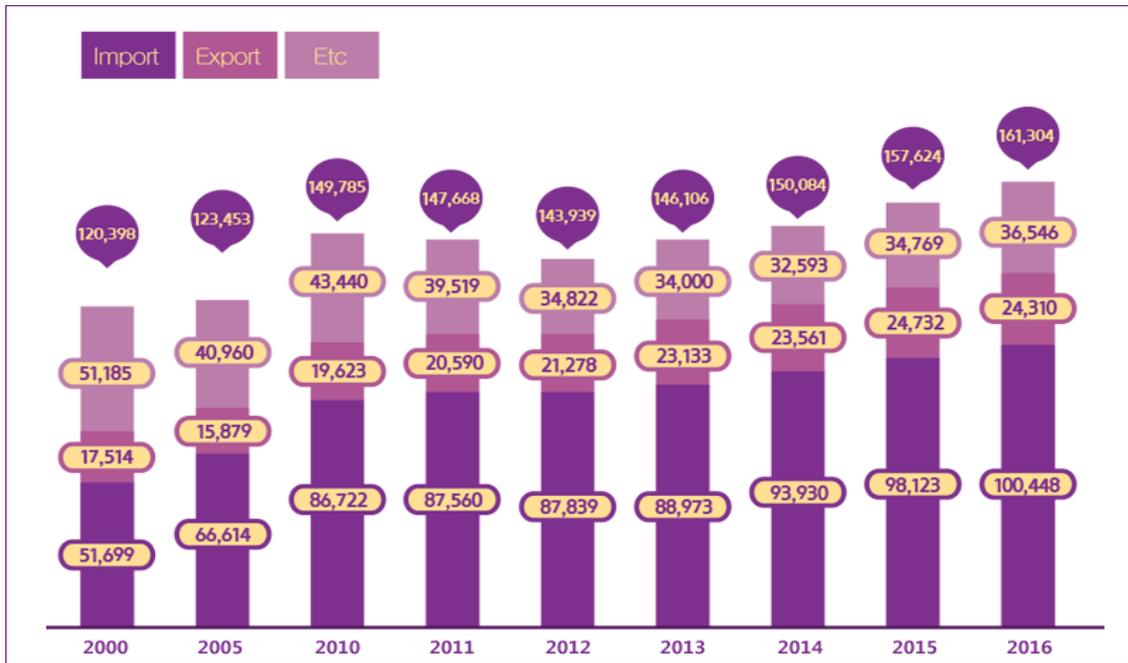
Tempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Yeonsu-gu (Songdo International City), Jung-gu (Yeongjong District), Seo-gu (Cheongna International City) ▪ Terletak di pantai barat, berdekatan dengan Seoul ▪ Benteng yang menghubungkan China dan Jepang, dan pintu masuk ke Korea Utara
Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah 132.9 km² ▪ Songdo International City (53.45 km²), Yeongjong District 61.7 km², Cheongna International City (17.8 km²)
Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seekitar 50 km jarak dari pusat kota Seoul ▪ Kota metropolitan utama, seperti Suwon, Anyang,

	<p>Gwangmyeong, dan Bucheon yang dapat ditempuh kurang dari satu jam</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peran jembatan antara Cina dan Jepang, kedua negara berjarak 1-2 jam lagi
Potensi pasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Populasi 2,9 juta di Incheon Metropolitan City ▪ 23 juta orang di Seoul dan daerah metropolitan sekitarnya (48% dari populasi nasional) ▪ 147 kota asing dengan populasi 1 juta atau lebih dalam jarak 3 jam terbang, pasar konsumsi besar 2 miliar orang

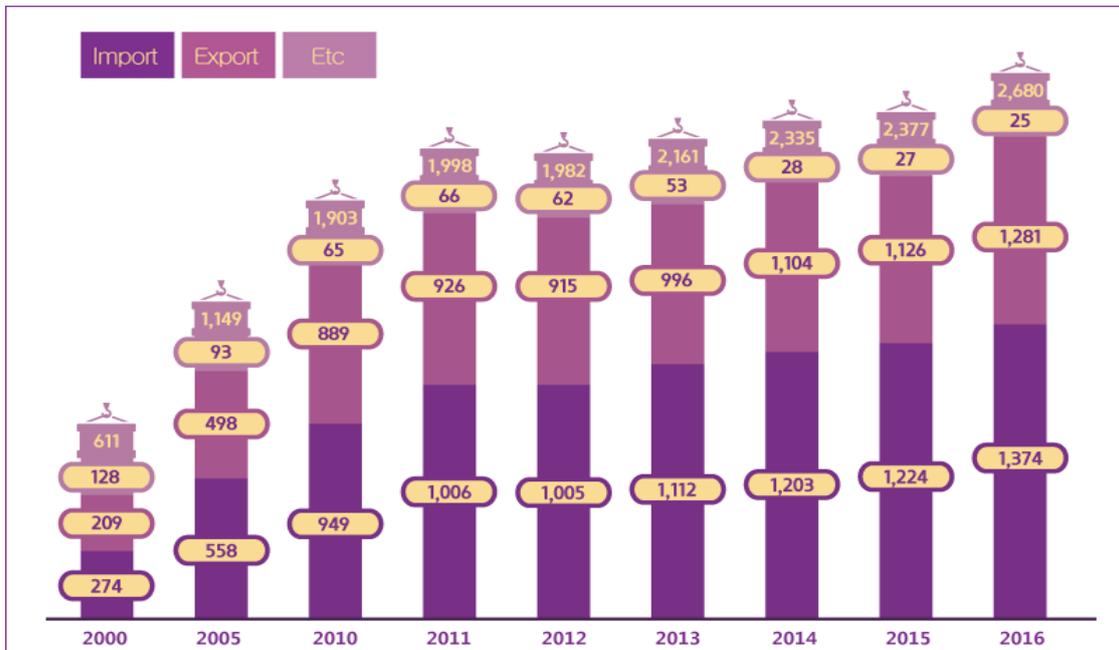
Beberapa potensi yang cukup besar dari Kota Metropolitan Incheon adalah antara lain yaitu, **Pelabuhan Incheon**, Pelabuhan Incheon menjadi sumber kekuatan ekonomi bagi Incheon Metropolitan City. Pelabuhan Incheon terdiri dari fasilitas pelabuhan seperti Pelabuhan Dalam, Pelabuhan Utara, Pelabuhan Selatan termasuk daerah pedalaman penumpang pesisir dan internasional, dan Pelabuhan Baru. Pelabuhan Incheon menampung 128 kapal dengan panjang 29 km yang dapat berlabuh pada saat bersamaan. Dengan begitu dapat memberi pengaruh terhadap ekonomi lokal Incheon, yakni:

- a. Pengaruh pada induksi produksi (industri logistik pelabuhan lokal): KRW 21,833 triliun
- b. Pengaruh pada inducement nilai tambah (industri yang secara langsung / tidak langsung tergantung): KRW 7,439 triliun
- c. Pengaruh pada penciptaan lapangan kerja: 134.595 orang

Gambar 5.19
 Statistik Total Volume Kargo Pelabuhan Incheon per tahun



Gambar 5.20
 Statistik Volume kontainer Pelabuhan Incheon per tahun



Selain Pelabuhan, yang juga sangat strategis adalah **Bandar Internasional Incheon**, IFEZ terletak di pusat kawasan ekonomi Asia Timur Laut. Asia Timur Laut membuat seperlima dari ekonomi global, termasuk negara-negara ekonomi besar seperti China, Jepang, Hong Kong, dan Rusia. Di Asia Timur Laut, lebih dari 1 juta orang tinggal di 61 kota asing yang dapat dicapai dalam penerbangan 3 jam. Hal ini memungkinkan kemampuan adaptasi yang pesat untuk pasar bisnis yang dinamis di Asia. Bandar udara Incheon ini awal mulanya dibuka pada 29 maret 2001 dengan 87 penerbangan 176 kota. Bandar udara Incheon menjadi bandar udara terbaik dengan pelayanannya dan kini telah menjadi bandar udara internasional terbesar di dunia selama 8 tahun berturut-turut.

5.7 KOTA METROPOLITAN ULSAN, KOREA SELATAN

5.7.1 Gambaran Umum

Kota Metropolitan Ulsan Kota terbesar ketujuh di Korea Selatan dengan populasi hampir sebanyak 1.1 Juta penduduk. Kota ini berada di bagian tenggara. Kota ini merupakan kota yang menghadap ke Laut Jepang. Terletak 70 km dari utara Busan. Status administratif Ulsan sebagai Kota Metropolitan berada langsung dibawah pengawasan Pemerintah Pusat yang setara dengan wilayah lain yang mempunyai status Provinsi. Pada tahun 1962, ketika kota itu terhubung dengan kereta api dan jalan raya dengan Seoul, Pusan (Busan), Taegu (Daegu), dan Taejŏn (Daejeon), Ulsan merupakan pelabuhan perikanan dan pusat pasar untuk produk pertanian (terutama pir) dari Dataran Ulsan dan Sungai T'aehwa.⁴⁴

⁴⁴ <https://www.britannica.com>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2017

Ulsan Metropolitan City memiliki slogan *'The City of Prestige, Comparison and Creativity'*. Slogan tersebut mengusung beberapa visi yang menjadi tujuan pemerintah daerah Ulsan Metropolitan City guna mewujudkan kota Ulsan sebagai:

- 1) Kota yang mengutamakan keselamatan
- 2) Kota kreatif yang menjadi pusat ekonomi Asia Timur
- 3) Kota atraktif dengan infrastuktur perkotaan
- 4) Kota budaya yang bersih
- 5) Kota sehat dengan budaya yang ramah
- 6) Kota bagi masyarakat, pekerja dan pebisnis
- 7) Kota sejahtera

Dalam rangka menyambut peringatan dua puluh (20) tahun sejak diresmikannya Ulsan menjadi Metropolitan City, pemerintah daerah Ulsan Metropolitan City memberikan sejarah perkembangan Ulsan melalui berbagai keberhasilan yang mereka capai sampai dengan tahun 2017. Keberhasilan-keberhasilan tersebut antara lain:

- 1) Tahun 1999, diresmikannya Komplek Industri Dalcheon
- 2) Tahun 2000, dimulainya Festival New Millenium Sunrise
- 3) Tahun 2002, Gelaran Piala Dunia
- 4) Tahun 2004, dideklarasikannya 'Eco-polis Ulsan'
- 5) Tahun 2006, diresmikannya Ulsan Grand Park
- 6) Tahun 2007, peresmian Ujeong Innovation City
- 7) Tahun 2009, dibukanya Ulsan National Institute of Science and Technology

8) Tahun 2010, selesainya pembangunan Taehwagang Grand Park

9) Tahun 2010, dibukanya KTX Ulsan Station

10) Tahun 2015, dibukanya Ulsandaegyo Bridge

Keberhasilan pemerintah daerah Ulsan Metropolitan City tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi sektor-sektor lain pun ikut berkembang selama dua dekade kota ini menyanggah status sebagai Kota Metropolitan

5.7.2 Letak Geografis

Ulsan Metropolitan City terletak di bagian Tenggara Korea Selatan sekitar 70 km dari Kota Busan. Kota ini memiliki luas wilayah 1.056.7 km² dengan temperatur hangat sepanjang tahun. Ulsan dianugerahi letak geografis yang ideal dan sangat jarang diterpa badai maupun banjir. Letaknya yang strategis menghubungkan dua samudera dan benua sehingga memudahkan akses ke daerah lain. Selain itu, kota ini dapat dicapai dalam penerbangan dua jam dari kota-kota besar di Asia Timur seperti Beijing, Shanghai, Hong Kong, Tokyo dan Osaka. Oleh karena itu, lokasi geografisnya memberi Ulsan sebagai basis industri strategis yang luar biasa.

Ulsan Metropolitan City mempunyai suhu rata-rata 14.3 °C dengan suhu terendah pada bulan Januari, yaitu 1.4 °C dan suhu tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan suhu rata-rata 27.8 °C. Curah hujan daerah ini sebesar 1161.1 mm dengan periode Januari 17.0 mm dan Agustus sebesar 114 mm.

Tabel 5.4
Iklm Kota Metropolitan Ulsan

Temperatur (2012)	14.3 °C	Januari	1.5 °C	Agustus	27.8 °C
Hujan (2012)	1161.6 mm	Januari	17.0 mm	Agustus	114

5.7.3 Sejarah Singkat

Sejarah terbentuknya Kota Metropolitan Ulsan terbagi ke dalam beberapa periode. Periode-periode tersebut dilalui dengan pergantian beberapa dinasti yang ada di Korea Selatan sampai dengan ditetapkannya kota ini menjadi Kota Metropolitan oleh Pemerintah Korea Selatan pada tanggal 15 Juli 1997. Berikut ini merupakan sejarah singkat Kota Metropolitan Ulsan.⁴⁵

- Masa Dinasti Tiga Han (*Three Han*)

Berada dalam kekuasaan Jinhan

- Masa Dinasti Tiga Kerajaan (*Three Kingdoms*)

Gulwahyeon didirikan pada masa pemerintahan oleh Raja Pasa Isaguem, raja kelima dari Dinasti Silla

- Masa Dinasti Goryeo

Tiga "Hyeons" dari Hagok, Dongjin dan Wupung terintegrasi dan diangkat ke Heungryebu selama masa pemerintahan oleh Raja Taejo.

- Masa Dinasti Joseon

- Selama 13 tahun dipimpin oleh Raja Taejong (1413): mengganti nama Ulju menjadi Ulsan-gun
- Selama 31 tahun dipimpin oleh Raja Seonjo (1598): menaikkan status Ulsan-Gun menjadi Ulsan-Dohobu
- Selama 32 tahun dipimpin oleh Raja Gojong (1895): mengganti nama Ulsan-Dohobu menjadi Ulsan-Gun
- Tahun 1914 menggabungkan Eongnyang-Gun dengan Ulsan-Gun
- Tahun 1931 menaikkan status Ulsan-Myeon menjadi Ulsan-Eup

⁴⁵ <http://www.ulsan.go.kr>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2017

- Tahun 1936 menaikkan status kota Bangeojin-Myeon menjadi Bangeojin-Eup
- 27 Januari 1962: dibentuk Kawasan Industri Terpadu Ulsan (Ulsan Specific Industrial Zone)
- 1 Juni 1962: status kota meningkat menjadi Ulsan-Si
- 15 Juli 1985: mendirikan Jungnam-Gu
- 1 Januari 1988: memindahkan Kantor Bangeojin ke Dong-Gu
- 1 Januari 1995: Ulsan-Si dan Ulsan-Gun terintegrasi
- 15 Juli 1997: dibentuk Kota Metropolitan Ulsan
- 27 Januari 2012: peringatan 50 tahun dibentuknya Kawasan Industri Terpadu Ulsan
- 15 Juli 2017: ulang tahun ke 20 berdirinya Kota Metropolitan Ulsan

5.7.4 Politik dan Pemerintahan

Sama seperti halnya dengan Icheon yang memiliki status sebagai Kota Metropolitan yang secara administratif dipimpin oleh seorang Walikota, maka Ulsan juga dipimpin oleh seorang Walikota. Jabatan Walikota Ulsan saat ini dipegang oleh Kim Gi-hyeon. Masa jabatan seorang Walikota adalah selama empat (4) tahun dan dapat dipilih kembali melalui pemilihan umum sampai dengan tiga (3) kali masa jabatan. Walikota dan anggota dewan daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat. Daerah administratif Ulsan terdiri dari empat 'gu' (Distrik) dan satu (1) 'gun' (Kabupaten). Keempat 'gu' (Distrik) yang ada di Ulsan antara lain Buk-gu, Dong-gu, Jung-gu, dan Nam-gu. Sedangkan satu-satunya 'gun' (Kabupaten) yang ada di Ulsan adalah Ulju-gun.

Dalam menjalankan tugasnya, Walikota Ulsan dibantu oleh dua orang Deputi dengan tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Kedua Deputi tersebut antara lain Deputi yang mengurus masalah Hubungan Administratif dan Deputi yang mengurus masalah ekonomi. Setelah kedua Deputi tersebut, ada dua organisasi pemerintah yang mengelola hubungan masyarakat, yaitu Badan Hubungan Masyarakat dan Badan Inspeksi dan Audit.

Guna meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada di Ulsan Metropolitan City, maka pemerintah kota Ulsan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti *Smart Ulsan*, *Green Ulsan*, *Lovely Ulsan*, dan *Mega Ulsan*. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan implementasi dari visi yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah Ulsan guna mewujudkan kota Ulsan sebagai '*The City of Prestige, Comparison and Creativity*'.

5.7.5 Potensi Sosial dan Ekonomi

Kota Metropolitan Ulsan mempunyai beberapa potensi yang menjadi unggulan antara lain yaitu, **Industri Manufaktur**, Industri manufaktur menjadi tulang punggung perekonomian Ulsan Metropolitan City. Dengan slogannya, yaitu '*World Greatest Manufacturing City*', Ulsan menjadi garda terdepan dalam industri manufaktur Korea Selatan dengan menjadi pusat produksi beberapa produk unggulan yang berskala Internasional. Industri manufaktur yang ada di wilayah Ulsan antara lain; 1) Industri mobil, salah satunya adalah Hyundai Motor yang memproduksi kendaraan sekitar 1.540.000 kendaraan dalam setiap tahunnya. Industri mobil Ulsan memasok sekitar 20% kebutuhan pasar nasional, 2) Industri pembuatan kapal laut terbesar di dunia. Perusahaan seperti Hyundai Heavy

Industry dan Hyundai Mipo Dockyard berada di Ulsan, dan 3) Industri Petrochemical. Perusahaan berskala internasional seperti SK dan S-Oil memproduksi 32% petrochemical domestik.

Gambar 5.21
Kawasan Industri Kota Metropolitan Ulsan



Tingkat pertumbuhan *Gross Regional Domestic Product* (GRDP) Kota Metropolitan Ulsan mengalami perlambatan dalam kurun waktu 2015 pada sektor manufaktur. Total GRDP Ulsan mengalami peningkatan 0.2% dengan peningkatan pada sektor Bisnis Jasa sebesar 11.8%, Elektrik, Gas, dan Air sebesar 7.7%. Sementara industri yang mengalami laju penurunan adalah industri *Mining and Quarrying* -22.7% dan Manufaktur sebesar -1.6%.

Tabel 5.5
Pertumbuhan Perekonomian Ulsan⁴⁶

Tingkat Pertumbuhan	Industri yang Meningkat	Industri yang Menurun
0.2	Bisnis Jasa (11.8%), Listrik, Gas, Uap dan Persediaan Air (7.7%)	Pertambangan (-22.7%), Manufaktur (-1.6%)

Ulsan memainkan peran utama dalam mengembangkan Korea Selatan sebagai eksportir terbesar keenam di dunia. Kota Metropolitan Ulsan adalah pintu gerbang menuju pasar domestik dan luar negeri. Selain itu, Ulsan mempersiapkan masa kejayaan kedua dengan membangun kompleks industri untuk Ulsan Newport dan pusat minyak di Asia Timur Laut untuk memperkuat posisinya sebagai satu dari tiga terminal bulk cair dunia. Komplek industri berskala besar yang menjadi komoditas ekspor Korea Selatan yang ada di Ulsan Metropolitan City antara lain:

- 1) Hyundai Heavy Industri (HHI) yang merupakan perusahaan konstruksi kapal terbesar di dunia. alangan kapal ini berada di sepanjang 2,5 mil Mipo Bay dan diatas areal seluas 1.780 hektar. sejak tahun 1972 hingga 2011, HHI sudah merampungkan 1.686 kapal ke 268 pemesan di 48 negara.
- 2) Hyundai Motor Company merupakan perusahaan multinasional sebagai produsen mobil terbesar di Korea Selatan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1967. Hyundai Motor Company merupakan perusahaan otomotif terbesar ketiga di dunia. Dengan karyawan berjumlah 75.000 orang, perusahaan ini mampu memproduksi 1.6 juta mobil per tahun.

⁴⁶ <http://kostat.go.kr>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

- 3) Ulsan Mipo National Complex merupakan kawasan industri yang terdiri dari 253 perusahaan mesin, 155 perusahaan petrokimia, dan 151 perusahaan peralatan transportasi. Komplek industri ini didirikan untuk membuat kilang minyak berksala besar, industri petrokimia, mobil dan perkapalan. Ulsan Mipo National Complex memiliki pabrik perakitan mobil terbesar di dunia dan kilang minyak terbesar kedua di dunia.⁴⁷

Potensi besar lainnya adalah dari sektor **Pariwisata**, Sektor pariwisata Kota Metropolitan Ulsan menawarkan berbagai macam wisata guna menarik wisatawan datang ke Ulsan. Jenis wisata yang ditawarkan oleh pemerintah Ulsan Metropolitan City meliputi wisata *Cultrual Heritage Tour*, *Tour of Famous Sights along the Coast*, *Tour to Famous Mountains*, *Industry Tour*, dan *Ecology Experience*. Terletak di ujung tenggara semenanjung Korea, Ulsan terkenal dengan menonton ikan paus, tebing berbatu, dan pantai yang indah. Landmark utamanya meliputi Ganjeolgot Cape, tempat matahari terbit pertama, Daewangam Park, dan Taman Provinsi Gajisan. Selain itu, berkat lokasinya yang strategis, kota ini merupakan pusat industrialisasi dan perdagangan maritim.⁴⁸

Kota Metropolitan Ulsan telah berhasil mengubah citra sebagai kota industri menjadi kota wisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke kota tersebut. Perubahan citra dari kota industri menjadi kota wisata tidak terlepas dari usaha Pemerintah Ulsan Metropolitan City dalam merubah citra tersebut dengan mengkampanyekan program '2017 Visit Ulsan'. Dengan adanya program tersebut, perkembangan industri pariwisata Ulsan Metropolitan City meningkat dengan

⁴⁷ <http://investkorea.org>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

⁴⁸ <http://english.visitkorea.or.kr>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

signifikan yang ditandai oleh peningkatan jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Ulsan Metropolitan City.

Sebagai kota metropolitan, Ulsan tidak hanya menawarkan wisata industri yang memang menjadi *trademark* kota ini sebagai kota industri. Akan tetapi, kota ini juga menawarkan keindahan alam dan budaya serta festival-festival sebagai daya tarik untuk mengundang wisatawan datang ke Ulsan. Pemerintah Kota Metropolitan Ulsan mengklasifikasikan potensi wisata yang ada di Ulsan menjadi beberapa paket wisata sesuai dengan objek wisata yang ada di daerah mereka. Paket wisata tersebut dibedakan menjadi: paket wisata budaya, paket wisata alam, paket wisata ekologi, dan paket wisata industri

Tabel 5.6
Jumlah Wisatawan Masuk ke Ulsan

Tahun	Jumlah Wisatawan
2016	1.4 Juta
2017	3.5 Juta

Keanekaragaman paket wisata yang ditawarkan serta promosi yang optimal telah membawa hasil positif bagi perkembangan industri pariwisata Kota Metropolitan Ulsan. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Ulsan pada semester awal 2017 dari 1.4 juta orang pada tahun lalu menjadi 3.5 juta orang pada tahun ini. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Ulsan membawa dampak terhadap perekonomian daerah yang berhasil mendapatkan total pemasukan sekita 309 miliar won.

5.8 PROVINSI GYEONGSANGBUK-DO, KOREA SELATAN

5.8.1 Gambaran Umum

Provinsi Gyeongsangbuk-do (Gyeongsang Utara) merupakan salah satu provinsi yang ada di sebelah timur Korea Selatan. Luas wilayah Provinsi ini seluas 19.440 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.775.890 jiwa (2015).⁴⁹ Ibu kota Provinsinya adalah Daegu. Pertama kali berdiri provinsi ini bernama Gyeongsang-do (1314), akan tetapi setelah pemerintah Korea Selatan memberlakukan struktur pemerintahan provinsi menjadi 13 provinsi pada tahun 1896, maka provinsi Gyeongsang-do berganti nama menjadi Gyeongsangbuk-do.

Berlandaskan visi 2020-nya provinsi Gyeongsangbuk-do berusaha untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi wilayahnya melalui pengembangan bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan kearifan lokal (local wisdom) dan sumber daya alam yang mereka miliki. Gyeongsangbuk-Do meluaskan aktifitas diplomatiknya melalui berbagai penandatanganan 'sister city' dengan pemerintah provinsi lain di dunia. Provinsi ini bertindak selaku penggerak organisasi pemerintahan regional yang tergabung dalam *North East Asia Regional Governments Association (NEAR)*, sejak September 1996 dan menjadi kantor pusat NEAR di Pohang, Gyeongsangbuk-Do sejak tahun 2005. Secara aktif, Gyeongsangbuk-Do menginisiasi beberapa kali pertemuan internasional untuk terwujudnya organisasi NEAR tersebut, termasuk beberapa pertemuan penting yang membahas masuknya Mongolia dan Korea Utara ke dalam NEAR.⁵⁰

⁴⁹ <https://www.gb.go.kr> . Diakses pada tanggal 6 Juli 2017

⁵⁰ Ali, Muli Takdir *Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional Paradiplomacy: The Rise of Local Actor in International Fora, 2015*, hal 89.

5.8.2 Letak Geografis

Gyeongsangbuk-do terletak di wilayah tenggara Semenanjung Korea yang dibatasi oleh Laut Timur di sebelah timur, Gangwon-do di sebelah utara dan Chungcheongbuk-do, di sebelah barat oleh Chungcheongbuk-do dan Jeollabuk-do, dan di selatan oleh Gyeongsangnam-do dan Ulsan. Provinsi ini berjarak 170-430 km dari Ibu Kota negara, yaitu Seoul. Secara geografis Gyeongsangbuk-do terletak di antara 35 ° 34E dan 37 ° 33E Lintang Utara.

Topografi Gyeongsangbuk-do menyerupai cekungan yang membentang luas. Sobaek Range yang berada di sebelah utara dan barat provinsi ini mengelilingi daratan luas sampai dengan sungai Nakdonggang. Sementara itu, gunung Wunmunsan dan gunung Biseulsan di wilayah selatan menjadi perbatasan dengan daerah lain. Garis pantai sepanjang 335 km di pantai timur memberikan pemandangan Laut Timur yang jernih dengan keindahan yang memukau. Garis pantai tersebut membentang sampai ke Ulleungdo dan Dok-do di ujung timur yang masih merupakan bagian dari provinsi Gyeongsangbuk-do.

Karena provinsi Gyeongsangbuk-do dikelilingi oleh pegunungan, maka iklim di wilayahnya berupa iklim ekstrem, baik di musim panas maupun musim dingin. Akan tetapi, di sekitar wilayah Timur Laut sedikit hangat, karena berada di wilayah Tebaek Range dan Laut Timur.

5.8.3 Sejarah Singkat

Gyeongsangbuk-do merupakan provinsi dengan multi budaya dan etnis. Budaya Budha yang ada di daerah ini merupakan warisan dari kerajaan Silla, budaya Gaya, serta budaya Konfusianisme warisan dari Dinasti Joseon. Menurut

data, sekitar 20 % budaya dan etnis yang menjadi aset Korea Selatan berasal dari provinsi Gyeongsangbuk-do. Sejarah terbentuknya provinsi Gyeongsangbuk-do berasal dari kerajaan Silla. Kerajaan Silla (57 SM- 935 SM) merupakan salah satu dari tiga kerajaan yang ada di Korea. Provinsi ini dibentuk pada zaman Goryeo dan dilanjutkan oleh Dinasti Joseon. Nama provinsi ini merupakan gabungan dari dua kota besar, yaitu Gyeongju dan Sangju.

Tabel 5.7
Sejarah Provinsi Gyeongsangbuk-do⁵¹

TAHUN	KETERANGAN
1314	Dinamai wilayah 'Gyeongsang-do' untuk pertama kali
Agustus 1896	Dinamai Provinsi Gyeongsangbuk-do berdasarkan perubahan sistem 13 Provinsi yang digunakan oleh Korea Selatan
Maret 1914	Mulai diterapkannya sistem bu-gun-myeon yang terdiri dari 1 bu, 22 gun, dan 1 do
Agustus 1949	Daegu, Pohang, dan Gimcheon berubah status menjadi kota. Kemudian, Ulleung-do berganti nama menjadi Ulleung-gun termasuk 3 kota dan 23 gun.
Januari 1963	Uljin-gun disatukan dengan Gangwon-do
April 1966	Uljin-gun disatukan dengan Gangwon-do
Juni 1981	Daegu berubah status menjadi Ibu Kota dan berada dibawah pengawasan pemerintah pusat dan berpisah dari Gyeongsangbuk-do
Januari 1989	Gyeongsan-eup berubah status menjadi kota
Januari 1995	10 kota dan 13 guns dibuat berdasarkan penyatuan kota dan guns
Maret 1995	Dalseong-gun disatukan dengan Daegu Metropolitan City
Juli 1995	Otonomi daerah diberlakukan kembali dengan Gubernur terpilih Lee Eui-Geun disertai oleh pembentukan Dewan Provinsi ke 5.
Juli 1998	Otonomi daerah diberlakukan kembali dengan Gubernur terpilih Lee Eui-

⁵¹ <https://www.gb.go.kr>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2017

	Geun dan Dewan Provinsi ke 6 kembali dibentuk.
Juli 2002	Otonomi daerah dilakukan dengan Gubernur terpilih Lee Eui-Geun dan Dewan Provinsi ke 7 kembali dibentuk.
Juli 2006	Untuk kedua kalinya otonomi daerah dilakukan dengan Gubernur terpilih Kim Kwan Yong dan Dewan Provinsi ke 8 kembali dibentuk.
Juli 2010	Otonomi daerah kedua dilakukan dengan Gubernur terpilih Kim Kwan Yong dan Dewan Provinsi ke 9 kembali dibentuk.

5.8.4 Politik dan Pemerintahan

Sejak Korea Selatan memberlakukan sistem Otonomi Daerah yang dimulai pada tahun 1995, maka secara administratif semua wilayah yang ada di Korea Selatan terbagi ke dalam 9 Provinsi, 6 Kota Metropolitan, 1 Kota Istimewa, dan 1 Kota Khusus Otonom. Kesembilan provinsi tersebut adalah Gyeonggi, Gangwon, Chungcheongbuk, Chungcheongnam, Jeollabuk, Jeollanam, Gyeongsangbuk, Gyeongsangnam, dan Jeju. Enam kota Metropolitan terdiri dari Busan, Incheon, Daegu, Gwangju, Daejeon, Ulsan. Satu Kota Khusus, yaitu Seoul sebagai Ibu Kota Negara dan satu kota Otonom adalah kota Sejong.

Tabel 5.8
Wilayah Administratif Korea Selatan⁵²

No.	Provinsi / Kota	Tipe	Ibukota
1	Seoul	Kota Khusus	Seoul
2	Sejong	Kota Khusus otonom	Sejong
3	Busan	Kota Metropolitan	Busan
4	Incheon	Kota Metropolitan	Incheon
5	Daegu	Kota Metropolitan	Daegu
6	Gwangju	Kota Metropolitan	Gwangju
7	Daejeon	Kota Metropolitan	Daejeon
8	Ulsan	Kota Metropolitan	Ulsan
9	Gyeonggi	Provinsi	Suwon
10	Gangwon	Provinsi	Chuncheon
11	Chungcheongbuk	Provinsi	Cheongju
12	Chungcheongnam	Provinsi	Daejeon
13	Jeollabuk	Provinsi	Jeonju
14	Jeollanam	Provinsi	Muan
15	Gyeongsangbuk	Provinsi	Daegu
16	Gyeongsangnam	Provinsi	Changwon
17	Jeju	Provinsi	Kota Jeju

Wilayah administratif provinsi Gyeongsangbuk-Do terdiri dari beberapa bentuk administratif yang berbeda, yakni 10 Kota dan 13 Kabupaten. Sepuluh kota tersebut yakni Andong, Gimcheon, Gyeongju, Gyeongsan, Gumi, Mungyeong, Pohang, Sangju, Yeongcheon, dan Yeongju. Tiga belas Kabupaten terdiri dari Bonghwa, Cheongdo, Cheongsong, Chilgok, Goryeong, Gunwi, Seongju, Uiseong, Uljin, Ulleung, Yecheon, Yeongdeok, dan Yeongyang.

⁵² <http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-korea-selatan-republic-korea>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2017

Tabel 5.9

Nama Kota dan Kabupaten Provinsi Gyeongsangbuk-Do

No.	Kota	Kabupaten
1	Andong	Bonghwa
2	Gimcheon	Cheongdo
3	Gyeongju	Cheongsong
4	Gyeongsan	Chilgok
5	Gumi	Goryeong
6	Mungyeong	Gunwi
7	Pohang	Seongju
8	Sangju	Uiseong
9	Yeongcheon	Uljin
10	Yeongju	Ulleung
11		Yecheon
12		Yeongdeok
13		Yeongyang

Karena negara Korea Selatan menganut sistem pemerintahan demokrasi, maka setiap empat tahun sekali diadakan Pemilihan Umum untuk memilih seorang Gubernur, Walikota/Bupati, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Provinsi Gyeongsangbuk-Do saat ini dipimpin oleh Gubernur terpilih, yaitu Kim Kwan Yong yang untuk kedua kalinya terpilih kembali menjadi Gubernur Gyeongsangbuk-Do dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2010.

Secara administratif, Gubernur di Provinsi Gyeongsangbuk-Do dibantu oleh seorang Sekretaris dan dua orang Wakil Gubernur. Kedua orang Wakil Gubernur

tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda, yaitu satu orang Wakil Gubernur membawahi urusan Hubungan Adiministratif (*Administrative Affairs*) dan satu orang Wakil Gubernur lagi bertugas membidangi masalah Rencana Ekonomi (*Economic Planning*). Selain dibantu oleh dua orang Wakil Gubernur, Gubernur provinsi Gyeongsangbuk-Do dibantu pula oleh seorang Direktur yang membidangi masalah hubungan politik (*political affairs*). Kemudian, seorang Direktur tersebut membawahi masing-masing divisi yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugasnya. Divisi-divisi tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Masing-masing divisi yang membantu tugas Gubernur antara lain.

1. Divisi Juru Bicara (Division of Spokeperson)
2. Divisi Kerjasama dan Komunikasi (Division of Communication and Cooperation)
3. Divisi Inspeksi Audit (Division of Audit Inspection)
4. Divisi Strategi dan Perencanaan (Division of Future Stratgetic Planning)

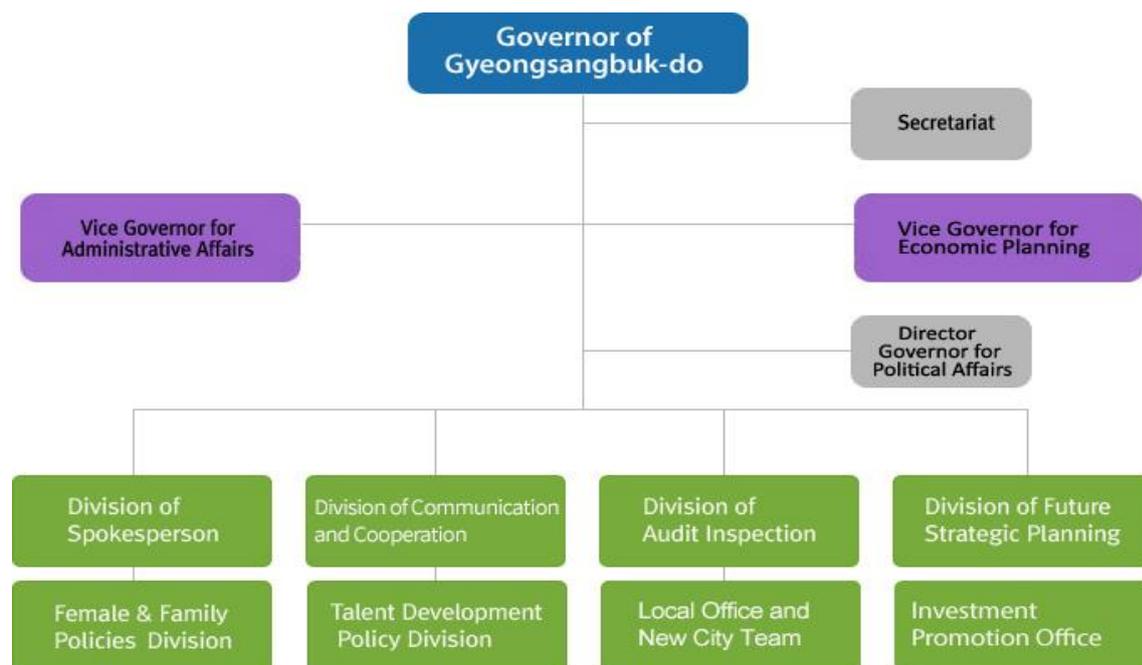
Selain keempat divisi di atas, ada beberapa divisi yang secara struktur berada di bawahnya. Divisi-divisi tersebut antara lain:

1. Divisi Kebijakan Keluarga dan Perempuan
2. Divisi Pengembangan Kebijakan
3. Tim Sekreatriat Daerah dan Kota
4. Promosi dan Investasi

Organisasi terakhir yang secara struktur berada langsung di bawah Gubernur Gyeongsangbuk-Do adalah beberapa Biro, yakni 12 Biro dengan tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Berikut ini adalah ke-12 Biro yang ada di Provinsi

Gyeongsangbuk-Do. 1) Biro Perencanaan, 2) Biro Industri dan Ekonomi Kreatif, 3) Biro Informasi Pekerjaan untuk Warga Sipil, 4) Biro Keselamatan, 5) Biro Olahraga, Budaya, dan Pariwisata, 6) Biro Administrasi Otonomi, 7) Biro Distribusi dan Produksi Peternakan dan Perkebunan, 8) Biro Sumber Daya Hutan dan Lingkungan, 9) Biro Kesehatan dan Kesejahteraan, 10) Biro Hubungan Urbanisasi dan Konstruksi, 11) Biro Pengembangan Wilayah Timur, dan 12) Biro Pemadam Kebakaran.

Gambar 5.22
Struktur Organisasi Provinsi Gyeongsangbuk-Do⁵³



⁵³ <https://www.gb.go.kr>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2017

5.8.5 Potensi Sosial dan Ekonomi

Sebagai Provinsi terbesar di Korea Selatan, Gyeongsangbuk-Do memiliki luas daratan sekitar 19.440 km² dengan jumlah populasi penduduk mencapai 2,7 juta (2015). Dengan modal tersebut, maka provinsi Gyeongsangbuk-Do memiliki beberapa potensi, khususnya di bidang ekonomi yang mampu mereka kembangkan sehingga provinsi ini mampu menghasilkan pendapatan domestik mereka sebesar 92.697 triliun won pada tahun 2014 dengan total per kapitanya sebesar 35.10 miliar won. Pendapatan daerah tersebut menjadikan provinsi Gyeongsangbuk-Do sebagai provinsi terbaik ke empat di Korea Selatan.

Sektor-sektor unggulan yang menjadi andalan bagi pendapatan daerah provinsi Gyeongsangbuk-Do dengan jumlah serapan tenaga kerja terbanyak terdiri dari beberapa sektor, yakni; i) industri jasa sebesar 895.8 ribu, ii) industri manufakturing dan pertambangan sebanyak 278.7 ribu, dan iii) industri perikanan dan agrikultur sebanyak 237.8 ribu. Gambar di bawah ini merupakan jumlah serapan tenaga kerja serta industri unggulan yang ada di Provinsi Gyeongsangbuk-Do. Berikut ini merupakan sektor-sektor unggulan yang menjadikan provinsi Gyeongsangbuk-Do sangat potensial, khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga layak untuk dilakukan peninjauan kerjasama.

Industri Manufaktur, Sektor industri memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah dan perkembangan ekonomi provinsi Gyeongsangbuk-Do. Menurut data yang dikeluarkan oleh situs resmi pemerintah provinsi Gyeongsangbuk-Do, jumlah perusahaan yang beroperasi mencapai 20.978 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang seperti industri metal, tekstil, elektronik, makanan dan sebagainya. Perusahaan yang

beroperasi di Gyeongsangbuk-Do didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang elektronik dengan presentase sebesar 53%, diikuti oleh perusahaan yang bergerak di bidang elektrik sebesar 27.9%, kemudian perusahaan yang bergerak di bidang metal dengan presentase sebesar 15.8%.

Presentase jumlah industri yang ada di provinsi Gyeongsangbuk-Do berdasarkan jumlah industri dan pegawai yang terserap oleh industri tersebut antara lain industri metal 15.8%, industri mineral 13.9%, industri tekstil 12.8%, industri elektronik 11.6%, industri makanan 10.6%, industri petro-chemistry 6.6%. Berikut ini merupakan gambaran umum jumlah industri disertai dengan jumlah pegawai yang ada di provinsi Gyeongsangbuk-Do.

Tabel 5.10

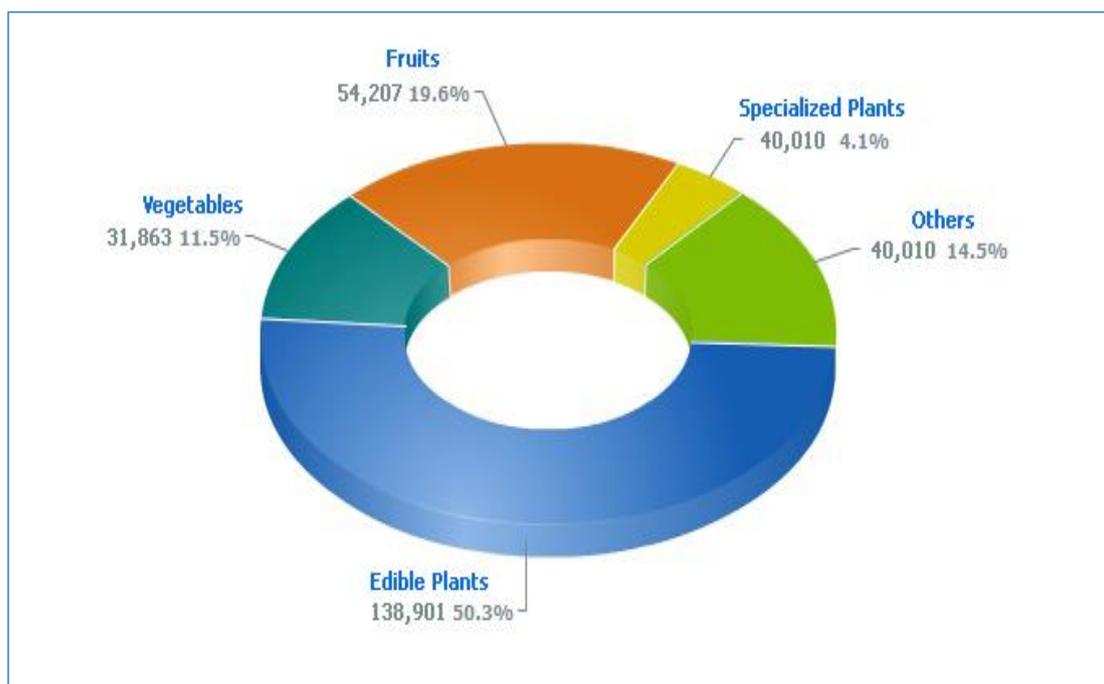
Jumlah dan Jenis Industri Manufaktur di Provinsi Gyeongsangbuk-Do⁵⁴

	Jumlah Industri (%)	Jumlah Pegawai (%)	Jumlah Produksi (Unit: miliar won)
Tekstil	1,340(12.8)	17,433(7.1)	4,332.3(2.9)
Elektronik	1,218(11.6)	68,553(27.9)	62,195.9(41.6)
Metal	1,660(15.8)	51,983(21.1)	49,089.7(32.8)
Petro-chemistry	690(6.6)	12,389(5.0)	7,237.5(4.8)
Makanan	1,109(10.6)	13,928(5.7)	4,175.1(2.8)
Mineral	1,454(13.9)	25,379(10.3)	8,315.4(5.6)
Lain-lain	3,018(28.8)	56,379(22.9)	14,148.2(9.5)
Total	10,489(100)	246,044(100)	149,494.1(100)

⁵⁴ <https://www.gb.go.kr>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2017

Sektor Agrikultur, Sektor agrikultur merupakan salah satu sektor unggulan dalam menunjang pembangunan provinsi Gyeongsangbuk-Do. Luas lahan yang digunakan untuk agrikultur mencapai 274.487 hektar menjadikan Gyeongsangbuk-Do sebagai salah satu pusat penghasil perkebunan dan pertanian terbesar di Korea Selatan. Pangsa pasar hasil perkebunan dan pertanian daerah ini mencapai 17.2 % dari populasi penduduk Gyeongsangbuk-Do. Produk agrikultur yang menjadi komoditas unggulan provinsi ini diantaranya adalah beras, apel, melon dan anggur. Produksi pertanian dan perkebunan tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, akan tetapi dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar internasional seperti WTO/ODA dan FTA.

Gambar 5.23
Komoditas Unggulan Provinsi Gyeongsangbuk-Do⁵⁵



⁵⁵ <https://www.gb.go.kr>. diakses pada tanggal 16 Juli 2017

Provinsi Gyeongsangbuk-Do menyediakan lahan seluas 267.568 hektar yang diperuntukan bagi pertanian dan perkebunan. Dari 267.568 hektar lahan tersebut, digunakan untuk memproduksi 1) tanaman laik makan sebesar 50.3%, 2) buah-buahan sebesar 19.6%, 3) sayuran sebesar 11.5%, 4) tanaman spesial sebesar 4.1%, dan tanaman-tanaman lain sebesar sebesar 14.5%.

Luas lahan yang memadai disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agrikultur yang mutakhir, menjadikan produktivitas agrikultur provinsi Gyeongsangbuk-Do berkembang pesat. Beberapa komoditas seperti apel, anggur, cabe merah, melon, dan persik menduduki peringkat pertama dalam skala nasional. Di bawah ini merupakan jumlah produksi komoditas unggulan Gyeongsangbuk-Do dalam skala nasional.

Tabel 5.11
Jumlah Produksi Komoditas Unggul Provinsi Gyeongsangbuk-Do⁵⁶

	Beras	Apel	Anggur	Melon	Persik	Cabe Merah	Bawang
Jumlah Produksi	564	252	152	166	112	31	152
Nasional %	14	64	55	89	55	30	13
Peringkat Nasional	4	1	1	1	1	1	3

(Unit: 1,000 won)

5.9 PROVINSI JEOLLANAM-DO, KOREA SELATAN

5.9.1 Gambaran Umum

Provinsi Jeollanam-Do Memiliki ibu kota yang bernama Muan-gun dengan total populasi adalah 1,91 juta (sekitar 3,7 persen populasi nasional), peringkat

⁵⁶ <https://www.gb.go.kr>. diakses pada tanggal 16 Juli 2017

kelima dalam hal populasi diantara sembilan provinsi nasional. Luas wilayah provinsi ini adalah 12.304 kilometer persegi (12,3 persen dari wilayah nasional), membuatnya menjadi ketiga provinsi terbesar dalam hal daratan (setelah Gyeongsangbuk-do dan Gangwon-do). Kepadatan penduduknya rata-rata 155 orang per Kilometer persegi, menjadikannya provinsi berpenduduk paling jarang ketiga (setelah Gangwon-do dan Gyeongsangbuk-do).⁵⁷

5.9.2 Letak Geografis

Provinsi Jeollanam-Do berada di Asia Timur Laut tepatnya di bagian Barat Daya Korea Selatan. Provinsi ini berhadapan langsung dengan Cina di sebelah Barat dan Jepang di sebelah Timur dan Selatan. Letak tersebut menjadikan provinsi Jeollanam-Do sebagai pusat di kawasan Asia Timur Laut serta pintu masuk menuju Samudera Pasifik. Sungai yang mengalir di sepanjang Jeollanam-do menyediakan lahan pertanian yang subur dengan menciptakan dataran yang luas di barat daya dan barat laut lembah sungai. Ada tiga sungai di wilayah ini, yaitu sungai Youngsan mengalir ke Teluk Mokpo, Sungai Seomjin yang berasal dari Jeollabuk-do dan mengalir menuruni medan sepanjang Jangheung-gun dan Gangjin-gun. Dataran Jeollanam-do terdiri dari dataran Naju di lembah Sungai Youngsan dan dataran Tinggi Honam di Jeollabuk-do adalah lumbung yang representatif di Korea.

⁵⁷ Geography of Korea. The Academy of Korean Studies. 2016

Gambar 5.24
Letak Geografis Provinsi Jeollanam-Do⁵⁸



5.9.3 Sejarah Singkat

Sejarah terbentuknya provinsi Jeollanam-Do terbagi ke dalam beberapa periode seiring dengan perkembangan negara Korea Selatan dalam memerdekakan diri dari jajahan Jepang. Provinsi ini dikenal dengan dedikasi dan perjuangannya dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan dari para penjajah. Perjalanan sejarah terbentuknya Jeollanam-Do sebagai sebuah wilayah di Korea Selatan beberapa kali mengalami perubahan status sampai dengan ditetapkannya wilayah ini sebagai sebuah provinsi sejak Korea Selatan memberlakukan sistem Otonomi Daerah pada tahun 1995. Berikut ini merupakan sejarah provinsi Jeollanam-Do dari masa ke masa.⁵⁹

- Masa Dinasti Tiga Kerajaan (Three Kingdom Dynasty)

⁵⁸ <http://www.jeonnam.go.kr>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2017

⁵⁹ <http://www.jeonnam.go.kr>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2017.

Ibukota terakhir dari Kerajaan Mahan dan pusat Bang Selatan di antara lima Bangs (provinsi administratif) selama Era Dinasti Baekje.

- Masa Dinasti Silla

Mujinju di antara 9 Ju dan 5 Sugyeong (provinsi administratif dan distrik), yang disebut sebagai "Muju" pada tahun 757, selama 16 tahun masa pemerintahan Raja Gyeongbok.

- Masa Dinasti Goryeo

Dinamai "Haeyang-do" pada tahun 995, selama 14 tahun masa pemerintahan Raja Seongjong dan berganti nama menjadi Jeolla-do pada tahun 1018, selama 9 tahun pemerintahan Raja Hyeonjong

- Masa Dinasti Joseon

Eolla-do dibagi menjadi Jeollabuk-do dan Jeollanam-do pada tanggal 4 Agustus 1896, selama 32 tahun pemerintahan Kaisar Gojong sesuai dengan Perintah Kekaisaran No. 36

- Masa Kini

Kota Gwangju dipromosikan menjadi Kota Metropolitan Gwangju dan terpisah dari Jeollanam-do pada tanggal 1 November 1986

Kantor Provinsi Jeollanam-do dipindahkan dari Kota Metropolitan Gwangju ke Muan-gun, Jeollanam-do pada bulan November 2005

5.9.4 Politik dan Pemerintahan

Seperti daerah-daerah yang ada di seluruh dunia pada umumnya, Pemerintah Provinsi Jeollanam-Do memiliki sebuah visi dan tujuan utama. Visi Pemerintah Provinsi Jeollanam-Do yakni "Memimpin bidang Logistik, Pariwisata, Industri Masa

Depan di Wilayah Timur Laut Asia". Kemudian tujuan utama dari Pemerintah Provinsi Jeollanam-Do antara lain;

- Perluasan jaringan logistik, transportasi, dan informasi untuk menciptakan basis pertumbuhan di wilayah Timur Laut Asia.
- Menjadi mesin pertumbuhan di masa depan dan mengembangkan industri-industri tradisional untuk memungkinkan pembangunan ekonomi lokal.
- Memimpin penghijauan yang rendah karbon dengan menumbuhkan industri yang ramah lingkungan.
- Membentuk budaya dan pariwisata bahari yang berbasis di wilayah Timur Laut Asia sebagai pusat wisata bahari baru.
- Membangun lingkungan yang menarik dan sejahtera dengan pendidikan yang maju.

Sebagai sebuah provinsi, Jeollanam-do memiliki wilayah administratif yang terdiri dari beberapa bentuk administratif yang berbeda, yaitu wilayah administratif yang berbentuk kota dan wilayah administratif yang berbentuk kabupaten. Terdapat 5 kota dan 17 kabupaten yang dimiliki Provinsi Jeollanam-Do. Di bawah ini adalah daftar kota dan kabupaten yang terdapat di Provinsi Jeollanam-do.

Tabel 5.12
Kabupaten di Provinsi Jeollanam-Do

No.	Kabupaten	Kota
1	Boseong	Gwangyan
2	Damyang	Mokpo
3	Gangjin	Naju
4	Goheung	Suncheon

5	Gokseong	Yeosu
6	Gurye	
7	Haenam	
8	Hampyeong	
9	Hwasun	
10	Jangheung	
11	Jangseong	
12	Jindo	
13	Muan	
14	Shinan	
15	Wando	
16	Yeongam	
17	Yeonggwang	

Gambar 5.25

Letak Geografis Kota/Kabupaten di Provinsi Jeollanam-Do⁶⁰

⁶⁰ <http://www.jeonnam.go.kr>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017.

Negara Korea Selatan yang menganut sistem demokrasi sehingga setiap 4 tahun sekali diadakan pemilihan umum untuk memilih seorang Gubernur, Walikota/Bupati, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Provinsi Jeollanam-Do saat ini dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Kim Kab Seob yang terpilih pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun ini.

Gubernur Jeollanam-Do dibantu oleh dua wakil gubernur. Kedua wakil gubernur tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Wakil gubernur pertama bertugas pada urusan administratif (*Administrative Affairs*) yang membawahi Departemen Audit dan Inspeksi (*Audit and Inspection Office*), Departemen Kebijakan Keluarga dan Perempuan (*Women and family Policy Office*), dan Markas Besar Sirkuit F1 (*F1 Circuit Support Headquarters*). Sedangkan wakil gubernur kedua bertugas pada urusan politik (*Political Affairs*) yang membawahi Departemen Ketenagakerjaan (*Job Policy Office*). Kemudian, di bawah Departemen Ketenagakerjaan terdapat Divisi Daya Tarik Investasi (*Investment Attraction Division*) dan Biro Usaha Kota (*Enterprise Cities Bureau*).

Selanjutnya terdapat dua departemen dan biro-biro yang kedudukannya tepat berada di bawah Gubernur Jeollanam-Do. Dua departemen yang tadi disebutkan yaitu ada Departemen Juru Bicara (*Office of the Spokesperson*) dan Departemen Hubungan Masyarakat (*Office for Communication with Citizens*). Lalu ada 10 biro dengan tugas dan wewenang berbeda yang dimiliki oleh Provinsi Jeollanam-Do. Biro-biro tersebut kemudian membawahi divisi-divisi terkait. Berikut adalah daftar biro serta divisi yang dibawahinya.

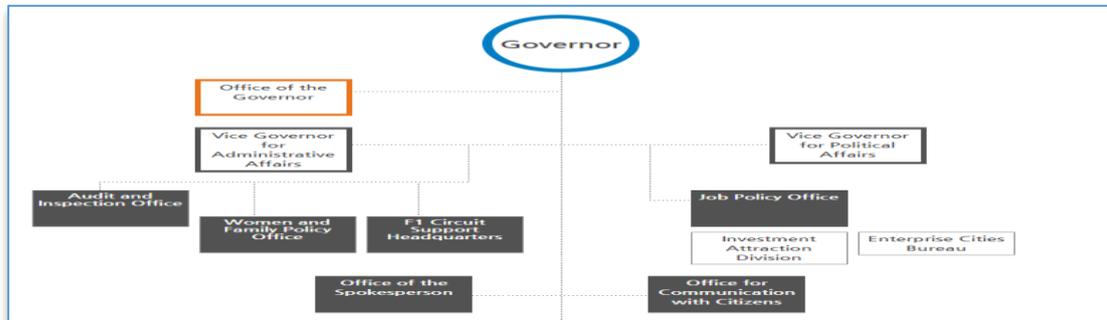
1. Biro Perencanaan dan Koordinasi

- a. Divisi Perencanaan Kebijakan
 - b. Divisi Keuangan
 - c. Divisi Administrasi Pajak
 - d. Divisi Urusan Legal dan Statistik
 - e. Divisi Informasi dan Komunikasi
2. Biro Keamanan Umum
 - a. Divisi Kebijakan Keamanan
 - b. Divisi Managemen Bencana Sosial
 - c. Divisi Manaemen Bencana Alam
3. Biro Ilmu Pengetahuan dan Ekonomi
 - a. Divisi Ekonomi Regional
 - b. Divisi Usaha Kecil dan Menengah
 - c. Divisi Industri Kreatif
 - d. Divisi Industri Energi
 - e. Divisi Kerjasama Internasional
4. Biro Pariwisata, budaya, dan Olahraga
 - a. Divisi Periwisata
 - b. Divisi Seni dan Budaya
 - c. Divisi Arsitektur Lansekap
 - d. Divisi Industri Olahraga
5. Biro Kesehatan dan Kesejahteraan
 - a. Divisi Kesejahteraan Sosial
 - b. Divisi Pelayanan Jompo dan Disabilitas
 - c. Divisi Kesehatan

- d. Divisi Industri Makanan
- 6. Biro Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Produksi Makanan
 - a. Divisi Kebijakan Pertanian
 - b. Divisi Pertanian Ramah Lingkungan
 - c. Divisi Distribusi hasil Pertanian
 - d. Divisi Pelayanan Peternakan
 - e. Divisi Industri Kehutanan
- 7. Biro Kelautan dan Perikanan
 - a. Divisi Kelautan dan Pelabuhan
 - b. Divisi Sumber Daya Perikanan
 - c. Divisi Pemrosesan dan Pendistribusian hasil Perikanan
- 8. Biro Konstruksi dan Manajemen Kota
 - a. Divisi Perencanaan Regional
 - b. Divisi Jalan dan Transportasi
 - c. Divisi Pengembangan Arsitektur
 - d. Divisi Manajemen Lahan
- 9. Biro Administrasi dan Urusan Provinsi
 - a. Divisi Umum
 - b. Divisi Administrasi Otonomi Lokal
 - c. Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
 - d. Divisi Akuntansi
- 10. Markas Besar Departemen Pemadam Kebakaran
 - a. Divisi Administrasi Pelayanan Kebakaran
 - b. Divisi Pengamanan Kebakaran

- c. Divisi Pertolongan Pertama
- d. Ruang penanganan kondisi darurat

Gambar 5.26 : Struktur Organisasi Pemerintahan Jeollanam-Do⁶¹



Dalam bursa internasional, Provinsi Jeollanam-Do memiliki hubungan-hubungan bilateral yang dijalin dengan banyak kota/provinsi/negara bagian ataupun instansi yang tersebar di seluruh belahan dunia. Salah satunya yaitu dengan Provinsi Jawa Barat. Beberapa hubungan-hubungan tersebut merupakan hubungan yang berbentuk *sister city*. Berikut ini adalah daftar bursa internasional yang telah dijalin Provinsi Jeollanam-Do⁶²: 1) Oregon, Amerika Serikat; 2) Arizona, Amerika Serikat; 3) Negara Bagian Maryland, Amerika Serikat; 4) Negara Bagian Missouri, Amerika Serikat; 5) Departemen Boyaca, Columbia; 6) Negara Bagian Novosibirsk, Rusia; 7) Provinsi Chuy, Kyrgyzstan; 8) Negara Bagian Schleswig-Holstein, Jerman; 9) Negara Bagian Bremen, Jerman; 10) Regional Moravia-Silesia, Republik Ceko; 11) Provinsi Shanxi, China; 12) Hunan, China; 13) Jiangxi, China; 14) Jiangsu, China; 15) Shanghai, China; 16) Fujian, China; 17) Nagasaki, Jepang; 18) Kochi, Jepang; 19) Rayong, Thailand; 20) Ba Ria-Vung Tau, Vietnam; 21) Sulawesi, Indonesia; 22) Jawa Barat, Indonesia.

⁶¹ <http://www.jeonnam.go.kr>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017.

⁶² <https://www.jeonnam.go.kr>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017

5.9.5 Potensi Sosial dan Ekonomi

Kondisi geografis Provinsi Jeollanam-Do yang proporsional di mana terdapat dataran tinggi di wilayah Utara dan Timur dan dataran rendah dan lautan di sebelah Selatan dan Barat serta terdapat 2.219 pulau yang menyumbang 65% pulau yang ada di Korea Selatan menjadikan Provinsi Jeollanam-Do memiliki potensi ekonomi yang besar. Tercatat pendapatan domestik Jeollanam-Do telah mencapai 61.095,3 triliun won pada tahun 2013 dengan pendapatan per kapita sebesar 34,6 juta won.⁶³ Hal tersebut menjadikan Provinsi Jeollanam-Do mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar. Wilayah Utara Jeollanam-Do yang merupakan dataran tinggi sangat cocok untuk usaha perkebunan dan peternakan juga wilayah selatannya yang merupakan dataran rendah dan lautan menjadikan Jeollanam-Do potensial di bidang perikanan tangkap. Tidak hanya potensi ekonomi konvensional, Jeollanam-Do juga memiliki potensi ekonomi perindustrian modern. Terdapat tiga industri modern utama yang diunggulkan Provinsi Jeollanam-Do, industri-industri tersebut yakni industri petrokimia, industri baja, dan industri perkapalan. Status ekonomi pada tiga industri utama Jeollanam-Do dapat kita lihat pada tabel berikut

Tabel 5.13
Persentase Industri Utama di Jeollanam-Do⁶⁴

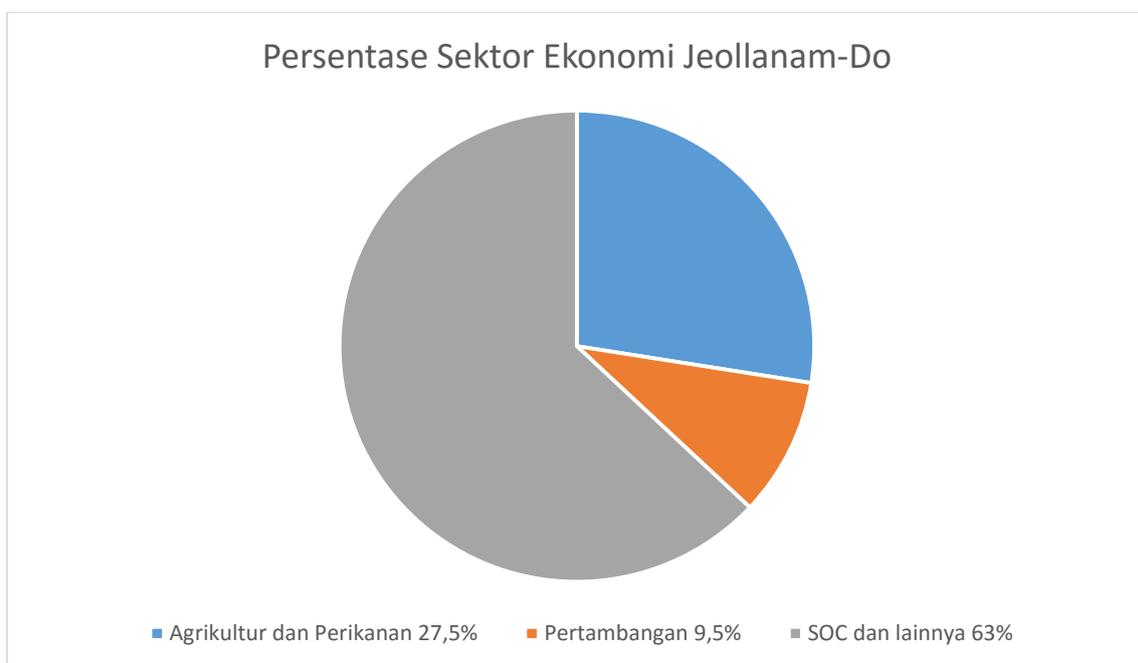
Klasifikasi	Keseluruhan	Tiga Industri Utama				Persentase Industri Utama
		Total	Petrokimia	Industri Baja	Industri Perkapalan	
Jumlah Perusahaan	1.511	727	203	267	257	48,1

⁶³ <http://www.knoema.com>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017.

⁶⁴ <http://www.jeonnam.go.kr>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017.

Jumlah Karyawan	80.178	56.472	18.926	16.640	20.906	70,4
Produksi (USD)	126,0	118,7	91,8	21,8	5,1	94,2
Ekspor (USD)	357,8	281,4	281,4	45,3	21,1	97,2
Impor (USD)	388,7	324,0	324,0	7,2	0,4	85,3

Gambar 5.27
Persentase Sektor Ekonomi Jeollanam-Do⁶⁵



Dari gambar di atas terlihat sektor agrikultur dan perikanan menempati posisi kedua dan memiliki persentase yang cukup besar, yakni 27,5%. Disusul dengan pertambangan sebesar 9,5% dan sisanya berada pada sektor SOC dan lain-lain. Negara Korea selatan yang telah maju tidak membuat mereka meninggalkan sektor

⁶⁵ <https://www.neargov.org>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

ekonomi konvensional. Sebaliknya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, mereka memanfaatkannya untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut.

Termasuk Jeollanam-Do, provinsi ini terus meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil sektor agrikultur dan perikanan. Dengan modal kondisi geografis yang dimiliki dan didorong dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju serta adanya dukungan dari pemerintah yang terus berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang tepat terhadap agrikultur dan perikanan menjadikan Provinsi Jeollanam-Do sebagai provinsi dengan sektor agrikultur dan perikanan terbaik di tingkat nasional Korea Selatan.

BAB VI

ANALISA PROSPEK KERJASAMA PROVINSI BERSAUDARAPEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI BELGIA, BELANDA, RUSIA, SUDAN, MAROKO DAN KOREA SELATAN

6.1 WALLONIA REGION, BELGIA

6.1.1 Hubungan Bilateral Indonesia – Belgia

Hubungan bilateral Indonesia dan Belgia dimulai sejak tahun 1947 ketika Belgia menjadi anggota Komisi Tiga Negara (KTN) bersama dengan Australia dan Amerika Serikat untuk mengatasi perselisihan antara Indonesia dan Belanda pada Agresi Militer Pertama Belanda. Saat itu Belgia mewakili Belanda selama perundingan dengan Indonesia. Di tahun 1949, Belgia menjadi salah satu dari negara-negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Setahun berselang, perwakilan masing-masing negara resmi dibuka di Jakarta dan Brussels.

Hubungan bilateral kedua negara terus berkembang yang ditandai dengan kunjungan tingkat tinggi diantara kedua belah pihak. Hubungan kedua negara secara politik selama ini terjalin dengan baik, baik di lingkup bilateral maupun dalam kerjasama di forum regional dan internasional. Hubungan baik tersebut tercermin pula pada kepedulian Belgia terhadap bencana tsunami Aceh dan Nias dan gempa bumi di Sumatra Barat dan Yogyakarta melalui pemberian bantuan kepada Indonesia untuk penanggulangan bencana tersebut. Hubungan Indonesia dengan Belgia walaupun terjalin dengan baik namun masih perlu ditingkatkan lagi terutama melalui kunjungan pejabat tinggi kedua negara yang intensif untuk saling bertukar informasi dan mencari peluang peningkatan kerja sama bilateral.

Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia sepakat memperkuat kerja sama di bidang ekonomi sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan hubungan bilateral kedua negara yang sudah terjalin selama hampir 67 tahun. Saat ini sudah terdapat sekitar 2.000 perusahaan Belgia beroperasi di Indonesia. Jumlah transaksi perdagangan Indonesia dan Belgia di tahun 2015 mencapai angka 1,67 milyar dolar Amerika Serikat, sedangkan angka investasi selkitar 7 juta dolar Amerika Serikat. Dalam 6 tahun terakhir, neraca perdagangan diantara kedua negara selalu mengindikasikan surplus untuk Indonesia.

Total nilai perdagangan bilateral di tahun 2016 terhitung mencapai 1,61 milyar USD dengan menunjukkan surplus 634 milyar USD untuk Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia ke Belgia terdiri dari alas kaki (28,1%), pakaian (15,2%), *furniture* (4,5%), perekam suara (3,2%), benang sintesis (2,9%), ban (2,7%), kopi (2,7%), kayu tripleks (2,2%), daun tembakau (1,7%), kertas (1,5%), lampu (1,3%), jeroan (1,1%), dan cat sintesis (1,0%). Sebaliknya, Indonesia mengimpor beberapa produk dari Belgia yang terdiri dari produk kimia (11,1%), susu terkonsentrasi (9,1%), kompresor angina (4,8%), kertas daur ulang (3,1%), darah/vaksin *raw materials* (2,9%), produk kimia nitrogen heterosiklik (2,8%), pupuk kimia (2,8%), mentega (2,8%), truk (2,6%), obat-obatan (2,3%), coklat (2,3%), tepung gandum (1,4%).⁶⁶

Di bidang investasi, realisasi investasi Belgia di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 mencapai US\$ 1,4 juta dalam 6 proyek, tahun 2007 sebesar US\$ 3,7 juta dalam 4 proyek, tahun 2008 mencapai US\$ 23,2 juta dalam 2 proyek, dan tahun 2009 tercatat realisasi investasi Belgia di

⁶⁶ Rilis KBRI Brussels

Indonesia sebesar US\$ 1,8 juta dalam 5 proyek. Total nilai investasi Belgia di Indonesia dari tahun 1990-2009 adalah senilai US\$ 393,2 dalam 56 proyek.⁶⁷ Pada umumnya investasi Belgia di Indonesia bergerak di bidang perkebunan, keramik dan kaca, baja, farmasi, garmen dan tekstil. Sejumlah perusahaan Belgia berkomitmen menanamkan investasi di Indonesia dalam jangka waktu panjang. Patrick Herman, Duta Besar Kerajaan Belgia untuk Indonesia, mengungkapkan, kebanyakan perusahaan Belgia yang berinvestasi di Indonesia adalah perusahaan skala kecil dan menengah yang kemudian berkembang menjadi sebuah perusahaan global. Setidaknya ada tiga perusahaan Belgia yang telah menanamkan investasi di Indonesia dan beroperasi di wilayah Jawa Barat –Karawang dan Cikarang-, yaitu:

PT Eternit Gresik

PT Eternit Gresik adalah perusahaan manufaktur yang menjual berbagai material bangunan, seperti berbagai material untuk atap bangunan, material pelapis bangunan (*cladding*), lapisan penahan dan penyekat api, serta keramik. Perusahaan ini beroperasi di 42 negara dengan lebih dari 17 ribu karyawan dengan nilai penjualan per tahun sekitar 3 miliar euro.

PT Bekaert Indonesia

PT Bekaert Indonesia adalah salah satu perusahaan terdepan yang memproduksi kawat baja dan teknologi pelapisan (*coating*). Bekaert saat ini menjadi perusahaan global yang mempekerjakan hampir 30 ribu karyawan dengan pendapatan per tahun sekitar 4,4 miliar euro.

⁶⁷ Rilis KBRI Brussels; Direktorat Eropa Barat, Kemlu

BKS (*Belgium Knives Services*)

Perusahaan penyedia dan penggilingan pisau ini telah beroperasi selama 30 tahun. Produk BKS tersebar dari pisau kecil hingga pisau yang bisa memotong 360 derajat. Pisau yang dihasilkan oleh BKS digunakan industri plastik, daur ulang, makanan, tekstil, dan masih banyak lagi.

Gambar 6.1**Presiden Joko Widodo dan Putri Astrid**

Kebijakan Pemerintah Belgia untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan ditandai dengan kunjungan resmi Putri Astrid, adik Raja Belgia, yang memimpin delegasi ekonomi Belgia untuk bertemu Presiden Jokowi dan lebih lanjut berkunjung ke sejumlah daerah guna membicarakan kerjasama ekonomi,

perdagangan dan investasi. Presiden Jokowi menyambut baik kedatangan Putri Astrid berserta 300 delegasi dari kalangan bisnis Belgia. Diharapkan kunjungan ini dapat mempererat hubungan bilateral, terutama kerjasama di bidang ekonomi. Sebab, Indonesia merupakan basis pintu produksi dan pintu masuk barang-barang Belgia ke Asia Tenggara. Misi ekonomi ini terdiri dari pejabat tinggi, wakil presiden dan menteri dari level federal dan regional, dan pebisnis serta media.

Dalam rangka kunjungan ke Jakarta, Putri Astrid juga melakukan kunjungan ke Bogor, Bandung, Karawang, dan Bekasi. Di sela-sela kunjungan delegasi besar tersebut, Wakil Presiden Wallonia dan Komunitas Berbahasa Prancis di Belgia, Jean-Claude Marcourt memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kunjungan resmi ke Yogyakarta. Dalam kunjungannya, Putri Astrid meresmikan pabrik papan semen fiber, PT Eternit Gresik di Surya Cipta Industrial Residence, Karawang. Beberapa *MoU* juga sudah ditandatangani antara Belgia dan Indonesia pada tingkat pemerintah, pebisnis, dan akademisi. Sektor investasi terbesar Belgia di Indonesia adalah perkebunan, baja, farmasi, garmen dan tekstil, pergudangan, transportasi, dan telekomunikasi. Perusahaan Belgia terbesar di Indonesia adalah Solval (materi kimia), SIPEF (perkebunan), Bakaert (Industri baja), dan Delhaize (retail dan supermarket).

Kebijakan Pemerintah Belgia mendapatkan sambutan sangat positif di semua lini, termasuk khususnya di BKPM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2016 telah hadir perwakilan dari sekitar 127 perusahaan Belgia untuk berdiskusi dengan BKPM. Pada berita yang dirilis Bisnis.com, Pemerintah Indonesia mengincar masuknya investasi dari Belgia pada sejumlah sektor usaha di tanah air. Pemerintah berfokus mengambil peluang investasi

langsung dari sektor manufaktur, perkebunan, dan energi terbarukan dalam kerja sama bilateral bidang ekonomi dengan Belgia. Belgia telah memilih Indonesia sebagai fokus hubungan ekonomi dan perdagangan di wilayah Asia Tenggara dengan keuntungan sebagai basis pemasaran untuk 650 juta populasi di sepuluh negara ASEAN. Kesempatan ini memberikan peluang bagi Belgia untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya ke Indonesia begitu pula sebaliknya bagi Indonesia yang akan memperoleh akses yang lebih luas untuk memasarkan produk-produk manufakturnya di Eropa Barat. Seperti yang telah diketahui, Indonesia juga mengincar komoditas coklat Belgia untuk dapat diproduksi di Indonesia dan dipasarkan setidaknya di kawasan Asia-Pasifik.

Presiden Jokowi menyampaikan harapan agar terjadi peningkatan hubungan dagang bilateral yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan Belgia. Peningkatan hubungan ini dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan peningkatan interaksi antara komunitas bisnis kedua negara serta perluasan akses pasar bagi produk Indonesia, seperti produk alas kaki, karet, tekstil, elektronik, dan furnitur. Presiden juga mengundang investor Belgia untuk meningkatkan investasinya di sektor strategis Indonesia, antara lain infrastruktur, telekomunikasi, industri perfilman, dan bahan baku obat.

Sebagai langkah balasan dalam rangka lebih memperkuat relasi bilateral, Presiden Joko Widodo mengunjungi Belgia pada bulan April 2016 dan bertemu dengan Raja Belgia, yang disusul kunjungan kedua pada bulan Oktober 2016 untuk membuka secara resmi Festival Europalia Indonesia 2017 bersama dengan Raja Philippe. Festival Europalia merupakan acara dua tahunan yang diselenggarakan oleh Belgia untuk mempertunjukkan seni dan budaya dari negara tamu terpilih.

Indonesia adalah negara kedelapan di luar Uni Eropa yang telah dipilih sebagai negara tamu sejak pertama kali festival ini diselenggarakan pada tahun 1949. Pemilihan Indonesia sebagai negara tamu Festival Europalia Indonesia 2017 diharapkan akan dapat dioptimalkan sebagai sarana promosi budaya dan pariwisata Indonesia serta meningkatkan *people-to-people contact*.

Lebih jauh Presiden menyambut baik kerjasama kebudayaan Indonesia-Belgia, termasuk taman bertemakan Indonesia “Kingdom of Ganesha” di dalam taman Pairi Daiza, Belgia. Pairi Daiza Park yang berlokasi di Brugelette memiliki luas wilayah sebesar 6,2 hektar yang diresmikan oleh Menteri Pariwisata, Jero Wacik, pada tahun 2009 silam. Pemerintah Indonesia mengirimkan dua gajah ke Belgia pada perayaan kemerdekaan 17 Agustus 2009 ke Pairi Daiza Park. Kedua gajah tersebut merupakan hadiah simbolis untuk merayakan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Belgia. Indonesia juga diberikan kehormatan untuk memakaikan baju tradisional Lampung di maskot Brussels, *Manneken Pis*, pada 18-19 Agustus 2008.

Dalam sektor pendidikan tinggi, beberapa universitas di Indonesia dan Belgia telah menjalin hubungan kerja sama dalam bidang akademik dan penelitian. Beberapa universitas tersebut adalah *Ghent University*, *Leuven University*, *Liège University* dari Belgia, dan Universitas Gadjah Mada, Universitas Paramadina, Universitas Bina Nusantara dari Indonesia. Kerja sama meliputi penelitian bersama, pertukaran pelajar dan dosen, pelatihan bersama dan mencakup berbagai bidang, seperti: manajemen bisnis, sistem pertanian, teknologi pangan, dan pengelolaan wilayah tertentu dan perlindungan terhadap keanekaragaman satwa liar.

6.1.2 Analisis Target Kerjasama

Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki 27 kabupaten dan kota dengan beragam potensi yang dimiliki masing-masing. Sebagai salah satu barometer pembangunan ekonomi dan kemajuan di tanah air, sudah menjadi keharusan bagi Jawa Barat untuk lebih giat dan kuat dalam membantu peningkatan capaian perekonomian nasional dengan performa dan kinerja yang baik. Beberapa proses dan kebijakan pemekaran yang terjadi pada era otonomi daerah juga menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki komitmen kuat untuk menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi contoh dan motivator bagi provinsi-provinsi lain di tanah air yang masih memiliki performa dan kinerja minimal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan Provinsi Jawa Barat yang secara detail dijabarkan dalam visi dan misi, Provinsi Jawa Barat memiliki inisiatif untuk membuka hubungan kemitraan dan kerjasama dengan daerah dan wilayah di luar negeri sebagai motivasi, inspirasi, kombinasi, dan komparasi yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan sekaligus memperkuat performa dan kinerja daerah dalam semangat menciptakan Provinsi Jawa Barat yang tidak hanya maju, namun juga unggul tak hanya secara nasional, namun juga regional dan global. Mengingat visi dan misi Provinsi Jawa Barat adalah “*Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia*”; dengan visi “*Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera*”. Visi Provinsi Jawa Barat dapat dijabarkan sebagai berikut:⁶⁸

- Mandiri, yaitu sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan

⁶⁸ Website Pemerintah Provinsi Jawa Barat

kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis *e-government*, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air;

- Dinamis, yaitu sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan;
- Sejahtera, yaitu sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Kata ‘mandiri’, ‘dinamis’, dan ‘sejahtera’ dimaksud diarahkan untuk menciptakan Provinsi Jawa Barat yang berkualitas dan berdaya saing pada era globalisasi ekonomi dengan dinamika persaingan terbuka pada semua tataran; memperkuat potensi dan kapasitas daerah untuk meningkatkan daya saing; menciptakan aparatur pemerintahan yang berkualitas untuk mendukung daya saing, dan; meraih suatu kondisi sosial ekonomi yang adil dan merata sebagai basis kesejahteraan.

Inisiatif Jawa Barat untuk melebarkan jejaring dengan membentuk kemitraan dan kerjasama komprehensif dengan masyarakat internasional adalah bagian dan amanat dari misi, utamanya terkait dengan upaya membangun kemandirian, menghadapi dinamika perkembangan serta kemajuan peradaban, dan mencapai kondisi sejahtera dalam semua sektor kehidupan. Program dan desain konstruksi *sister-region* dengan sejumlah wilayah di semua benua diharapkan akan mampu mewujudkan Jawa Barat yang mandiri, bersaing, dan unggul.

Terkait dengan intensitas Provinsi Jawa Barat untuk menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan yang sangat aktif, maka hal ini akan terkait dengan

bagaimana Provinsi Jawa Barat secara optimal membuka diri dalam rangka untuk memperlihatkan potensinya, sekaligus berupaya untuk memperkuat potensi-potensi yang dimiliki sebagai modalitas kerjasama dan bermitra dengan kawasan-kawasan lainnya baik di belahan Asia-Pasifik dan Oceania, maupun dengan Eropa, Timur-Tengah dan Afrika yang secara aktif dimulai pada 2015-2016 dan akan diupayakan keberlanjutannya di masa mendatang.

Potensi lengkap Jawa Barat hendaknya tidak disia-siakan tatkala Jawa Barat berupaya membangun kemitraan dan kerjasama dengan kawasan lain di luar negeri sebagai stimulan sekaligus insentif kepada kabupaten dan kota untuk lebih serius berkomitmen dalam memajukan daerahnya sekaligus menjadi yang terbaik.

Bergabungnya Provinsi Jawa Barat dalam Forum Pemerintah Daerah Asia-Pasifik di Nara, Jepang, yang beranggotakan 76 pemerintah daerah dari sembilan negara; kunjungan sejumlah figur penting representasi pemerintah dari sejumlah negara termasuk dari Eropa;⁶⁹ dan penandatanganan sejumlah dokumen kerjasama serta nota kesepahaman dengan beberapa wilayah kawasan di luar negeri menjadi bukti sekaligus indikator dan komitmen Provinsi Jawa Barat untuk memajukan wilayahnya sebagai percontohan nasional pada banyak sektor.⁷⁰ Upaya membuka dan membangun jejaring serta kerjasama dengan sejumlah kawasan di Eropa, termasuk dengan Belanda, Belgia dan Russia diharapkan dapat berbuah positif dalam memperkuat dan mengembangkan potensi Jawa Barat.

⁶⁹ Kunjungan Duta Besar Perancis, Corinne Breuze tahun 2014; Kunjungan Duta Besar Belgia, Patrick Herman tahun 2015, dan Utusan Khusus Pemerintah Kerajaan Belgia, Putri Astrid tahun 2016 ke Bandung, Bogor dan Karawang dengan maksud menawarkan kerjasama dan investasi berbagai sektor di Jawa Barat.

⁷⁰ Tim Humas, Provinsi Jawa Barat

Hal ini juga ditujukan juga untuk bisa memetik hal-hal positif dengan kawasan target kerjasama yang pada gilirannya akan dapat menjadi referensi motivasi dan inspirasi untuk membuka tali simpul potensi yang masih belum optimal tergali, serta menguatkan potensi yang telah ada dalam rangka mencapai titik keunggulan. Sebagai contoh secara garis besar, wilayah-wilayah Bekasi, Karawang, Subang dan Purwakarta adalah merupakan sentra sekaligus basis industri Jawa Barat dan nasional sebagai yang terdepan dalam upaya memperkuat sektor perindustrian. Melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai kawasan di luar negeri hendaknya juga akan membuka peluang bagi daerah-daerah yang selama ini relatif 'terisolir' seperti Sumedang, Kuningan, dan Sukabumi.

Sementara itu, pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka idealnya dapat dimaknai sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan laut di Cirebon instrumen infrastruktur untuk lebih membuka wilayah Jawa Barat secara internasional, yang kemudian juga peningkatan fungsi bandara-bandara kecil seperti di Tasikmalaya, dan Astanajapura (Cirebon) –Jakarta dan Rotterdam telah menjalin *sister-region* yang salah satu domainnya adalah pelabuhan laut dengan merujuk Rotterdam sebagai salah satu pelabuhan laut terbesar dan terkemuka tak hanya di kawasan Eropa, namun juga dunia. Hal-hal tersebut menjadi sebuah kemudahan untuk semakin meningkatkan hubungan luar negeri sehingga upaya untuk memperkuat potensi daerah akan semakin dapat terwujud.

Potensi ekonomi perdagangan dari sektor agraris –pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan – juga seharusnya menjadi pertimbangan bagi Jawa Barat untuk lebih mampu melakukan eksplorasi dalam menjalin hubungan luar negeri. Jawa Barat juga memiliki kekayaan budaya dan potensi wisata yang

akan mampu tidak hanya meningkatkan citra dan martabat Jawa Barat yang lebih dikenal secara global, namun juga sebagai salah satu sumber pendapatan riil daerah serta variabel penentu kesejahteraan. Keberadaan beberapa perguruan tinggi favorit – ITB, IPB, UI, Unpad, UPI - seyogianya dapat dimanfaatkan Jawa Barat untuk lebih mendongkrak *aptitude* dan *skill* bagi sumber daya manusia-nya, khususnya aparaturnya pemerintah daerah sebagai instrumen utama dalam melakukan hubungan luar negeri.

Dalam konteks membangun hubungan kemitraan, langkah melibatkan perguruan tinggi dan dunia riset patut dikedepankan, terutama pada saat Jawa Barat berupaya menjalin kerjasama dan kemitraan dengan kawasan atau wilayah seperti Wilayah Wallonia. Sebagai langkah awal ada baiknya fondasi dari pembentukan *sister province* bisa dimulai dari kerjasama pelaku usaha dalam hal ini antara KADIN Jawa Barat, berikut asosiasi pengusaha dengan mitranya di Wallonia. Dengan merujuk pada intensitas dan volume kerjasama di banyak sektor secara bilateral antara Indonesia dan Belgia, maka hal ini dapat menjadi payung bagi upaya Jawa Barat untuk membangun jejaring kerjasama dalam wujud kemitraan dengan Wallonia.

Hubungan Jawa Barat dan Belgia sesungguhnya telah terbangun sejak lama –sekitar kurang lebih dua dekade- sejak Belgia memiliki sejumlah investasi di bidang tekstil, logam, alat elektronik dan mesin berat. Rintisan hubungan secara lebih serius antara Jawa Barat dengan Belgia diawali pada saat kunjungan kerja Gubernur Ahmad Heryawan ke Belgia pada tahun 2009 silam sebagai kunjungan balasan Pangeran Philippe ke Bandung sebelumnya. Kunjungan tersebut ditujukan untuk

memperluas jejaring dan hubungan yang pada gilirannya dapat memberikan makna positif bagi pembangunan Jawa Barat.

Gambar 6.2
Kunjungan Misi Belgia ke Jawa Barat



Proses jalinan hubungan ini berlanjut tatkala Jawa Barat akhirnya mendapatkan kesempatan kunjungan Putri Astrid dalam rangkaian kunjungan ke

Indonesia dengan rombongan delegasi yang besar -300 orang dengan 127 perwakilan perusahaan- pada tahun 2016 lalu. Wakil Gubernur Deddy Mizwar berkesempatan menerima kunjungan kehormatan tersebut.

Dalam kesempatan ini, Misi Belgia kali ini menjadi yang ketiga berkunjung ke Jawa Barat. Semangat dalam kunjungan Delegasi Belgia adalah untuk mempererat hubungan ekonomi dan perdagangan, termasuk khususnya dengan Wilayah Wallonia. Sejumlah sektor diharapkan dapat menjadi titik utama jalinan hubungan antara kedua wilayah seperti: pertanian –khususnya produk kopi-, ekonomi kreatif,

fashion, pariwisata –Garut, Kabupaten Bandung-, konservasi dan pemerliharaan lingkungan hidup, pendidikan, sains dan teknologi.

Sementara itu, salah satu yang menjadi titik perhatian yang ditawarkan oleh Wallonia adalah teknologi pertanian –pengolahan makanan dan peternakan-. Penandatanganan *letter of intent* sebagai *prologue* dari jalinan kerjasama telah dilakukan antara Wakil Gubernur Jawa Barat dan Wakil Presiden Negara Bagian Wallonia, Jean Claude Marcourt, yang disaksikan sendiri oleh pimpinan delegasi, Putri Astrid, pada tanggal 17 Maret 2016.

Rancangan kerjasama ini akan mencakup sektor pendidikan, ekonomi, perdagangan, pariwisata, kesehatan, konservasi lingkungan, sains dan teknologi. Faktor penting yang menjadi modalitas Jawa Barat untuk membangun kerjasama secara umum adalah kekuatan sektor industri nasional yang tersentra sebagian di kawasan Jawa Barat. Mengikuti faktor ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlunya kerjasama untuk penguatan teknologi dan sains dalam bidang lingkungan hidup, teknik penyehatan lingkungan.

Dalam rangkaian desain kerjasama antara kedua wilayah, Wallonia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kota Bandung untuk membentuk Proyek *Smart City*, dan juga kontrak kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung untuk sektor pendidikan tinggi. Dalam kesempatan yang lain, Belgia melalui *Flanders Investment and Trade* juga menawarkan investasi untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan, reklamasi pantai, dan pembangkit listrik tenaga angin. Berkenaan dengan tawaran investasi di bidang kemaritiman – infrastruktur pelabuhan dan reklamasi pantai-, perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Jawa Barat untuk mempertimbangan dua ruas kawasan di koridor utara

dan selatan. Koridor utara sejalan dengan paket yang disepakati dengan pemerintah pusat yaitu terkait pembangunan kawasan pesisir utara.

Jawa Barat perlu mempertimbangkan untuk mengupayakan pembangunan dan peningkatan kapasitas Pelabuhan Laut Cirebon sebagai pintu perdagangan dan ekspor impor untuk produk Jawa Barat, sekaligus menjadi penopang lalu lintas perdagangan untuk beberapa kawasan di Jawa Tengah seperti Tegal, Brebes, dan Banyumas. Ambisi Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah unggulan sudah barang tentu harus dibekali sarana infrastruktur ekonomi yang memadai termasuk pelabuhan laut yang bertaraf internasional dan dilengkapi dengan dok perkapalan, pelabuhan peti kemas yang berkelas.

Gambar 6.3 : Sektor Prospektif Kerjasama



Status pelabuhan laut Cirebon sebagai milik Jawa Barat harus diperkuat sehingga tidak lagi menjadi pelabuhan sekunder dan pelabuhan penghubung seperti yang selama ini ada. Peningkatan kapasitas pelabuhan Cirebon diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi pesisir di sekitar Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. Ke depannya Pelabuhan Cirebon tidak lagi di

bawah Tanjung Priok, Tanjung Mas dan Tanjung Perak, sehingga akan lebih membuka Jawa Barat secara lebih lebar terhadap kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Provinsi Jawa Barat juga perlu mempertimbangkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi pesisir selatan dari wilayah Kabupaten Pangandaran hingga Kabupaten Sukabumi sebagai upaya untuk lebih memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir selatan, meningkatkan kesejahteraan wilayah, mengoptimalkan potensi ekonomi, termasuk pariwisata laut, dan memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Barat secara integral. Tawaran dari Belgia, dan mungkin Belanda, perlu untuk dipertimbangkan mengingat potensi Jawa Barat secara ekonomi, khususnya dalam hal penguatan ekonomi pesisir, dan kapasitas teknologi serta pengalaman yang dimiliki Belgia dalam hal infrastruktur maritim.

Harapan dan keinginan Jawa Barat untuk memperkuat dan mengembangkan potensi dengan membangun konstruksi kemitraan dengan Wallonia memiliki koherensi dengan proyek negara bagian tersebut dalam mengelola dan memajukan dirinya di tengah-tengah persaingan antara wilayah di Eropa. Program Pemerintah Wallonia melalui Smart Specialisation dan upaya memperkuat kegiatan riset serta pengembangan nampaknya menarik untuk dicermati. Dalam tingkatan keamanan yang lebih baik, program Pemerintah Wallonia ini mungkin akan dapat disesuaikan dengan program kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama dalam hal bagaimana melakukan fokus dan penekanan terhadap potensi-potensi unggulan Jawa Barat, dan kemudian juga memperkuat unit penelitian dan pengembangan pemerintah daerah untuk melakukan upaya kajian secara berkelanjutan terhadap

potensi-potensi unggulan dengan melibatkan institusi perguruan tinggi di Jawa Barat –ITB, IPB, Unpad dan juga perguruan tinggi swasta khususnya di Kota Bandung-.

Kebijakan Pemerintah Wallonia untuk bagaimana mengembalikan peranan kuat wilayah tersebut setelah berakhirnya era industri tradisional –besi-baja dan batubara- adalah langkah yang dapat diimbangi Provinsi Jawa Barat dalam memanfaatkan interaksi kemitraan. Potensi investasi Belgia, khususnya Wallonia, nampaknya akan dapat menuju kesinambungan visi dengan Jawa Barat dengan memperhatikan potensi terkait teknologi pertanian dan pengolahan pangan, pembangunan infrastruktur, industri kimia, industri kesehatan, sains-teknologi dan pariwisata. Intensitas dan kekuatan Wallonia dalam melakukan riset dan pengembangan untuk sektor ekonomi selayaknya dapat diselaraskan dengan program pengembangan riset Provinsi Jawa Barat terutama terkait bagaimana mengupayakan fokus produk-produk ekonomi unggulan Jawa Barat.

Industri kreatif dan unit usaha kecil-menengah nampaknya juga patut dipertimbangkan untuk digandeng terkait strategi dan komitmen bagaimana Jawa Barat akan mampu memperkuat industri kreatif dan UKM setempat sebagai faktor penopang industri dan pariwisata daerah. Kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan sekitar bekas Karesidenan Cirebon mungkin bisa diproyeksikan menjadi target aplikatif kemitraan dengan Wallonia dalam hal industri kreatif dan UKM. Contoh lain untuk sektor terkait –UKM pengolahan produk makanan- adalah produksi pengolahan coklat berbasis teknologi yang dimiliki Belgia adalah salah satu yang termashur di dunia. Provinsi Jawa Barat dalam koridor kemitraan akan dapat mengupayakan transfer teknologi produksi pada produksi pengolahan coklat nasional yang ada di Jawa Barat, selain sebagai potensi ekonomi untuk

meningkatkan pendapatan daerah, juga akan semakin memperkuat popularitas Jawa Barat sebagai sentra coklat di kawasan Asia Tenggara dan pasifik yang implikasinya juga akan terjadi pada ranah pariwisata.

6.2 PROVINSI GELDERLAND, BELANDA

6.2.1 Hubungan Bilateral Indonesia – Belanda

Pengakuan Pemerintah Belanda di bawah kepemimpinan PM Jan Pieter Balkenende atas proklamasi 17 Agustus 1945 pada tahun 2005 di sela-sela peringatan 60 tahun kemerdekaan Indonesia dipandang sebagai sebuah babak baru terpenting antara kedua negara, dan diyakini akan semakin memperkuat hubungan bilateral secara komprehensif di semua sektor.

Momentum tersebut menjadi hal yang paling bersejarah setelah dalam kurun enam dekade Pemerintah Belanda enggan mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari lahir Indonesia sebagai bangsa dan negara berdaulat. Khusus hubungan ekonomi, secara umum semakin menguat baik dalam konteks kunjungan antar pejabat tinggi maupun kerjasama konkrit seperti investasi, kerjasama pembangunan dan berbagai kerjasama teknis lainnya. Indonesia nampak semakin penting sebagai mitra kerjasama ekonomi di sektor-sektor komersial seperti perdagangan dan investasi.

Gambar 6.4
Kunjungan PM Mark Rutte Kepada Presiden Joko Widodo



Pada tahun 2016 yang lalu, tercatat dalam situs Kementerian Luar Negeri adanya kunjungan delegasi Indonesia lebih dari 1700 dalam satu tahun. Investasi Belanda tercatat menunjukkan peningkatan yang ironisnya justru terjadi ketika ekonomi Belanda dalam tekanan dampak krisis. Sektor-sektor investasi Belanda di Indonesia umumnya berkisar pada sektor transportasi, komunikasi, kimia dan industri farmasi, makanan, perdagangan, industri baja, mesin dan elektronik. Jawa Barat menjadi salah satu titik investasi Belanda di Indonesia selain DKI, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Banten. Bagi Indonesia, Belanda dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang pemasaran produk komoditi Indonesia ke Eropa, dan sebaliknya Indonesia diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi pemasaran produk-produk Belanda ke Asia, khususnya Asia Tenggara, dan juga negara-negara Oceania, termasuk Australia.

Kerjasama pembangunan terarah pada substansi pendukung kerjasama ekonomi dan perdagangan seperti bidang pendidikan, riset, pengembangan lingkungan, penyediaan air bersih dan produksi obat-obatan yang terjangkau. Momentum kedua yang terpenting bagi hubungan bilateral kedua negara adalah pada saat kunjungan resmi kenegaraan PM Mark Rutte pada tahun 2016 silam sebagai kunjungan balasan Presiden Jokowi sebelumnya. Pada kesempatan kunjungan resmi kenegaraan tersebut, PM Rutte membawa anggota delegasi yang sangat besar sekitar 200 orang termasuk para pelaku usaha besar Belanda untuk menjajaki kerjasama ekonomi dan perdagangan serta investasi yang lebih luas dengan pelaku usaha Indonesia, termasuk dari kalangan pemerintah daerah. Jumlah besar pengusaha Belanda ini mencerminkan wujud kepercayaan dunia usaha Belanda terhadap iklim investasi di Indonesia yang terus membaik.

Fokus kerjasama ekonomi dan pembangunan yang berhasil disepakati pada momentum kunjungan tersebut adalah di bidang ***infrastruktur maritim, pertanian, perikanan, manajemen iklim dan kesehatan, teknik pengairan, dan pendidikan***. Hal ini tentu saja sangat diharapkan meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral yang pada tahun 2016 tercatat senilai 3,2 juta USD dengan surplus Indonesia mencapai 2,5 miliar USD. Selain itu, kunjungan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang lebih luar dalam kerangka *Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement*. Secara resmi telah ditandatangani empat nota kesepahaman penting di bidang energi, pembangunan infrastruktur, dan teknologi pertanian pangan yaitu: ***investasi panel surya, pembangunan jembatan dan pembangkit tenaga listrik arus laut, pengembangan kapasitas maritim,***

pengembangan produksi benih kentang, yang secara ekstensif memperkuat nota kesepahaman pada tahun 2015 yaitu di bidang kerjasama kelautan, dan perairan.⁷¹

Kerjasama ekonomi dan perdagangan komprehensif Indonesia-Belanda mengacu pada format angka 5 plus 6, yaitu: Angka lima menunjukkan lima bidang utama yaitu perdagangan dan investasi, infrastruktur dan logistik, pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan serta pendidikan; sedangkan angka enam menunjukkan enam bidang kerja sama yang meliputi pariwisata, kesehatan, industri, energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerja sama trilateral dalam konteks pembangunan bersama negara lain. Jauh pada masa sebelumnya, pertemuan *Mixed Economic Commission (MEC)* RI – Belanda telah terselenggara juga dengan tujuan memprioritaskan kerjasama guna mendorong pembangunan maritim sebagai bagian dari implementasi Nawacita sebagai visi utama Kabinet Kerja.

Disepakati untuk menyelenggarakan Forum Infrastruktur di Belanda yang melibatkan para pihak swasta dari kedua negara, serta usulan pembentukan Pokja Infrastruktur, Maritim dan Sektor Swasta untuk tindak lanjut. Pertemuan telah membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan kedua negara di bidang ekonomi, antara lain, kerjasama di bidang maritim, pembangunan infrastruktur, manajemen pengairan, keselamatan penerbangan, perikanan dan pertanian, kerjasama di bidang riset dan teknologi, pariwisata, serta bidang-bidang strategis lainnya. Sebagai informasi, Indonesia dan Belanda jauh hari sebelumnya telah menyepakati Deklarasi Bersama Kemitraan Komprehensif pada tahun 2013.

⁷¹ Antara News 2016; Sindo News 2016; Detik News 2016; Pers Rilis Kemlu-Direktorat Eropa Barat 2016

Belanda merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia di Uni Eropa, dengan nilai perdagangan USD 4,22 miliar tahun 2015, dan USD 3,2 miliar tahun 2016. Belanda juga salah satu investor utama di Indonesia, dengan nilai investasi USD 1,31 miliar tahun 2015, dan USD 631 juta di semester pertama 2016; di sektor pariwisata, jumlah wisatawan Belanda juga menjadi salah satu yang terbesar dari Eropa yaitu tercatat mencapai angka sekitar 170 ribu orang, dan sebaliknya tingkat kunjungan mencapai rata-rata 40 ribu wisatawan Indonesia ke Belanda pada tahun 2016. Di bidang pendidikan, saat ini terdapat 1600 mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda pada semua strata. Secara detail, kemitraan komprehensif yang secara resmi ditandatangani juga pada kunjungan PM Rutte pada tahun 2016 meliputi:⁷²

1. Pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi personel diplomatik RI;
2. Pendidikan vokasi dan pelatihan dengan pilot project sektor pertanian;
3. Kerja sama saling tukar white list perusahaan untuk fasilitasi kemudahan di pelabuhan dan mengurangi *dwelling time*;
4. Kerja sama lingkungan hidup, mencakup aspek perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan *circular economy*;
5. Kerja sama sektor perikanan dan kelautan;
6. Pertukaran informasi elektronik tentang kualitas dan keamanan produk perikanan atau *E-Certification*;
7. Kerja sama pengelolaan air untuk menghadapi tantangan banjir rob di Semarang;

⁷² Antara News 2016; Sindo News 2016; Detik News 2016; Pers Rilis Kemlu-Direktorat Eropa Barat 2016

8. Kerja sama pembangunan pesisir dan revitalisasi pantai utara Jawa;
9. 19 nota kesepahaman kerja sama antar pengusaha di sektor energi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanahan, pertanian dan pariwisata.

Lebih jauh juga diselenggarakan forum-forum diskusi dan dialog antara sejumlah elemen kedua negara -birokrat, pelaku bisnis, akademisi, pemuda dan para pemimpin muda, serta alumni pendidikan Belanda dalam rangka bertukar pemikiran seputar isu-isu maritim, energi, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pembangunan pelabuhan, pendidikan tinggi, pengelolaan air dan ketahanan kota. Lebih jauh terkait kerjasama ekonomi dan perdagangan, merujuk informasi yang dirilis Kementerian Perindustrian, di bidang perindustrian, Indonesia dan Belanda telah menyepakati kerjasama ekonomi di bidang permesinan dan industri pengolahan hasil pertanian serta bahan pangan dengan melibatkan 37 perusahaan dari kedua negara.

Ruang lingkup kerjasama kedua negara ini meliputi analisis pasar, pembinaan ekspor, kegiatan pengembangan bisnis, serta pertukaran informasi tentang perdagangan dan kebijakan industri. Fokus kerjasama Indonesia dan Belanda ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) dan meningkatkan ekspor produk ke Uni Eropa. Kerjasama bisnis tersebut diyakini dapat meningkatkan ekspor bahan makanan dan permesinan ke Belanda hingga € 17,5 juta. Diharapkan dari kerjasama tersebut akan terjadi pertumbuhan ekspor pada sektor *Food Ingredients* sebesar € 7-9, dan untuk *Engineering Sector* sebesar € 8,5 juta. Program ini melibatkan setidaknya 20 perusahaan industri dari sektor *Food Ingredients*, seperti produk teh, kopi, olahan buah-buahan, dan lainnya, serta 17

perusahaan di bidang *Engineering* seperti suku cadang otomotif, dan elektronik. Selain dengan Kementerian Perindustrian, Kerajaan Belanda juga telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerjasama bilateral ini merupakan program terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.⁷³

Berkenaan dengan kebutuhan praktis kerjasama dan kemitraan ekonomi, pertumbuhan industri kreatif di Belanda disebabkan oleh kebutuhan untuk melahirkan produk yang berbeda dengan produk negara lain, tidak hanya sekedar bersaing dalam harga, tetapi juga mengandalkan teknologi, kualitas, jasa, manajemen rantai suplai, kecepatan, disain dan nilai-nilai simbol, karena industri kreatif juga berperan dalam menciptakan identitas nasional dan regional di lingkungan internasional. Belanda merupakan pionir event-event internasional di bidang musik dan tari serta memiliki kekuatan di bidang desain komunikasi. Belanda memiliki tradisi panjang di bidang desain interior dan furnitur serta memiliki pengalaman di bidang pembangunan kota terpadu dan proyek konstruksi, baik dalam bidang arsitektur, lingkungan, kesinambungan, konteks sosial dan perencanaan. Keberhasilan kinerja industri kreatif tersebut antara lain didorong oleh penerapan standar yang tinggi bagi pendidikan desain, keberadaan perusahaan-perusahaan terkemuka yang menghubungkan inovasi, kreativitas dan bisnis, serta kondisi topografis dan sosial Belanda, seperti keterbatasan ruang dan keberadaan air yang sangat besar.

⁷³ Antara News 2016; Sindo News 2016; Detik News 2016; Pers Rilis Kemlu-Direktorat Eropa Barat 2016

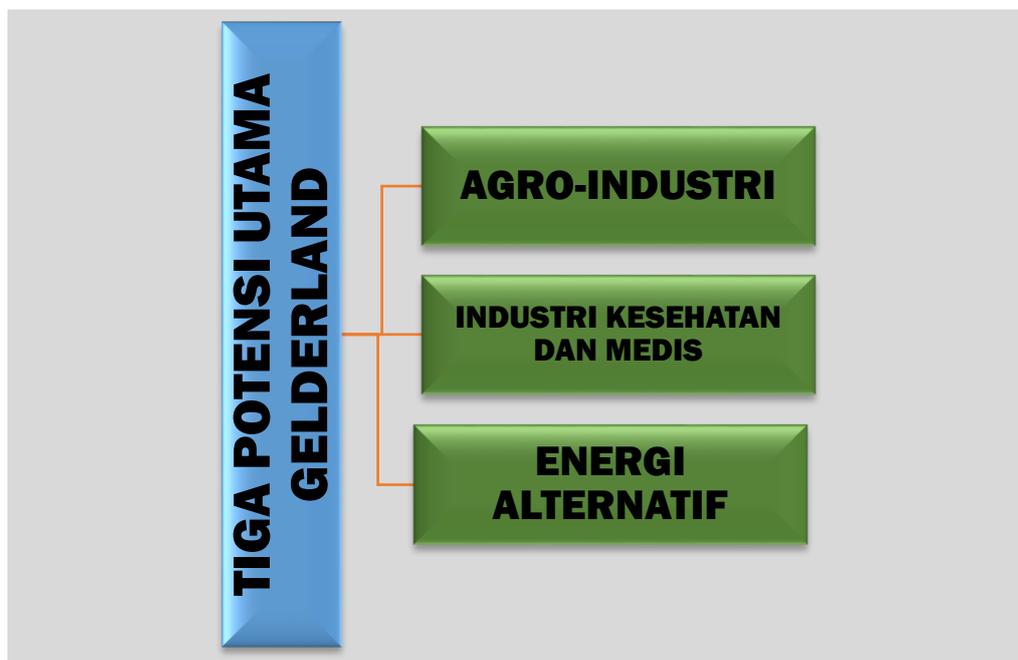
Pengembangan jejaring antar sesama insan kreatif Indonesia dan Belanda dapat dilakukan melalui pemanfaatan berbagai forum atau event yang diselenggarakan oleh KBRI –yang bisa bekerjasama menggandeng para pelaku ekonomi di daerah, termasuk utamanya pemerintah daerah sebagai elemen yang akan mampu melakukan inisiatif, dan promosi serta memotivasi para pelaku usaha di daerah-, khususnya dalam rangka promosi *Trade, Tourism and Investment (TTI)*, diantaranya Pasar Malam Indonesia yang merupakan event penting dalam mempromosikan industri kreatif Indonesia di Belanda, dan berbagai pertemuan atau forum bisnis dan investasi lainnya. Pembentukan jejaring insan kreatif juga dapat dilakukan melalui pembentukan asosiasi insan kreatif Indonesia di Belanda, pelibatan pemangku kepentingan di daerah, khususnya pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi yang ada dan situasi yang berkembang di Belanda. Disamping itu, insan kreatif Indonesia yang melibatkan pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan event tahunan pesta rakyat dalam rangka HUT RI, dan perhelatan besar lainnya, termasuk dalam hal ini adalah membentuk *sister region* pada semua tataran sebagai upaya mewujudkan kemitraan komprehensif, khususnya di bidang pembangunan ekonomi.

6.2.2 Analisis Target Kerjasama

Dalam konteks membangun hubungan kemitraan, langkah melibatkan perguruan tinggi dan dunia riset patut dikedepankan, terutama pada saat Jawa Barat berupaya menjalin kerjasama dan kemitraan dengan kawasan atau wilayah seperti Provinsi Gelderland. Sebagai langkah awal ada baiknya fondasi dari pembentukan *sister province* bisa dimulai dari kerjasama pelaku usaha dalam hal ini antara KADIN

Jawa Barat, berikut asosiasi pengusaha dengan mitranya di di Provinsi Gelderland. Dengan merujuk pada intensitas dan volume kerjasama di banyak sektor secara bilateral antara Indonesia dan Belanda, maka hal ini dapat menjadi payung bagi upaya Jawa Barat untuk membangun jejaring kerjasama dalam wujud kemitraan dengan Provinsi Gelderland. Selain instrumentasi pendidikan tinggi yang dimiliki, Jawa Barat menjadi basis sejumlah industri strategis nasional, termasuk bio-farma, kimia farma, PT. Dirgantara, Pindad, Telkom, Dahana, INTI dan juga kawasan pertanian yang luas sebagai salah satu induk sektor pertanian nasional.

Gambar 6.5
Potensi Gelderland



Proyek kemitraan dengan Provinsi Gelderland memiliki arah yang sama dengan semangat provinsi tersebut yang terkemas dalam *'Uitdaged Gelderland'* dan *'Gelderland Voor Innovatie'* yang merupakan kebijakan responsif untuk

menghadapi tantangan terkait dengan kompetisi ekonomi dan sosial dalam semua tataran. Proyek dan kebijakan *Uitdagend Gelderland* merupakan gambaran bahwa provinsi tersebut membuka diri dalam jalinan kerjasama yang pastinya memiliki semangat yang sama dengan visi dan misi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. Salah satu hal yang menjadi titik konsentrasi Gelderland adalah upaya memperkuat keberadaan unit-unit usaha kecil menengah yang tersebar dalam beberapa bidang berbeda termasuk industri pertanian dan pengolahan pangan, dan juga produk pariwisata. Merujuk pada relevansi target sasaran prioritas kerjasama dengan potensi masing-masing wilayah, setidaknya terdapat tiga substansi prioritas yang dapat dipertimbangkan untuk digarap sekaligus dijadikan materi utama dalam paket kerjasama kemitraan komprehensif yaitu: **pertama**, agro-industri terkait dengan proses pengolahan makanan berbasis teknologi; **kedua**, industri kesehatan dan medis termasuk produksi obat-obatan dan alat kedokteran, dan; **ketiga**, bidang energi alternatif berbasis teknologi. Sedangkan substansi tambahan yang layak dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam kluster kedua prioritas kerjasama adalah bidang transportasi, kerjasama pendidikan, riset, dan *vocational* serta pariwisata yang berbasis lingkungan hidup.

Mengacu pada paket kerjasama bilateral dalam sejumlah nota kesepahaman yang dilakukan pemerintah pusat dengan Kerajaan Belanda setidaknya terdapat lima substansi yang relevan dan memiliki koneksitas dengan potensi sasaran yang dimiliki dan digarap oleh Provinsi Jawa Barat yaitu: sektor pertanian; lingkungan hidup terkait daur ulang sampah berbasis teknologi; perikanan; pengelolaan air dan tata guna air serta pengendalian banjir; revitalisasi pesisir, khususnya pesisir utara; plus bidang pendidikan dan kesehatan.

Gambar 6.6
Sektor Kemitraan



Dengan demikian arah dan basis kerjasama Provinsi Jawa Barat dan Gelderland memiliki konvergensi dan koherensi substansi yang dapat didukung oleh elemen-elemen pelaku kerjasama kemitraan dari kalangan pelaku usaha, perguruan tinggi, institusi penelitian dan Badan Usaha Negara maupun Daerah. Sebagai daerah dan kawasan produksi pangan nasional, plus terdapatnya industri makanan, Jawa Barat memerlukan proses pengembangan dan penguatan tidak hanya terkait kuantitas dan kualitas produksi, namun juga terkait dengan teknologi kemasan, pengawetan, nutrisi dan hal-hal terkait kesehatan produk untuk produk-produk makanan maupun minuman kemasan dan kaleng. Gelderland memiliki teknologi yang maju dalam hal pemrosesan, produksi, dan pengolahan produk pangan-pertanian yang pada gilirannya mampu menempatkan wilayah tersebut sebagai

kawasan maju dalam hal produksi pertanian dan pangan berbasis teknologi di kawasan Eropa.

Kawasan di Jawa Barat yang bisa diangkat dalam implementasi kerjasama kemitraan adalah Bandung –Kota dan Kabupaten-, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Bekasi, Purwakarta. Jawa Barat juga memiliki potensi lahan dan kawasan pertanian yang cukup luas terutama di koridor selatan plus bekas Karesidenan Cirebon –Majalengka, Kuningan, Indramayu- dan wilayah Subang dan sekitarnya hingga Kabupaten Bandung. Perlu mengingatkan pula bahwa Jawa Barat juga memiliki potensi pertanian pangan untuk komoditas kentang, sehingga jangkauan wilayah kemitraan juga memasukkan komoditas tersebut dalam rangka menciptakan Jawa Barat sebagai daerah produsen kentang nasional. Untuk mendukung sektor pertanian terkait peningkatan kapasitas produksi tanaman pangan, kemitraan di bidang teknologi pengairan sebagai bagian dari rekayasa sipil juga perlu mendapatkan prioritas bagi Jawa Barat untuk memantapkan hasil produksi pertanian tanaman pangan nasional.

Untuk industri kesehatan, Jawa Barat, khususnya Bandung, memiliki beberapa industri potensial –Bio Farma dan Kimia Farma- misalnya yang dapat diajak dan dilibatkan untuk pengembangan produk-produk kesehatan, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan, termasuk peralatan kedokteran yang memang sangat diperlukan dalam skala nasional. Dalam upaya mendukung kebijakan ketahanan energi nasional yang salah satunya adalah mengupayakan inovasi dan revitalisasi sumber energi non-fosil, Jawa Barat seyogyanya mampu untuk mengambil bagian proyek pembangunan dan pengadaan energi alternatif dengan potensi perairan sungai maupun laut, plus energi panas bumi dan matahari. Terlebih dalam hal ini

Jawa Barat sangat memiliki potensi karena memiliki banyak aliran sungai, dan gunung berkarakter vulkanis sehingga memungkinkan Jawa Barat menjadikan energi sebagai salah satu prioritas kemitraan ke depan dengan menggandeng institusi-institusi terkait termasuk perguruan tinggi seperti ITB.

Di wilayah maritim, dan juga perikanan, Provinsi Jawa Barat perlu untuk mempertimbangkan upaya peningkatan kapasitas pelabuhan nasional Cirebon yang bisa ditingkatkan tarafnya menjadi pelabuhan internasional alternatif yang akan mampu mendukung ekspor-impor Jawa Barat ke depan dan tidak bertumpu pada Pelabuhan Tanjung Priok. Peningkatan kapasitas kawasan perikanan laut di pesisir utara selatan –Indramayu, Cirebon- dan pesisir selatan –Pangandaran hingga Sukabumi- juga perlu menjadi subs tansi prioritas sehingga akan mampu juga menjadikan Jawa Barat sebagai sentra produk perikanan laut. Belanda umumnya adalah negara yang sudah memiliki kemampuan teknologi perikanan laut mulai dari penangkapan hingga produksi dengan kualitas unggul.

Revitalisasi dua ruas kawasan pesisir ke depannya akan mampu membawa Jawa Barat sebagai daerah unggul untuk produk perikanan, dan kemaritiman yang salah satunya adalah membangun kapasitas Pelabuhan Cirebon, dan memberdayakan kawasan Indramayu dan Kabupaten Pangandaran khususnya untuk teknologi pengolahan hasil laut. Perlu dipikirkan untuk mendirikan industri pengolahan hasil laut di kawasan tersebut yang juga berdampak pada penyerapan pasar tenaga kerja di wilayah sekitarnya. Revitalisasi kawasan pantai juga tidak hanya terkait sektor perikanan, namun juga energi. Gelderland adalah wilayah yang sangat tepat untuk menjadi mitra konsultasi dan asistensi berkenaan dengan upaya serta kebijakan membangun sumber energi listrik dengan menggunakan teknologi

gelombang serta arus laut. Dalam soal pemanfaatan teknologi lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dipandang perlu untuk menuntaskan banjir berkelanjutan di Bandung Selatan melalui asistensi dengan Belanda terkait isu pengentasan bencana dan konservasi lingkungan, dan juga penataan sejumlah wilayah yang memiliki potensi eko-wisata yang selayaknya juga memperhatikan aspek konservasi lingkungan berbasis teknologi sains. Hal ini juga termasuk mengupayakan teknik dan keilmuan untuk instalasi pengolahan sampah dalam rangka mengurangi serta menekan tingkat resiko limbah, terutama di sejumlah kota besar seperti Bandung, Bogor dan Cirebon yang memiliki kecenderungan ekspansi demografis yang berimplikasi pada persoalan-persoalan baru terkait penataan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu terkait potensi ekonomi Provinsi Gelderland, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah setempat adalah para pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi penopang perekonomian, khususnya untuk industri, pertanian dan pariwisata. Secara umum karakteristik sektor usaha kecil dan menengah memiliki similaritas satu dengan yang lain. Namun demikian, dalam beberapa narasi terkait dengan sektor usaha kecil dan menengah di Gelderland, terlihat bahwa salah satu keunggulan dari industri domestik, pertanian, dan wisata adalah begitu kuatnya peranan para pelaku usaha kecil dan menengah. Terkait dengan hal ini, Gelderland menjadi lokasi yang cukup sesuai untuk mempelajari kiat para pelaku usaha kecil menengah setempat dalam peranannya memperkuat perekonomian Gelderland, termasuk khususnya untuk pengolahan hasil pertanian dan produk tanaman pangan.

6.3 REPUBLIK BASHKORTOSTAN, RUSIA

6.3.1 Hubungan Bilateral Indonesia – Rusia

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Russia telah berusia hampir tujuh dasawarsa, atau tepatnya sejak 3 Februari 1950. Sejarah menunjukkan bahwa pasang-surut hubungan bilateral kedua negara tidak pernah mencapai titik nol sekalipun Indonesia pernah melakukan kebijakan penumpasan Partai Komunis pasca peristiwa 1965. Opsi pemutusan ataupun pembekuan hubungan diplomatik tidak pernah diambil oleh Jakarta sekalipun Indonesia secara jelas menetapkan kebijakan anti komunis pada periode Perang Dingin, khususnya pada era Orde Baru. Setelah bubarnya Uni Sovyet, hubungan bilateral Indonesia-Russia memasuki babak baru yang lebih nyaman karena tiadanya lagi hambatan secara ideologis.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan terjadi penandatanganan kemitraan strategis antar kedua negara pada tahun 2003. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono capaian yang sudah dilakukan sebelumnya direalisasi pada setidaknya sejumlah substansi yaitu: eksplorasi ruang angkasa, pemanfaatan energi atom, kerjasama bidang hukum, perlindungan intelektual, dan kerjasama militer/pertahanan. Keinginan dan ambisi Russia untuk ‘bermain’ di kawasan Asia Pasifik di bawah Vladimir Putin menunjukkan adanya indikasi yang kuat tatkala Russia lebih mendekati tidak hanya kawasan Asia Timur namun juga Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Vietnam – yang pernah disebut oleh sumber perwakilan Russia sebagai satu dari lima teman terdekat Russia di kawasan.

Kedua negara juga sama-sama sebagai anggota G-20 dan APEC, plus keanggotaan Russia dalam semua desain arsitek keamanan ASEAN seperti TAC

1976, ARF 1994, dan EAC 2011. Tidak bisa dielakkan bahwa Russia secara tradisional dan historis memiliki latar belakang hubungan yang dekat dengan Indonesia. Dengan Indonesia, Presiden Putin secara resmi penandatanganan beberapa nota kesepahaman diantaranya: kerjasama di bidang lingkungan hidup, kerjasama di bidang olah raga dan kepemudaan, kerjasama di bidang promosi dan perlindungan investasi, kerjasama budaya dan sinematografi, kerjasama audit oleh BPK, kerjasama dalam pemberantasan terorisme, kerjasama terkait mekanisme perpanjangan utang, dan kerjasama antar institusi keuangan.

Di bidang teknologi militer dan pertahanan, Indonesia adalah 'pelanggan' setia pengguna arsenal persenjataan Russia mulai pada saat jaman Bung Karno tatkala Indonesia memborong sejumlah piranti militer tercanggih pada masanya seperti jet tempur MiG, kapal penjelajah 'Irian', selusin kapal selam Whiskey, peluru kendali, hingga pembom strategis Tupolev 16, dan kendaraan tempur. Dewasa ini apa yang dilakukan Indonesia terulang kembali dengan pembelian sejumlah peralatan militer seperti jet Sukhoi, helikopter tempur Mi, kendaraan tempur, dan kemungkinan kapal selam kelas Kilo. Pada tahun 2015 neraca perdagangan total mencapai lebih dari 5 miliar *USD* dengan surplus di pihak Indonesia.

Beberapa rekam jejak tersebut seyogianya bisa menjadi motivasi bagi semua elemen pada era diplomasi total, termasuk pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah termaju di Indonesia layak untuk mengambil inisiatif membangun, mengembangkan dan memperluas hubungan luar negeri dengan kawasan-kawasan lain dalam rangka untuk memperkuat motivasi dalam membangun daerah pada semua sektor melalui

komparasi dan menjalin konsep *sister region* secara lebih aplikatif, praktis, dan komprehensif.

Terkait prospek hubungan yang lebih kuat antara Indonesia dan Federasi Russia, animo dan antusiasme masyarakat Russia sangat tinggi untuk lebih mengenal Indonesia secara dekat. Hal ini ditandai dengan sangat besarnya jumlah masyarakat Russia yang mengunjungi Pekan Indonesia atau *Indonesia Fair* pada Bulan Agustus 2016 lalu ketika tercatat hampir 70 ribu pengunjung mendatangi event tersebut. Hal ini sudah barang tentu menjadi sebuah kesempatan dan peluang untuk menjalin hubungan yang lebih kuat khususnya di sektor ekonomi, sosial dan budaya.⁷⁴ Pemerintah daerah seyogianya juga mampu menangkap hal ini dengan inisiatif untuk membuka hubungan langsung, salah satunya dalam program *sister region*. Selain itu, tujuan untuk perluasan hubungan adalah dalam rangka mendorong pembangunan sosial-ekonomi sekaligus promosi daerah dan peningkatan kapasitas aparatur serta SDM melalui studi, riset, pertukaran, maupun mekanisme lain yang dikemas dalam mekanisme pendidikan dan pelatihan serta magang. Yang tidak kalah pentingnya bahwa hal ini juga ditujukan untuk semakin memperkuat pembangunan ekonomi berbasis peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta penguatan kapasitas serta skill pada domain suprastruktur di daerah-daerah yang menjadi target penandatanganan kerjasama.

6.3.2 Analisa Target Kerjasama

Untuk memberikan gambaran Republik Bashkortostan, secara ideal akan berangkat dari faktor geografis sebagai parameter pertama untuk dapat menetapkan

⁷⁴ Pers Rilis KBRI Moskwa – Fungsi Penerangan 2006; LKBN ANTARA 2006

indikator-indikator kondusif dan menguntungkan bagi dilakukannya sebuah kerjasama kemitraan komprehensif. Secara geografis, meskipun memiliki posisi sebagai *landlocked territory*, letak Bashkortostan memiliki makna ekonomi karena berada di tepi batas wilayah Asia dan Eropa.

Bashkortostan dapat menjadi pintu masuk bagi promosi dan pemasaran produk-produk Indonesia, khususnya dari Jawa Barat untuk wilayah Russia Ural dan sekitarnya, sekaligus kawasan Asia Tengah dan Kaukasia dimana terdapat negara-negara Turkestan – diantaranya Turkmenistan, Tajikistan -, dan negara-negara Kaukasus seperti Azerbaijan, Armenia dan Georgia. Republik Bashkortostan memiliki enam kota utama selain Ufa sebagai ibukota, yaitu: Salavat, Neftakamsh, Agidel, Blagoveschensk, Sterilitamak dan Meleuz yang juga sebagai titik situs sektor industri dan manufaktur.

Wilayah ini juga dilewati tiga jaringan rel nasional yang membentang dari Russia Eropa ke wilayah Asia Tengah dan tepi Pasifik yaitu: Kuibhishevskaya, Gorkovskaya, dan Yuzhno-Uralskaya. Transportasi dengan melalui sungai-sungai – Belaya, Kama dan Volga - yang banyak terdapat di Bashkortostan memungkinkan akses lalu lintas menuju Laut Kaspia, Laut Azov, Laut Hitam, Laut Baltik, dan Laut Putih. Laut Kaspia adalah pintu masuk dan akses ke wilayah Asia Tengah dan sekitarnya – Turkestan. Sedangkan Laut Hitam adalah akses utama ke Timur Tengah melalui perairan Turki. Laut Baltik adalah akses utama pada koridor utara Russia menuju Eropa Barat. Dari ibukota Ufa terdapat akses jalan poros utama menuju Moskwa, Kazan, Samarra, Chelyabinsk, Orenburg, dan Yekaterinburg (ibukota Ural) sebagai kota-kota penting konsentrasi sosial ekonomi di Russia.

Gambar 6.7
Akses Bashkortostan



Melalui kemitraan dengan Republik Bashkortostan, Provinsi Jawa Barat dapat mengupayakan perluasan jangkauan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan wilayah-wilayah lain di sekitar Ural –Chuvasia, Tatarstan, Udmurtia, Mari El, dan Mordovia, plus sebagian Asia Tengah dan kawasan Kaukasia seperti dimaksud. Jawa Barat selayaknya mampu mengoptimalkan inisiatif untuk memulai secara intensif membuka relasi dan koneksi dengan wilayah dan kawasan yang selama ini relatif kurang dikenal di tanah air sehingga bukan tidak mungkin akan dapat diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Diperlukan suatu kontinuitas rangkaian kontak dan komunikasi secara berkelanjutan dalam rangka merespon potensi dan kemungkinan hambatan serta persoalan teknis di lapangan.

Seperti yang telah diulas secara ringkas pada bagian-bagian sebelumnya, terdapat beragam alasan dan motif untuk merealisasi secara lebih serius koneksitas dan relasi dengan Republik Bashkortostan yang memiliki potensi ekonomi dan sosial beragam. Bashkortostan sangat khas dan kuat dengan kapasitas industri yang menjadi salah satu barometer perindustrian nasional Russia yang sudah barang tentu menjadi variabel berpengaruh bagi penguatan kapasitas dan performa ekonomi lokal dan nasional.

Sektor industri yang menjadi bagian historis dan tradisional bagi Bashkortostan harus mampu dimanfaatkan oleh Jawa Barat dengan tidak sekedar sebagai bahan komparasi, yang lebih penting adalah bagaimana potensi industri Bashkortostan akan dapat diadopsi oleh Jawa Barat dengan membuat *blue-print* perindustrian yang dikaitkan dengan upaya untuk mengembangkan dan membangun daerah-daerah target yang memiliki similaritas pada sektor terkait dengan Bashkortostan. Sebagai salah satu provinsi unggulan, Jawa Barat diharapkan dapat lebih meningkatkan daya saing dan kapasitasnya, termasuk dalam pengembangan industri berat, termasuk industri mesin, petrokimia, dan energi.

Dalam kesempatan kunjungannya, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Federasi Russia, Wahid Supriyadi, pada tahun 2016 silam pernah menyinggung hal ikhwal pembentukan *sister province* antara Provinsi Jawa Barat dan Republik Bashkortostan dengan merujuk fakta sejumlah similaritas antara kedua wilayah, terutama sektor industri – mesin, petrokimia, energi - , pertanian dan peternakan serta pendidikan.⁷⁵ Mengutip rilis dan laporan dari sejumlah media online dan sumber dari Kedutaan Besar Indonesia di Moskwa, dalam pernyataannya

⁷⁵ Pers Rilis KBRI Moskwa 2006; LKBN ANTARA

Presiden Republik Bashkortostan, Rustam Khamitov juga menegaskan bahwa Bashkortostan sangat mengharapkan adanya hubungan yang lebih dekat dengan wilayah-wilayah di Indonesia dalam rangka saling bertukar potensi dan kesempatan untuk memajukan daerah. Hal ini setidaknya juga metujuk fakta sosial-budaya bahwa Bashkortostan adalah salah satu sentra populasi muslim, selain Tatarstan, Dagestan, Chechnya, sehingga dimungkinkan tak ada lagi hambatan psikologis antara wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat dalam membangun hubungan kemitraan. Secara keseluruhan volume total perdagangan antara Bashkortostan dengan Indonesia baru mencapai 1,5 juta USD pada tahun 2015 dan tentu saja masih perlu adanya peningkatan.⁷⁶

Dalam konteks kemitraan Sebagai langkah awal ada baiknya fondasi dari pembentukan *sister province* bisa dimulai dari kerjasama pelaku usaha dalam hal ini antara KADIN Jawa Barat, berikut asosiasi pengusaha dengan mitranya di Russia, termasuk khususnya di Bashkortostan. Dengan mengacu pada potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat dan Republik Bashkortostan seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, dan secara lebih detail serta spesifik pada bagian setelah ini, dapat diperoleh gambaran jelas terkait beberapa sektor unggulan yang dapat dipertimbangkan secara prioritas dalam fokus kerjasama *sister province* yaitu: **pertama**, industri dan manufaktur dengan titik berat pada produk-produk berbasis sains dan teknologi serta industri berat. Dalam hal ini industri otomotif, mesin pesawat, industri kimia dan petrokimia, serta industri pendukung sarana pertanian menjadi prioritas pertama. Seperti yang telah diketahui bahwa potensi

⁷⁶ Sumber Kantor Berita ANTARA – Pers Rilis KBRI Moskwa 2016

pengembangan serta penguatan industri Jawa Barat yang terpuat di sepanjang poros Bekasi, Karawang, Purwakarta dapat dijadikan target untuk bermitra.

Hal ini juga dapat ditambahkan dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor yang memiliki kapasitas serta potensi untuk industri kimia dan petrokimia. Jawa Barat juga menjadi tempat beberapa industri strategis seperti PT Dirgantara, Pindad, INTI, Dahana yang dapat dimitrakan dengan Bashkortostan. Kota Bandung yang juga menjadi situs industri medis dan kesehatan, Kimia Farma dan Bio Farma sekali lagi juga menempati daerah tersebut sebagai prioritas terdepan untuk bermitra yang pada gilirannya dapat didiseminasikan ke daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Kedua, Arah perkembangan industri juga dapat dilakukan ke arah Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran terkait industri agraris atau pertanian, dan sub-sektor perikanan. Potensi untuk sub-sektor peternakan dapat dilakukan dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. Sedangkan industri energi-mineral –penyulingan minyak- dapat diarahkan ke Kabupaten Cirebon dan Indramayu. **Ketiga**, secara umum, Bashkortostan yang memiliki banyak situs *eco-tourism*, wisata berbasis konservasi alam dan wisata kesehatan memiliki similaritas karakteristik dengan yang dimiliki Jawa Barat. Jawa Barat kemungkinan bisa termotivasi dalam kerangka kemitraan dalam membangun dan menyediakan sarana serta fasilitas sektor wisata seperti yang dimiliki Bashkortostan.

Keempat, seperti yang telah disinggung secara singkat sebelumnya, Jawa Barat yang menjadi sentra pendidikan tinggi semestinya juga dapat memanfaatkan potensi pendidikan tinggi serta riset di bidang sains dan teknologi, khususnya teknologi penerbangan, transportasi, energi-mineral, dan mesin-mesin untuk

pertanian. Bashkortostan memiliki universitas dan institut yang memiliki studi perminyakan, energi, penerbangan, dan petrokimia. Jawa Barat sebagai salah satu yang terdepan atau barometer pendidikan nasional, khususnya untuk pendidikan tinggi seyogianya dapat memanfaatkan konstruksi kemitraan dengan mengajak serta beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi seperti ITB, UNPAD yang memiliki fokus teknologi dan Unikom salah satunya dengan fokus teknologi informasi. Perguruan tinggi untuk pusat studi agama tidak bisa juga dilewatkan dalam membangun kemitraan, seperti Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan Universitas Islam Bashkortostan dengan pemahaman umum bahwa Islam menjadi identitas historis, tradisi, dan sosiologis di kedua wilayah. Hal ini tentunya diharapkan akan dapat lebih menjadi perekat identitas dalam koridor kemitraan dan mekanisme *sister-province*.

6.3.2.1 Industri Manufaktur

Sebagai salah satu sentra industri dan manufaktur di Russia, Bashkortostan memiliki sekitar 150 industri dalam dengan aneka ragam produk, khususnya industri berbasis teknologi, industri berat dan industri kreatif. Menempati peringkat sembilan untuk *Gross Domestic Product* terbesar di Russia, sektor industri dan manufaktur menjadi kontributor terbesar bagi Republik Bashkortostan selain pertanian dan konstruksi yaitu sekitar 2/3 total jumlah. Secara menyeluruh sektor manufaktur yang di dalamnya termasuk penyulingan minyak, produksi kimia, energi, industri mesin, dan produksi bahan mentah menyediakan 40% *GDP*, sekitar 60% pajak penghasilan, dan menyediakan hampir 30% lapangan kerja. Dalam data tahun 2015/2016 tercatat 37,2% potensi Republik Bashkortostan adalah industri dan

manufaktur, yang disusul sektor housing/ real estate sebesar 25,1%, dan sisanya adalah konstruksi, telekomunikasi, dan transportasi.⁷⁷

Mengacu data tersebut, dapat diperoleh gambaran jelas bahwa potensi terbesar Bashkortostan adalah sektor industri, khususnya industri berat, energi dan petrokimia. Seperti yang telah disajikan secara garis besar pada bagian sebelumnya terdapat setidaknya lima item utama pada sektor industri yaitu: **industri pertahanan/militer, industri pengolahan makanan, industri energi, industri kimia-petrokimia, dan industri pertanian**. Lima industri terbesar yang menjadi andalan Republik Bashkortostan adalah: *Bashneft* (manufaktur pertambangan), *Bashspirt*, *Gazprom Neftekim Salavat* (energi), *Neftekamsk Avtomobile Plant*, dan *Ufa Engine Industrial Association*. *Bashneft* adalah salah satu unit usaha minyak terbesar keenam di Russia untuk volume produksi dan menempati posisi keempat untuk total penyulingan minyak bumi.

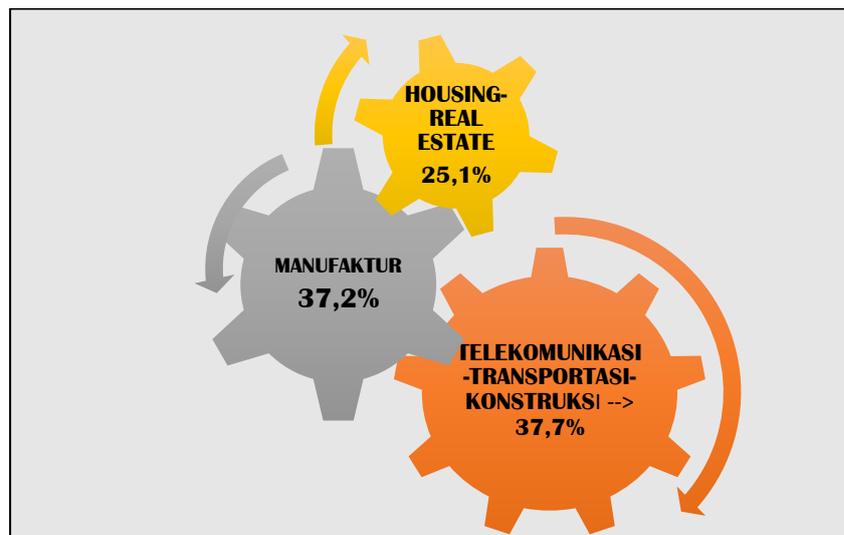
Sedangkan lima potensi target investasi utama adalah: pertambangan, produksi mesin dan peralatan berat, pertanian, kimia-petrokimia, dan metalurgi (peringkat ketiga nasional untuk investasi dan tergolong yang relatif bebas resiko/ *low risk*).⁷⁸ Sentra industri dapat dijumpai di beberapa kota dengan konsentrasi utama di Ufa sebagai ibukota wilayah. Ufa memiliki beberapa instalasi penting sektor perindustrian yaitu: industri material konstruksi Bashkortostan, pusat pengolahan kayu untuk konstruksi, sentra teknologi aviasi atau penerbangan (komponen pesawat dan helikopter), industri pertanian, sentra produksi instrumen petrokimia, sentra industri elektronika, industri peralatan medis dan kedokteran, manufaktur

⁷⁷ Center of Development Cluster of Bashkiriya Republic 2016

⁷⁸ Center of Development Cluster of Bashkiriya Republic 2016

nano dan bio-teknologi, serta berbagai sentra industri kreatif. Tidak hanya instalasi industri, Ufa juga menjadi pusat dari fasilitas pelatihan teknik perindustrian seperti Institut Petrokimia dan Penyulingan Minyak Bumi, tempat pelatihan bio dan nano-teknologi, Institute Penerbangan Ufa.

Gambar 6.8
Diagram Prioritas Industri



Selain Ufa, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat sejumlah kota sentra industri seperti Salavat untuk industri petrokimia, Agidel dan Sterlitamak untuk industri dan produksi material konstruksi serta bangunan, Meleuz sebagai sentra industri pengolahan makanan dan karet olahan, Neftekamsk untuk pembuatan produk plastik bersama dengan Kota Blagoveschensk, dan Sibay sebagai sentra produksi pengolahan kayu. Melihat luas dari Republik Bashkortostan yang relatif tidak terlampau besar, keberadaan beberapa instalasi industri pada sejumlah lokasi yang tersebar membuktikan bahwa Bashkortostan adalah instrumen serta situs

industri nasional Russia. Berikut adalah matrik instalasi dan lokasi industri di Republik Bashkortostan: ⁷⁹

Tabel 6.1
Industri Bashkortostan

	NAMA INDUSTRI	JENIS	LOKASI
1	Sentra Industri Bashkortostan	Produksi material konstruksi	Agidel
2	Sentra Industri Ufa	Pengolahan kayu	Ufa
3	Sentra Industri Salavat	Petrokimia	Salavat
4	Industri Penyulingan Minyak dan Petrokimia - Institute of Refinery and Petrochemistry of Bashkortostan	Sentra Pelatihan Energi dan Petrokimia	Ufa
5	'Kolos'	Industri pertanian	Ufa
6	Sentra Teknologi Penerbangan	Aviasi dan Aeronautika	Ufa
7	Sentra Industri Petrokimia skala kecil	Petrokimia	Ufa
8	Regional Center of Engineering	Bio-teknologi	Ufa
9	Ufa Mechanics	Industri kreatif	Agidel
10	Youth Innovative Creativity	Industri kreatif	Ufa
11	Him Terra Industrial Park	plastik olahan	Blagoveschensk
12	Prikamie Industrial Park	pengolahan plastik	Neftekamsk
13	First Zauralsky Industrial Park	Pengolahan makanan	Sibay
14	Institute Penerbangan Ufa	Komponen pesawat dan helikopter	Ufa
15.	Technopark Ecoline	Karet olahan dan bahan adhesive	Meleuz
16	Technopark Inmash	Produksi mesin	Sterlitamak
17	Technopark Bashkiria	Produksi makanan	Meleuz
18	Kolos Innovative Bussiness Incubator	Pertanian	Ufa
19	Youth Innovative Creativity	Industri Kreatif	Ufa
20	Center for Hi-tech Equipment of Electronic Cluster	Elektronika dan Informatika	Ufa
21	Medtech Technopark	Peralatan medis dan kedokteran	Ufa

⁷⁹ Project of Foundation 'Roskongress' and the Agency for Strategic Initiatives –Investment Potential of Russian Regions, 2016

22	Center for Nano-Technology	Nano-teknologi	Ufa
23	Ritox Inovatsiya	Industri pendukung usaha kecil-menengah	Neftekamsk
24	Ufimsky	Konstruksi	Ufa
25	OOO Innovation Education and Science Nano-Industrial Technology	Nano-teknologi	Ufa
26	Construction Materials of Bashkortostan	Konstruksi	Agidel

Mengacu pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa Republik Bahkortostan kaya dengan potensi industri berbasis sains dan teknologi tinggi, serta berbasis pada industristrategis. Menarik untuk dicermati bahwa selain industri berat dan peralatan keras, Bashkortostan juga memiliki sentra industri kreatif yang cocok untuk kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah yang pada gilirannya akan dapat menghasilkan temuan-temuan baru bagi pengembangan industri berbasis sains teknologi.

Keberadaan sejumlah tempat pelatihan industri berbasis teknologi, khususnya energi dan pertambangan juga menjadi instrumen komplementer bagi Bashkortostan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang sesuai dan paralel dengan kapasitas wilayah tersebut. Dalam waktu yang tidak terlampau lama, Pemerintah Bashkortostan juga akan menyelesaikan sarana infrastruktur penunjang sektor ekonomi dan industri yaitu: Sentra Bisnis Zauralye, Pusat Bisnis Oktober, dan Pusat Bisnis Bashkortostan. Untuk menunjang lalu lintas perdagangan dalam mendukung sektor manufaktur, Bandara Ufa juga mengalami renovasi serta peningkatan kapasitas untuk tidak hanya melayani penerbangan domestik, namun juga antar kawasan bahkan penerbangan internasional, termasuk pelayanan kargo.

Sebagai wilayah yang memiliki potensi industri tertinggi tingkat investasi asing untuk sektor dimaksud memiliki prosentase tertinggi yaitu 57,5%, diikuti oleh sektor kesehatan dengan 20,8%, dan sektor perumahan sebesar 8,2%. Pada prosentase total tertinggi, pihak investasi swasta asing menempati prosentase terbesar dengan jumlah 79,7% dengan Uni Eropa sebagai investor terbesar berjumlah kurang lebih 90% total investasi –Cyprus, Jerman, Belanda, Austria, Swedia -, disusul oleh Amerika Serikat, Korea Selatan dan negara-negara lainnya.⁸⁰ Saat ini Republik Bashkortostan memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan dengan lebih dari 90 negara, khususnya termasuk Jepang, Amerika Serikat, Timur Tengah, Uni Eropa, negara-negara Asia Tengah, India dan Turki. Konstitusi Federal Russia mengizinkan negara-negara bagian untuk menjalin hubungan luar negeri secara langsung.

Republik Bashkortostan saat ini bergabung secara langsung dengan beberapa organisasi kerjasama internasional seperti *UNIDO (United Nations Organization for Industrial Development)*, *UNESCO*, *TURKSOI (Organization for Joint Development of Turks Culture and Art)*, *AER (European Regions Assembly)*, dan *CLRAE (Local and Regions Authorities Congress of Europe)*. Beberapa perusahaan swasta asing yang melakukan investasi di Bashkortostan adalah perusahaan-perusahaan terkenal seperti Alstom dari Perancis untuk bidang pembangkit listrik, investor Austria Palfinger untuk konstruksi, Kronospan di bidang konstruksi dan pengolahan kayu, dua raksasa industri berat dan aviasi Amerika Serikat, *General Electric* dan *Snecma*, serta *Honeywell* untuk bidang avikultur – produksi madu dan propolis.

⁸⁰ *Bashkortostan Development Cooperation – Project of Foundation ‘Roskongress’ – Agency for Strategic Initiatives, 2016*

6.3.2.1.1 Industri Pertahanan/Militer

Kawasan Ural yang termasuk bagian distrik Volga dikenal sebagai sentra produsen dan pemasok alat berat/ industri berat, tempat dimana salah satunya adalah Bashkortostan, selain Udmurtia, Mari El, Mordovia, Chuvasia, dan Tatarstan, serta Perm Krai, Nizhny Novgorod, Ulyanovsh, Samarra, Orenburg, Saratov dan Kirov. Sebagai gambaran, secara menyeluruh Distrik Volga menghasilkan 85% produksi otomotif – jenis-jenis kendaraan *Volzhky, Gorkovsky, Kamsky, Ulyanovsky* -, 65% mesin pesawat, 30% kapal, dan 30% produk peralatan militer, termasuk roket dan peluru kendali. Bersama dengan Republik Tatarstan, Perm Krai, Nizhny Novgorod, dan Samara, Bashkortostan termasuk wilayah tujuan investasi utama di Federasi Russia dengan mengacu pada data dan laporan Forbes berkenaan dengan indikator iklim investasi, perbankan, tingkat konsumsi, kekuatan pasar, inovasi, sumber daya alam, sektor keuangan serta perpajakan.⁸¹

Sektor industri berat secara umum dimulai sejak tahun 1920-an tatkala *Ufa Engine Industrial Association* membuat mesin jet pertama di era Uni Sovyet. Terdapat setidaknya dua industri pertahanan ternama yang berada di Republik Bashkortostan yaitu *KUMAPE (Kumertau Aviation Production Enterprise)* dan *Ufa Engine Building Production Association*. Berdiri sejak tahun 1962, *KUMAPE* merupakan industri yang menghasilkan berbagai varian helikopter *KAMOV (Ka)* yang dirancang untuk berbagai keperluan, termasuk militer, pesawat transport *Ilyushin (Il)* yang juga digunakan untuk penerbangan sipil. Sementara *Ufa Engine Building* yang berdiri sejak 1925 adalah perusahaan yang memiliki produksi traktor, instrumen generator, turbin, dan pompa gas, serta mesin-mesin pesawat seperti

⁸¹ *Russian Defense Industries Directory; The Future of Defense Industries in Central and East Europe*

Mikoyan Gurevich (MiG) dan *Sukhoi*. *Ufa Engine Building* dalam laporan terkategori sebagai industri berat yang paling laku dengan volume penjualan dan omset yang terbesar tidak hanya di Russia, namun juga di Eropa Timur.

Sebagai industri mesin dan alat berat, *Ufa Engine* tercatat dalam sejarah sebagai salah satu ujung tombak industri nasional yang merancang berbagai instrumen pertahanan, termasuk varian-varian persenjataan dan pesawat Uni Sovyet antara Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Pada era modern dan Perang Dingin, Ufa menjadi basis produksi mesin-mesin pesawat tempur seri *MiG* (*MiG* 15 hingga *MiG* 31), seri *Sukhoi* (*Su* 15 hingga *Su* 39), serta pesawat tempur serbaguna *Yakovlev (Yak)*, *Beriev (Be)* dan pesawat pembom *Tupolev (Tu)*. Selain itu, Ufa Engine adalah pabrik yang merancang komponen roket dan peluru kendali, serta komponen helikopter dan kendaraan *Izhmash*, *UAZ*, *Kamaz*. Seperti yang diketahui,

Gambar 6.9
Pesawat Tempur Sukhoi



berdasarkan laporan SIPRI (Swedia), Russia masih menempati peringkat kedua ekspor/pasar persenjataan dunia dengan menguasai rata-rata 20% lebih penjualan. Sebagai tambahan, Bashkortostan adalah tempat pembuatan alat angkut berat, seperti truk, dan berbagai varian mesin yang dalam hal ini diproduksi oleh *Neftekamsk Automobile Plant (NefAz)*, *Tuimanzinsky Concrete Delivery Truck Works*, *BelZAN*, dan *Sterlitamak MTE*, serta *Bashkir Trolleybus Manufacturing Plant*.⁸²

6.3.2.1.2 Industri Petrokimia

Industri kimia dan petrokimia termasuk menjadi salah satu andalan Republik Bashkortostan yang mampu memberikan sumbangan terhadap industri petrokimia secara nasional serta meningkatkan nilai kompetitif bagi Bashkortostan secara global sebagai bagian identitas ekonomi dan perdagangan. Cabang industri ini juga diharapkan mampu memperkuat sektor usaha kecil dan menengah bagi Bashkortostan dan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, seperti Tatarstan dan Udmurtia. Wilayah ini menempati peringkat pertama untuk produksi sodium carbonate dan benzol, serta di peringkat kedua untuk produksi aneka bahan plastik, ethylene, karet sintesis, dan peringkat ketiga nasional untuk produksi soda dan belerang.

Bashkortostan tercatat sebagai produsen utama soda –sodium carbonate dan soda kaustik – dengan pusat produksi di Sterlitamak. Secara keseluruhan terdapat sekitar 120 varian produk kimia untuk komoditas ekspor dari wilayah ini, diantaranya

⁸² *Russian Defense Industries Directory; The Future of Defense Industries in Central and East Europe*

phospor, karbonat, zeolit, glaukonit. Gazprom dan Neftekim Salavat menjadi bagian dari perusahaan yang diharapkan mampu memperkuat produksi petrokimia Salavat-Sterlitamak untuk produk ethylene-propylene hingga mencapai satu juta ton setiap tahunnya.

6.3.2.1.3 Industri Pertambangan dan Energi

Bashkortostan memiliki sejarah panjang terkait potensi minyak dan gas bumi dengan cadangan atau deposit termasuk yang tertinggi di Federasi Russia. Pada dekade 1930-an eksplorasi sumber energi mulai dilakukan di bawah pimpinan akademisi Ivan Gubkin dan ahli geologi A.A. Blokhin hingga diketemukannya sumur minyak Ishimbay yang mampu menghasilkan sekitar 500 ribu sampai dengan satu juta ton. Hingga awal 1990-an telah berhasil dieksplorasi sekitar 250 sumur minyak dan gas di seluruh Bashkortostan dan diperkirakan menghasilkan sekitar 1400 ton minyak bumi dan hampir 60 juta meter kubik cadangan gas alam.⁸³

Pembangunan teknologi penyulingan minyak bumi dimulai pada pertengahan 1930-an yang dilakukan oleh *Central Scientific Laboratory of Bashkirian Oil Chemical Group* yang sekaligus menjadi embrio Institute Sains Bashkortostan yang berdiri tahun 1947. Dekade 1960-an menjadi awal bagi dimulainya era energi Russia dengan berdirinya empat unit perusahaan minyak dan gas Uni Soviet yaitu: *Tuimanzinsky, Skhapovsky, Minnibaevsky* dan *Muvkaevsky*. Keempat unit usaha pemerintah tersebut juga membangun pipa minyak dan gas nasional guna

⁸³ *Ufa State Petroleum Technological University: Gas Fields and Gas Processing in Bashkortostan*

mendukung potensi energi Bashkortostan hingga dibangunnya Bastransgaz yang mencapai ribuan kilometer pada tahun 1980-an.⁸⁴

Saat ini Bashkortostan memiliki *Bashneft*, *Ufaneftekhim*, *Novoil*, *Salavatnefteorgsintez*, dan *Ufa Oil Refinery* sebagai unit usaha energi. Untuk metalurgi, *Beloretsk Metalurgical Plant* menjadi unit terdepan industri metalurgi Bashkortostan. Dengan kecenderungan kenaikan index produksi tambang setiap tahunnya, Bashkortostan masuk dalam posisi lima besar produsen minyak di Russia (sekitar 3% dari total produksi nasional), dan menempati peringkat tiga dengan produksi sekitar 1,5% total untuk distrik wilayah Volga. Pada tahun 2014 produksi rata-rata per tahunnya mencapai sekitar 17,5% dan hingga tahun 2016 Bashkortostan menempati peringkat pertama nasional untuk penyulingan minyak bumi dengan total proses mencapai 20% semua varian produk minyak bumi.⁸⁵

Pemerintah Bashkortostan memang mencanangkan kebijakan untuk mendukung investasi utamanya di sektor energi dan pertambangan dalam rangka untuk semakin menambah jumlah produksi dan kualitas produk energi serta memastikan produksi yang ramah terhadap lingkungan dan ekosistem. Tidak hanya minyak dan produk energi sejenis, Bashkortostan juga kaya dengan mineral non fosil, seperti tembaga yang memiliki deposit sebesar 12% produksi nasional, dan juga seng, emas, perak dan bauksit. Untuk teknologi metalurgi non-besi, wilayah Ural umumnya, Bashkortostan khususnya menjadi penghasil varian produk sulphur atau belerang yang menjadi basis produksi industri kimia. Kota Beloretsk menjadi rumah bagi tiga produk perangkat keras utama– *Beloretsk Metalurgi Plant/ Mechel*

⁸⁴ *idem*

⁸⁵ *idem*

Group- termasuk salah satunya produk-produk karbon yang diekspor ke lebih dari 30 negara, termasuk ke Uni Eropa.

6.3.2.2 Pertanian-Peternakan

Sekitar 40% populasi Bashkiria menempati wilayah pedesaan dengan produk pertanian sebagai mata pencaharian dengan area pertanian total 7,1 juta hektar lahan. Pemerintah Bashkortostan sangat mendukung sektor pertanian dan para petani sebagai elemen penting bagi upaya memperkuat dan menempatkan ekonomi Bashkortostan pada posisi tertinggi secara nasional sehingga diharapkan mampu mengangkat wilayah ini di mata dunia internasional. Bashkortostan menempati peringkat tujuh untuk produksi pertanian di Russia.

Varian produk pertanian dapat dijumpai beraneka-ragam mulai dari produk *diary* -susu, keju dan mentega- (peringkat pertama nasional), peternakan sapi yang menghasilkan pasokan daging domestik (peringkat pertama nasional), peternakan kuda (kedua terbesar secara nasional), peternakan unggas (peringkat enam nasional) hingga avikultur atau kombinasi budidaya pertanian dan kehutanan seperti madu (peringkat pertama nasional). Madu Bashkiria sangat dikenal dan digemari oleh masyarakat Russia. Selain produk-produk tersebut, Bashkortostan juga memiliki potensi utama gandum, gula bit, minyak nabati, dan sayuran.

Pemerintah Republik Bashkortostan memiliki beberapa langkah kebijakan untuk mendukung sektor agraris –pertanian dan peternakan diantaranya: pertama, penggunaan teknologi untuk pemrosesan bahan mentah produk-produk yang memiliki nilai kompetitif dengan fokus pada produksi tanaman biji-bijian termasuk gandum, jagung; pengembang-biakan ternak berbasis teknologi dan lingkungan;

penerapan manajemen berbasis teknologi untuk penyediaan pakan ternak, berikut proses inseminasi. Kedua, menjaga mutu dan kualitas produk-produk peternakan – daging, susu, sosis- dengan menghindarkan campuran bahan-bahan kimia; memperkuat potensi alamiah untuk meningkatkan produk-produk utama lainnya seperti buah-buahan, sayuran, dan madu, serta produk-produk makanan kaleng. Khusus produk madu diberikan perhatian khusus mengingat madu adalah salah satu produk prioritas Bashkortostan untuk ekspor dengan jumlah mencapai 2000 ton per tahunnya yang bisa menghasilkan pendapatan sekitar 1 juta rubel. Selain itu, Pemerintah Bashkortostan juga sangat memberikan perhatian utama pada produk tanaman obat-obatan terkait proses tanam hingga panen, yang dalam hal ini mampu menghasilkan sekitar 700 ton setiap tahunnya.⁸⁶

Untuk sektor kehutanan sebagai bagian ekonomi agraris, Bashkortostan memiliki area hutan seluas 6,2 juta hektar, sehingga mampu menghasilkan produk kehutanan hingga mencapai sekitar 750 juta meter kubik setiap tahunnya –termasuk 3 juta meter kubik kayu timber. Sejumlah jenis produk kehutanan diantaranya kayu ek, maple, dan kamper yang digunakan untuk konstruksi dan peralatan sehari-hari. Total produksi kayu rata-rata setiap tahunnya antara tiga hingga empat persen (3-4%) untuk produksi total nasional.

Sentra produksi hasil hutan tersebar di sejumlah wilayah seperti Meleuz, Sterlitamak, Ufa, dan Salavat dengan perusahaan besar yang dimiliki yaitu *Forestry Industry Company Selena*, dan LZK Bashlesprom.⁸⁷ Sektor kehutanan menjadi salah satu fokus dalam rangka untuk memenuhi asupan kebutuhan nasional, keperluan

⁸⁶ *Investment Guide to the Republic of Bashkortostan; Deloitte-Bashkortostan Investment Promotion Agency*

⁸⁷ *idem*

ekspor nasional berbasis kualitas dan teknologi tinggi, dan meningkatkan kapasitas serta nilai kompetitif Bashkortostan secara global, dan seperti halnya sektor industri petrokimia dan energi, akan menjadi identitas bagi wilayah tersebut.

6.3.2.3 Pendidikan dan Sosial Budaya

Keberadaan instrumen pendidikan ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan Bashkortostan terhadap sains dan teknologi. Dengan jumlah populasi sekitar empat juta lebih dan sangat maju dalam hal sains dan teknologi, Bashkortostan memiliki beberapa wadah serta institusi pendidikan tinggi yang cukup maju seperti *Ufa Scientific Centre, Russian Academy of Sciences, Academy of Sciences of Bashkortostan, Ufa Aviation University, Petrochemical Refining Institute of Bashkortostan, Ufa State Petroleum University,* dan *Bashkir State Agricultural University* serta sejumlah institusi riset terkait dengan potensi wilayah tersebut, termasuk bidang—bidang spesialis seperti pembangkit listrik, teknologi informasi, ahli ekologi dan sebagainya.

Bashkortostan juga menjadi tempat tinggal dari banyak ilmuwan dan peneliti serta spesialis yang utamanya menggeluti sektor-sektor pendidikan berbasis teknologi dan sains seperti energi, tambang, mesin, metalurgi, aeronautika dan aviasi, teknologi informasi, medis dan kedokteran, serta bio-nano teknologi. Jumlah total mahasiswa pada tahun 2016 sekitar 170 ribu yang melanjutkan studi di sekitar 10 perguruan tinggi milik pemerintah, dan 11 perguruan tinggi swasta.

6.3.2.3.1 Inovasi Teknologi

Sebagai salah satu penopang bidang pendidikan, Republik Bashkortostan sangat intensif memperkuat dan mengembangkan inovasi teknologi pada bidang-bidang komoditas unggulan wilayah tersebut seperti teknologi informasi, radio elektronik, bio-kimia, pharmaceutical, dan nano-teknologi. Bashkortostan juga diketahui memiliki jaringan serta mengambil bagian dari pembangunan kluster antar kawasan yang bersandar pada upaya mendirikan sentra industri regional untuk sektor pertanian, teknologi pangan, industri kimia dan pertanian, yang pada gilirannya akan berkontribusi penuh pada upaya mengembangkan bio-teknologi, dan produk-produk lain termasuk nano-teknologi. Dalam upaya penguatan inovasi teknologi untuk komoditas-komoditas tersebut, Bashkortostan menggandeng perusahaan-perusahaan swasta dari luar negeri seperti Rusnano, OAO Iskra, R&D innovation centre dan lain. Tahun 2013 silam, Pemerintah Bashkortostan meresmikan pusat riset dan pengembangan untuk kluster peralatan telekomunikasi berikut peralatannya.

6.3.2.3.2 Pariwisata

Republik Bashkortostan memiliki landscape dan lokasi yang dalam beberapa hal memiliki daya tarik untuk sektor pariwisata, termasuk wilayah Ural Selatan yang memiliki ketinggian sekitar 1600 di atas permukaan laut dengan kontur dan iklim pegunungan. Dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih tinggi daripada wilayah lain memungkinkan Bashkortostan memacu infrastruktur wilayah, sektor pariwisata diantaranya –menempati peringkat enam anggaran pendapatan daerah. Potensi dan fasilitas pariwisata memiliki keunikan dengan berbagai situs

wisata sehingga menempatkan wilayah tersebut sebagai salah satu tujuan wisata di Federasi Russia selain kawasan yang ada di wilayah Baltik dan Laut Hitam.

Keunikan budaya dan warisan sejarah juga menambah daya tarik wisata di Bashkortostan, terutama juga wisata arkeologi, seni, dan anthropologi seperti Shulgantash, Arkaim, Ural Batyr, dan Bashkir Urals yang ditetapkan UNESCO menjadi salah satu konservasi warisan dunia. Terdapat sekitar 600 gua untuk wisata, 800 danau, dan pegunungan, serta empat taman nasional, hampir dua puluh lokasi untuk olah raga ski, dan sekita 30 lokasi perkemahan alam yang menyajikan suguhan wisata alam di wilayah ini.

Setelah berakhirnya Uni Sovyet, pembangunan sektor wisata sangat intensif, khususnya wisata yang berbasis kesehatan –spa dan perawatan kesehatan/ medis. Tidak mengherankan apabila wisata berbasis kesehatan dan pengobatan menjadi salah satu fokus Bashkortostan untuk bidang pariwisata dengan beberapa perusahaan lokal ternama seperti Yangan-Tau, Kransnousolsk, Yakty-Kul, Assy. Sanatorium, pelayanan *therapeutic*, terapi madu adalah beberapa fasilitas wisata kesehatan yang paling banyak dijumpai di Bashkortostan –hampir sekitar 30% turis mendatangi sentra kesehatan dan pengobatan, dan sekitar 26% datang untuk tujuan wisata konvensional (rekreasi).⁸⁸

Selain jenis wisata dimaksud, Bashkortostan juga memiliki unggulan wisata ekologi/lingkungan. Pemerintah Bashkortostan menetapkan jenis wisata ekologi adalah dalam rangka mengimbangi kekuatan sektor industri/manufaktur yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Taman-taman konservasi alam – Iremel dan Muradymovskoe Gorge yang terkenal, beikut taman

⁸⁸ UFA, 12 April 2017. /Bashinform News Agency, Gulfiya Akulova

alam Zilim yang mendapatkan status *geopark* dari UNESCO- sebagai situs wisata banyak dijumpai di Bashkortostan dengan rata-rata kunjungan sekitar 30 ribu pengunjung setiap tahunnya.⁸⁹ Namun demikian, secara umum sektor wisata masih terlihat inferior dibanding industri dan manufaktur serta pertanian. Terkait kerjasama bidang pariwisata, Republik Bashkortostan memiliki kerjasama dengan banyak negara, khususnya terakhir dengan Austria dan Jerman yang nota kesepahamannya belum lama ini ditandatangani.

6.4 KHARTOUM STATE, REPUBLIK SUDAN

6.4.1 Hubungan Bilateral Indonesia – Sudan

Hubungan Indonesia dan Sudan telah terjalin sejak Indonesia belum merdeka atau sekitar tahun 1910-an dimana seorang ulama besar Sudan, Syeikh Ahmed Surkati datang ke Indonesia dan kemudian mendirikan yayasan *Al Irsyad* yang menjadi salah satu elemen pergerakan kemerdekaan Indonesia sebelum 1945, dan hingga kini masih eksis berkiprah di dunia pendidikan dan dakwah agama Islam. Hubungan tersebut diperkuat dengan keikutsertaan delegasi Sudan dalam delegasi Mesir pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung meskipun pada saat itu Sudan masih berjuang untuk mencapai kemerdekaannya dari protektorat Mesir–Inggris. Pemimpin pejuang Sudan, Ismail Al Azhari dan rombongan, oleh Presiden RI Soekarno, kemudian diberi bendera (berupa kain / sapu tangan berwarna putih bertuliskan kata SUDAN).

⁸⁹ UFA, 12 April 2017. /*Bashinform News Agency*, Gulfiya Akulova

Setahun setelah keikutsertaan dalam KAA, Sudan memperoleh kemerdekaannya dan Al Azhari menjadi Presiden Pertama Sudan. Hubungan diplomatik Indonesia dan Sudan terjalin sejak tahun 1960 yang ditandai dengan pembukaan Kuasa Usaha RI di Khartoum sebelum ditutup pada tahun 1967 karena alasan finansial, dan selanjutnya dirangkap oleh KBRI Cairo. Pada tahun 1996, Pemerintah Indonesia membuka kembali perwakilannya di Khartoum pada tingkat Kedutaan Besar RI. Sebaliknya, Kedutaan Besar Sudan di Jakarta yang sebelumnya dirangkap dari Kedubes Sudan di Kuala Lumpur) resmi dibuka oleh pada tahun 1993. Hubungan antara Indonesia dan Sudan juga terjalin dalam ranah yang lebih luas dalam keanggotaan bersama Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Hubungan Indonesia-Sudan di bidang politik selama beberapa tahun terakhir berjalan baik. Hal ini bukan saja terlihat dari kegiatan saling dukung mendukung di forum internasional, tetapi juga kegiatan saling kunjung antar pejabat serta partisipasi Indonesia dalam perdamaian di Sudan. Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia banyak memberikan dukungan yang cukup besar pada upaya penyelesaian beragam permasalahan di Sudan terutama terkait dengan isu pelanggaran HAM, proses perdamaian atas perang sipil, dan penyelesaian persoalan Darfur. Bentuk dukungan yang lain pada upaya menciptakan perdamaian menyeluruh di Sudan adalah pengiriman personil TNI/POLRI dalam misi PBB dengan nama *UNMIS (United Nation Mission in Sudan)* di kawasan yang sekarang menjadi Negara Sudan Selatan, dan pada misi *UNAMID* di Darfur -(*United Nations – African Union Mission in Darfur*).

Dalam koridor ekonomi dan perdagangan, kerjasama ekonomi Indonesia–Sudan dilaksanakan berdasarkan sejumlah kesepakatan yang telah ditandatangani

pada Sidang Komisi Bersama Indonesia-Sudan pada tahun 1998 di Khartoum yang menyengket Persetujuan Kerjasama Perdagangan, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Investasi. Pada masa Pemerintahan Gus Dur pada tahun 2001 juga telah disepakati Nota Kesepahaman mengenai Pembentukan Komisi Bersama Tingkat Menteri RI – Sudan yang sidang pertamanya dilangsungkan setahun berselang di Jakarta. Dalam sidang tersebut telah ditandatangani sejumlah Nota Kesepahaman di berbagai bidang yaitu:⁹⁰

- Kerjasama Riset, Sains dan Teknologi;
- Perlindungan Kekayaan Intelektual di bidang riset, sains dan teknologi;
- Bidang Pertanian dan Peternakan;
- Pembentukan Dewan Bisnis Bersama kedua negara;
- Kerjasama bidang Perbankan antara bank sentral kedua negara.

Hingga saat ini menurut rilisan dari Kementerian Luar Negeri, Indonesia merupakan urutan ke-16 sebagai eksportir ke Sudan setelah Arab Saudi, China, UAE, Jerman, Inggris, India, Jepang, Bahrain, Italia, Perancis, Australia, Korsel, Belanda dan Turki. Sudan juga menjadi pintu masuk bagi pemasaran produk-produk Indonesia ke beberapa negara tetangga Sudan Yang tak memiliki akses pelabuhan laut seperti Chad, Afrika tengah, Uganda, Congo dan Ethiopia. Beberapa komoditas ekspor Indonesia ke Sudan dan wilayah-wilayah sekitarnya adalah *spare-part* kendaraan, ban, karet, kertas, mesin pertanian, pupuk dan aneka produk pertanian, gula, dan minyak sayur.

Secara keseluruhan terdapat kecenderungan peningkatan hubungan perdagangan kedua negara yang ditandai dengan peningkatan ekspor Indonesia

⁹⁰ Sumber: Kementerian Luar Negeri RI; KBRI, Khartoum

rata-rata sepuluh persen dalam lima tahun terakhir dengan capaian berkisar di angka 70 juta USD. Kunjungan wisata dan bisnis diantara pelaku usaha juga mengalami kenaikan drastis mencapai 300 persen pada tahun 2015-2016. Peluang dan potensi perdagangan yang akan bisa lebih dioptimalkan adalah: Pengiriman tenaga profesional; perawat, insinyur, dan tenaga trampil dari politeknik, serta operator alat-alat pertanian; Ekspor produksi pertanian, termasuk benih dan bibit seperti padi dan kapas; Produk tambang, khususnya emas dan jenis-jenis mineral. deposit emas yang cukup besar dengan harapan produksi dapat mencapai seratus ribu ton per tahun.⁹¹

Di bidang energi, Pertamina dan Medco melakukan eksplorasi minyak bumi di Sudan. Minyak bumi adalah komoditas ekspor utama Sudan, sedangkan Indonesia mengekspor semen, kertas, barang-barang rumah tangga, dan suku cadang otomotif ke Sudan. Setelah penandatanganan kesepakatan bersama Komisi Teknis bidang Pertanian dan Pangan, Indonesia tertarik untuk menanamkan investasi kapas, gula, beras, dan komoditas perkebunan. Di bidang perminyakan juga terdapat beberapa komitmen dalam proses negosiasi diantaranya: Pembangunan instalasi penyulingan minyak; Pembentukan *Joint Venture Company* antara Pertamina dengan Nile Petroleum untuk ekspor produk minyak pelumas; Kerjasama pelatihan tenaga perminyakan dari Sudapet ke Pusat Pelatihan Pertamina dan ITB; Pemanfaatan teknologi milik Pertamina dan ITB di Sudan.

Di bidang sosial, budaya dan pariwisata, kerjasama di bidang pendidikan Indonesia – Sudan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selain peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Sudan, kunjungan pejabat tinggi bidang

⁹¹ Sumber: Fungsi Penerangan KBRI, Khartoum

pendidikan juga semakin intensif sejak kunjungan Menteri Agama RI, Drs. KH. Muhammad Tholchah Hassan pada tahun 2000 untuk membahas peningkatan kerjasama pendidikan. Sebagian besar mahasiswa Indonesia di Sudan mengambil program S-1 atas beasiswa pemerintah Sudan di Universitas Internasional Afrika (IUA). Universitas lain yang menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia adalah *Khartoum International Institute for Arabic Language (KIIFAL)* yang menyediakan beasiswa program S-2 bagi mahasiswa Indonesia, Universitas Al Quran Al Karim yang menyediakan beasiswa pasca sarjana untuk utusan Universitas Islam Assyafiiyah Jakarta, IAIN Arraniry, dan PB NU.⁹²

Selain mahasiswa yang datang dari Indonesia, juga terdapat beberapa mahasiswa Indonesia asal Kairo yang melanjutkan studi Program S-2 maupun S-3 di Sudan. Beberapa perguruan tinggi Indonesia telah memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi Sudan, antara lain *International University of Africa*, Omdurman *Islamic University* dan *Al-Qur'an University*, Universitas Semarang, UIN Malang, dll. Pada Desember 2012, Rektor Omdurman melakukan kunjungan ke Indonesia untuk mengembangkan kerjasama dengan UI, ITB, IPB, Unpad dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya, utamanya bidang-bidang eksakta.

Pemerintah Sudan berkeinginan juga agar kerjasama pendidikan tinggi kedua negara tidak saja di bidang pendidikan agama Islam dan bahasa Arab namun diperluas ke bidang-bidang pendidikan umum lainnya dan teknologi. Dalam hal pelatihan profesi bagi para profesional Sudan, Indonesia juga telah banyak membantu Sudan untuk sejumlah sektor diantaranya farmasi bekerjasama dengan Biofarma Bandung, perikanan, dan pertanian serta perkebunan.

⁹² Sumber: Fungsi Penerangan KBRI, Khartoum

6.4.2 Analisa Potensi Kerjasama

Pemerintah Sudan melalui Duta Besarnya telah melakukan kunjungan kepada Gubernur Ahmad Heryawan pada tahun 2013 untuk membangun kerjasama ekonomi dan perdagangan. Pada momentum kunjungan tersebut tercetus keinginan untuk membentuk *sister province* antara Khartoum dan Jawa Barat. Saat ini, Khartoum memiliki jalinan kerjasama dengan sejumlah kota besar di dunia, diantaranya dengan Istanbul, Ankara, Brasillia, Cairo, Jibouti, Addis Abeba, dan Wuhan. Sudan menawarkan investasi di bidang pertanian dan peternakan kepada Jawa Barat, dan sebaliknya juga menawarkan para pelaku usaha Jawa Barat untuk menanamkan investasi di Sudan yang sedang giat membangun pasca berakhirnya perang sipil.

Sudan berharap bantuan dan dukungan Indonesia yang dipandang sebagai negara yang telah memiliki kemajuan ekonomi lebih baik dari Sudan. Jalinan kerjasama ke depan antara Jawa Barat dengan Sudan, khususnya Khartoum, akan terasa lebih solid dengan adanya jejak sejarah Sudan di Bandung pada saat KAA, momentum bendera Sudan pertama kali berkibar di luar Sudan. Sudan juga adalah negara mayoritas muslim dan memiliki dinamika sosial-ekonomi dan politik seperti juga yang telah dialami Indonesia secara keseluruhan.

Pada pertemuan dengan Gubernur dan Kadinda Jawa Barat pada acara *Trade Expo Indonesia 2016*, pihak delegasi Sudan menyampaikan inisiasi Gubernur Khartoum sebelumnya, Mr. Abdel Rahman Khidir, untuk menjalin kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Khartoum Sudan. Difasilitasi oleh KBRI Khartoum, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Khartoum State berhasil menyepakati dan menandatangani *Letter of Intent* guna

mengembangkan kerja sama diantara kedua daerah di berbagai bidang, diantaranya: pendidikan, pertanian, pariwisata, seni dan budaya, kehutanan, perdagangan dan investasi.

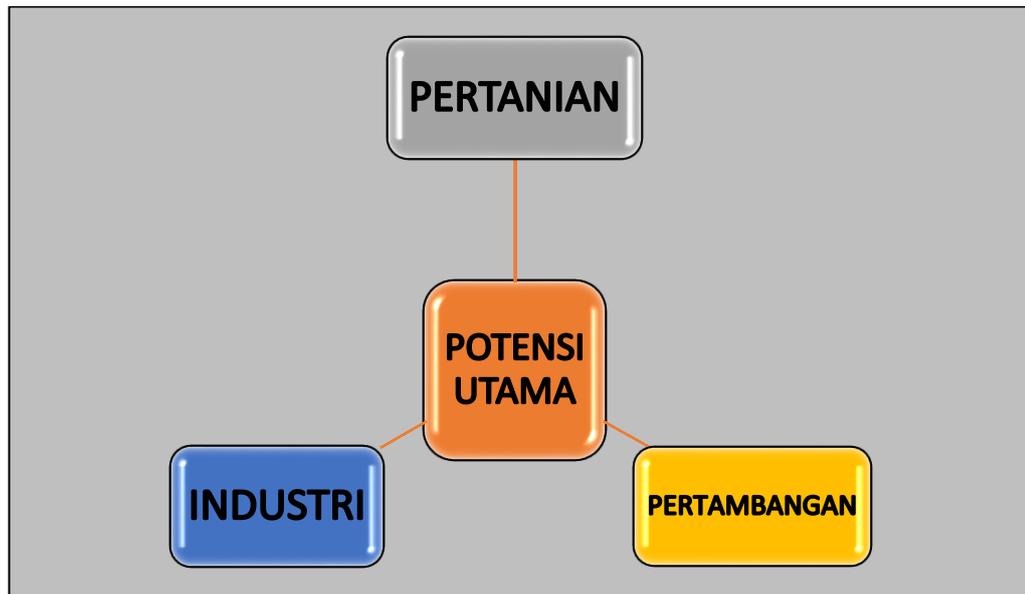
Pada saat kunjungan, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Khartoum State bersepakat untuk segera menindaklanjuti *letter of intent* dengan penandatanganan Nota Kesepahaman, yang berisi program kerja sama yang dapat dilakukan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Rencana dan program kerja sama dan telah diusulkan kepada pihak Pemerintah Khartoum State melalui KBRI Khartoum.

Negara bagian Khartoum dapat menjadi akses awal bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi dari Republik Sudan yang memiliki populasi yang cukup besar, yaitu sekitar 40 juta jiwa dan merupakan salah satu negara sumber pangan dunia. Kunjungan Gubernur Jawa Barat pada Januari 2017 merupakan kunjungan pertama kali yang dilakukan oleh seorang Gubernur dari Republik Indonesia, sehingga mendapatkan sambutan dan apresiasi yang sangat tinggi dari Pemerintah Republik Sudan, khususnya Pemerintah negara bagian Khartoum.

Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah mengajukan permohonan persetujuan terhadap rencana kerja sama tersebut kepada DPRD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya diproses pula Nota Kesepahaman serta Persetujuan Pemerintah. Penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Khartoum, direncanakan akan dilaksanakan pada saat rangkaian kunjungan delegasi Pemerintah dan Pengusaha Sudan di acara *Indonesia Middle East Update 2017* di Bandung pada bulan Oktober 2017 mendatang.

Terdapat beberapa hal pokok yang menjadi konduktor dan motif bagi upaya merealisasi kerjasama kemitraan berbentuk *sister-province* antara Jawa Barat dan Negara Bagian Khartoum yaitu: **pertama**, relasi dan pertautan historis dan tradisional antara Indonesia dan Sudan dalam spektrum kemitraan Asia-Afrika, dan latar belakang sosial-budaya yang terepresentasikan dalam Organisasi Kerjasama Islam, serta dalam spektrum kerjasama selatan-selatan untuk saling berkolaborasi dan bekerjasama dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama; **kedua**, semangat kedua wilayah untuk memajukan daerahnya masing dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keunggulan serta meningkatkan daya saing dalam semua sektor. Sudan, dalam hal ini Negara Bagian Khartoum sedang giat-giatnya membangun mengingat posisi wilayah tersebut sebagai tumpuan ekonomi nasional dan domestik setelah berakhirnya konflik bersenjata yang berlarut-larut, dan; **ketiga**, adanya similitaritas potensi dan produk dalam sejumlah sektor, khususnya pertanian, industri dan juga pariwisata yang memungkinkan kedua wilayah membangun sinergi dalam sektor-sektor terkait.

Gambar 6.10
Potensi Kerjasama dengan Khartoum



Secara umum seperti yang telah diulas pada bagian sebelumnya sangat kentara potensi Sudan, khususnya Khartoum, adalah pertanian dengan varian produk tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, serta beberapa jenis industri, dan pertambangan –kilang, pengolahan dan penyulingan minyak, dan produksi emas-. Tatkala mengacu pada ulasan secara spesifik maka sektor pertanian, termasuk perkebunan dan peternakan layak dan potensial menjadi prioritas bagi kedua daerah untuk bermitra.

Negara Bagian Khartoum memiliki potensi untuk produk dan budidaya tanaman pangan dan buah-buahan, serta beberapa jenis komoditas lain seperti kacang-kacangan dan tebu. Dapat dipertimbangkan bagi Jawa Barat untuk fokus pada kerjasama pengembangan jenis-jenis tanaman pangan, termasuk jenis makanan pokok. Provinsi Jawa Barat bisa mempertimbangkan juga untuk menanamkan investasi di Khartoum untuk sektor tanaman pangan, termasuk untuk

varian tanaman buah-buahan tropis dan sub-tropis. Jawa Barat memiliki potensi besar untuk sektor pertanian termasuk untuk jenis varian produk buah-buahan.

Sedangkan untuk sektor peternakan, Jawa Barat dan Khartoum juga dapat melakukan sinergi dalam rangka untuk peningkatan produksi bersama komoditas susu, daging, dan produk-produk olahan ternak lainnya seperti penyamakan kulit untuk pasokan industri serta komoditas yang berbeda seperti madu, propolis dan varian-varian produk serupa. Jawa Barat di sisi lain dapat membuka diri terhadap Khartoum untuk mencoba memperkenalkan varian produk peternakan unggulan seperti kuda. Program ketahanan dan kemandirian pangan yang dicanangkan Sudan idealnya memang dapat disinergikan dengan kebijakan nasional Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Khartoum sebagai wilayah unggulan memang menjadi pelaku kunci bagi performa ekonomi Sudan, khususnya ekspor produk tanaman pangan dan juga konveksi atau garment. Negara Bagian Khartoum memang memiliki potensi sangat besar untuk produk pertanian kapas. Jawa Barat yang pernah berjaya pada bidang konveksi mungkin dapat mencoba kembali untuk menoleh kembali kepada kapasitas Khartoum pada varian sektor yang satu ini.

Sektor industri lain yang juga layak untuk disinergikan adalah industri farmasi, industri petrokimia, industri tepung, minyak goreng, industri pengolahan makanan, dan industri semen. Seperti yang juga telah secara singkat diulas pada bagian terdahulu, Khartoum juga terkemuka pada industri farmasi –obat-obatan dan medis– di kawasan Afrika. Sebagai salah satu daerah yang juga memiliki instalasi industri serupa, maka industri medis dan farmasi juga layak untuk dijadikan salah satu target kemitraan kedua wilayah dalam rangka meningkatkan potensi farmasi Jawa Barat dan memperkuat kapasitas industri farmasi Negara Bagian Khartoum.

Dalam beberapa hal, sektor-sektor ekonomi Khartoum terkendala oleh keamanan investasi, ketersediaan infrastruktur transportasi untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan, dan kualitas produksi. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, kemitraan kedua daerah memang diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan dimaksud, dan sudah barang tentu Jawa Barat secara relatif lebih baik daripada Khartoum akan sangat diperlukan peranan dan bantuannya untuk meningkatkan performa dan kinerja sektor perekonomian Negara Bagian Khartoum.

Total lahan pertanian Khartoum yang luas dan potensial sedikit banyak dapat dimanfaatkan oleh Jawa Barat untuk mengepakkan sayap investasi ekonomi dan perdagangan khususnya di bidang pertanian, terlebih-lebih Khartoum juga memiliki keunggulan untuk ekspor minyak nabati dan minyak sayur yang merepresentasikan komoditas domestik Sudan secara menyeluruh.

6.5 SOUSS MASSA REGION, MAROKO

6.5.1 Hubungan Bilateral Indonesia – Maroko

Hubungan persaudaraan Indonesia-Maroko secara historis yang tercatat dalam sejarah, mulai dari kunjungan musafir terkenal Maroko Ibnu Batuthah di kerajaan Samudera Pasai-Aceh pada abad pertengahan sampai pada kisah salah satu sesepuh Wali Songo Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal dengan nama Syeikh Maulana Maghribi. Hubungan bilateral Indonesia-Maroko dalam bidang politik berlangsung baik dan stabil karena kedua negara memiliki banyak kesamaan sikap dan pandangan dalam menyikapi berbagai masalah regional maupun internasional. Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan Marokko hingga negara tersebut memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956.

Gambar 6.11

PRESIDEN SOEKARNO BERSAMA RAJA MUHAMMAD V DI RABAT



Kunjungan Presiden Soekarno ke Rabat tanggal 2 Mei 1960 tercatat sebagai kunjungan kepala negara pertama di dunia ke Maroko pasca kemerdekaan. Kunjungan tersebut mendapat sambutan hangat dari Raja Mohammed V dan rakyat Maroko sebab dianggap sebagai tokoh yang berperan dalam kemerdekaan bangsa di Asia Afrika. Presiden Soekarno dianggap sebagai Pemimpin Revolusi dunia yang membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika. Nama Soekarno pun diabadikan sebagai nama salah satu jalan protokol di Maroko. Selain nama Soekarno, Bandung dan Jakarta juga dijadikan nama jalan di negara yang terkenal dengan masakan berbahan dasar gandum *couscous* atau di Indonesia dikenal dengan sebutan *bulgur* itu. Jalan Soekarno di Maroko adalah satu dari tiga jalan Soekarno yang ada di dunia, dua di antaranya ada di Mesir dan Pakistan.

Nama Jalan Soekarno sendiri diresmikan pada tahun 1960 oleh Raja Mohammed V (saat ini Raja Mohammed VI) dan dihadiri langsung oleh Soekarno

yang saat itu sebagai Presiden RI. Sebelum berubah menjadi Rue Soukarno, nama jalannya adalah Al Rais Ahmed Soekarno. Indonesia pun melakukan hal yang sama dengan menjadikan nama kota terbesar di Maroko yaitu Casablanca menjadi nama jalan di Jakarta. Presiden Soekarno juga meminta kepada Raja Mohammad V agar rakyat Indonesia dapat masuk ke Maroko seperti rumahnya sendiri. Pada tahun 1960 resmi dibuka kedutaan besar Republik Indonesia di Rabat.

Pada 1965 Indonesia mengirimkan Dubes RI pertama untuk Kerajaan Maroko, yaitu GPH Djatikoesoemo. Namun demikian, karena kondisi keuangan pada tahun 1967 KBRI Rabat terpaksa ditutup. Pada tahun 1986 KBRI Rabat akhirnya dibuka kembali sampai saat ini.⁹³

Banyak hal yang melatarbelakangi keeratan hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko. Kedua negara pernah mengalami masa kolonisasi barat, berlatarbelakang mayoritas muslim secara demografis dan sosiologis, sama-sama memiliki kekayaan budaya beragam, dan sama-sama memiliki letak geografis diantara dua benua dan sama-sama menjadi persinggahan lalu lintas perdagangan dunia. Maroko sering menyebut Indonesia dengan "*Akh Syaqiq*" yang berarti saudara kandung karena kedekatan keduanya. Kedekatan hubungan Indonesia Maroko juga dilihat dari banyaknya kitab karya ulama Maroko yang dijadikan rujukan bahan pelajaran wajib diberbagai pesantren di Indonesia. Maroko berperan penting dalam pengembangan ajaran Islam di Indonesia.

Maulana Malik Ibrahim berasal dari Maroko, adalah wali pertama yang mengembangkan ajaran Islam di Indonesia -di pulau Jawa khususnya-. Selain mendakwahkan islam, Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara bercocok

⁹³ Sumber: Kementerian Luar Negeri – KBRI Rabat

tanam pada masyarakat Jawa. Pada saat wafat, Maulana Malik Ibrahim dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Kedekatan hubungan historis dan tradisional ini telah menjadi landasan dan batu pijakan bagi kedua negara untuk lebih memperkuat dan meningkatkan hubungan di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi dan perdagangan.

Salah satu cara untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Maroko adalah melalui sektor ekonomi dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan keinginan Maroko yang mengharapkan peningkatan perdagangan antara Maroko dan Indonesia mengingat produk Indonesia diminati masyarakat Maroko, sehingga memungkinkan bagi keduaneegara untuk menjalin kerjasama ekspor impor lebih intensif. Perekonomian Maroko secara umum tumbuh dengan baik seiring tingginya tingkat ekspor hasil pertanian Maroko ke berbagai negara eropa dan timur tengah dan juga sektor perikanan. Maroko juga dikenal sebagai negara penghasil fosfat terbesar di dunia dan memiliki pelabuhan-pelabuhan laut internasional. Menurut statistik terakhir tahun 2016-17, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pendapatan per kapita Marokko mencapai 7700 USD dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai 4-4,5 persen.

Hubungan perdagangan Indonesia-Maroko menunjukkan *trend* peningkatan rata-rata sebesar 34,6% dalam 5 tahun terakhir (2010-2015). Pada tahun 2014 nilai perdagangan RI-Maroko tercatat sebesar US\$147,81 juta, meningkat 14,23% dibandingkan tahun 2013. Indonesia mencatat defisit perdagangan sebesar US\$40 juta (turun 10% dari periode yang sama 2013). Sementara itu, nilai perdagangan RI-Maroko sepanjang tahun 2013 tercatat US\$186,8 juta (Indonesia defisit US\$49,83

juta). Produk ekspor Indonesia ke Maroko yang mencatat nilai terbesar adalah kopi, diikuti produk elektrik dan elektronik, minyak mentah, dan tekstil.

Adapun produk impor Indonesia dari Maroko didominasi produk fosfat dan asam fosfat, produk pertanian, dan peralatan medis. Produk-produk ekspor Indonesia yang diminati warga Maroko dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kelompok yaitu produk makanan dan minuman, produk mentah hewani/nabati, produk jadi peralatan industri, produk jadi siap pakai (konsumsi), dan produk setengah jadi.⁹⁴

Hubungan Indonesia dan Maroko sudah berumur tua, sudah banyak kerjasama di segala bidang yang dilakukan dan manfaat yang didapatkan, sehingga kedepannya diharapkan adanya peningkatan kerjasama Indonesia dan Maroko dalam berbagai bidang sehingga akan lebih banyak lagi manfaat yang bisa didapatkan baik oleh Indonesia maupun oleh Maroko, termasuk dalam tingkat pemerintah daerah. Saat ini salah satu cara untuk mempererat hubungan Indonesia dan Maroko adalah dengan diadakannya lomba menulis bertajuk “Lomba Menulis Artikel Tingkat Nasional tentang RI-Maroko” oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) -sebuah lembaga jurnalisme independen- bekerjasama dengan Kedutaan Besar Maroko di Indonesia, dengan tujuan untuk lebih memperkuat proses saling kenal dan paham antara kedua bangsa. Tidak hanya sampai di sini, sejak tahun 2012 silam Bahasa Indonesia juga telah diresmikan menjadi salah satu mata kuliah dalam kurikulum pendidikan tinggi di Marokko. Pembukaan pengajaran Bahasa Indonesia tersebut tentunya diharapkan akan semakin meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang khususnya bidang pendidikan, serta

⁹⁴ Website Kementerian Perdagangan RI

mendorong masyarakat Maroko untuk mengenal lebih lanjut mengenai budaya Indonesia.

Bahasa Indonesia resmi diajarkan sebagai mata kuliah di Universitas Mohamed V Rabat sebagai mata kuliah pilihan dengan 4 SKS bersama dengan Bahasa Mandarin, Jepang, Korea, Urdhu, dan Turki. Universitas Mohamed V yang berdiri sejak tahun 1957 adalah universitas terkemuka di Maroko yang namanya diambil dari nama raja yang memerintah Maroko dari 1927 sampai 1961. Saat ini terdapat sekitar 24.000 orang mahasiswa yang menempuh pendidikan di universitas yang dikenal dengan nama *King University*, karena dua raja setelahnya yaitu Raja Hassan II dan Mohamed VI pernah menempuh pendidikan di universitas ini.⁹⁵

6.5.2 Analisa Potensi Kerjasama

Upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral kedua negara memiliki makna penting bagi Provinsi Jawa Barat karena provinsi ini telah membuka Kantor Perwakilan Dagang di Casablanca pada tahun 2014 yang lalu dan sekaligus menjadi momentum pembentukan *Morocco-Indonesia Business Council* disertai pengangkatan Konsul Kehormatan.

Pada tahap selanjutnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rabat juga telah menunjuk Provinsi Jawa Barat untuk menjalin kerja sama *Sister Province* dengan salah satu Provinsi terbesar di Maroko, yakni Provinsi Souss-Massa. Pemilihan Jawa Barat didasari pada banyaknya kesamaan antara kedua daerah,

⁹⁵ Kementerian Luar Negeri; Rilis Kedutaan Besar RI Rabat

diantaranya bidang pertanian, pariwisata, pendidikan dan karakteristik pembangunan ekonomi yang mengandalkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).⁹⁶

Provinsi Sous Massa berpenduduk 3,7 juta orang, serta menonjol pada 3 (tiga) bidang utama, yaitu bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Telah ditandatangani Naskah Pernyataan Kehendak Kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Sous Massa Region tentang Pembentukan Kerja Sama Provinsi – *sister province* di bidang pengembangan UKM, Perikanan, Pariwisata, Perdagangan dan Investasi, Seni dan Budaya, Pendidikan, serta bidang lainnya yang disepakati para pihak, pada tanggal 18 April 2017 di Meknes. Pada November 2017, Pemerintah Sous Massa Region akan memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pameran produk-produk unggulan dan penampilan seni budaya Jawa Barat di Agadir.⁹⁷

Pada waktu yang bersamaan pula akan diselenggarakan forum bisnis antara Pengusaha dari Provinsi Jawa Barat dengan Pengusaha dari Souss Massa, yang difasilitasi oleh Pemerintah Sous-Massa. Melalui KBRI, kedua belah pihak menyatakan komitmennya untuk meningkatkan status kerja sama menjadi MoU. Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah mengajukan permohonan persetujuan terhadap rencana kerja sama tersebut kepada DPRD Provinsi Jawa Barat (*work-plan* terlampir). Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan memproses Nota Kesepahaman serta Persetujuan Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Rabat. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Jawa Barat dan Presiden

⁹⁶ Dokumen Provinsi Jawa Barat; Kerjasama dengan Sous-Massa

⁹⁷ Dokumen Provinsi Jawa Barat; Kerjasama dengan Sous-Massa

Sous Massa, akan dilakukan pada saat rangkaian kunjungan delegasi Pemerintah dan Pengusaha Sous- Massa pada Oktober 2017 mendatang.

Merujuk pada harapan, keinginan, kepentingan, komitmen dan potensi kedua wilayah, dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Barat dan Sous-Massa tidak hanya memiliki koherensi, namun juga inherensi dalam konstruksi kerjasama kemitraan. Sebagai wilayah unggulan nasional, Provinsi Jawa Barat sudah semestinya dapat mengupayakan langkah untuk menjadi daerah percontohan sekaligus barometer nasional. Wilayah Sous-Massa yang relatif baru juga sedang giat-giatnya untuk bagaimana mendapatkan eksistensi juga sebagai wilayah unggulan dan termaju di Kerajaan Marokko.

Gambar 6.12
Geografi Maroko



Kesempatan kerjasama dalam bangunan kemitraan akan lebih ideal untuk mencapai kemajuan secara bersama-sama. Proyek *Le Plan Maroc Vert* merupakan salah satu kepentingan dan proyek nasional untuk ‘menghijaukan’ Marokko dengan tumpuan terpenting adalah pertanian dan perkebunan. Selain untuk tujuan konservasi alam –pengadaan *supply* air tanah, pencegahan desertifikasi, mengurangi suhu panas-, yang tak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kapasitas produksi pertanian, pangan untuk pasokan nasional dan komoditas ekspor.

Sous-Massa sebagai daerah yang bersandar kepada sektor pertanian tentu memiliki kepentingan untuk keberhasilan proyek ‘Marokko Hijau’. Proyek nasional ‘Marokko Hijau’ ini menjadi kesempatan baik untuk memperkuat jalinan kemitraan dan kerjasama di bidang pertanian dan perkebunan, berikut kerjasama penguatan ekspor-impor dan pertukaran produk tanaman pangan antara Jawa Barat dan Marokko, khususnya Sous-Massa. Potensi Jawa Barat yang terpenting adalah buah-buahan, sayuran dan bunga, selain tanaman pangan pokok.

Sementara Sous-Massa juga kurang lebih memiliki kemiripan sebagai produsen komoditas buah-buahan, sayuran dan bunga. Dalam koridor kemitraan dan pertukaran, Sous-Massa akan dapat menjadi lokasi pemasaran produk pertanian dan perkebunan Jawa Barat, khususnya untuk komoditas buah-buahan, sayuran, dan bunga, utamanya untuk wilayah Marokko dan sekitarnya, seperti Aljasair, Tunisia dan yang lain. Dengan Proyek Nasional ‘Marokko Hijau’, kepentingan Jawa Barat untuk bermitra dalam sektor budi-daya dan pengembangan produk pertanian akan lebih memiliki banyak peluang dan kesempatan.

Letak Marokko dan Sous-Massa diantara Eropa dan Afrika, plus lintas ekonomi Laut Tengah cukup menjanjikan untuk hal ini. Sebaliknya, Jawa Barat dapat menawarkan kepada Sous-Massa untuk pemasaran produk-produk pertanian yang memiliki potensi pasar di tanah air dan Asia Tenggara. Untuk komoditas perikanan laut juga memiliki similaritas dan koherensi dengan potensi perikanan Sous-Massa yang besar dalam sektor ini. Sementara Jawa Barat dapat mengoptimalkan kemitraan ini dengan mengundang kawasan perikanan laut tropis seperti Indramayu, Cirebon, Pangandaran dan yang lain untuk aplikasi kerjasama lebih jauh. Seperti halnya sektor pertanian, sektor perikanan adalah mata kerjasama yang paling dapat diterima antara kedua wilayah terutama terkait bagaimana peningkatan produksi perikanan dan hasil laut, menjaga mutu dan kualitas, kerjasama riset, pemasaran produk-produk perikanan di kedua kawasan, dan pengembangan perikanan dengan melibatkan akademisi dari IPB misalnya.

Pada analisis *SWOT* Sous-Massa memiliki kapasitas yang menjanjikan dengan adanya sektor UKM yang kuat sehingga Provinsi Jawa Barat memiliki kesempatan untuk menggadengkan dengan sektor UKM di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Ketersediaan infrastruktur dan konsolidasi antar-sektor yang bagus juga hendaknya dapat menjadi perhatian dan fokus Jawa Barat untuk lebih melakukan eksplorasi di tiga bidang yang dimiliki Sous-Massa yaitu pertanian, perikanan dan pariwisata.

Potensi pariwisata Sous-Massa yang lebih bersifat pada wisata pantai-laut dan gurun dapat disandingkan dengan potensi Jawa Barat yang lebih beragam sehingga dalam hal ini dapat pula dilakukan investasi di bidang pariwisata, pembuatan dan pertukaran produk-produk kerajinan lokal, saling bertukar dalam

informasi, dan promosi wisata di sekitar kawasan. Visi dan misi otoritas Sous-Massa untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja perekonomian dalam persaingan dengan Casablanca, Tangier, Marrakesh dan wilayah lain akan berbanding lurus dengan ambisi serta kepentingan Jawa Barat untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah baik secara nasional maupun regional dalam kerangka Komunitas ASEAN.

Provinsi Jawa Barat juga memiliki kesempatan untuk memperkuat pertukaran sosial-budaya pada semua elemen, termasuk pendidikan, dan pariwisata. Selama ini, koridor kerjasama pendidikan hanya terkait dengan studi Islam dan yang sejenisnya. Pada kesempatan ke depan dalam kemitraan, Jawa Barat dapat pula mengajak perguruan tinggi seperti IPB dan Unpad atau perguruan tinggi swasta untuk menjalin kerjasama pendidikan, dan riset, khususnya untuk sektor pertanian, dan perikanan. Kekayaan budaya dan sejarah kedua bangsa, dalam skala lebih kecil juga akan menawarkan suatu alternatif penguat bagi hubungan kedua daerah, khususnya bidang pariwisata kolektif berbasis produk budaya setempat.

6.6 KOTA METROPOLITAN INCHEON, KOREA SELATAN

6.6.1 Analisa Potensi Kerjasama

Analisa potensi kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Incheon Metropolitan City. Analisis dilakukan berdasarkan kondisi terkini dari kedua daerah, baik itu Jawa Barat maupun Incheon Metropolitan City, untuk mengetahui kebutuhan masing-masing daerah akan sektor mana saja yang perlu diadakan kerja sama.

6.6.1.1 Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif

6.6.1.1.1 Kondisi Ekonomi Kreatif Jawa Barat

Kreativitas bukan hanya merupakan aset penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara dengan informasi serta pengetahuan, namun juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan aktivitas kreatif yang menghubungkan produsen dan konsumen melalui teknologi, bakat dan keterampilan untuk menghasilkan produk kreatif.⁹⁸ Kontribusi Ekonomi Kreatif Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi ekonomi kreatif 2016 menunjukkan ada peningkatan dari sisi PDB sektor ekonomi kreatif. Hasil data statistik ekonomi kreatif 2016 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 hingga 2015, besaran PDB ekonomi kreatif naik dari 525,96 triliun pada 2010 dan menjadi 852,24 triliun pada 2015 atau meningkat rata-rata 10,14 persen per tahun.⁹⁹ Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ekonomi kreatif menyerap 15,9 juta tenaga kerja atau 13,90 persen dari total tenaga kerja pada 2015.

Provinsi Jawa Barat memiliki modal yang sangat potensial untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Barat seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya dan sebagainya. tiga subsektor ekonomi kreatif yang menjadi primadona, yakni *fashion*, kriya, dan kuliner. Potensi berikutnya adalah besarnya nilai ekspor produk ekonomi kreatif Jawa Barat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Total nilai ekspor ekonomi kreatif Jawa Barat pada tahun

⁹⁸ TOURISM AND THE CREATIVE ECONOMY © OECD 2014

⁹⁹ Hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif. Kerjasama Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik 2015

2015 adalah sebesar USD 6.499 miliar atau 33.56 persen dari total nilai ekspor ekonomi kreatif nasional, yaitu sebesar USD 19.4 miliar.

Pesatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat serta besarnya sumbangsih sektor ekonomi kreatif terhadap nilai ekspor, baik daerah maupun pusat, perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Salah satu usaha untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi beserta DPRD Jawa Barat tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru tentang ekonomi kreatif. Dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya di Jawa Barat.

Peran serta Pemerintah Daerah Jawa Barat sangat dibutuhkan mengingat masih banyaknya kendala dan hambatan dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat. Salah satunya adalah berkaitan dengan regulasi yang mengatur serta mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat. Oleh karena itu, dengan adanya raperda ini diharapkan pengembangan industri ekonomi kreatif Jawa Barat lebih terarah. Harapan lainnya adalah adanya peningkatan kualitas produk-produk ekonomi kreatif Jawa Barat agar mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Merujuk pada hasil survei khusus yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif, kendala serta hambatan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif saat ini antara lain¹⁰⁰:

- 1) Pemasaran, baik itu pemasaran di dalam maupun luar negeri
- 2) Riset dan pengembangan

¹⁰⁰ Hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif. 2015

- 3) Infrastruktur fisik
- 4) Edukasi
- 5) Regulasi

Kendala-kendala tersebut di atas, dihadapi pula oleh pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat. Untuk itu, solusi serta langkah-langkah strategis perlu diambil sesegera mungkin untuk meningkatkan serta memberdayakan potensi yang ada pada sektor ekonomi kreatif, khususnya di Jawa Barat, mengingat besarnya potensi serta sumbangsih sektor ini terhadap perekonomian daerah.

Kerja sama dengan daerah lain merupakan salah satu solusi dalam menanggulangi masalah atau kendala yang ada di sektor ekonomi kreatif. Untuk itu, rencana jalinan kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Incheon Metropolitan City, Korea Selatan diharapkan mampu memberdayakan serta meningkatkan sektor ekonomi kreatif Provinsi Jawa Barat. Berikut ini merupakan faktor pentingnya dilakukan jalinan kerja sama sektor industri kreatif Jawa Barat dengan Incheon Metropolitan City. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Banyaknya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat merupakan aset daerah dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah.
- 2) Beragamnya jenis serta produk industri kreatif Jawa Barat merupakan nilai jual bagi pemasaran produk sektor ekonomi kreatif.
- 3) Membuka pangsa pasar baru sehingga produk ekonomi kreatif Jawa Barat mampu menembus pangsa pasar internasional.
- 4) Menciptakan dan mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui penelitian dan pengembangan sehingga produk-produk ekonomi kreatif Jawa Barat terus berkembang.

6.6.1.1.2 Kondisi Ekonomi Kreatif Incheon

Pemerintah Korea Selatan saat ini bertekad untuk mempromosikan ekonomi kreatif untuk memfasilitasi gagasan serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui start-up dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai dasar untuk mewujudkan ekonomi kreatif, total 17 Pusat Ekonomi & Inovasi Kreatif telah dibuka di kota-kota dan provinsi secara nasional untuk mendukung usaha kecil, usaha kecil, inovasi UKM, dan industri khusus lokal. Usaha tersebut sejauh ini membawa hasil yang positif seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang berdampak pada meningkatnya tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini.

Pada bulan Juli 2015, *Incheon Center for Creative Economy and Innovation* diresmikan oleh Presiden Korea Selatan saat itu, Park Geun-hye. Pendirian lembaga ini bertujuan untuk menunjang keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium Enterprises (SMES) di Incheon. Selain itu, lembaga ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi kaum muda melalui pelatihan kerja dan penciptaan program-program kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Tabel 6.2

Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan Tenaga Kerja, Korea Selatan¹⁰¹

T A H U N	Total (A)		SMEs (B)		Ratio (B/A)	
	No. of Firms	No. of Employees	No. of Firms	No. of Employees	No. of Firms	No. of Employees
2000	2,729,957	10,768,597	2,707,805	8,680,694	99.2	80.6
2001	2,658,860	10,876,418	2,649,691	9,176,237	99.7	84.4
2002	2,861,830	11,737,640	2,856,913	10,154,095	99.8	86.5

¹⁰¹ <http://kosis.kr>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

2003	2,939,661	11,870,358	2,934,897	10,308,574	99.8	86.8
2004	2,927,436	11,824,074	2,922,533	10,210,629	99.8	86.4
2005	2,867,749	11,902,400	2,863,583	10,449,182	99.9	87.8
2006	2,940,345	12,234,160	2,936,114	10,677,789	99.9	87.3
2007	2,976,646	12,612,692	2,974,185	11,149,134	99.9	88.4
2008	3,046,958	13,070,424	3,044,169	11,467,713	99.9	87.7
2009	3,069,400	13,398,497	3,066,484	11,751,022	99.9	87.7
2010	3,125,457	14,135,234	3,122,332	12,262,535	99.9	86.8
2011	3,234,687	14,534,230	3,231,634	12,626,746	99.9	86.9
2012	3,354,320	14,891,162	3,351,404	13,059,372	99.9	87.7
2013	3,418,993	15,344,860	3,415,863	13,421,594	99.9	87.5
2014	3,545,473	15,962,745	3,542,350	14,027,636	99.9	87.9

Keberadaan *Incheon Center for Creative Economy and Inovation* telah membuahkan hasil yang nyata terhadap perkembangan industri ekonomi kreatif Incheon. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku serta perekonomian ekonomi kreatif di Incheon Metropolitan City. Jenis ekonomi kreatif yang dikembangkan di Incheon saat ini adalah industri start up. Start up merupakan perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi, yang sebagian besarnya merupakan perusahaan baru didirikan, berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat.¹⁰²

¹⁰² <https://m.tempo.co>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Korean Statistical Information Service* (KOSIS), jenis ekonomi kreatif yang berkembang di Incheon saat ini terdiri dari bisnis eceran (retail bussines), kuliner, jasa fotografi, bisnis jasa pendidikan, jasa perbaikan kendaraan, dan lain sebagainya. Jumlah bisnis kuliner merupakan jenis ekonomi kreatif terbanyak yang ada di kota ini yaitu 98 ribu pelaku usaha, kemudian diikuti oleh bisnis jasa pendidikan dengan jumlah 96 ribu pelaku usaha dan bisnis jasa perorangan dengan 89ribu pelaku usaha.

Pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif memunculkan beragam jenis usaha baru di Incheon Metropolitan City. Jenis usaha ekonomi kreatif di Incheon dibedakan berdasarkan jenis bisnis yang digeluti seperti pengembangan lunak game, bisnis komunikasi elektronik, dan sebagainya. Industri manufaktur dalam skala menengah dan kecil yang ada di Incheon mampu menyerap tenaga kerja dengan maksimal. Pada tahun 2013 sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 153.517 orang.

Tabel 6.3
Serapan Tenaga Kerja Industri Ekonomi Kreatif Bidang Manufaktur Kota Metropolitan Incheon¹⁰³

NO	JENIS USAHA MANUFAKTUR	TOTAL PEKERJA
1	Food product manufacturing	5.529
2	Beverages manufacturing	76
3	Textile product manufacturing; excluding clothes	1.798
4	Clothes, accessories and furs manufacturing	3.337
5	Leather, bag and shoes manufacturing	532

¹⁰³ <http://kosis.kr>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2017

6	Beverages manufacturing	76
7	Wood and tree product manufacturing; excluding furniture	4.874
8	Pulp, paper and paper product manufacturing	1.955
9	Publishing and recording device duplication business	1.351
10	Cokes, briquettes, refined petroleum product manufacturing	87
11	Chemical material and chemical product manufacturing; excluding medicine	4.838
12	Medical material and medicine manufacturing	452
13	Rubber and plastic product manufacturing	13.499
14	Non-metal mineral product manufacturing	3.121
15	Primary metal manufacturing	7.767
16	Processed metal product manufacturing; excluding machine and furniture	26.669
17	Electronic component, computer, video, audio and communication devices manufacturing	18.361
18	Medical, precision, optical equipment and watches manufacturing	3.804
19	Electric equipment manufacturing	11.461
20	Other machine and equipment manufacturing	27.188
	TOTAL	153.517

Incheon memiliki *Star-up Support Department dan Performance Technology Departement* untuk merangsang pertumbuhan industri start-up di daerahnya. Saat ini, 44 Perusahaan start-up Incheon merambah memasuki pangsa pasar China dan menarik investasi kota ini, mengadakan konferensi lokal untuk investasi dan hubungan investor, menghasilkan 180 biro konsultasi investasi dan 65 surat kesepakatan investasi. Selain itu, penguatan terhadap industri start-up terus diperkuat melalui pelayanan satu pintu berupa konsultasi hukum, keuangan dan hak paten.

6.6.1.1.3 Bentuk Kerjasama Yang Dapat Dilakukan

Berdasarkan data dan fakta di atas, bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara Provinsi Jawa Barat dengan Incheon Metropolitan City dalam usaha mengembangkan sektor ekonomi kreatif antara lain:

- 1) Membentuk wadah berupa organisasi/badan kerja sama antara Jawa Barat dan Incheon yang menaungi sektor ekonomi kreatif kedua provinsi yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar pelaku ekonomi kreatif.
- 2) Mempromosikan produk ekonomi kreatif Jawa Barat yang berkualitas tinggi ke Korea Selatan, khususnya Incheon Metropolitan City seperti produk fashion, kuliner, kerajinan tangan dan sebagainya.
- 3) Mengirimkan petugas teknik bidang ekonomi kreatif untuk mempelajari/mengetahui: Cara pengelolaan usaha ekonomi kreatif serta menghasilkan produk bermutu tinggi; mempelajari penguatan sektor ekonomi kreatif serta tata cara pengelolaan aset, mengetahui usaha-usaha lain yang bisa dilakukan dari sektor ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan nilai tambah penghasilan pelaku ekonomi kreatif.
- 4) Melakukan kerja sama dalam pengembangan dan penelitian sektor ekonomi kreatif.

6.6.1.2 Investasi

6.6.1.2.1 Iklim Invetasi Korea Selatan di Indonesia

Iklim investasi di Indonesia sedang dalam masa positif. Menurut beberapa lembaga pemeringkat seperti Fitch, kemudian Edelman, lembaga konsultan public relations global yang menaikkan peringkat kepercayaan publik Indonesia 13 peringkat ke posisi 71 (dalam skala 100). Adapun Bank Dunia juga merilis kenaikan peringkat Indonesia 15 tingkat dalam hal kemudahan berusaha.

Ini menunjukkan bahwa iklim investasi dan kepercayaan publik terhadap Indonesia yang meningkat.¹⁰⁴ Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada kuartal I tahun 2017, total investasi di Indonesia mencapai Rp 165,8 triliun. Angka itu tumbuh 13,2 persen dibandingkan Rp 146,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi investasi tersebut menyerap 194.000 tenaga kerja.

Tabel 6.4
Realisasi Investasi di Indonesia Triwulan II¹⁰⁵

JENIS INVESTASI	TW I 2016	TW II 2016	Jan-Jun 2016	TW I 2017	TW II 2017	Jan-Jun 2017	Target 2017	CAPAIAN
PMA	96.1	99.4	195.5	97.0	109.9	206.9	429.0	48.2%
PMDN	50.4	52.2	102.6	68.8	61.0	129.8	249.8	52.0%
TOTAL	146,5	151.6	298.1	165.8	170.9	336.7	678.8	49.6%

(dalam Triliun Rupiah)

¹⁰⁴ <http://ksp.go.id/iklim-investasi-di-indonesia-saat-ini-positif/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

¹⁰⁵ REALISASI PENANAMAN MODAL PMDN-PMA TriwulanII dan Januari–Juni Tahun 2017 BKPM-RI

Nilai investasi Triwulan II 2017 merupakan realisasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan periode April-Juni 2017 berdasarkan laporan kegiatan penanam modal. Realisasi tersebut di luar investasi migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, dan Industri Rumah Tangga. Realisasi nilai investasi Triwulan I berdasarkan negara asal didominasi oleh lima negara Asia seperti Jepang, Singapura, Tiongkok dan Korea Selatan.

Singapura merupakan negara yang memiliki nilai investasi terbesar, yakni US\$ 1.6 miliar (19.6%), diikuti oleh Jepang dengan total nilai investasi sebesar US\$ 1.4 miliar (17.5%) disusul oleh Tiongkok sebesar US\$ 1.3 miliar (16.4%), kemudian Hongkong dengan total investasi sebesar US\$ 0.6 miliar (7.5%) dan negara terakhir adalah Korea Selatan dengan investasi sebesar US\$ 0.5 miliar (5.8%). Untuk sektor usaha yang paling diminati PMA adalah, pertambangan dengan nilai investasi US\$ 1,2 miliar, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik sebesar US\$ 0,8 miliar. Berikutnya adalah sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar US\$ 0,8 miliar, listrik, gas dan air sebesar US\$ 0,7 miliar, industri alat angkut dan transportasi lainnya sebesar US\$ 0,5 miliar.

Peningkatan realisasi investasi pada Triwulan II 2017 : Rp 170,9 T meningkat 3,1 % dari Triwulan I 2017 (Rp165,8T) atau meningkat 12,7 % dari Triwulan II 2016 (Rp 151,6 Triliun). Realisasi Investasi pada Januari–Juni 2017 : Rp 336,7 T, meningkat 12,9% dari tahun sebelumnya yaitu Januari–Juni 2016 (Rp298,1 Triliun).

Korea Selatan merupakan salah satu mitra aktif Indonesia dalam penanaman modal investasi. Total nilai investasi Korea Selatan pada kuartal II tahun 2017 adalah sebesar US\$ 478.2 juta. Angka tersebut merupakan realisasi dari 1.582 proyek yang saat ini sedang digarap oleh Korea Selatan. Investasi Korea Selatan di

Indonesia masih didominasi industri manufaktur. Sebanyak 71 persen dari total investasi selama lima tahun terakhir periode 2012 sampai 2016 berada di sektor manufaktur. meliputi beberapa sektor manufaktur seperti pabrik tekstil dan sepatu, infrastruktur, pembangkit listrik.

6.6.1.2.2 Iklim dan peluang Investasi di Jawa Barat

Jawa Barat masih menjadi daya tarik utama bagi para investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, pada 2016, Jawa Barat merupakan provinsi tujuan penanaman modal asing (PMA) terbesar di Indonesia dengan nilai investasi US\$ 5,47 miliar dan provinsi tujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terbesar kedua di Indonesia dengan nilai investasi Rp 30,36 miliar. Daerah yang menjadi tujuan PMA adalah Kabupaten Bekasi, Karawang, Bogor, Purwakarta, dan Kota Bekasi. Adapun investor PMA berasal dari Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Belanda. Sektor investasinya meliputi industri transportasi, konstruksi dan perumahan, serta industri mesin dan elektronik. Sedangkan tujuan utama PMDN adalah Kabupaten Bekasi, Karawang, Bogor, juga Kota Bekasi dan Bandung. Pada 2016, perekonomian Jawa Barat meningkat cukup tinggi dibanding provinsi lain. Inflasi terkendali serta terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi ini penting dalam mendukung dan meningkatkan iklim investasi di Jawa Barat.¹⁰⁶

Salah satu usaha Jawa Barat untuk menarik investor adalah dengan mendirikan West Java Ambassador Forum, yang merupakan tindak lanjut dari High Level Meeting West Java Incorporated (WJI), bertujuan mengundang para investor

¹⁰⁶ <https://m.tempo.co/read/news/2017/04/06/299863242/pemprov-jawa-barat-janjikan-kemudahan-kepada-investor>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

ke Jawa Barat. Terkait dengan upaya meningkatkan investasi, pemerintah provinsi kini menerapkan program 3-Hours Investment Licensing Service pada kawasan industri, seperti di Karawang dan Bekasi. West Java Ambassador Forum menjadi ajang bagi setiap kabupaten/kota di Jawa Barat untuk mengenalkan berbagai potensi masing-masing. Selama ini, para investor sulit mendapatkan informasi mengenai potensi unggulan yang dimiliki setiap daerah karena terbatasnya data.

Tabel 6.5

Total Nilai Investasi PMDN Kuartal II 2017¹⁰⁷(Miliar)

NO	LOKASI	INVESTASI	PROYEK
1	Jawa Timur	24.952.0	1.023
2	DKI Jakarta	21.989.3	487
3	Jawa Barat	20.899.7	658
4	Jawa Tengah	7.790.2	768
5	Banten	7.524.1	393

Pada kuartal II tahun 2017, total investasi Penanam Modal Asing (PMA) yang ada di Jawa Barat mencapai US\$ 2.249.4 juta dengan total proyek sebanyak 2.924 proyek. Angka tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang paling banyak diminati oleh investor asing. Untuk Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) sendiri, Jawa Barat berada di posisi ketiga dengan total nilai investasi sebesar Rp 20.899.7 miliar dengan total proyek sebanyak 658 proyek. Berikut ini merupakan lima provinsi dengan nilai investasi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) terbesar pada kuartal II 2017.

¹⁰⁷ REALISASI PENANAMAN MODAL PMDN-PMA Triwulan II dan Januari–Juni Tahun 2017. BKPM-RI

Peningkatan pertumbuhan investasi di Jawa Barat pada kuartal II 2017 didorong oleh peningkatan jumlah investasi asing, sementara investasi dalam negeri masih mengalami perlambatan. Peningkatan laju pertumbuhan Penanam Modal Asing (PMA) berada pada industri alat angkutan dan industri makanan. Sebaran lokasi PMA dan PMDN mayoritas berada di wilayah perindustrian seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta. Peningkatan investasi di Jawa Barat berpengaruh pula terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja. Total tenaga kerja yang terserap pada kuartal II 2017 adalah sebanyak 76.816 orang

Tabel 6.6
Total Nilai Investasi PMA Kuartal II 2017

NO	LOKASI	INVESTASI	PROYEK
1	Jawa Barat	2.497.4	2924
2	DKI Jakarta	2.033.6	6022
3	Banten	1.223.0	1525
4	Sulawesi Tengah	979.1	146
5	Jawa Tengah	950.9	667

(US\$ juta)

Bagi Jawa Barat, Korea Selatan merupakan mitra strategis dalam sektor investasi. Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa menanamkan modal di Jawa Barat sangat menguntungkan. Total nilai investasi di Jawa Barat mencapai US\$ 1.2 miliar. Jawa Barat memiliki daya tarik tersendiri sehingga para investor, baik PMA maupun PMDN tertarik untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ketertarikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Kemudahan perizinan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Infrastruktur yang memadai dan letak yang berdekatan dengan Ibukota.
- 3) Kondisi politik dan ekonomi daerah yang stabil.
- 4) Jumlah tenaga kerja yang melimpah
- 5) Ketersediaan sumber daya alam

Saat ini, peluang investasi di Jawa Barat masih sangat besar. Peluang tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pertumbuhan investasi yang bagus, banyaknya kawasan industri, serta iklim investasi yang kondusif menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang paling banyak diminati investor asing. Hal tersebut merupakan modal berharga, karena sampai saat ini masih banyak peluang serta potensi investasi di Jawa Barat yang dapat ditawarkan kepada calon investor. Berikut ini merupakan beberapa peluang investasi yang ada di Jawa Barat :¹⁰⁸

1. PPP Scheme in Water Supply “Project For The City Of Bekasi”
2. BIJB “ Bandara Internasional Jawa Barat
3. PT Jabar Moda Transportasi

6.6.1.2.3 Bentuk Kerja sama yang dapat Dilakukan

Berdasarkan data dan fakta di atas, bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara Provinsi Jawa Barat dengan Incheon Metropolitan City dalam usaha meningkatkan antara lain:

¹⁰⁸ <http://bpmpt.jabarprov.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

- 1) Berpartisipasi aktif dalam mencari investor "menjemput bola" dengan mendatangi korporasi-korporasi besar yang memiliki investasi besar dalam investasi global.
- 2) Menyediakan infrastuktur seperti pembangkit listrik, pelabuhan, memberikan insentif untuk menarik minat investor.
- 3) Memberikan layanan khusus berupa pendampingan dengan petugas yang menguasai bahasa Korea Selatan untuk mempermudah komunikasi.
- 4) Mempromosikan *West Java Ambassador Forum* kepada asosiasi atau perkumpulan investor asal Korea Selatan yang ada di Indonesia.

6.6.1.3 Perdagangan

6.6.1.3.1 Kondisi Perdagangan Indonesia-Korea Selatan

Korea Selatan merupakan pangsa pasar alternatif yang menjanjikan bagi Indonesia karena Korea Selatan adalah importir terbesar ke-9 di dunia. Untuk itu, Korea Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Hal itu ditandai dengan kedatangan 130 delegasi importir Korea Selatan yang tergabung dalam *Korea Importers Association* (KOIMA) ke Indonesia pada bulan Juni 2017.

KOIMA merupakan asosiasi perdagangan terkemuka Korea yang bertujuan mempromosikan dan mendorong perdagangan sebagai sarana untuk berkontribusi secara substansial terhadap perekonomian nasional Korea Selatan. KOIMA diakui secara global dan disetujui oleh pemerintah Korea Selatan dalam rangka memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekspor dan impor nasional. Misi

pembelian adalah salah satu kegiatan utama KOIMA yang didukung Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Korea serta Kementerian Luar Negeri Korea dan diselenggarakan 4-5 kali per tahun.

Korea merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dan mitra dagang ke-7 bagi Indonesia. Total investasi Korea di Indonesia pada 2016 tercatat USD 1,06 miliar. Sementara itu, total perdagangan Indonesia-Korea sebesar USD 13,68 miliar pada 2016 atau menurun 15,79 persen dibandingkan tahun lalu. Nilai ekspor Indonesia ke Korea sebesar USD 7 miliar pada 2016 atau menurun 17,53 persen dalam lima tahun terakhir. Sedangkan pada Januari-Mei 2017, ekspor Indonesia ke Korea senilai USD 2,64 miliar atau meningkat 14,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun komoditas ekspor utama Indonesia ke Korea antara lain batu bara, briket, ovoid dan padatan serupa, bahan manufaktur dari batu bara, bijih tembaga dan konsentrat, karet alam, kayu lapis, panel veener, bubur kertas, soda, dan beberapa barang manufaktur lainnya.¹⁰⁹

Tabel 6.7

Nilai Ekspor Indonesia ke Korea Selatan Periode Januari-Mei 2017¹¹⁰

Januari	Februari	Maret	April	Mei
611.224.899	675.347.131	734.029.003	617.297.812	797.672.959

(dalam US \$)

Total nilai ekspor komoditas non migas Indonesia ke Korea Selatan mengalami peningkatan sebesar 4 persen pada tahun ini. Pada Januari 2016 nilai ekspor non migas Indonesia sebesar USD 2.069 juta meningkat menjadi 2.629 juta pada Mei 2017.

¹⁰⁹ <https://bisnis.tempo.co>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

¹¹⁰ <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

Tabel 6.8

Perubahan Nilai Ekspor non Migas Indonesia ke Korea Selatan¹¹¹

Jan-Mei		Perub (%)	Peran.(%) 2017
2016	2017	2017/2016	
2.069,0	2.629,0	27,00	4,00

Masih rendahnya nilai ekspor non migas, terutama hasil perkebunan dan pertanian yang mampu menembus pangsa pasar Korea Selatan menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengintensifkan kerja sama, terutama kerja sama perdagangan antar negara. Ketahanan perekonomian Indonesia terhadap gejolak ekonomi global dinilai cukup baik dengan pertumbuhan positif yang selaras dengan pertumbuhan pendapatan per kapita negara sebesar 4,64 persen. Pada Januari 2017, inflasi tercatat di titik yang relatif rendah, yaitu 3,45 persen.

6.6.1.3.2 Kondisi Perdagangan (Ekspor) Jawa Barat

Saat ini pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional berupaya untuk mendorong ekspor non migas, mengingat masih rendahnya nilai ekspor dibandingkan dengan nilai impor pada bidang tersebut. Nilai ekspor Provinsi Jawa Barat pada tahun ini adalah senilai USD 2.30 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 0.07 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Total nilai ekspor tersebut masih didominasi oleh sektor migas yang mencapai USD 35.08 juta, naik sebesar 198.87 persen. Sektor non migas sendiri mengalami penuruna

¹¹¹ <http://www.kemendag.go.id>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

0.96 persen dari tahun sebelumnya dari USD 2.28 milyar pada tahun 2016 turun menjadi USD 2.26 milyar pada tahun 2017.

Tabel 6.9
Ringkasan Perkembangan Ekspor Jawa Barat,
Perubahan dan Peranannya¹¹²

Uraian	Nilai FOB (juta USD)			Perubahan (%)		Peran (%)
	2016		2017	y-o-y	m-to-m	2017
	Jan	Des	Jan	Jan-Jan	Des-Jan	Jan
Migas	47.07	11.70	35.08	(25.47)	199.87	1.53
Non Migas	1,929.51	2,282.99	2,261.16	17.19	(0.96)	98.47
Total	1,976.58	2,294.69	2,296.24	16.17	0.07	100.00

Pangsa pasar ekspor non migas Jawa Barat didominasi oleh tiga negara yaitu, Amerika Serikat, Jepang dan Thailand. Nilai ekspor Jawa Barat dengan tiga negara tersebut masing-masing Amerika Serikat senilai USD 440.19 juta, Jepang senilai USD 230.94 juta, dan Thailand senilai USD 172.89 juta.

Sementara itu, nilai impor Jawa Barat pada Januari 2017 mencapai USD 1.07 miliar. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 10.98 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan impor migas sebesar USD 100.09 persen dari 57.09 juta menjadi USD 114.22 juta dan impor non migas mengalami kenaikan sebesar 5.39 persen.

Selama 13 bulan terakhir, nilai impor migas tertinggi Jawa Barat tercatat pada September 2016 senilai USD 131,85 juta, sedangkan terendah USD 13,50 juta terjadi pada Oktober 2016. Sementara itu nilai impor non migas tertinggi tercatat

¹¹² <https://jabar.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

pada November 2016 senilai USD 990,11 juta, sedangkan nilai terendah USD 758,30 juta tercatat pada Juli 2016.

Tabel 6.10

Ringkasan Perkembangan Impor Jawa Barat, Perubahan & Peranannya¹¹³

Uraian	Nilai CIF (juta USD)		Perubahan (%)		Peran (%)
	2016		2017	y-o-y	2017
	Jan	Des	Jan	Jan-Jan	Jan
Migas	30.02	57.09	114.22	280.53	100.09
Non Migas	873.03	909.19	958.18	9.75	5.39
Total	903.05	966.28	1,072.41	18.75	10.98

Nilai ekspor Jawa Barat ke Korea Selatan tahun ini, baik itu migas maupun non migas, mengalami peningkatan sebesar 1.37 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total nilai ekspor sebesar USD 73.14 juta pada tahun 2016 meningkat menjadi USD 74.14 juta pada Januari 2017.

Tabel 6.11

Nilai Ekspor Jawa Barat ke Korea Selatan¹¹⁴

Nilai FOB (juta USD)		Perubahan (%)		Peran (%)
2016		2017	y-o-y	2017
Jan	Des	Jan	Jan-Jan	Jan
73.14	72.86	74.14	1.37	3.28

Komoditas ekspor Jawa Barat pada tahun 2017 didominasi oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang angka terbanyak bagi komoditas ekspor

¹¹³ <https://jabar.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

¹¹⁴ <https://jabar.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

Jawa Barat sebesar 97.82 persen. Komoditas ekspor terbesar kedua adalah sektor migas sebesar 1.53 persen, kemudian sektor pertanian sebesar 0.64 persen dan terakhir adalah sektor pertambangan dan lainnya sebesar 0.02 persen.

Nilai ekspor Jawa Barat ke Korea Selatan masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai ekspor Jawa Barat ke negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang dan Thailand. Selain nilai ekspor yang masih rendah, sektor andalan yang menjadi pendulang nilai ekspor Jawa Barat masih bertumpu pada sektor industri pengolahan dan migas yang menjadi komoditas unggulan daerah. Peran sektor lain dalam meningkatkan nilai ekspor Jawa Barat seperti pertanian dan perkebunan masih sangat minim. Pada tahun 2017, sektor pertanian hanya menyumbang sebanyak 0.64 persen dari total keseluruhan nilai ekspor sebesar USD 2,296.24 juta. Dari total nilai ekspor tersebut, nilai ekspor hanya menyumbang USD 74.14 juta atau sekitar 3.28 persen.

Berbeda dengan nilai ekspor yang masih sangat rendah, nilai impor Jawa Barat dari Korea Selatan sangat tinggi. Korea Selatan menjadi negara ketiga yang memiliki nilai impor setelah Tiongkok dan Jepang. Nilai impor non migas Korea Selatan sebesar USD 137.10 juta atau sekitar 14.31 persen.

Tabel 6.12
Nilai Impor Jawa Barat dari Korea Selatan¹¹⁵

Nilai CIF (juta USD)		Perubahan (%)		Peran (%)
2016		2017		2017
Jan	Des	Jan	Jan-Jan	Jan
130.81	132.43	137.10	4.81	14.31

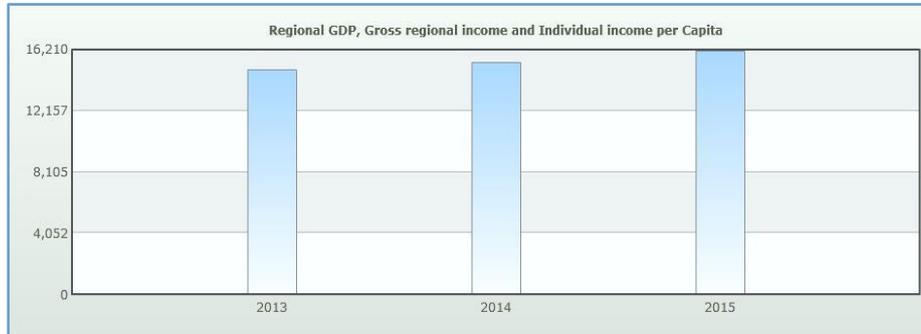
¹¹⁵ <https://jabar.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

6.6.1.3.3 Perekonomian dan Perdagangan Incheon Metropolitan City

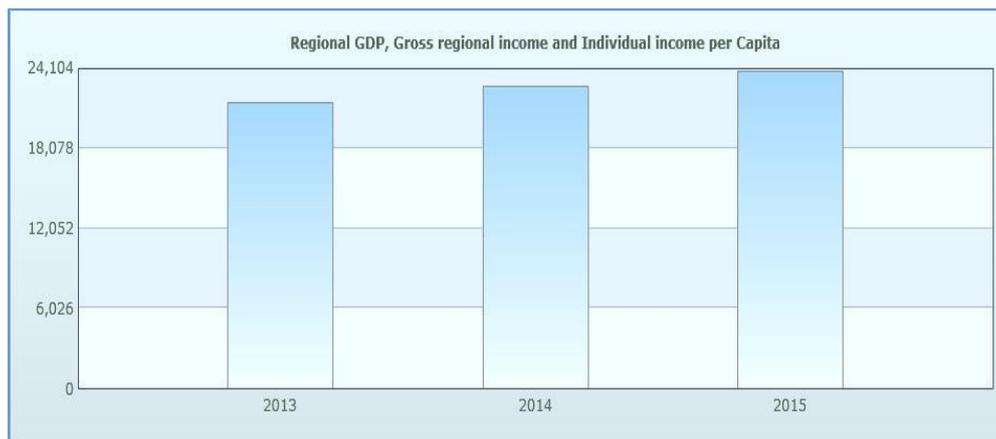
Peluang Provinsi Jawa Barat untuk membuka kerja sama perdagangan dengan Incheon Metropolitan City sangat menjanjikan. Potensi tersebut tidak terlepas dari status Incheon sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk mencapai 2.8 juta dengan mayoritas penduduk berasal dari berbagai negara, karena Incheon merupakan salah satu kota di Korea Selatan yang paling banyak dihuni oleh warga negara asing.

Jumlah penduduk yang multi nasional menjadikan pendapatan per kapita masyarakat Incheon lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Korea Selatan. Pendapatan per kapita tiap individu masyarakat Incheon setiap tahun terus mengalami peningkatan. Terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, pendapatan per kapita masyarakat Incheon meningkat dengan signifikan. Tahun 2013 pendapatan per kapita tiap individu masyarakat Incheon adalah sebesar 14.849 ribu won, pendapatan tersebut meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 15.341 ribu won per kapita, angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2015 menjadi 16.105 ribu won per kapita. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Incheon akan mempengaruhi daya beli masyarakat Incheon guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tingginya daya beli masyarakat Incheon menjadi salah satu potensi yang sangat menjanjikan untuk membuka jalur perdagangan dengan Incheon Metropolitan City.

Gambar 6.13
Penghasilan per Individu Masyarakat Incheon¹¹⁶



Gambar 6.14
Total Gross Regional Income Incheon¹¹⁷



Jumlah pendapatan per individu yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya mempunyai dampak positif terhadap pendapatan daerah Kota Incheon. Terhitung sejak tahun 2013 total Gross Regional Income Incheon meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2013 total pendapatan daerah Incheon adalah sebesar 21.453 ribu won per kapita. Angka tersebut terus meningkat pada tahun 2014

¹¹⁶ <http://kosis.kr>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

¹¹⁷ <http://kosis.kr>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

menjadi 22.698 ribu per kapita dan tahun 2015 mengalami peningkatan kembali sebesar 23.900 ribu won per kapita.

Kedua hal tersebut, yakni laju peningkatan pendapatan per kapita tiap individu masyarakat serta meningkatnya nilai Gross Regional Income Incheon Metropolitan City menjadi salah satu dasar dalam usaha menjajaki kerja sama perdagangan antara Provinsi Jawa Barat dengan Incheon Metropolitan City. Berdasarkan data dan fakta di atas, berikut ini merupakan faktor pendukung kerja sama perdagangan kedua daerah. Faktor pendukung tersebut antara lain:

1. Incheon merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk terbanyak ke-3 di Korea Selatan, yakni 2,902,608 juta jiwa.
2. Pendapatan per kapita tiap individu masyarakat Incheon, terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 pendapatan per kapita tiap individu masyarakat Incheon adalah sebesar 16.105 ribu won per kapita.
3. Gross Regional Income Incheon mengalami kenaikan setiap yang sangat signifikan setiap tahunnya. Tercatat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Gross Regional Income Incheon meningkat dari 21.453 juta won per kapita menjadi 23.900 juta won per kapita.

6.6.1.3.4 Potensi Perdagangan Jawa Barat dengan Kota Metropolitan Incheon

Nilai perdagangan, tepatnya total nilai ekspor Jawa Barat ke Korea Selatan masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai ekspor Jawa Barat ke negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang. Disamping nilai ekspor yang masih rendah, komoditas ekspor Jawa Barat saat ini masih didominasi oleh komoditas produksi

pengolahan. Sektor-sektor lain yang sejatinya memiliki potensi untuk dijadikan komoditas ekspor seperti perkebunan, pertanian dan industri kreatif belum digali dengan optimal.

Berikut ini merupakan sektor-sektor yang memiliki pontensi untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan Jawa Barat:

1) Produk Perkebunan

Salah satu komoditas hasil perkebunan Jawa Barat yang memiliki peluang cukup besar untuk dijadikan komoditas perdagangan adalah kopi. Saat ini Jawa Barat memiliki keberagaman dan kualitas kopi yang tidak kalah dengan kopi dari daerah lain. Hal itu terbukti dengan adanya pengakuan dunia internasional akan kualitas dan cita rasa kopi Jawa Barat pada perhelatan *Specialty Coffee Association of America Expo* (SCAA) di Amerika pada tahun 2016. Kopi Jawa Barat seperti Gunung Puntang, Mekar Wangi, Malabar Honey, Java Cibeber, West Java Pasundan, dan Andungsari mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari para penggemar kopi. Berdasarkan 74 sampel dalam kontes berkelas internasional, terpilih 20 besar sampel berskor tertinggi. Enam di antaranya, sambung Aher, hasil petani kopi di Jabar terdiri Gunung Puntang (juara), Mekar Wangi (peringkat kedua), Malabar Honey (peringkat keempat), Java Cibeber (posisi ke-9), West Java Pasundan Honey (posisi ke-11) dan Andungsari (posisi ke-17).¹¹⁸

Daerah perkebunan kopi ini meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang. Luas tanaman kopi di tatar Sunda ini

¹¹⁸ <https://news.detik.com>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

mencapai 37.725 hektare dengan potensi lahan seluas 50.000 hektare dan dapat dimaksimalkan hingga 200.000 hektare.

Produk perkebunan lain yang memiliki potensi untuk dijadikan komoditas perdagangan adalah teh. Jawa Barat merupakan penyumbang nomor satu bagi kebutuhan teh dalam negeri. Provinsi Jawa Barat menyumbang lebih dari 78 persen produksi teh nasional. Daerah seperti Pangalengan, Ciwidey, Cipeundeuy, Cikalong Wetan, Pasirjambu dan Sukabumi merupakan sentra produksi teh Jawa Barat. Dari luas 494.166 hektare, 13,76 parse merupakan perkebunan teh. Rinciannya, perkebunan teh 94.850 hektare yang terdiri dari perkebunan teh rakyat 48.636 hektare, perkebunan teh swasta 21.023 hektare, dan perkebunan teh negara 25.191 hektare. Luasnya perkebunan teh serta melimpahnya hasil produksi teh Jawa Barat merupakan aset yang harus dimaksimalkan keberadaannya.

Melalui kerja sama perdagangan dengan Incheon Metropolitan City, diharapkan kedua produk perkebunan, yaitu kopi dan teh mendapatkan pangsa pasar baru sehingga dapat menembus pangsa pasar internasional. Selain itu, dengan adanya kerja sama perdagangan tersebut, maka perekonomian petani perkebunan akan meningkat seiring kebutuhan pasar yang semakin banyak.

2) Produk Ekonomi Kreatif

Produk sektor ekonomi kreatif Jawa Barat sangat melimpah. eluruh potensi ekonomi kreatif, diperoleh dari beberapa sektor antarlain ; aplikasi dan game, arsitektur, desain interior, desainkomunikasi visual serta desain produk. Sektor lain dari ekonomi kreatif : fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, senipertunjukkan, seni rupa serta televisi dan radio. Di Jawa

Barat, sebaran ekonomi kreatif juga sudah berkembang antara lain : Batik Cirebon, berbagai fashion bahan kulit dari Garut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat saat ini adalah promosi. Kendala tersebut berpengaruh terhadap perluasan pangsa pasar, baik itu pangsa pasar dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kerja sama perdagangan ini diharapkan terbuka pangsa pasar baru bagi produk-produk ekonomi kreatif Jawa Barat sehingga keberlangsungan usaha dan taraf ekonomi para pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat akan meningkat.

6.6.1.3.5 Bentuk Kerja sama yang Dapat Dilakukan

Berdasarkan data dan fakta di atas, berikut ini merupakan rekomendasi kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Incheon Metropolitan City pada sektor perdagangan.

- 1) Membentuk badan atau organisasi perdagangan antara Jawa Barat dan Incheon yang membidangi kerja sama perdagangan sebagai jembatan komunikasi antar kedua provinsi mengenai potensi perdagangan yang dapat dilakukan.
- 2) Mempromosikan produk unggulan Jawa Barat non migas yang berkualitas tinggi ke Korea Selatan, khususnya Incheon Metropolitan City diantaranya produk perkebunan seperti teh dan kopi, produk ekonomi kreatif seperti fashion, kuliner, kerajinan tangan dan sebagainya.
- 3) Membuka komunikasi dengan asosiasi importir Korea Selatan yang ada di Indonesia seperti Korea Importers Association (KOIMA).

- 4) Melakukan kerja sama dalam pengembangan dan penelitian sektor perdagangan.

6.7 KOTA METROPOLITAN ULSAN, KOREA SELATAN

6.7.1 Analisis Potensi Kerjasama

Analisis potensi kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Ulsan Metropolitan City, Korea Selatan. Analisis dilakukan berdasarkan kondisi terkini dari sektor-sektor yang dianggap potensial untuk dilakukan kerja sama seperti sektor pariwisata, penataan lingkungan wilayah perindustrian, dan industri galangan kapal.

6.7.1.1 Kerja sama dan Investasi Galangan Kapal

6.7.1.1.1 Kondisi Industri Galangan Kapal Nasional

Perkembangan industri galangan kapal di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan sulitnya industri perkapalan Indonesia bersaing secara global mengingat pangsa pasar Indonesia hanya 0.3 persen dan masih berada di bawah Filipina 2.6 persen dan Vietnam 1.1 persen. Saat ini, industri perkapalan dunia masih dikuasai oleh Tiongkok sebesar 41 persen, Korea Selatan 33 persen dan Jepang sebesar 18 persen.

Menurut Indonesia National Shipowner Association (INSA) kendala yang dihadapi oleh industri perkapalan nasional saat ini adalah harga produksi yang tinggi dan waktu pembuatan yang relatif lebih lama. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah belum adanya industri penunjang atau komponen kapal di Indonesia

sehingga 60 sampai 70 persen dari komponen kapal masih impor.¹¹⁹ Masalah lainnya adalah terkait dengan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang memahami teknik tentang perkapalan, pembiayaan perkapalan, dan aspek hukum perkapalan.¹²⁰

Mengingat besarnya potensi ekonomi dan pangsa pasar perkapalan dalam negeri, yaitu tingginya kebutuhan angkutan perdagangan internasional dan antar pulau yang mencapai volume 400 juta ton per tahun, maka untuk mengatasi kebutuhan kapal dalam negeri, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 05/2005 tentang Pemberdayaan Industri Kapal Pelayaran Nasional. Dengan adanya Inpres tersebut diharapkan tumbuh dan berkembangnya industri perkapalan nasional termasuk industri pelayaran rakyat, baik usaha besar, menengah maupun usaha kecil serta koperasi.

Berdasarkan data Kementrian Perindustrian, saat ini jumlah produsen galangan kapal yang ada di Indonesia berjumlah 334 yang tersebar di seluruh Indonesia. Industri ini menyerap tenaga kerja sebanyak 43 ribu orang.¹²¹ Sebagian besar galangan kapal tersebut berada di Batam yang secara geografis berdekatan dengan Singapura.

Secara geografis, Provinsi Jawa Barat memiliki garis pantai sepanjang 805 km dan 368 km di antaranya ada di Pantai Utara. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi laut dan kemaritiman yang sangat potensial untuk diberdayakan. Potensi hasil laut seperti ikan tangkap dan ikan budidaya tersebar di pesisir Selatan Jawa Barat seperti Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Sukabumi, Karawang dan Subang.

¹¹⁹ <http://ekonomi.kompas.com>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

¹²⁰ <http://www.antaraneews.com>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

¹²¹ <http://katadata.co.id>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

Dengan kondisi geografis tersebut, maka sebagian mata pencaharian masyarakat Jawa Barat yang tinggal di pesisir pantai adalah nelayan. Pengembangan potensi laut yang ada di Jawa Barat belum diberdayakan secara optimal karena dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi hasil produksi perikanan dan rumah tangga perikanan Provinsi Jawa Barat yang tiap tahunnya mengalami penurunan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh nelayan yang ada di Jawa Barat adalah terkait peralatan yang digunakan seperti kapal dan alat tangkap yang masih bersifat konvensional. Selain kapal dan alat tangkap, kendala-kendala lain yang dihadapi oleh nelayan dan rumah tangga perikanan Jawa Barat antara lain:¹²²

- 1) Belum memiliki gudang pendingin yang mengakibatkan ikan tidak segar mengakibatkan nilai jual ikan menjadi rendah.
- 2) Tidak ada pusat informasi yang menyediakan informasi mengenai cuaca dan sebaran ikan di laut.
- 3) Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan yang masih rendah.
- 4) Keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha perikanan.

Untuk mengatasi masalah perkapalan, khususnya bagi nelayan yang ada di Jawa Barat, maka perlu ada peningkatan jumlah produsen galangan kapal yang memproduksi kapal-kapal yang disertai dengan teknologi modern. Pentingnya keberadaan galangan kapal di daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, salah satunya adalah untuk memperbaiki kapal-kapal nelayan ketika terjadi kerusakan. Karena tidak memiliki galangan kapal, maka para

¹²² <https://www.jurnalbandung.com>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

nelayan harus memperbaiki kapalnya ke daerah lain. Dengan adanya galangan kapal tersebut, maka mereka bisa memperbaiki secara mandiri.

Saat ini, jumlah produsen galangan kapal di Jawa Barat masih sangat minim. Salah satu daerah di Jawa Barat yang mampu memproduksi kapam nelayan adalah Indramayu, tepatnya di sepanjang bantaran Sungai Praja Gumiwang dan pantai Song, Indramayu. Kapal-kapal nelayan yang diproduksi di daerah ini rata-rata berukuran 30 gross ton berbahan baku kayu yang didatangkan dari berbagai daerah seperti Surabaya, Papua dan Kalimantan. Proses pembuatan kapal nelayan yang ada di Indramayu terbilang rumit dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebuah kapal yang berukuran 30 GT mempunyai ukuran yang sama dengan rumah tipe 45 dengan tinggi sekitar 18 meter. Dibutuhkan waktu selama delapan bulan untuk menyelesaikan satu unit perahu yang dijual seharga Rp.4 miliar - Rp.5 miliar tersebut.

Peningkatan jumlah serta moderinsasi industri galangan kapal di Jawa Barat sangat dibutuhkan disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya:

- 1) Masih minimnya produksi kapal nasional sehingga kebutuhan akan kapal, khususnya kapal untuk nelayan tradisional sangat tinggi.
- 2) Masih minimnya tempat reparasi kapal sehingga menyulitkan nelayan untuk memperbaiki kapal mereka ketika mengalami kerusakan.
- 3) Tingginya harga kapal sehingga sulit dijangkau oleh nelayan-nelayan tradisional.
- 4) Lamanya produksi sebuah kapal yang memerlukan waktu berbulan-bulan.

Keberadaan industri galangan kapal akan memberikan dampak positif, khususnya bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat yang berdomisili di sekitar pesisir pantai. Dampak-dampak positif tersebut antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan pasar kapal nasional.
- 2) Menyediakan tempat reparasi dan perbaikan kapal sehingga tidak menghambat operasional nelayan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
- 3) Membuka lapangan pekerjaan baru.
- 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Barat dalam bidang perkapalan.
- 5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 6) Menarik jumlah investor untuk menanamkan modal di sektor industri galangan kapal.

Melihat potensi industri galangan kapal Indonesia yang sangat menjanjikan, maka Pemerintah Korea Selatan tertarik untuk mengembangkan industri galangan kapal di Indonesia. Kebutuhan kapal yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi magnet bagi investor dari Korea Selatan.¹²³ Salah satu wilayah di Korea Selatan yang menjadi pusat industri galangan kapal adalah Ulsan Metropolitan City.

6.7.1.1.2 Kondisi Industri Galangan Kapal Korea Selatan

Pusat industri galangan kapal Korea Selatan terletak di Ulsan Metropolitan City. Kota ini memiliki industri galangan kapal terbesar di dunia, yaitu Hyundai Heavy Industri yang pembangunannya dimulai sejak tahun 1972. Galangan kapal itu terbentang sejauh dua setengah mil di sepanjang pantai Teluk Mipo di Ulsan dan

¹²³ <http://bisnis.liputan6.com>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

mencakup area seluas 1.780 hektar dengan jumlah tenaga kerja mencapai 30.767 orang. Karena letaknya yang strategis, galangan kapal dapat dengan mudah diakses dari dan ke laut terbuka. Sejak Hyundai Heavy Industries terjun ke galangan kapal pada tahun 1968, sektor ini telah menjadi salah satu industri ekspor andalan Korea, yang menyumbang 10% dari seluruh ekspor Korea Selatan. Korea menyalip Jepang pada tahun 2001 untuk mengambil posisi teratas di industri perkapalan global dan berhasil mengatasi krisis keuangan global pada tahun 2008 untuk mengambil 70% dari pesanan pembuatan kapal di dunia pada tahun 2009 dan 2010. Galangan kapal tersebut mencapai puncak produksi 20 juta DWT pada tahun 1988 dan 50 juta DWT pada tahun 1997.

Perusahaan ini memperoleh nilai produksi keseluruhan sebesar 100 juta DWT pada tahun 2005. Dari tahun 1972 sampai 2013, HHI telah mengirimkan 2.981 kapal ke 268 pemilik kapal di 48 negara. Saat ini, ia menguasai sekitar 16% pasar manufaktur kapal dunia.¹²⁴ Fasilitas di galangan kapal dipasang sedemikian rupa sehingga efisiensi maksimum operasi galangan kapal dapat dipertahankan. Dari total area 1.780 hektar galangan kapal, bengkel tersebut mencakup sekitar 395 hektar. Hyundai Heavy Industry dilengkapi dengan fasilitas mutakhir dan peralatan terbaru, mulai dari garis pemotongan baja yang sepenuhnya digerakkan mesin yang ramah lingkungan. Fasilitas canggih lainnya termasuk pabrik kerja logam, bengkel, bengkel mesin, toko crankshaft dan robot pengelasan offline. Hyundai Heavy Industry juga mengembangkan semprotan otomatis untuk melukis dasar kapal pada bulan September 2014.

¹²⁴ <http://www.ship-technology.com>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

Keberhasilan industri perkapalan Korea Selatan didukung oleh beberapa langkah strategis diantaranya adalah mendirikan Global Shipbuilding & Offshore Engineering Co, Ltd., (GSOE), yaitu perusahaan rekayasa galangan kapal dan lepas pantai yang bekerja sama dengan perusahaan terkait di Kota Metropolitan Ulsan, Korea. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan Ulsan Marine Association, produsen lokal pembuat kapal, Pemerintahan Ulsan Metropolitan City, Universitas lokal dan Ulsan Industry-University Convergence Campus (Ulsan UIC). GSOE adalah perusahaan rekayasa terpadu yang terdiri dari 20 unit rekayasa perkapalan di Ulsan (sekitar 700 karyawan).

Pabrik galangan kapal dan pabrik lepas pantai mendapatkan pesanan baru senilai KRW 41trn (sekitar \$ 37.9bn), terhitung sekitar 35% dari pasar global hingga 2013. Namun, sektor teknik tidak proporsional dan rentan.. Sektor ini mendapatkan pendapatan tahunan sekitar KRW 130 miliar, yang hanya sekitar 2,5% dari pasar global. Dengan demikian, GSOE bertujuan untuk meningkatkan pendapatan tahunan sektor teknik menjadi sekitar KRW 500 miliar (10% dari pasar global) pada tahun 2019. Ini juga menetapkan tujuan jangka panjang kenaikan pangsa pasar 20%, pendapatan KRW 2 triliun dan 10.000 karyawan pada tahun 2030.¹²⁵

6.7.1.1.3 Bentuk Kerja sama yang Dapat Dilakukan

Berdasarkan data dan fakta di atas, berikut ini merupakan peluang kerjasama antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Ulsan Metropolitan City, khususnya pada sektor industri galangan kapal. Bentuk kerja sama tersebut antara lain:

¹²⁵ <http://komec.kr>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perusahaan Korea Selatan yang ada di Ulsan Metropolitan City untuk mengembangkan industri galangan kapal dan perbaikan kapal di Provinsi Jawa Barat.
- 2) Pertukaran wawasan dan pengalaman dengan industri berorientasi teknologi yang ada di Ulsan Metropolitan City mengenai faktor keberhasilan utama dan tantangan yang dihadapi dalam menembus pangsa pasar global.
- 3) Menjalinkan kerja sama kemitraan dengan University College of Ulsan (USU) dan Global Shipbuilding and Offshore Engineering (GSOE) dalam bentuk Research and Development (R&D) mengenai industri perkapalan.
- 4) Kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa program pelatihan khusus dan pertukaran informasi dan teknologi perkapalan.
- 5) Menawarkan investasi pendirian galangan kapal di Jawa Barat

6.7.1.2 Penataan Lingkungan Wilayah Perindustrian

6.7.1.2.1 Kondisi Wilayah Perindustrian Jawa Barat

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah industri terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Barat masih menjadi jantung industri secara nasional karena mampu mengendalikan lebih dari 50 persen kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional. Dari 74 kawasan industri yang tersebar di Indonesia, diantaranya disumbang dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 40 industri. Jika dilihat dari sisi luas wilayah yang mencapai 31.000 hektar luas industri di dalam negeri maka 23.000 hektar diantaranya berada di Provinsi Jawa Barat. Berkat sektor industri ini pula yang membuat Jawa Barat menjadi

penyumbang produk domestik bruto (PDB) ketiga terbesar mencapai 14,07 persen setelah Jakarta sebesar 16,40 persen dan Jawa Timur sebesar 14,88 persen.

Jumlah kawasan industri yang ada di Jawa Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Saat ini Kawasan industri tersebar di utara Jawa Barat seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Saat ini, Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki kawasan industri terluas dengan luas lahan mencapai 17.000 hektar dan tujuh (7) kawasan industri. Jumlah itu akan bertambah pada tahun ini menjadi sembilan (9) kawasan industri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) wilayah I dan IV yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Karawang menjadi daerah kedua setelah Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan industri terbanyak. Kawasan industri yang beroperasi saat ini di Kabupaten Karawang ada enam (6) kawasan industri dengan luas 19.000 hektar.

Keberadaan kawasan industri di daerah-daerah tersebut, membawa dua dampak bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, yaitu dampak positif dan negatif. Pembangunan kawasan industri akan memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan perekonomian seperti:

- 1) Terbukanya lapangan pekerjaan
- 2) Tumbuhnya peluang usaha baru
- 3) Peningkatan pendapatan daerah
- 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat
- 5) Meningkatnya ekspor

Selain dampak positif, sebuah kawasan industri juga membawa dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Dampak negatif kawasan industri antara lain:

- 1) Meningkatnya laju perpindahan penduduk, baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Jawa Barat.
- 2) Meningkatnya pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah) berupa limbah dan polusi yang berasal dari pabrik.
- 3) Berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan yang beralih fungsi menjadi kawasan industri.
- 4) Berkurangnya pasokan air tanah karena penggunaan yang berlebihan.

Masalah yang timbul akibat dari berkembangnya kawasan industri di Jawa Barat adalah terkait pencemaran lingkungan. Setiap tahunnya jumlah pencemaran lingkungan di Jawa Barat, terutama Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti Cimanuk, Cilamaya dan Bekasi telah masuk ke dalam kategori pencemaran berat. ketiga sungai tersebut tercemar berbagai macam limbah. Yakni, mulai dari rumah tangga, industri sampai pertanian dan peternakan. Beban air limbah penduduk DAS sungai ini mencapai 9.279 Kg/tahun, sedangkan total limbah sampah mencapai 2.748 m³/hari.¹²⁶

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat merilis Laporan Catatan Akhir Tahun Lingkungan Hidup Jawa Barat 2016 dengan memetakan ancaman kerusakan lingkungan berdasarkan Kabupaten / Kota di Jawa Barat. Berdasarkan catatan Walhi Jabar, pencemaran lingkungan di Jawa Barat semakin memprihantinkan mengingat semakin tercemarnya sungai, tanah dan air yang ada di Jawa Barat disebabkan, salah satunya adalah pembuangan limbah industri yang tidak tertata dengan baik. Misal Kabupaten Bekasi, sekitar 40% pabrik di kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi membuang limbahnya ke aliran sungai.

¹²⁶ <http://nasional.republika.co.id>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

Pembuangan itu dilakukan melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) milik kawasan industri tempat berdirinya perusahaan tersebut.¹²⁷

Tabel 6.13
Ancaman Kerusakan Lingkungan di Jawa Barat¹²⁸

No	Nama Kabupaten/Kota	Masalah Lingkungan Hidup
1	Kota Bandung	Alih fungsi lahan resapan air, banjir, kurangnya RTH, pencemaran udara, pencemaran sungai, kekurangan air saat kemarau, sampah, pengambilan air bawah tanah
2	Kota Cimahi	Alih fungsi lahan resapan, kurangnya RTH, pencemaran industri, banjir, kekurangan air bersih, pencemaran udara, sampah, pengambilan air bawah tanah
3	Kota Banjar	Kurangnya RTH, banjir, sampah, pertambangan galian c
4	Kota Cirebon	Limbah batubara, pencemaran udara, banjir, kurangnya RTH, krisis air bersih saat kemarau, pengambilan air bawah tanah
5	Kota Tasikmalaya	Kurangnya RTH, banjir, sampah, banjir
6	Kota Bogor	Kurangnya RTH, sampah, pencemaran udara, krisis air bersih, pencemaran sungai, pengambilan air bawah tanah
7	Kota Depok	Kurangnya RTH, sampah, pencemaran udara, krisis air bersih, pencemaran sungai, banjir
8	Kota Bekasi	Kurangnya RTH, sampah, pencemaran udara, pencemaran sungai, banjir
9	Kota Sukabumi	Kurangnya RTH, alih fungsi lahan resapan, sampah dan limbah, krisis air bersih
10	Kabupaten Bandung	banjir, sampah, pencemaran limbah industri, pencemaran sungai, alih fungsi lahan sawah dan resapan, krisis air bersih, lahan kritis di kawasan hutan, pencemaran batubara, longsor
11	Kabupaten Bandung Barat	banjir, sampah, pencemaran limbah industri, pencemaran sungai, alih fungsi lahan sawah dan resapan, krisis air bersih, lahan kritis di kawasan hutan, pencemaran batubara, longsor, pertambangan

¹²⁷ <https://poskoberita.com>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

¹²⁸ <http://www.walhijabar.org>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

		galian c dan pertambangan di kawasan karst
12	Kabupaten Sumedang	banjir, longsor, alihfungsi lahan, pertambangan galian c, alihfungsi kawasan hutan, kebakaran hutan
13	Kabupaten Garut	banjir, pencemaran sungai, pertambangan pasir besi di kawasan pesisir, alihfungsi lahan sawah, alihfungsi kawasan hutan, pertambangan galian c, sampah
14	Kabupaten Sukabumi	pertambangan pasir besi di pesisir, pertambangan emas di lahan perkebunan, pertambangan di kawasan karst, banjir, longsor, alihfungsi kawasan hutan, kebakaran hutan, pencemaran sungai oleh pertambangan
15	Kabupaten Cianjur	sampah, limbah pabrik, banjir, longsor, pertambangan pasir besi di pesisir, pencemaran sungai, pertambangan galian c
16	Kabupaten Bogor	pertambangan di kawasan hutan dan perkebunan, sampah, limbah industri, pengambilan air bawah tanah, kurangnya RTH di perkotaan, hutan beton di kawasan resapan air dan hutan, sampah domestik
17	Kabupaten Purwakarta	Pertambangan, pencemaran sungai, limbah cair, limbah batubara, alihfungsi kawasan hutan dan sawah
18	Kabupaten Karawang	rusaknya kawasan mangrove, alihfungsi lahan pertanian, limbah pabrik, sampah domestik, pengambilan air bawah tanah, banjir, pertambangan karst, pencemaran sungai
19	Kabupaten Bekasi	rusaknya kawasan mangrove, alihfungsi lahan pertanian, limbah pabrik, sampah domestik, pengambilan air bawah tanah, banjir, pencemaran sungai
20	Kabupaten Subang	rusaknya kawasan mangrove, banjir, sampah, alihfungsi lahan pertanian oleh pabrik, limbah pabrik, longsor, kebakaran hutan
21	Kabupaten Indramayu	rusaknya kawasan mangrove, sampah, limbah pabrik, banjir, pertambangan pasir besi di pesisir, limbah minyak, limbah batubara, pencemaran sungai, pertambangan galian c
22	Kabupaten Cirebon	alihfungsi kawasan pesisir, limbah batubara, pertambangan galian c, pencemaran sungai, kurangnya RTH, longsor, banjir, pengambilan air bawah tanah
23	Kabupaten Kuningan	pertambangan galian c di kawasan hutan, alih fungsi lahan, sampah dan limbah, longsor

24	Kabupaten Majalengka	sampah, limbah industri, alih fungsi lahan pertanian, longsor, banjir, pertambangan galian c
25	Kabupaten Ciamis	Pertambangan galian c, pertambangan di kawasan pesisir, pertambangan karst, sampah, banjir, longsor, alihfungsi kawasan hutan
26	Kabupaten Pangandaran	sampah, pertambangan di kawasan karst dan pesisir, alihfungsi kawasan pesisir, banjir dan longsor
27	Kabupaten Tasikmalaya	banjir, longsor, pertambangan di kawasan pesisir, pertambangan galian c, alihfungsi kawasan hutan

Faktor utama terjadinya pencemaran lingkungan di Jawa Barat adalah karena lemahnya upaya pengendalian limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah yang berasal dari industri. Kemunculan industri-industri baru akan menimbulkan masalah terhadap sungai mulai dari limbah, alih fungsi lahan, hingga sedimentasi. Industri baru, akan muncul dan tersebar di mana-mana sehingga kerusakan akan sangat sulit diidentifikasi. Untuk itu, diperlukan adanya sistem pengendalian pencemaran air sungai yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai.

Upaya pengendalian limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri di Jawa Barat, perlu dilakukan secepatnya mengingat jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Jawa Barat mengalami pencemaran yang cukup parah. Sasaran pengendalian pencemaran lingkungan meliputi:

- 1) Mengurangi beban pencemaran badan air oleh industri dan rumah tangga.
- 2) Mengurangi beban emisi dari industri.
- 3) Mengawasi pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3.
- 4) Mengembangkan produksi bersih dan kontrol lingkungan terhadap polusi.

Ulsan Metropolitan City, Korea Selatan merupakan salah satu contoh kota industri yang berhasil mengendalikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh banyaknya industri di daerah tersebut. Pemerintah Kota Ulsan mencanangkan program 'Green Ulsan' guna menyelaraskan antara dunia industri dengan kelestarian lingkungan.

6.7.1.2.2 Kondisi Lingkungan Perindustrian Ulsan Metropolitan City

Ulsan Metropolitan City merupakan sebuah kota kecil dengan kekayaan alam serta peninggalan sejarah yang beranekaragam. Kota ini menyandang status sebagai zona industri khusus pada tahun 1962 dan berkembang menjadi pusat industri Korea Selatan. Perusahaan global seperti S-OIL, Solvay, BASF, dan DUPONT serta perusahaan terkemuka Korea Selatan seperti Hyundai Motor Company, Hyundai Heavy Industry, SK, Samsung, dan LG beroperasi di Ulsan. Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi mobil, galangan kapal, dan petrokimia.

Sebagai kota industri, Pemerintah Ulsan Metropolitan City sadar betul akan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh adanya kawasan industri. Kota Ulsan menghadapi bencana polusi yang sangat serius sampai dengan pertengahan tahun 1980. Untuk menanggulangi masalah tersebut, Pemerintah Korea Selatan memberlakukan aturan standar kualitas lingkungan di Ulsan pada akhir tahun 1980. Dampak dari kebijakan tersebut adalah setiap perusahaan yang beroperasi di Ulsan ikut serta dalam pencegahan polusi dan pengelolaan lingkungan.¹²⁹

¹²⁹ Hung-Suck PARK and Jae-Yeon WON. Ulsan Eco-industrial Park Challenges and Opportunities. 2015

Ekologi industri (Eco-Industry) digunakan sebagai sarana untuk merangsang pembangunan berkelanjutan di setiap kawasan industri yang ada di Korea Selatan. Ekologi industri adalah pendekatan dalam mengelola aktivitas manusia secara berkelanjutan dengan mencari sistem yang esensial antara manusia dengan alam, meminimalisir penggunaan energi dan material serta meminimalkan dampak aktivitas manusia terhadap alam (Lowe 2001).

Usaha Pemerintah Kota Ulsan guna mewujudkan kota yang ramah lingkungan, dimulai pada tahun 2004 dengan mengeluarkan kebijakan '*Ulsan Declaration for Ecopolis*' guna mengembalikan ekosistem seperti sedia kala. Kota Metropolitan Ulsan telah menandatangani sebuah kesepakatan dengan 295 perusahaan untuk mengurangi emisi secara sukarela selama periode antara 2000 dan 2016 dan mendorong mereka untuk menginvestasikan 1,9 triliun won di bidang perlindungan lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, seluruh lapisan masyarakat Ulsan berjanji untuk:

- 1) Mendahulukan kepentingan lingkungan dan berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan kota Ulsan sebagai kota yang lestari.
- 2) Menjaga warisan alam dengan menjaga dan melestarikan keindahannya serta memulihkan kembali ekosistem yang rusak.
- 3) Mencintai Ulsan dengan sepenuh hati, mendahulukan kelestarian alam serta mewariskan pendidikan lingkungan pada generasi penerus.

Visi Ulsan Metropolitan City dalam menyukseskan program '*Ecopolis Ulsan*' diikuti oleh beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem. Terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 Pemerintah Kota Ulsan telah mengeluarkan 33

kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah usaha nyata Pemerintah Kota untuk mengembalikan kelestarian Ulsan.

Salah satu keberhasilan Pemerintah Ulsan Metropolitan City dalam mewujudkan kota yang lestari dan ramah lingkungan adalah keberhasilan kota tersebut mengembalikan kondisi sungai-sungai yang telah tercemar menjadi bersih kembali. Program 'Taehwa River Master Plan' adalah usaha untuk melindungi sungai yang melintasi kota Ulsan. Program tersebut menghabiskan dana sekitar 755.4 miliar won yang diimplementasikan ke dalam 43 proyek untuk memperbaiki kondisi air dan membangun tepi laut.

Sumber pencemaran sungai di Ulsan Metropolitan City hampir sama dengan sumber pencemaran sungai-sungai yang ada di Jawa Barat, yakni limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah peternakan. Seiring dengan bertambahnya populasi penduduk, maka jumlah limbah pun akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, tingkat pencemaran sungai-sungai di Ulsan sangat tinggi. Setiap harinya, sungai-sungai tersebut dicemari oleh limbah yang berasal dari rumah tangga sebesar 258,8 m³, industri 353,8 m³ dan peternakan 851m³.

Tabel 6.14
Pencemaran Sungai di Ulsan¹³⁰

Sumber Limbah	2004	2005	2006
Rumah Tangga	253,859	257,033	258,871
Industri	294,352	323,954	353,857
Peternakan	738	872	851
Total	623,961	581,859	613,597

¹³⁰ Environmental Policy Division, Ulsan Metropolitan City. 2014

Ulsan memiliki 102 sungai dengan panjang mencapai 491.3 km. Sungai besar yang melintasi kota terdiri dari sungai Taehwa, sungai Hweaya, dan sungai Dongcheon. Salah satu sungai yang mengalami pencemaran sangat hebat adalah sungai Taehwa. Sungai Taehwa mempunyai panjang 47.54 km yang melintasi dua Distrik di Ulsan, yakni Jung-gu dan Nam-gu, Pusat Kota Ulsan, dan Teluk Ulsan. Setelah Ulsan menjadi kota industri, sungai Taehwa mengalami pencemaran yang sangat hebat, badan sungai dipenuhi oleh sampah dan limbah pabrik. Sampai dengan awal tahun 1990, bau menyengat yang berasal dari sungai mengakibatkan masyarakat enggan mendekati sungai tersebut. Program pemulihan kembali kondisi sungai Taehwa dilakukan setelah tragedi kematian ribuan ikan yang ada di sungai tersebut pada tahun 2000. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Ulsan membuat rencana jangka panjang untuk merestorasi sungai-sungai yang ada di daerah mereka.

Pemulihan kondisi sungai yang digalakan oleh Pemerintah Kota Ulsan mengalami keberhasilan. Proyek restorasi sungai Taehwa berhasil mengembalikan kualitas air sungai dari level 6 pada tahun 1996 menjadi level 1 pada tahun 2007. Dua jenis ikan yang biasa hidup di air level 1 seperti salmon dan sweetfish kembali terlihat di sungai Taehwa. Selain ikan, pemulihan sungai Taehwa juga telah mengembalikan populasi burung ke habitatnya di sungai Taehwa. Setiap tahun terjadi migrasi burung dalam skala besar ke sungai Taehwa. Keberhasilan Pemerintah Kota Ulsan dalam merestorasi sungai-sungai yang ada di daerahnya disertai dengan beberapa strategi dalam menghadapi masalah tersebut. Berikut ini merupakan beberapa kunci sukses Kota Ulsan dalam merestorasi sungai-sungai yang ada di wilayah mereka.

- 1) Kemauan yang kuat dari *stakeholder*.
 - Membuat grand design mengenai konservasi lingkungan menjadi agenda utama.
 - Filosofi menjaga lingkungan, berarti tidak ada kata negosiasi, fokus pada perbaikan serta isu seputar lingkungan.
- 2) Menjadikan isu perbaikan lingkungan sebagai kepentingan seluruh warga masyarakat.
- 3) Menyesuaikan kondisi dengan lingkungan Ulsan
- 4) Melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Ulsan

6.7.1.2.3 Kerjasama yang Dapat Dilakukan

Berdasarkan data dan fakta di atas, berikut ini merupakan peluang kerjasama antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Ulsan Metropolitan City, khususnya pada sektor penataan lingkungan wilayah perindustrian. Bentuk kerja sama tersebut antara lain:

- 1) Pertukaran wawasan dan pengalaman dengan Ulsan Metropolitan City mengenai faktor keberhasilan dalam menata lingkungan perindustrian serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam merestorasi kembali sungai-sungai.
- 2) Kerja sama dalam pengelolaan dan pengendalian limbah perindustrian yang mencemari lingkungan dan memulihkan kondisi sungai yang ada di Jawa Barat.

- 3) Pertukaran pegawai, khususnya tenaga ahli dalam bidang lingkungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penataan lingkungan, terutama lingkungan wilayah perindustrian.

6.7.1.3 Pariwisata

6.7.1.3.1 Kondisi Pariwisata Ulsan Metropolitan City

Seperti yang telah dikemukakan di atas, Pemerintah Ulsan Metropolitan City berhasil mengubah citra kota industri yang melekat terhadap kota tersebut menjadi kota wisata yang ramah bagi wisatawan. Citra sebagai kota industri muncul karena banyaknya kawasan industri dan perusahaan-perusahaan besar, baik skala nasional maupun berskala internasional yang beroperasi di wilayah Ulsan Metropolitan City. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Ulsan Metropolitan City untuk mengubah citra kota industri menjadi kota wisata, salah satunya adalah dengan membuat program '2017 Visit Ulsan'.

Keberhasilan Pemerintah Ulsan Metropolitan City dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui program '2017 Visit Ulsan' telah membawa hasil positif terhadap sektor pariwisata kota tersebut. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan, baik lokal maupun asing, yang datang berkunjung ke kota Ulsan sebanyak 3.52 juta orang pada semester I tahun 2017. Atas keberhasilan tersebut, maka pemerintah Ulsan membuat analisa langkah-langkah strategis dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya sebagai berikut:

- 1) Potensi perkembangan pariwisata Ulsan

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Ulsan pada paruh pertama tahun 2017, maka pertumbuhan industri pariwisata mengalami

kenaikan dan menjadikan peluang bagi Ulsan Metropolitan City untuk menjadikan kota tersebut sebagai salah satu tujuan wisata baru di Korea Selatan.

Jumlah wisatawan yang datang ke Ulsan meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu dari 1.4 juta orang menjadi 3.52 juta orang pada tahun ini. Hal tersebut mengindikasikan kemajuan dari industri pariwisata Ulsan. Jumlah wisatawan per objek wisata meningkat sebesar 1.2 juta untuk Taman Grand Taehwagang, 670 ribu orang Taman Ulsan Grand, 330 ribu orang untuk pegunungan Yeongnam, dan 180 ribu orang untuk Museum Whale Life Experience.

2) Potensi untuk merubah citra kota Ulsan

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Ulsan, maka Ulsan berhasil merubah citra dari kota industri menjadi kota wisata yang memiliki keanekaragaman tempat wisata.

3) Memperkuat Jaringan dan Strategi Pemasaran Industri Pariwisata

Jaringan kerja sama yang luas memperkuat industri pariwisata Ulsan sehingga mengalami percepatan yang signifikan. Sejak dilakukannya kemitraan dengan Korea Tourism Organization (KTO) jumlah mitra pariwisata Ulsan mengalami peningkatan diantaranya bekerja sama dengan tiga organisasi wisata dan delapan agen perjalanan. Kemitraan tersebut menciptakan sistem yang saling menguntungkan, baik bagi agen perjalanan maupun Pemerintah Kota Ulsan sendiri.

4) Promosi melalui *Mega Event*

Program '2017 Visit Ulsan' serta peringatan 20 tahun Ulsan sebagai Metropolitan City telah berhasil menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke Ulsan. Keduanya telah berhasil pula meningkatkan taraf perekonomian kota secara signifikan. Sepanjang tahun berbagai kegiatan digelar di Ulsan, seperti 20 festival menyambut peringatan hari jadi Ulsan, 30 festival budaya dan olahraga, dan 3 pagelaran festival nasional, salah satunya adalah Ulsan International Tourism Conference yang dihadiri oleh 2.000 orang.

5) Konsensus dalam Pembangunan Industri Pariwisata

Pemerintah Kota Ulsan mengajak semua elemen masyarakat seperti pengusaha, akademisi dan organisasi terkait dalam mengembangkan pariwisata Ulsan Metropolitan City. Secara khusus, dibentuknya kelompok sukarela U-Smile telah berhasil mengkampanyekan sistem pariwisata secara aktif dengan mempromosikan kota Ulsan di wilayah lain.

Keberhasilan Pemerintah Ulsan Metropolitan City dalam mengembangkan sektor pariwisatanya tidak terlepas dari usaha dan strategi yang digunakan dalam mempromosikan potensi yang ada di wilayah mereka. Salah satu dari strategi tersebut adalah dengan mengklasifikasikan tema wisata berdasarkan objek yang ditawarkan kepada wisatawan sehingga wisatawan dapat menentukan objek wisata apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu tempat yang dijadikan objek wisata adalah kawasan industri dengan mengusung tema wisata industri.

Sebagaimana kita ketahui, Ulsan Metropolitan City merupakan kota industri. Pesatnya pertumbuhan kawasan industri yang ada di Ulsan menjadikan sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian kota ini. Saat ini, ada lima kawasan

industri besar di Ulsan Metropolitan City, yakni Ulsan Plant Hyundai Motor Company, Hyundai Heavy Industries, Hyundai Mipo Shipbuilding, Petrochemical and Onsan Industry Complex dan Ulsan Port. Kejelian pemerintah Ulsan dalam memberdayakan potensi yang ada di daerahnya adalah dengan menjadikan kawasan industri-kawasan industri tersebut sebagai objek wisata. Dengan demikian, sebuah kawasan industri akan memiliki nilai tambah, tidak hanya sebatas kawasan industri semata, akan tetapi berfungsi sebagai objek wisata yang berpotensi untuk mengubah citra kota, membuka lapangan pekerjaan baru, dan yang paling penting adalah meningkatkan pendapatan daerah.

Kawasan industri yang dijadikan objek wisata meliputi Ulsan Plant Hyundai Motor Company, Hyundai Heavy Industries, Hyundai Mipo Shipbuilding, Petrochemical and Onsan Industry Complex, Ulsan Port dan Ulsandaegyo Bridge. Masing-masing kawasan industri menawarkan objek wisata yang berbeda-beda.

Tabel 6.15
Objek Wisata Industri Ulsan Metropolitan City

No	Kawasan Industri	Objek Wisata	Lokasi
1	Hyundai Plant of Hyundai Motor Company	Land : about 5 million m ² No. of Employees : about 35,000	700 Yeompo-ro, Buk-gu
2	Hyundai Heavy Industri	Land : 6,080,000 m ² No. of Employees : about 18,500 Main Products : shipbuilding, engine, plant, marine heavy equipment, etc.	1000, Bangeojin Ring Road, Dong-gu, Ulsan
3	Hyundai Mipo Shipbuilding	Land : 670,000 m ² No. of Employees : about 3,800 Main Products : drilling ship, underwater fiberoptic cables, multi-purpose vessels, ferries.	100 Bangeojin Ring Road, Dong-gu, Ulsan

4 Ulsan Port	Pelabuhan ini merupakan yang terbesar di Korea dan pelabuhan terbesar keempat untuk perdagangan cairan di dunia. Pelabuhan Ulsan terbagi menjadi pelabuhan Ulsan, pelabuhan baru Ulsan, pelabuhan Mipo, dan pelabuhan Onsan. 271, Jangsaengpogorae-ro, Nam-gu, Ulsan (in front of the Jangsaengpo Whale Museum)
--------------	---

6.7.1.3.2 Kondisi Pariwisata Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat mempunyai beberapa kesamaan dengan Ulsan Metropolitan City. Jika Ulsan Metropolitan City dikenal sebagai kota industri yang memiliki banyak warisan budaya dan cagar alam, maka Jawa Barat pun memiliki Kabupaten/Kota yang hampir mirip dengan Ulsan Metropolitan City. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan kawasan industri nasional terbanyak yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, salah satu tema wisata yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Ulsan guna menarik wisatawan datang berkunjung ke daerahnya adalah wisata industri. Hal yang sama dapat dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang memiliki kawasan industri seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Potensi wisata industri yang ada di Kabupaten/Kota tersebut sangat potensial mengingat luasnya kawasan industri-kawasan industri yang ada. Contohnya Kabupaten Bekasi, saat ini Kabupaten Bekasi memiliki tujuh (7) kawasan industri dengan luas kawasan mencapai 17.000 hektar dan akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi 2011-2031 menjadi 23.000 hektar.¹³¹ Tujuh kawasan industri besar yang terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi antara lain kawasan industri tersebut adalah Jababeka, MM 2100, Delta Mas, Lippo Cikarang, Hyundai, EJIP, dan Bekasi Fajar. Kawasan Industri MM2100 merupakan joint venture antara 2 kawasan industri, yaitu MM2100 dan PT. Bekasi Fajar.

Adanya potensi lain dari banyaknya kawasan industri di Kabupaten Bekasi disadari betul oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal itu ditandai dengan diluncurkannya program wisata industri dengan tema '*Lets Go to Kabupaten Bekasi*' yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Asosiasi Travel dan Agensi Travel Indonesia (ASITA) pada tahun 2014.¹³² Program untuk mengembangkan wisata industri, khususnya di Kabupaten Bekasi, terus digulirkan sampai dengan saat ini. Akan tetapi, perkembangannya belum signifikan karena dihadapkan pada beberapa kendala sehingga potensi tersebut belum digali dengan optimal. Beragam hambatan dan tantangan dalam pengembangan wisata industri antara lain:

- 1) Belum adanya *Grand Design* mengenai pola dan sistem pengembangan wisata industri.
- 2) Belum optimalnya komunikasi dan kerja sama antara kawasan industri dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengembangkan potensi wisata industri.

¹³¹ <http://economy.okezone.com>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2017

¹³² <http://www.urbancikarang.com>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2017

- 3) Masih sedikitnya jumlah perusahaan yang ikut serta dalam program wisata industri.
- 4) Belum optimalnya promosi dan pemasaran wisata industri.

Pengembangan wisata Jawa Barat, khususnya wisata industri, sangat potensial untuk dikembangkan mengingat banyaknya kawasan industri serta perusahaan-perusahaan besar, baik perusahaan skala nasional maupun internasional yang beroperasi di Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri, saat ini ada beberapa perusahaan besar dari Korea Selatan seperti Hankook Tire Indonesia, PT Samsung Electronic Indonesia, Win Textile, LG Electronic Indonesia, kawasan industri Hyundai. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi daya tarik wisata, baik bagi masyarakat Korea Selatan sendiri maupun masyarakat Jawa Barat. Dengan banyaknya perusahaan asal Korea Selatan yang beroperasi di Jawa Barat, maka laju peningkatan jumlah penduduk Korea Selatan di Jawa Barat akan ikut bertambah. Hal ini merupakan peluang bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi pariwisata, yaitu dengan memperkenalkan budaya serta objek wisata yang ada di Jawa Barat terhadap warga asing, khususnya Korea Selatan.

6.7.1.3.3 Kerjasama yang Dapat Dilakukan

Berdasarkan data dan fakta di atas, berikut ini merupakan peluang kerjasama antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Ulsan Metropolitan City, khususnya pada sektor pariwisata. Bentuk kerja sama tersebut antara lain:

- 1) Pemasaran bersama joint marketing, memberi kemudahan dalam visa dan permit.

- 2) Pertukaran informasi pariwisata mengenai inovasi serta solusi dalam meningkatkan serta mengembangkan objek wisata yang ada di kedua Provinsi melalui pelatihan dan penelitian.
- 3) Penawaran dan peninjauan investasi pada sektor pariwisata
- 4) Kerjasama business to business antar industri pariwisata

6.8 PROVINSI GYEONGSANGBUK-DO, KOREA SELATAN

6.8.1 Analisa Potensi Kerjasama

Kerjasama antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Gyeongsangbuk-Do sejatinya telah terjalin sejak tahun 2010. Kerjasama tersebut dilakukan guna meningkatkan prestasi kontingen Jawa Barat dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XVII di Riau pada tahun 2012 dan Pekan Olahraga Nasional XIX Jawa Barat dengan agenda utama kepelatihan dan pelatihan atlet Jawa Barat di Korea Selatan.¹³³ Buah dari kerjasama tersebut adalah keberhasilan Jawa Barat menjadi juara umum pada gelaran Pekan Olahraga Nasional XIX di Jawa Barat. Atas keberhasilan tersebut, maka provinsi Jawa Barat menginisiasi untuk melanjutkan kerjasama antara kedua provinsi, tidak hanya pada bidang olahraga saja, akan tetapi bidang-bidang lain yang dirasa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat.

Pokok bahasan ini akan menguraikan secara lebih mendalam tentang beberapa potensi kerjasama yang dapat dilakukan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan. Uraian mengenai potensi kerjasama kedua provinsi tersebut dilandasi oleh beberapa faktor diantaranya; 1)

¹³³ <http://humas.jabarprov.go.id>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2017

geografis, 2) ekonomi, 3) sosial budaya, dan 4) hubungan bilateral antar kedua negara. Selain faktor-faktor tersebut, kerjasama antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Gyeongsangbuk-Do juga dilandasi oleh keinginan kedua provinsi untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah masing-masing. Berikut ini merupakan analisis beberapa bidang yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama antara provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Gyeongsangbuk-Do. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah agrikultur, industri manufaktur, pariwisata, dan lain sebagainya.

6.8.1.1 Kerjasama Sektor Agrikultur

6.8.1.1.1 Kondisi Agrikultur Provinsi Jawa Barat

Kemandirian pangan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemajuan di sektor pertanian. Akan tetapi penyusutan lahan pertanian akibat modernisasi dan alih fungsi lahan menjadi properti ataupun industri, masih terjadi. Tidak terkecuali di Jawa Barat, yang digadang – gadang sebagai wilayah lumbung padi terbesar nasional.¹³⁴ Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan), dalam lima tahun terakhir luas lahan pertanian di Jawa Barat mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Luas lahan pertanian Jawa Barat pada tahun 2009 adalah seluas 937.373 hektar. Angka tersebut terus mengalami penyusutan setiap tahun, sampai dengan tahun 2013 luas lahan pertanian Jawa Barat adalah seluas 925.042 hektar. Dalam jangka waktu lima tahun, penyusutan lahan pertanian Jawa Barat adalah sebesar 12.331

¹³⁴ <http://www.mongabay.co.id/>. Diakses pada tanggal 27 Juli Agustus 2017

hektar. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat Jawa Barat merupakan provinsi penghasil beras tertinggi di Indonesia.

Tabel 6.16
Luas Lahan Pertanian Jawa Barat¹³⁵

Tahun	Luas Lahan
2009	937,373.00
2010	930,268.00
2011	930,507.00
2012	925,565.19
2013	925,042.00

Semakin menyusutnya lahan pertanian yang ada di Jawa Barat berimbas pada penurunan jumlah produksi pertanian. Setiap tahun, jumlah produksi pertanian Jawa Barat terus mengalami penurunan. Dalam lima tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, kondisi produksi pertanian Jawa Barat berada pada kondisi stagnan, jumlah produksi tertinggi terjadi pada tahun 2013, yakni 12.083.162 ton dengan luas panen mencapai 2.029.891 hektar, sedangkan jumlah produksi terendah terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah produksi sebesar 11.271.861 ton dengan luas panen seluas 1.918.799 hektar.

Hal positif dari kondisi pertanian Jawa Barat dalam kurun 2009-2015 adalah meningkatnya produktivitasnya. Produktivitas pertanian Jawa menunjukkan peningkatan, walaupun peningkatan tersebut belum signifikan, setidaknya jumlah produktivitas pertanian memperlihatkan adanya kenaikan. Dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2015 produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 61 kuintal per hektar.

¹³⁵ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian. 2014

Tabel 6.17
Produksi Pertanian Jawa Barat¹³⁶

Tahun	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)
2010	11,737,070	2,037,657	58
2011	11,633,891	1,964,466	59
2012	11,271,861	1,918,799	59
2013	12,083,162	2,029,891	60
2014	11,644,899	1,979,799	59
2015	11,373,144	1,857,612	61

Luas lahan pertanian yang ada di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagian besar mengalami masalah yang sama, yakni penyusutan luas lahan. Tiga daerah yang saat ini memiliki lahan pertanian terluas di Jawa Barat adalah Kabupaten Indramayu dengan luas lahan seluas 114,962 hektar, diikuti oleh Kabupaten Karawang dengan luas lahan 98,149 hektar, kemudian Kabupaten Cianjur dengan luas lahan mencapai 66,205 hektar. Berbeda dengan ketiga Kabupaten tersebut, Kota Depok, Kota Cirebon dan Kota Bogor merupakan tiga Kota yang memiliki lahan pertanian paling sedikit.

Kota Depok memiliki lahan pertanian seluas 175 hektar, kemudian Kota Cirebon dan Kota Bogor masing-masing memiliki luas lahan pertanian seluas 257.00 hektar dan 750.00 hektar. Luas lahan pertanian Jawa Barat, per tahun 2013, berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian adalah seluas 925.042.00 hektar. Luas lahan tersebut semakin hari semakin menyusut mengingat jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengalami penyusutan luas lahan pertanian lebih banyak

¹³⁶ <http://www.pertanian.go.id/>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2017

jumlahnya dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan luas lahan pertanian.

Tabel 6.18
Luas Lahan Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat¹³⁷

No	Kabupaten	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Bogor	45,431.00	45,740.00	44,587.00	40,008.11	45,511.00
2	Kab. Sukabumi	67,352.00	63,261.00	65,055.00	55,338.06	63,973.00
3	Kab. Cianjur	65,803.00	65,460.00	65,907.00	66,232.87	66,205.00
4	Kab. Bandung	35,563.00	35,140.00	35,447.00	32,075.31	34,803.00
5	Kab. Garut	50,273.00	50,270.00	50,176.00	45,842.56	48,541.00
6	Kab. Tasikmalaya	49,460.00	49,515.00	49,428.00	43,940.96	51,267.00
7	Kab. Ciamis	52,217.00	51,853.00	51,898.00	47,854.89	35,357.00
8	Kab. Kuningan	28,960.00	28,952.00	28,949.00	29,103.06	28,623.00
9	Kab. Cirebon	51,804.00	51,677.00	50,491.00	54,271.95	51,493.00
10	Kab. Majalengka	51,404.00	51,438.00	51,438.00	50,961.85	47,323.00
11	Kab. Sumedang	32,878.00	32,626.00	33,152.00	30,358.00	32,860.00
12	Kab. Indramayu	116,039.00	116,001.00	114,048.00	118,767.22	114,962.00
13	Kab. Subang	85,302.00	84,869.00	85,575.00	91,991.49	84,868.00
14	Kab. Purwakarta	16,566.00	16,588.00	16,573.00	19,848.01	17,395.00
15	Kab. Karawang	97,472.00	97,472.00	98,358.00	104,216.80	98,149.00
16	Kab. Bekasi	54,117.00	53,889.00	53,524.00	62,901.55	52,508.00
17	Kab. Bandung Barat	20,654.00	20,333.00	20,791.00	16,481.02	20,907.00
18	Kab. Pangandaran	-	-	-	-	16,426.00
19	Kota Bogor	960.00	960.00	1,061.00	631.68	750.00
20	Kota Sukabumi	1,912.00	1,741.00	1,725.00	1,618.45	1,543.00
21	Kota Bandung	1,990.00	1,425.00	1,354.00	1,869.87	1,116.00
22	Kota Cirebon	333.00	307.00	273.00	241.95	257.00
23	Kota Bekasi	521.00	469.00	469.00	709.60	432.00
24	Kota Depok	596.00	589.00	565.00	246.01	175.00
25	Kota Cimahi	293.00	293.00	275.00	180.43	296.00
26	Kota Tasikmalaya	6,155.00	6,082.00	6,070.00	6,819.83	5,984.00
27	Kota Banjar	3,318.00	3,318.00	3,318.00	3,053.68	3,318.00

¹³⁷ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian. 2014

Total	937,373.00	930,268.00	930,507.00	925,565.19	925,042.00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(dalam Ha)

Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengalami penyusutan luas lahan per tahun 2012-2013 adalah sebanyak 15 daerah. Daerah yang paling tinggi penyusutan luas lahan pertaniannya adalah Kabupaten Ciamis, diikuti oleh Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang. Total penyusutan lahan pertanian di Kabupaten Ciamis adalah seluas 12.497.89 hektar, kemudian Kabupaten Bekasi berada di posisi kedua dengan penyusutan luas lahan pertanian mencapai 10.393.55 hektar dan Kabupaten Subang mengalami penyusutan luas lahan pertanian seluas 7.123.49 hektar. Total penyusutan luas lahan pertanian dari 15 Kabupaten/Kota tersebut mencapai 51.274.45 hektar.

Tabel 6.19
Penyusutan Lahan Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Barat

NO	Kabupaten/Kota	2012	2013	Penyusutan
1	Kab. Ciamis	47,854.89	35,357.00	12.497.89
2	Kab. Bekasi	62,901.55	52,508.00	10.393.55
3	Kab. Subang	91,991.49	84,868.00	7.123.49
4	Kab. Karawang	104,216.80	98,149.00	6.067.80
5	Kab. Indramayu	118,767.22	114,962.00	3.805.22
6	Kab. Majalengka	50,961.85	47,323.00	3.638.85
7	Kab. Cirebon	54,271.95	51,493.00	2.778.95
8	Kab. Purwakarta	19,848.01	17,395.00	2.453.01
9	Kota Tasikmalaya	6,819.83	5,984.00	835.83
10	Kota Bandung	1,869.87	1,116.00	753.87

11	Kab. Kuningan	29,103.06	28,623.00	480.06
12	Kota Bekasi	709.60	432.00	277.60
13	Kota Sukabumi	1,618.45	1,543.00	75.45
14	Kota Depok	246.01	175.00	71.01
15	Kab. Cianjur	66,232.87	66,205.00	27.87
Total				51.274.45

Dalam rentang waktu yang sama, ada beberapa daerah di Jawa Barat yang mengalami fenomena sebaliknya, yaitu penambahan luas lahan pertanian. Total daerah yang mengalami peningkatan luas lahan pertanian adalah sebanyak 11 daerah. Daerah yang paling banyak penambahan luas lahan pertanian di Jawa Barat antara lain Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Total luas lahan pertanian Kabupaten Sukabumi mengalami penambahan seluas 8.634.94 hektar dari 55.338.06 hektar pada tahun 2012 menjadi 63.973.00 pada tahun 2013. Kabupaten Tasikmalaya menjadi Kabupaten kedua yang mengalami peningkatan luas lahan pertanian, yakni peningkatan seluas 7.326.04 hektar, diikuti oleh Kabupaten Bogor seluas 5.502.89 hektar dan Kabupaten Bandung Barat seluas 4.425.98 hektar serta Kabupaten Bandung seluas 2.727.69 hektar. Total penambahan luas lahan pertanian Jawa Barat per tahun 2012-2013 adalah seluas 34.331.24 hektar

Tabel 6.20

Peningkatan Luas Lahan Pertanian Kabupaten/Kota, Jawa Barat

NO	Kabupaten/Kota	2012	2013	Penambahan
2	Kab. Sukabumi	55,338.06	63,973.00	8.634.94
5	Kab. Tasikmalaya	43,940.96	51,267.00	7.326.04
1	Kab. Bogor	40,008.11	45,511.00	5.502.89
7	Kab. Bandung Barat	16,481.02	20,907.00	4.425.98
3	Kab. Bandung	32,075.31	34,803.00	2.727.69
4	Kab. Garut	45,842.56	48,541.00	2.698.44
6	Kab. Sumedang	30,358.00	32,860.00	2.502.00
11	Kota Banjar	3,053.68	3,318.00	264.32
8	Kota Bogor	631.68	750.00	118.32
10	Kota Cimahi	180.43	296.00	115.57
9	Kota Cirebon	241.95	257.00	15.05
Total				34.331.24

Berdasarkan data di atas, luas lahan pertanian Jawa Barat mengalami penyusutan yang cukup drastis. Hal itu dibuktikan dengan tidak seimbangnya antara jumlah peningkatan dengan penyusutan luas lahan pertanian dalam kurun waktu 2012-2013. Dalam jangka waktu satu tahun, yaitu peralihan dari tahun 2012 ke tahun 2013 Provinsi Jawa Barat telah kehilangan lahan pertanian seluas 16.943.21 hektar.

Selain luas lahan yang semakin berkurang, masih banyak kendala lain yang muncul dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan sektor pertanian di Jawa Barat. Kendala-kendala tersebut antara lain:

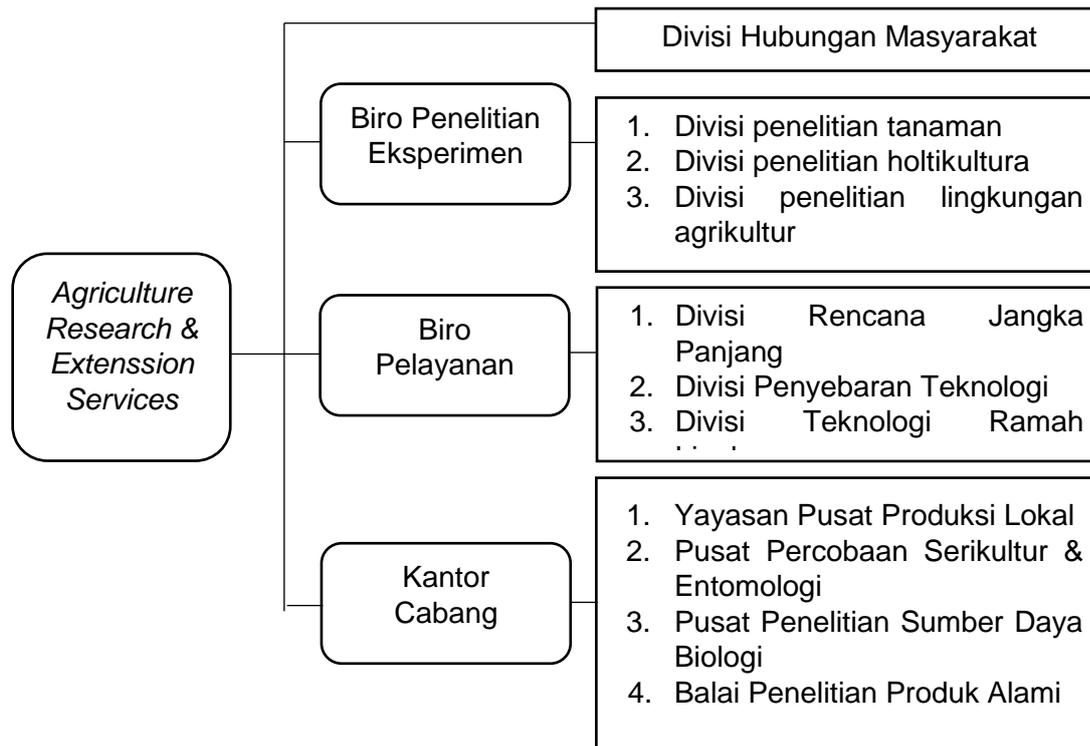
- 1) Luas lahan pertanian yang semakin berkurang berpengaruh terhadap produktivitas pertanian.
- 2) Jumlah rumah tangga pertanian semakin berkurang karena rendahnya minat generasi muda untuk berkecimpung di dunia pertanian.
- 3) Tingginya jumlah limbah industri yang mencemari area pertanian sehingga mempengaruhi kesuburan sawah dan menjadi 'hama' pertanian.
- 4) Banyaknya lahan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 5) Pertumbuhan penduduk yang pesat di wilayah pertanian mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.

6.8.1.1.2 Kondisi Agrikultur Provinsi Gyeongsangbuk-Do

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa salah satu potensi, khususnya dalam bidang ekonomi yang dimiliki oleh Provinsi Gyeongsangbuk-Do adalah sektor agrikultur. Sektor ini menjadi andalan provinsi Gyeongsangbuk-Do dalam hal jumlah produk domestik daerah mereka. Beberapa komoditas agrikultur Gyeongsangbuk-Do seperti apel, cabe merah, persik, dan melon menempati urutan pertama dalam skala nasional (Korea Selatan) guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produktivitas sektor agrikultur provinsi Gyeongsangbuk-Do dalam menghasilkan komoditas yang unggul secara efektif dan efisien didukung oleh beberapa faktor seperti teknologi pertanian yang modern, ilmu pengetahuan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam hal peningkatan dan pengembangan yang berkelanjutan. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah provinsi Gyeongsangbuk-Do mendirikan satu organisasi/badan pemerintah yang bertanggungjawab dalam hal pengembangan, baik itu penelitian maupun riset

teknologi serta pelayanan dalam bidang agrikultur, yaitu Gyeongsangbuk-Do Agriculture Research and Extension Services (GARES).

Gambar 6.15 : Struktur Organisasi GARES



Tujuan utama dibentuknya GARES adalah untuk menghasilkan komoditas pertanian dan perkebunan yang berkualitas tinggi, pertanian berkelanjutan, pengembangan produk pada bagian penelitian dan penerapan teknik pertanian bagi petani. Selain tujuan utama tersebut, dibentuknya GARES oleh pemerintah provinsi Gyeongsangbuk-Do disertai oleh beberapa misi, diantaranya adalah sebagai berikut.¹³⁸

¹³⁸ Gyeongsangbuk-Do Agriculture Research & Extension Service. 2016.

- 1) Penelitian tentang perbaikan teknologi pertanian untuk pembangunan pedesaan.
- 2) Perluasan teknologi dan informasi agrtikultura.
- 3) Mendistribusikan benih bersertifikat kepada petani.
- 4) Mendistribusikan benih bersertifikat kepada petani.

Keberadaan organisasi GARES sangat signifikan dalam menunjang perkembangan sektor agrikultur provinsi Gyeongsangbuk-Do. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan, modernisasi teknologi agrikultur, serta ilmu pengetahuan terbaru mengenai varietas pertanian dan perkebunan merupakan keberhasilan organisasi ini bagi kemajuan sektor agrikultur provinsi Gyeongsangbuk-Do. Karena letaknya yang berada di bagian Selatan, provinsi Gyeongsangbuk-Do mengalami empat musim yang berbeda dalam setiap tahunnya, antara lain musim semi, musim Provinsi Gyeongsangbuk-Do mempunyai lahan yang digunakan untuk sektor agrikultur sekitar 268 hektar (16.3%) dari luas provinsi. Luas lahan tersebut menempatkan provinsi Gyeongsangbuk-Do sebagai provinsi ke 2 dalam skala nasional yang memiliki luas lahan agrikultur terbesar di Korea Selatan setelah provinsi Jeongnam (298 hektar). **Tabel 6.21**

Luas Lahan Agrikultur Provinsi/Kota di Korea Selatan¹³⁹

Provinsi/Kota	2015	2016
Seoul	476	422
Busan	6,008	5,934
Daegu	8,291	8,102
Incheon	20,114	19,511
Gwangju	10,261	9,878

¹³⁹ <http://kostat.go.kr>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017

Daejeon	4,305	4,072
Ulsan	11,003	10,889
Sejong	8,260	8,102
Gyeonggi	175,417	169,435
Gangwon	107,277	104,330
Chungbuk	111,568	109,161
Chungnam	218,787	215,161
Jeongbuk	203,559	200,720
Jeongnam	304,799	298,095
Gyeongbuk	274,268	268,461
Gyeongnam	151,769	149,247
Jeju	62,642	62,140

(dalam hektar)

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2016 telah terjadi pengurangan luas lahan agrikultur di provinsi Gyeongsangbuk-Do seluas 6.026 hektar (2.2%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan menyusutnya luas lahan agrikultur seluas 6.026 hektar tersebut, menjadikan provinsi Gyeongsangbuk-Do berada di urutan ke dua sebagai provinsi yang mengalami pengurangan luas lahan yang diperuntukan bagi sektor agrikultur setelah provinsi Jyeongnam dengan penyusutan seluas 6.70 hektar. Berkurangnya luas lahan agrikultur tidak hanya dialami oleh provinsi Gyeongsangbuk-Do, akan tetapi dialami oleh semua provinsi/kota di Korea Selatan. Jumlah penyusutan luas lahan agrikultur tiap provinsi/kota di Korea Selatan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.22

Penyusutan Luas Lahan Agrikultur di Provinsi/Kota di Korea Selatan¹⁴⁰

Provinsi/Kota	2016	%
Seoul	-54	-11.3
Busan	74	-1.2
Daegu	-189	-2.3
Incheon	-603	-3.0
Gwangju	-383	-3.7
Daejeon	-233	-5.4
Ulsan	-114	-1.0
Sejong	-158	-1.9
Gyeonggi	-5.982	-3.4
Gangwon	-2.947	-2.7
Chungbuk	-2.407	-2.2
Chungnam	-3.687	-1.7
Jeongbuk	-2.839	-1.4
Jeongnam	-6.704	-2.2
Gyeongbuk	-7.026	-2.2
Gyeongnam	-2.522	-1.7
Jeju	-502	-0.8

Dari total 268.461 hektar luas lahan agrikultur yang ada di provinsi Gyeongsangbuk-Do, terdiri dari dua jenis lahan yang berbeda, yaitu area persawahan, dataran tinggi, dan hutan. Total luas lahan yang digunakan seluas 19.025.9 km² dengan rincian luas lahan yang dapat digunakan menghasilkan komoditas agrikultur seluas 3.136.9 km² yang terdiri dari area persawahan seluas 1.847.4 km² dan dataran tinggi seluas 1.289.5 km². Area yang paling luas adalah area perhutanan, yakni mencapai 13.731.4 km² dan sisanya merupakan area lain-

¹⁴⁰ <http://kostat.go.kr>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017

lain sekitar 2.157.6 km². Berikut ini merupakan tabel luas lahan produktif yang ada di provinsi Gyeongsangbuk-Do.

Tabel 6.23
Luas Lahan Produktif Provinsi Gyeongsangbuk-Do¹⁴¹

Lahan Produktif		Sub-Total	Pegunungan	Lain-lain	Total
Sawah	DataranTinggi				
1.847.4	1.289.5	3.136.9	13.731.4	2.157,6	19.025.9

Dengan keterbatasan lahan produktif yang dapat digunakan sebagai penghasil komoditas agrikultur, provinsi Gyeongsangbuk-Do mampu mengatasi kekurangan tersebut melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi agrikultur dengan mendirikan organisasi *Gyeongsangbuk-Do Agriculture Research & Extension Service* (GARES), seperti yang telah diuraikan diatas.

Keberhasilan provinsi Gyeongsangbuk-Do dalam mengembangkan sektor agrikultur, walaupun memiliki keterbatasan lahan produktif, adalah dibuktikan dengan banyaknya industri rumah tangga (household) agrikultur yang mencapai angka 181 ribu rumah tangga yang aktif dalam bidang agrikultur. Angka tersebut menjadikan provinsi Gyeongsangbuk-Do sebagai provinsi tertinggi yang memiliki industri rumah tangga terbanyak di Korea Selatan. Gambar di bawah ini merupakan jumlah industri rumah tangga (household) dalam bidang agrikultur yang ada di Korea Selatan.

Berdasarkan tabel di atas, industri rumah tangga (household) dalam bidang agrikultur di provinsi Gyeongsangbuk-Do pada tahun 2015 berjumlah 185 ribu rumah tangga. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar empat ribu

¹⁴¹ Gyeongsangbuk-Do Agriculture Research & Extension Service. 2016.

rumah tangga sehingga jumlah pelaku industri rumah tangga agrikultur menjadi 181 ribu rumah tangga.

6.8.1.1.3 Bentuk Kerja sama yang Dapat Dilakukan

Berdasarkan data dan fakta di atas, berikut ini merupakan peluang kerjasama antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Gyeongsangbuk-Do khususnya pada sektor agrikultur. Potensi-potensi tersebut antara lain:

- 1) Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang agrikultur guna meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan daerah masing-masing.
- 2) Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan sektor agrikultur melalui pertukaran penyuluh pertanian dan perkebunan antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Gyeongsangbuk-Do.
- 3) Kerjasama dalam pengelolaan dan pemberdayaan wilayah agraria, khususnya komoditas-komoditas unggul yang ada di Jawa Barat seperti kopi, cabe merah, dan teh sehingga terjadi transfer ilmu (knowledge transfer) agar komoditas tersebut bisa bersaing di pangsa pasar internasional.
- 4) Transfer ilmu dan teknologi dalam pengelolaan dan pemberdayaan lahan agrikultur dengan optimal mengingat Provinsi Gyeongsangbuk-do dan Provinsi Jawa Barat memiliki masalah yang sama, yaitu semakin menyusutnya agrikultur akan tetapi, mereka (Provinsi Gyeongsangbuk-Do) mampu menanggulangi masalah tersebut melalui inovasi dan teknologi pertanian.

6.8.1.2 Kerjasama Pariwisata

6.8.1.2.1 Kondisi Pariwisata Provinsi Jawa Barat

Sektor pariwisata Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan aset guna meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah. Potensi-potensi pariwisata yang ada di Jawa Barat didukung oleh keanekaragaman tujuan wisata sebagai daya tarik datangnya wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing, untuk datang berkunjung ke Jawa Barat.

Tujuan wisata yang ada di Jawa Barat dipetakan berdasarkan jalur jalan utama dan sumber daya tarik wisata unggulan dengan produk wisata kawasan. Berdasarkan hal itu, maka Provinsi Jawa Barat membagi kawasan wisata menjadi 9 (sembilan) kawasan wisata dengan uraian sebagai berikut:¹⁴²

1. Kawasan wisata industri dan bisnis di daerah Karawang-Bekasi
2. Kawasan wisata Agro di daerah Purwakarta-Subang
3. Kawasan wisata Budaya Pesisir di daerah Cirebon
4. Kawasan wisata Alam Pegunungan di daerah Puncak
5. Kawasan wisata Perkotaan dan Pendidikan di daerah Bandung
6. Kawasan wisata Kriya dan Budaya Priangan
7. Kawasan Ekowisata Pelabuhan Ratu
8. Kawasan wisata Minat Khusus Jawa Barat Selatan
9. Kawasan wisata Pantai Pangandaran

Dengan melimpah serta beranekaragamnya daerah tujuan wisata yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, maka terbuka peluang yang sangat besar bagi

¹⁴² <http://bappeda.jabarprov.go.id>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2017

Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor dalam meningkatkan pendapatan daerah dan taraf perekonomian masyarakat. Salah satu usaha dalam mengembangkan sektor pariwisata ini adalah dengan memperkenalkan tujuan wisata-tujuan wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat kepada dunia internasional secara aktif melalui kerjasama, salah satunya adalah kerjasama dengan Provinsi Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan.

Jumlah wisatawan asing yang datang berkunjung ke Jawa Barat, khususnya yang berasal dari Korea Selatan masih sedikit dibandingkan dengan wisatawan-wisatawan yang berasal dari negara lain. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat per April dan Mei 2017, jumlah wisatawan asal Korea Selatan hanya berjumlah 45 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2016.

Tabel 6.24
Jumlah Wisatawan Asing Menurut Negara Asal

Banyaknya Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Jawa Barat Melalui Pintu Masuk Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung dan Pelabuhan Muarajati Kota Cirebon yang Dirinci Menurut Kebangsaan Mei 2016, April 2017 dan Mei 2017			
Kebangsaan	Jumlah Wisman (Orang)		
	Mei 2016	April 2017	Mei 2017
[1]	[2]	[3]	[4]
Singapura	3.183	2.543	2.138
Malaysia	14.374	11.605	11.422
Philipna	65	63	117
Thailand	77	167	183
Jepang	79	81	89
Korea Selatan	77	55	45
Tiongkok	91	72	87
India	168	251	175
Australia	89	154	111
Amerika Serikat	119	88	138
Inggris	50	56	56
Belanda	50	42	47
Jerman	51	31	33
Perancis	32	55	39
Saudi Arabia	11	-	2
Lainnya	386	1.392	480
Jumlah	18.902	16.655	15.162

*Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Hal ini merupakan peluang bagi provinsi Jawa Barat, khususnya dalam mengembangkan sektor pariwisata, mengingat jumlah wisatawan dari Korea Selatan yang datang ke Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah wisatawan asal Korea Selatan yang datang ke Indonesia per tahun 2016 adalah sebanyak 386.789 orang.

Tabel 12:
Jumlah Wisatawan Asing Masuk ke Indonesia¹⁴³

Tahun	Jumlah
2014	352 004
2015	375 586
2016	386 789

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata per Januari – April 2017, jumlah wisatawan asal Korea Selatan yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Periode Januari – April 2016 jumlah wisatawan Korea Selatan yang masuk ke Indonesia berjumlah 121.337 orang, sedangkan tahun ini jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 124.899 orang. Salah satu pintu masuk wisatawan asal Korea Selatan ke Indonesia adalah Bandara Husein Sastranegara, Jawa Barat. Jumlah wisatawan asal Korea Selatan yang masuk melalui Bandara tersebut berjumlah 333 orang.¹⁴⁴

Saat ini, pariwisata Jawa Barat belum mampu menarik wisatawan asal Korea Selatan dengan optimal, dengan jumlah wisatawan 121.337 wisatawan yang masuk ke Indonesia per periode Januari-April saja, hal ini merupakan peluang bagi Jawa

¹⁴³ <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2017

¹⁴⁴ <http://kemenpar.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2017

Barat dalam menarik wisatawan untuk berkunjung. Saat ini, daerah tujuan wisata yang menjadi favorit wisatawan asal Korea Selatan di Indonesia adalah Bali dan Batam. Pada periode yang sama, wisatawan asal Korea Selatan yang menggunakan Bandara Ngurah Rai, Bali sebagai pintu masuk ke Indonesia berjumlah 51.655 orang, kemudian diikuti oleh Bandara Batam, Kepulauan Riau dengan jumlah 21.681 orang. Dibandingkan dengan kedua provinsi tersebut provinsi Jawa Barat belum mengoptimalkan potensi pariwisata, khususnya dalam menarik minat wisatawan untuk datang dan mengunjungi tempat wisata yang ada di Jawa Barat.

Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi/Kota yang ada di Korea Selatan dalam bidang pariwisata perlu ditingkatkan. Kerjasama tersebut dirasa penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata. Saat ini, Provinsi Gyeongsangbuk-Do merupakan salah satu Provinsi dengan populasi penduduk terpadat di Korea Selatan, yakni berjumlah 2.775.890 jiwa dengan total GDP 88,552,710 miliar won (2013) dan rata-rata GDP per kapita 25,929 (2013). Populasi penduduk yang besar disertai dengan pendapatan yang cukup tinggi, Provinsi Gyeongsangbuk-do merupakan pasar potensial bagi Jawa Barat dalam bidang pariwisata.

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan wisatawan dalam memilih tujuan wisata adalah ketersediaan infrastruktur, kemudahan dalam menjangkau serta ketersediaan akses informasi mengenai tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Barat. Permasalahan utama dalam mengembangkan potensi pariwisata di Indonesia, khususnya di Jawa Barat adalah masalah infrastruktur yang belum

memadai.¹⁴⁵ Selain infrastuktur, kendala lainnya adalah keterbatasan informasi mengenai daya tarik tempat wisata, paket harga, dan tempat menginap yang ada di sekitar tempat wisata tersebut.

6.8.1.2.2 Kondisi Pariwisata Provinsi Gyeongsangbuk-Do

Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi/Kota yang ada di Korea Selatan. Setiap Provinsi/Kota yang ada di Korea Selatan sangat maksimal dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya masing-masing. Misalnya, Provinsi Gyeongsangbuk-do telah berusaha dengan maksimal untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah mereka melalui beberapa cara diantaranya:

- 1) Membuat media promosi dalam bentuk website diantaranya adalah <http://tour.gb.go.kr> dan <http://www.gtc.co.kr> yang menyediakan semua informasi mengenai tempat wisata, transportasi menuju tempat wisata, dan jenis wisata yang ada di Provinsi Gyeongsangbuk-Do.
- 2) Mengklasifikasikan jenis wisata berdasarkan potensi yang ada di Gyeongsanbuk-Do seperti wisata festival, wisata pegunungan, laut, sungai dan danau, rumah tradisional, dan lain sebagainya sebagai ragam pilihan yang ditawarkan kepada wisatawan.
- 3) Membuat akses infrastuktur yang memadai seperti jalan dan tempat menginap yang mudah dijangkau oleh wisatawan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menarik minat wisatawan asing datang ke Indonesia adalah dengan membebaskan visa

¹⁴⁵ <http://bisniswisata.co.id>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

kunjungan singkat (BVKS) bagi warga Korea Selatan dan 168 negara lainnya di dunia untuk mencapai target kunjungan wisata mancanegara sebesar 15 juta orang pada tahun 2017.¹⁴⁶ Jumlah warga negara Korea Selatan yang melakukan kunjungan ke luar negeri pada tahun 2016 adalah sebesar 22.3 juta orang. Angka tersebut naik 15 persen dari angka tahun sebelumnya. Hal ini merupakan peluang bagi Provinsi Jawa Barat dalam menarik minat wisatawan asing, khususnya dari Korea Selatan untuk datang berkunjung ke Jawa Barat.

6.8.1.2.3 Bentuk Kerja sama yang Dapat Dilakukan

Berdasarkan data dan fakta di atas, berikut ini merupakan peluang kerjasama antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Gyeongsangbuk-Do khususnya pada sektor pariwisata. Potensi-potensi tersebut antara lain:

- 1) Pemasaran bersama (joint marketing) dalam mempromosikan tempat wisata yang ada di daerah masing-masing.
- 2) Pertukaran informasi pariwisata mengenai kelebihan dan kekurangan daerah wisata yang ada di kedua provinsi.
- 3) Kerjasama investasi pariwisata antara kedua provinsi guna meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata kedua provinsi.
- 4) Peningkatan sumber daya manusia untuk kepentingan pariwisata
- 5) Kerjasama business to business antar industri pariwisata

¹⁴⁶ <http://travel.kompas.com>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2107

6.8.1.3 Kerjasama di Bidang Perikanan

6.8.1.3.1 Kondisi Perikanan Provinsi Jawa Barat

Sektor lain yang potensial untuk dijajaki kerja sama antara provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Gyeongsangbuk-Do adalah sektor perikanan. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup besar. Panjang garis pantai Jawa Barat mencapai 805 km yang terdiri dari pantai selatan dan 428 km² dan pantai utara 377 km. Luas laut yang dimiliki Provinsi Jawa Barat mencapai 289.800 km².

Tabel 6.25

Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Barat¹⁴⁷

Tahun	Jumlah
2013	218.609
2014	219.004
2015	292.649

* *up date* data 12 Juni 2017

Potensi tersebut tersebar di seluruh daerah pesisir seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang.¹⁴⁸ Sektor perikanan terdiri dari dua jenis, yakni perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Dari kedua jenis tersebut, produksi perikanan Jawa Barat, merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah produksi perikanan Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2013 jumlah perikanan tangkap di Jawa Barat menghasilkan produk sebanyak 218.609 ton. Jumlah tersebut

¹⁴⁷ <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

¹⁴⁸ <http://bandung.bisnis.com>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 219.004 ton pada tahun 2014 dan 292.649 ton pada tahun 2105.

Peningkatan jumlah produksi perikanan di Jawa Barat tidak diikuti oleh jumlah rumah tangga perikanan, baik itu rumah tangga perikanan tangkap maupun rumah tangga perikanan budidaya. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan semakin berkurangnya jumlah rumah tangga perikanan budidaya yang ada di Jawa Barat. Tahun 2013 jumlah rumah tangga perikanan budidaya berjumlah 391.007 rumah tangga. Jumlah tersebut terus mengalami penyusutan sampai dengan tahun 2015 jumlah rumah tangga perikanan yang ada di Provinsi Jawa Barat berjumlah 350.737 rumah tangga.

Tabel 6.26

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Provinsi Jawa Barat¹⁴⁹

Tahun	Jumlah Rumah Tangga
2013	391.007
2014	376.142
2015	350.737

Penurunan jumlah rumah tangga perikanan di Provinsi Jawa Barat tidak hanya terjadi di rumah tangga perikanan budidaya. Hal yang sama juga terjadi di rumah tangga perikanan tangkap. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap pada tahun 2013 berjumlah 46.457 rumah tangga. Jumlah tersebut terus mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Hal itu ditandai dengan jumlah rumah tangga perikanan tangkap pada tahun 2014 berjumlah 42.763 rumah tangga dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 28.677 rumah tangga.

¹⁴⁹ <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

Tabel 6.27

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Barat¹⁵⁰

Tahun	Jumlah
2013	46.457
2014	42.763
2015	28.677

Usaha dalam meningkatkan produksi perikanan serta jumlah rumah tangga perikanan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah dengan membangun beberapa dermaga laut di pantai selatan Jawa Barat seperti di Cidaun, Cikidang, Cikalong, dan Ranca Buaya.¹⁵¹ Saat ini, sentra perikanan dan di Provinsi Jawa Barat terpusat di Jawa Barat Selatan seperti Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Pelabuhan Ratu, dan Kabupaten Sukabumi.

Usaha peningkatan produksi perikanan dan rumah tangga perikanan yang ada di Jawa Barat tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha perikanan dan nelayan. Kendala-kendala tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan nelayan yang belum sesuai dengan harapan. Berikut ini merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh nelayan, khususnya nelayan kecil yang ada di Jawa Barat.

- 1) Belum adanya tempat penyimpanan hasil tangkapan berupa gudang pendingin yang mengakibatkan hasil tangkapan memiliki nilai tawar yang rendah.
- 2) Kapal-kapal yang digunakan masih konvensional sehingga hasil tangkapan tidak maksimal.

¹⁵⁰ <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

¹⁵¹ <http://diskanlaut.jabarprov.go.id/>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

- 3) Tidak adanya pusat informasi di tiap daerah yang menyediakan informasi mengenai cuaca dan sebaran ikan yang ada di laut sesuai dengan musim yang sedang berlangsung.
- 4) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha perikanan dan nelayan yang ada di Jawa Barat.
- 5) Minimnya modal dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha perikanan sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan nelayan.

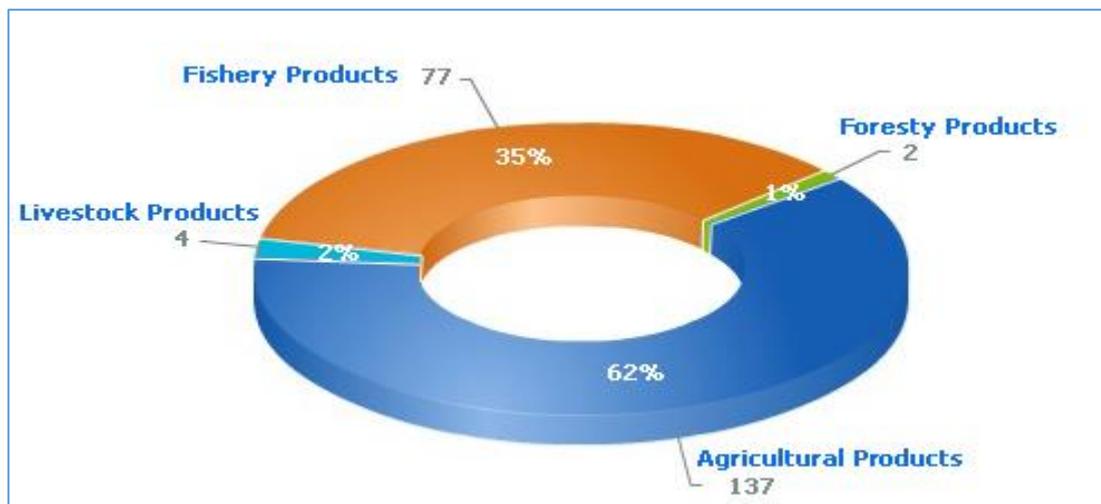
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sektor perikanan yang ada di Jawa Barat diperlukan kerja sama dengan daerah lain, baik itu daerah yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk menanggulangi kendala-kendala yang saat ini dihadapi oleh pelaku perikanan dan nelayan yang ada di Jawa Barat.

6.8.1.3.2 Kondisi Perikanan Provinsi Gyeongsangbuk-Do

Provinsi Gyeongsangbuk-Do mendukung usaha perikanan dengan meningkatkan produksi ikan dan membudidayakan spesies ikan berkualitas tinggi. Hal itu dilakukan dengan membangun terumbu karang buatan, fasilitas pelabuhan serba guna, dan infrastruktur perikanan untuk merespons secara aktif Perjanjian Perikanan Korea-Jepang dan Kesepakatan Perikanan Korea-China. Provinsi ini secara aktif mengembangkan produk pertanian dan perikanan yang untuk ekspor, kebijakan ekspor, kompleks ekspor pertanian dan peternakan khusus, dana bantuan

untuk memfasilitasi ekspor, menciptakan ekspor untuk pasar luar negeri, dan mengembangkan produk pertanian berkualitas tinggi.

Gambar 6.16
Komoditas Ekspor Provinsi Gyeongsangbuk-Do¹⁵²



Keberhasilan Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-Do dalam mengembangkan sektor perikanan adalah menjadikan sektor ini sebagai salah satu komoditas ekspor dengan target sebesar US\$ 220 miliar. Dari jumlah nilai komoditas ekspor tersebut, sumbangsih sektor perikanan adalah sebesar US\$ 77 miliar atau sebesar 33 persen.

Produksi perikanan Provinsi Gyeongsangbuk-Do berasal dari tiga jenis perikanan yang berbeda, yaitu 1) Perikanan Perairan Terdekat, 2) Perikanan Budidaya Laut Dangkal, 3) Perikanan Budidaya Daratan. Dari ketiga sumber perikanan tersebut, jenis ikan dibedakan menjadi ikan hidup, ikan segar, dan ikan beku. Produksi perikanan Provinsi Gyeongsangbuk-Do diprioritaskan pada jenis ikan

¹⁵² <https://www.gb.go.kr>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

hidup dan ikan segar karena kedua jenis ikan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis ikan beku. Jumlah produksi kedua jenis ikan tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 6.28
Jumlah Produksi Perikanan Provinsi Gyeongsangbuk-Do¹⁵³

Jenis Perikanan	2015				2016			
	Total	Ikan Hidup	Ikan Segar	Ikan Beku	Total	Ikan Hidup	Ikan Segar	Ikan Beku
Perikanan Perairan Terdekat	119.766	18.222	93.627	7.917	112.311	17.164	91.238	3.909
Perikanan Budidaya Laut Dangkal	4.543	4.543	-	-	5.067	5.067	-	-
Perikanan Budidaya Daratan	2.156	2.095	54	7	2.281	2.236	42	3

Berdasarkan tabel di atas, jumlah produksi perikanan, khususnya jenis perikanan budidaya laut dangkal dan budidaya daratan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2015 jumlah produksi perikanan budidaya laut dangkal sebanyak 4.4543 ton dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 5.067 ton. Sedangkan produksi perikanan daratan menghasilkan produksi sebanyak 2.156 ton pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 2.281 ton pada tahun 2016. Dari kedua jenis perikanan tersebut, yaitu budidaya perikanan laut dangkal dan perikanan budidaya daratan, produksi perikanan ditekankan pada hasil produksi ikan hidup. Dari 6.699 ton total produksi budidaya ikan laut dangkal dan budidaya ikan daratan, 6.638 ton merupakan ikan hidup. Demikian pula pada tahun 2016, dari 7.348 ton total produksi budidaya perikanan laut dangkal dan budidaya perikanan daratan, 7.303 ton merupakan jenis ikan hidup. Jenis ikan hidup yang dihasilkan dari kedua

¹⁵³ <http://kosis.kr/>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

budidaya tersebut menjadi prioritas karena mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi serta digunakan untuk kepentingan ekspor.

Selain keberhasilan dalam menghasilkan jumlah produksi perikanan yang dapat dijadikan komoditas ekspor, keberhasilan pemerintah Gyeongsangbuk-Do pada sektor perikanan disertai pula oleh meningkatnya varietas jenis ikan yang memiliki nilai jual di pangsa pasar internasional. Mayoritas jenis perikanan yang menjadi komoditas bernilai ekspor adalah bamboo crab, red crab, saury, squid, dan sole.

Tabel 6.29
Jenis Perikanan Provinsi Gyeongsangbuk-Do

	Bamboo Crab	Red Crab	Saury	Squid	sole
Production amount	1,829	15,717	1,290	66,630	4,025
National %	69	51	50	40	19

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-Do dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi perikanan yang ada di provinsi tersebut didukung oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-Do pada sektor tersebut, salah satunya adalah dengan membentuk Pusat Penelitian Pengembangan Sumber Daya Ikan. Kebijakan tersebut diimplementasikan dengan membuat dua lembaga penelitian yang khusus melakukan kajian dan penelitian mengenai perikanan, yaitu Provincial Fishery Resource Development Institute dibentuk pada tahun 1998 dan Provincial Research Center for Freshwater Fisheries dibentuk pada

tahun 1996. Keberhasilan dari kedua lembaga riset tersebut antara lain menghasilkan 3 juta jenis ikan dengan kualitas tinggi.

6.8.1.3.3 Bentuk Kerja sama yang dapat Dilakukan

Berdasarkan data dan fakta di atas, berikut ini merupakan peluang kerjasama antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Gyeongsangbuk-Do khususnya pada sektor perikanan. Bentuk kerja sama tersebut antara lain:

- 1) Melakukan Penelitian bersama (joint research) dalam mengembangkan potensi perikanan yang ada di daerah masing-masing.
- 2) Pertukaran informasi, baik berupa inovasi maupun teknologi perikanan.
- 3) Kerjasama investasi perikanan antara kedua provinsi guna meningkatkan dan mengembangkan potensi perikanan kedua provinsi.
- 4) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi seluruh pelaku perikanan, baik penyuluh, tenaga pembina, maupun nelayan yang ada di kedua provinsi.
- 5) Kerjasama business to business antar industri perikanan.

6.9 PROVINSI JEOLLANAM-DO, KOREA SELATAN

6.9.1 Analisa Potensi Kerjasama

Jalinan kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jeollanam-Do telah berlangsung sejak tahun 2001. Penandatanganan MoU oleh kedua wakil negara telah dilakukan pada tanggal 26 April 2001. Program kerjasama yang ditandatangani saat itu yakni kerjasama pada bidang Pertanian, Perikanan, Pariwisata, IPTEK dan Pendidikan. Secara tertulis MoU tersebut berakhir pada tahun 2006. Kerjasama

tersebut cukup menguntungkan, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus berinisiasi untuk melanjutkan kerjasama tersebut serta mengembangkannya ke bidang-bidang yang dirasa akan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Pokok bahasan ini akan menguraikan secara lebih mendalam tentang beberapa potensi kerjasama yang dapat dilakukan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jeollanam-Do, Korea Selatan. Uraian mengenai potensi kerjasama kedua provinsi tersebut dilandasi oleh beberapa faktor diantaranya; 1) geografis, 2) ekonomi, 3) sosial budaya, dan 4) hubungan bilateral antar kedua negara. Selain faktor-faktor tersebut, kerjasama antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Jeollanam-Do juga dilandasi oleh keinginan kedua provinsi untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah masing-masing. Berikut ini merupakan analisis beberapa bidang yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama antara provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jeollanam-Do. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah agrikultur, perikanan tangkap, pariwisata, dan lain sebagainya.

6.9.1.1 Kerjasama Sektor Agrikultur

6.9.1.1.1 Perbandingan Kondisi Agrikultur Jeollanam-Do dan Jawa Barat

Menurut data terakhir yang diperoleh oleh badan statistik Korea Selatan, lahan agrikultur Provinsi Jeollanam-Do memiliki luas 298 ribu hektar, yaitu 18,1% dari total lahan agrikultur yang ada di Korea Selatan. Luas lahan tersebut menempatkan Provinsi Jeollanam-Do sebagai Provinsi dengan luas lahan agrikultur

terluas dalam skala nasional. Berikut adalah data luas lahan agrikultur masing-masing provinsi Korea Selatan.

Tabel 6.30

Luas Lahan Agrikultur Provinsi/Kota di Korea Selatan (hektar)¹⁵⁴

Provinsi/Kota	2015	2016
Seoul	476	422
Busan	6,008	5,934
Daegu	8,291	8,102
Incheon	20,114	19,511
Gwangju	10,261	9,878
Daejeon	4,305	4,072
Ulsan	11,003	10,889
Sejong	8,260	8,102
Gyeonggi	175,417	169,435
Gangwon	107,277	104,330
Chungbuk	111,568	109,161
Chungnam	218,787	215,161
Jeollabuk	203,559	200,720
Jeollanam	304,799	298,095
Gyeongbuk	274,268	268,461
Gyeongnam	151,769	149,247
Jeju	62,642	62,140

Dengan luas lahan tersebut, Jeollanam-Do memiliki komoditas agrikultur yang beragam. Buah-buahan seperti pir, melon, dan plum menjadi produk yang selalu menjadi andalan dari Provinsi Jeollanam-Do ini. Untuk sayuran yang selalu mereka produksi setiap tahunnya ada kacang-kacangan, wijen, bawang putih dan merah, dan Kubis. Provinsi Jeollanam-Do juga menjadi provinsi penghasil beras di Korea

¹⁵⁴ <http://kostat.go.kr>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2017

Selatan. Pada tahun 2013, Provinsi Jeollanam-Do memiliki luas lahan agrikultur untuk keperluan menanam padi seluas 170.690 hektar. Dengan luas lahan tersebut Provinsi Jeollanam-Do berhasil memproduksi beras sebanyak 822.795 ton beras di mana jumlah tersebut mewakili 19,5% produksi beras nasional. Untuk mengetahui lebih lanjut produksi utama agrikultur Provinsi Jeollanam-Do, berikut adalah tabel produksi utama agrikultur di Provinsi Jeollanam-Do pada tahun 2013.

Tabel 6.31

Produksi Utama Agrikultur Provinsi Jeollanam-Do Tahun 2013.¹⁵⁵

Komoditas	Luas Lahan (hektar)	Jumlah Produksi (ton)	Nilai Produksi (miliar won)	Persentase Nasional (%)
Total	297.191	3.303.991	68.815	22,5
Makanan Pokok	209.990	921.808	21.775	18,9
Beras	170.690	822.795	17.100	19,5
Jelai	10.678	29.203	379	32
Kacang-kacangan	17.950	26.561	1.252	19
Lada	7.361	144.068	1.433	15
Gandum	3.311	6.389	294	12
Bunga	1.185	92 juta	551	7,4
Mawar	19,3	13 juta	47	6,4
Krisan	44	13 juta	43	5,7
Buah-buahan	18.896	220.777	10.642	6,5
Pir	3.602	87.893	2.086	31,1
Kesemek	3.623	35.940	1.187	22,4
Plum	3.844	24.944	1.049	55,6
Stroberi	707	20.443	1.598	9,4
Melon	366	12.795	380	26,5
Sayuran	53.562	2.116.994	30.784	22,9
Bawang Putih	8.895	109.263	3.243	26,4
Bawang Merah	10.124	580.151	4.419	44,8
Kubis	8.233	681.817	2.107	28,5
Paprika	56	5.616	239	9

¹⁵⁵ <https://www.jeonnam.go.kr>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017.

Wijen	7.493	3.631	1.272	29,3
Jamur	68	26.412	288	16,3
Ginseng	975	1.030	428	4,7

Terlihat pada tabel di atas, terdapat banyak komoditas agrikultur Provinsi Jeollanam-Do yang mewakili lebih dari 15% dari jumlah nasional. Bahkan buah plum berada di 55,6% dari jumlah Nasional Korea Selatan. Hal tersebut menandakan betapa besarnya potensi ekonomi sektor agrikultur yang dimiliki oleh Provinsi Jeollanam-Do.

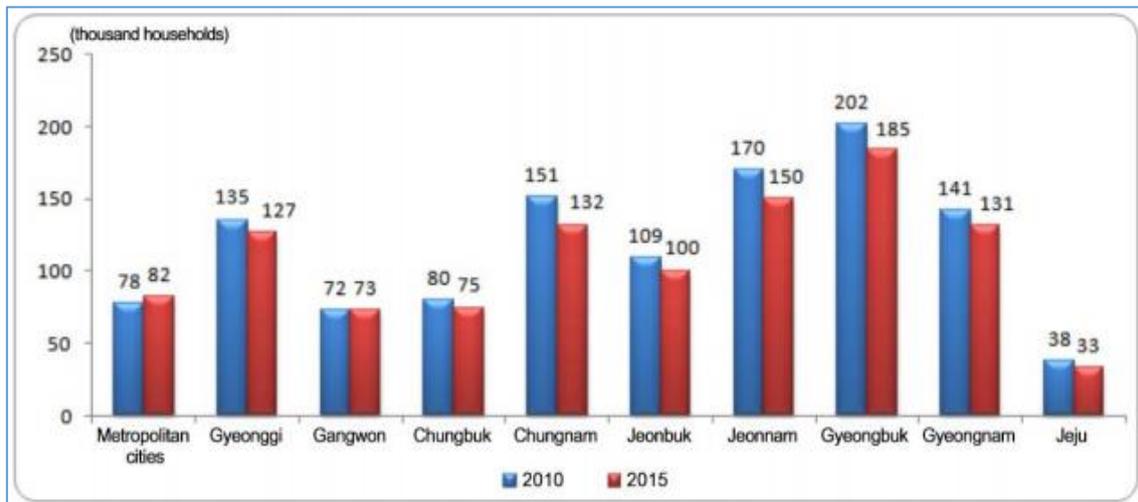
Selain produk-produk di atas, terdapat satu produk dari sektor agrikultur yang menjadi unggulan Provinsi Jeollanam-Do yang telah dikenal ke seluruh Korea Selatan bahkan dunia internasional, yaitu teh yang dihasilkan dari Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do. Dengan jumlah hasil panen yang melimpah dan kualitas yang tinggi sektor ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang diunggulkan oleh Provinsi Jeollanam-Do. Bersama dengan sektor perikanan, sektor agrikultur menyumbangkan 27,5%¹⁵⁶ dari keseluruhan kegiatan ekonomi yang ada di Provinsi Jeollanam-Do.

Selain lahan yang menjadikan Provinsi Jeollanam-Do mendapat peringkat pertama Provinsi dengan lahan agrikultur terluas se-Korea Selatan, juga terdapat industri-industri rumah tangga (*households*) yang ikut membantu meningkatkan hasil produksi dari sektor ini. Terhitung 150 ribu jumlah industri rumah tangga yang masih bertahan pada tahun 2015. Angka tersebut menyusut dibandingkan pada tahun 2010 yang saat itu jumlahnya berada di angka 170 ribu. Angka tersebut menjadikan Provinsi Jeollanam-Do menempati urutan ke-2 skala nasional dalam jumlah

¹⁵⁶ <https://www.neargov.org>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

terbanyak industri rumah tangga yang bergerak di sektor agrikultur. Data jumlah industri rumah tangga sektor agrikultur pada masing-masing provinsi di Korea Selatan dapat kita lihat pada gambar berikut.

Gambar 6.17
Jumlah Industri Rumah Tangga Sektor Agrikultur
Provinsi/Kota Korea Selatan¹⁵⁷



Tidak hanya lahan yang luas, terdapat faktor-faktor lain yang mendukung Provinsi Jeollanam-Do untuk menghasilkan komoditas agrikultur yang unggul. Ilmu tata kelola yang tinggi serta teknologi yang kian maju adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah produksi dan penjaminan mutu produk yang berkualitas. Selain itu peran pemerintah Provinsi Jeollanam-Do yang memberikan bantuan untuk para petani dan membuat kebijakan yang tepat di bidang agrikultur juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan hal tersebut.

Pemerintah provinsi Jeollanam-Do mendirikan satu organisasi/badan pemerintah yang bertanggungjawab dalam hal pengembangan, baik itu penelitian maupun riset teknologi serta pelayanan dalam bidang agrikultur, yaitu *Jeollanam-Do*

¹⁵⁷ <http://kostat.go.kr>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

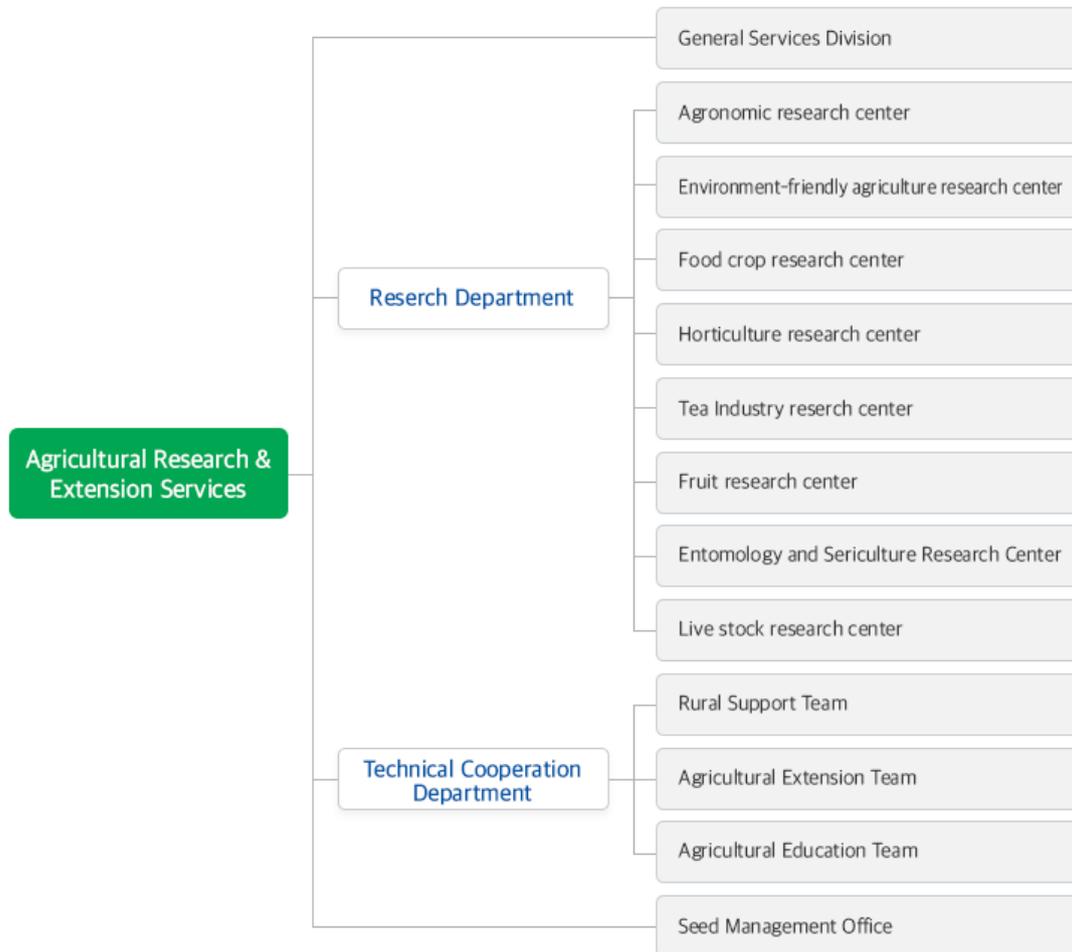
Agriculture Research and Extension Services (JNARES). JNARES berdiri sejak tahun 1998 yang sebelumnya memiliki nama dari *Jeonnam Rural Development Station* yang dipakai sejak 1962 – 1998. Terhitung lembaga ini telah berganti nama sebanyak delapan kali semenjak pertama didirikan pada Februari 1909 yang saat itu memiliki nama *Jeonnam Gwangju city Nursery Station*. JNARES sendiri bertempat di Kota Naju, Provinsi Jeollanam-Do.

JNARES memiliki visi, misi dan tujuan utama. Visi JNARES yakni “Melayani pengembangan pedesaan berupa pengembangan, distribusi, dan panduan teknologi sains pertanian.” Tujuan utama dibentuknya JNARES adalah untuk menghasilkan komoditas pertanian dan perkebunan yang berkualitas tinggi, pertanian berkelanjutan, pengembangan produk pada bagian penelitian dan penerapan teknik pertanian bagi petani. Selain tujuan utama tersebut, dibentuknya JNARES oleh pemerintah Provinsi Jeollanam-Do disertai oleh dua misi utama. Misi utama JNARES tersebut antara lain¹⁵⁸:

1. Terus-menerus melakukan penelitian dan uji teknologi baru yang dikembangkan untuk pembangunan pertanian.
2. Bimbingan teknis pertanian yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan dan peningkatan produksi, serta melatih para petani di bidang pertanian dan keterampilan hidup.

¹⁵⁸ <https://www.jares.go.kr>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017

Gambar 6.18:
Struktur Organisasi JNARES.¹⁵⁹



Upaya pemerintah tersebut tidak hanya berhenti sampai di sana. Untuk memaksimalkan hasil produksi Pemerintah Provinsi Jeollanam-Do membangun pos-pos pelayanan kepada para petani dan pelaku usaha agrikultur. Pos-pos pelayanan tersebut yang kemudian berfungsi sebagai pemberi informasi cuaca, pemberi penyuluhan kepada petani, sampai pengontrol harga pasar hasil produksi agrikultur di Provinsi Jeollanam-Do. Pada tahun 2013 jumlah Pos Pelayanan Pertanian yang

¹⁵⁹ <https://www.jares.go.kr>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017

telah dibangun dan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jeollanam-Do yaitu berjumlah 383 pos pelayanan. 256 diantaranya merupakan pos kecil, 120 pos menengah, dan 7 pos besar.

Setelah penandatanganan MoU pada tahun 2001 silam yang salah satu poin perjanjiannya mengenai kerjasama di bidang agrikultur, selanjutnya pada bulan Oktober 2013 perwakilan Team Dewan Teh Indonesia (DTI) menghadiri undangan International Tea Festival Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do. Saat itu mereka berhasil mengenalkan Provinsi Jawa Barat sebagai penghasil teh terbesar di Indonesia. Mengacu pada hal tersebut pada bulan Desember 2013 telah dilaksanakan kunjungan penjajagan pengembangan agribisnis teh ke Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do Korea Selatan. Seperti halnya Provinsi Jawa Barat, di Korea Selatan terdapat satu wilayah setingkat kabupaten yang sangat dominan dalam memproduksi teh yaitu Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do. Kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Jeollanam-Do.

Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do merupakan daerah penghasil teh terbesar di Korea Selatan, memiliki luas kebun teh 1.097 Ha dengan produksi sebesar 1.237 ton/tahun berupa teh hijau organik. Walaupun memiliki luas perkebunan teh yang kecil, namun Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do memegang posisi penting sebagai daerah penyumbang 40% dari total produksi teh Korea Selatan.¹⁶⁰ Hal yang menarik dari komoditas teh Boseong adalah produknya berkualitas tinggi sehingga memiliki harga jual yang termahal di dunia, yaitu sekitar US\$ 1500 per kg, serta adanya peran pemerintah yang sangat besar dalam

¹⁶⁰ <http://disbun.jabarprov.go.id>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2017

melakukan *quality control* terhadap produksi yang dihasilkan petani setempat, di mana setiap teh diuji terlebih dahulu oleh lembaga sertifikasi milik pemerintah.

Peran Pemerintah Provinsi Jeollanam-Do adalah memberikan bantuan investasi untuk pengembangan teh sebesar 50% dari total investasi, mendorong kreativitas para pelaku usaha teh, terutama dalam kegiatan *packaging*, bantuan *research* termasuk pelaksanaan promosi melalui berbagai *event* seperti: iklan gratis di seluruh tempat strategis (restoran, pasar, mall), penyelenggaraan festival *Internasional Korean Tea Forum* pada bulan Oktober, *Green Tea Plantations Light Festival* pada bulan Desember. Di samping itu juga diberikan dukungan sarana dan prasarana pendukung agribisnis teh.

Di Kabupaten Boseong Jeollanam-Do juga dibangun sebuah Museum Teh dan *Green House* yang berisi koleksi spesies tanaman teh dari berbagai negara. Juga hampir semua perkebunan teh di Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do ditata dengan sangat menarik sehingga layak dijadikan sebagai tempat agrowisata.

Hampir setiap aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do sepertinya tidak terlepas dari kepentingan komoditas teh, sehingga Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do disebut sebagai *The Capital of Green Tea*. Potensi Provinsi Jawa Barat pada sektor agrikultur sebenarnya juga cukup besar. Terhitung luas lahan kebun di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 yaitu seluas 568.685 hektar, luas ladang/huma sebesar 219.369 hektar, luas sawah teririgasi sebesar 742.658 hektar, luas sawah non-irigasi sebesar 181.649 hektar, luas lahan yang sementara tidak diusahakan sebesar 10.659 hektar. Dengan begitu jika dijumlahkan luas lahan total yang dimiliki Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 yakni sebesar 1.723.020 hektar.

Kerja sama pada sektor agrikultur dengan Provinsi Jeollanam-Do dirasa sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja di sektor agrikultur. Mengingat potensi yang cukup besar dari Provinsi Jawa Barat dan keberhasilan Provinsi Jeollanam-Do yang terbukti telah mengelola sektor agrikulturnya dengan sangat baik. Maka tidak menutup kemungkinan untuk potensi Provinsi Jawa Barat pada sektor agrikultur akan semakin berkembang dan menghasilkan produk-produk agrikultur yang melimpah dan berkualitas tinggi.

6.9.1.1.2 Bentuk Kerjasama yang Dapat Dilakukan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jeollanam-Do

Berdasarkan pemaparan data dan analisis di atas maka dipandang perlu bagi pengambilan kebijakan serta pihak institusi pembina agribisnis teh di Jawa Barat untuk belajar dan melakukan kerjasama dengan pengembangan agribisnis teh di Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do. Adapun bentuk kerjasama yang dapat diwujudkan yaitu:

1. Meneruskan MoU kerjasama dengan pihak Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do untuk pengembangan bidang agribisnis di Provinsi Jawa Barat.
2. Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang agrikultur guna meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan daerah masing-masing.
3. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan sektor agrikultur melalui pertukaran penyuluh pertanian dan perkebunan antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Gyeongsangbuk-Do.

4. Kerjasama dalam pengelolaan dan pemberdayaan wilayah agraria, khususnya komoditas-komoditas unggul yang ada di Jawa Barat seperti kopi, cabe merah, dan teh sehingga terjadi transfer ilmu (*knowledge transfer*) agar komoditas tersebut bisa bersaing di pangsa pasar internasional.
5. Transfer ilmu dan teknologi dalam pengelolaan dan pemberdayaan lahan agrikultur dengan optimal.

Kemudian berikut ini adalah bentuk kerja sama yang dapat dilakukan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jeollanam-Do dalam sektor Agrikultur khususnya di bidang perkebunan teh.

1. Mempromosikan produk *Black/Red Tea* Jawa Barat yang berkualitas tinggi ke Korea Selatan, khususnya untuk grade OPS (*Orange Pekoe Superior*), OP (*Orange Pekoe*), BS (*Broken Souchon*), BOPF (*Broken Orange Pekoe Fanning*), BOP (*Broken Orange Pekoe*)¹⁶¹, mengingat kualitas teh yang biasa diminum mereka sangat baik dan daya beli masyarakatnya yang tinggi, susai dengan permintaan pihak Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do.
2. Mengirimkan beberapa petani untuk mempelajari cara pengelolaan usaha agrobisnis teh organik serta menghasilkan teh bermutu tinggi, mempelajari penguatan kelembagaan kelompok tani serta tata cara lain yang bisa dilakukan dari agroindustri teh dalam rangka meningkatkan nilai tambah penghasilan petani teh.

¹⁶¹ Penjelasan pemeringkatan teh dapat dilihat di <https://www.ipb.ac.id/~tepfeta/elearning/media>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

3. Mengirimkan petugas teknis atau pengelola kelembagaan teh, untuk meningkatkan wawasan pembinaan agribisnis teh, antara lain tentang:
 - Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membangun agroindustri teh;
 - Mekanisme kerja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten dalam pembinaan agroindustri teh;
 - Mekanisme bantuan langsung pemerintah terhadap petani, kelompok tani maupun agroindustri teh;
 - Mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dengan asosiasi/organisasi petani teh;
 - Mekanisme stabilisasi harga pada saat produksi sangat tinggi dan berlebih;
 - Penanganan *Standard Produk Quality* dan *Quality Controll Procedure*;
 - Mekanisme/prosedur untuk dinyatakan lulus dalam *Quality Controll* dan mendapat label resmi dari pemerintah.

6.9.1.2 Kerjasama Perikanan Tangkap

6.9.1.2.1 Perbandingan Kondisi Perikanan Tangkap Jeollanam-Do & Jawa Barat

Letak geografis Provinsi Jeollanam-Do yang langsung berbatasan dengan Laut Cina dan memiliki banyak pulau membuat potensi ekonomi di sektor perikanan berkembang sangat pesat. Setidaknya terdapat 2.219 pulau di Provinsi Jeollanam-

Do di mana jumlah tersebut menyumbang 65% dari total jumlah pulau yang ada di Korea Selatan¹⁶².

Seperti yang di bahas sebelumnya, sektor perikanan bersama dengan sektor agrikultur menyumbang 27,5% dari keseluruhan kegiatan ekonomi yang ada di Jeollanam-Do. Selain kondisi geografis, Jeollanam-Do juga memiliki industri rumah tangga (*household*) sektor perikanan yang sangat banyak. Keberadaan industri rumah tangga ini dinilai sangat penting karena ikut membantu mengembangkan potensi di sektor ini. Selain itu industri rumah tangga juga ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi.

Industri rumah tangga sektor perikanan yang dimiliki Provinsi Jeollanam-Do terhitung cukup banyak, yakni pada tahun 2015 total keseluruhan industri rumah tangga sektor perikanan yang tersebar di seluruh Provinsi Jeollanam-Do berjumlah 18,8 ribu industri rumah tangga. Namun jumlah tersebut menurun dari 5 tahun yang lalu, yakni pada tahun 2010. Saat itu jumlah industri rumah tangga yang dimiliki Provinsi Jeollanam-Do berada di angka 21,8 ribu. Jumlah tersebut menjadikan Provinsi Jeollanam-Do sebagai provinsi yang memiliki industri rumah tangga terbanyak se-Korea Selatan.

¹⁶² <http://www.jeonnang.go.kr>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

Tabel 6.32
Jumlah Industri Rumah Tangga Sektor Perikanan per Provinsi Tahun 2015
(dalam ribuan)¹⁶³

Provinsi	Jumlah Industri Rumah Tangga
Busan	2,2
Incheon	2,2
Ulsan	0,9
Gyeonggi	0,8
Gangwon	2,3
Chungnam	8,2
Jeollabuk	2,9
Jeollanam	18,8
Gyeongbuk	3,0
Gyeongnam	9,4
Jeju	4,1

Tidak hanya Jeollanam-Do yang mengalami penurunan jumlah industri rumahan tersebut, hampir seluruh provinsi di Korea Selatan juga mengalami penurunan. Hanya ada satu provinsi yang mengalami peningkatan jumlah industri rumah tangga. Provinsi tersebut yaitu Provinsi Jeollabuk-Do, di mana pada tahun 2010 industri rumah tangga yang dimiliki provinsi ini sebanyak 2,6 ribu yang kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 0,3 ribu sehingga total menjadi 2,9 ribu industri rumah tangga. Peningkatan dan penurunan jumlah industri rumah tangga sektor perikanan tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut.

¹⁶³ <http://kostat.go.kr>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

Tabel 6.33
Peningkatan/Penurunan Jumlah Industri Rumah Tangga 2010 – 2015 Per Provinsi (ribuan)¹⁶⁴

Provinsi	Peningkatan/Penurunan
Busan	-0,3
Incheon	-0,5
Ulsan	-0,1
Gyeonggi	0
Gangwon	-0,7
Chungnam	-2,8
Jeollabuk	+0,3
Jeollanam	-3,0
Gyeongbuk	-1,1
Gyeongnam	-1,4
Jeju	-1,3

Dari banyaknya jumlah industri rumah tangga sektor perikanan tersebut, Provinsi Jeollanam-Do berhasil memproduksi hasil laut dengan sangat maksimal. Tercatat pada produksi tahun terakhir, Provinsi Jeollanam-Do berhasil memproduksi hasil laut sebanyak 1,4 juta ton dengan nilai produksi mencapai 2,18 triliun won. Angka tersebut menyumbang 52% dari hasil laut Nasional Korea Selatan¹⁶⁵.

Jika melihat sektor perikanan di Provinsi Jawa Barat, maka dapat dikatakan Provinsi Jawa Barat pun memiliki potensi yang besar untuk mengolah hasil lautnya. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup besar. Panjang garis pantai Jawa Barat mencapai 805 km yang terdiri dari pantai selatan dan 428 km dan pantai utara 377 km. Luas laut yang dimiliki Provinsi Jawa Barat mencapai 289.800 km². Potensi

¹⁶⁴ <http://kostat.go.kr>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

¹⁶⁵ <https://www.jeonnam.go.kr>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017.

tersebut tersebar di seluruh daerah pesisir seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang.¹⁶⁶

Usaha pengembangan potensi hasil laut Provinsi Jawa Barat tidak dapat terlepas dari adanya kendala yang dihadapi. Faktor yang menjadi kendala di Provinsi Jawa Barat ialah teknologi dan ilmu pengetahuan yang kurang memadai serta nelayan di Jawa Barat masih menggunakan kapal konvensional sehingga hasil tangkapan ikan menjadi kurang maksimal. Selain itu belum adanya tempat penyimpanan hasil tangkapan berupa gudang pendingin yang mengakibatkan hasil tangkapan memiliki nilai tawar yang rendah.

Diperoleh data dari Badan Pusat Statistik, jumlah hasil laut Provinsi Jawa Barat berhasil mencapai angka 271.332 ton pada tahun 2015 di mana selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2009. Jumlah tersebut berhasil menempatkan Provinsi Jawa Barat pada posisi ke-7 skala nasional dalam hal jumlah produksi perikanan tangkap. Perbandingan jumlah peringkat 10 besar teratas produksi perikanan tangkap tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.34
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Peringkat 10 Besar tahun 2015
(dalam ton)¹⁶⁷

Peringkat	Provinsi	Jumlah
1	Maluku	617.985
2	Sumatera Utara	494.724
3	Jawa Timur	402.569
4	Jawa Tengah	336.047
5	Sulawesi Selatan	318.394

¹⁶⁶ <http://bandung.bisnis.com>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017

¹⁶⁷ <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017.

6	DKI Jakarta	289.214
7	Jawa Barat	292.649
8	Sulawesi Utara	257.774
9	Maluku Utara	251.110
10	Papua	221.340

Terlihat dari data di atas, peringkat Provinsi Jawa Barat masih di bawah provinsi-provinsi tetangga yang ada di Pulau Jawa. Lebih buruknya lagi posisi Provinsi Jawa Barat berada di bawah Provinsi DKI Jakarta yang notabene memiliki garis pantai yang jauh lebih pendek dari Provinsi Jawa Barat. Dengan kondisi geografis yang ada, seharusnya hal tersebut dapat menjadi potensi bagi Provinsi Jawa Barat untuk lebih meningkatkan hasil dari sektor perikanan ini. Berikut ini adalah grafik peningkatan hasil produksi perikanan tangkap Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 – 2015.

Gambar 6.19

Grafik peningkatan hasil produksi perikanan tangkap Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 – 2015. ¹⁶⁸



¹⁶⁸ <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017.

Grafik di atas menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 ke 2015 yang berarti bahwa Provinsi Jawa Barat sudah mulai berusaha meningkatkan hasil produk perikanan tangkapnya.

Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan provinsi/kota di Korea Selatan khususnya Provinsi Jeollanam-Do dalam bidang perikanan tangkap perlu ditingkatkan. Kerjasama pada sektor perikanan tangkap dengan Provinsi Jeollanam-Do ini dinilai sangat penting guna meningkatkan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja pada sektor ini. Jika Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Jeollanam-Do yang memiliki teknologi maju dan ilmu pengetahuan kelautan yang memadai serta terbukti telah menjadi provinsi penghasil ikan tangkap nomor satu di Korea Selatan, tidak menutup kemungkinan Provinsi Jawa Barat akan mengalami peningkatan besar pada produk hasil laut dan bahkan dapat membuat Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi penghasil ikan tangkap nomor satu di Indonesia.

6.9.1.2.2 Bentuk Kerjasama yang Dapat Dilakukan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jeollanam-Do

Berdasarkan pemaparan data dan analisis di atas, maka bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dijalin oleh Jeollanam-Do dan Provinsi Jawa Barat khususnya pada sektor perikanan tangkap antara lain.

1. Melakukan pertukaran teknologi dan inovasi penangkapan ikan dari masing-masing provinsi.
2. Melakukan kerjasama investasi pada industri sektor perikanan tangkap masing-masing provinsi.

3. Menjalinkan kerja sama ekspor-impor perikanan tangkap untuk pemasaran internasional.
4. Menjalinkan Kerjasama business to business antar industri perikanan tangkap

6.9.1.3 Kerjasama Sektor Pariwisata

6.9.1.3.1 Perbandingan Kondisi Pariwisata di Jeollanam-Do dan Jawa Barat

Tempat pariwisata di Provinsi Jawa Barat sangat beragam. Kawasan wisata di Jawa Barat di kelompokkan berdasarkan daya tarik tempat wisata dan produk-produk yang dihasilkan daerah wisata tersebut. Sebut saja salah satu diantaranya yaitu kawasan wisata industri yang terdapat di daerah Karawang-Bekasi.

Bertempat di daerah Karawang dan Bekasi, Provinsi Jawa Barat menyuguhkan tempat pariwisata yang berbeda dari biasanya. Terdapat kawasan industri yang dapat dijelajahi untuk menghilangkan rasa penat serta juga dapat menambah pengetahuan sebagai wisata edukasi bagaimana sebuah produk dihasilkan dari sebuah bahan mentah yang kemudian diproses hingga menjadi barang siap pakai. Kawasan pariwisata ini menjadi salah satu tempat pariwisata unggulan yang terdapat di Provinsi Jawa Barat karena tempat pariwisata ini menyuguhkan hal yang berbeda dari tempat wisata pada umumnya. Keunikan tempat pariwisata ini seharusnya dapat menjadi peluang Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan potensi pariwisata kepada wisatawan lokal maupun mancanegara.

Selain wisata industri, Provinsi Jawa Barat juga memiliki kawasan wisata alam yang tak kalah unggul dari kawasan wisata alam yang dimiliki provinsi lain. Terdapat kawasan wisata pegunungan dan perkebunan teh yang terdapat di daerah

puncak. Pengunjung perkebunan teh ini dapat menikmati pemandangan asri dengan menelusuri jalan setapak yang telah disediakan. Di sini pengunjung juga bisa memetik daun teh sendiri dan dapat langsung ikut melihat pengolahan daun teh menjadi berbagai olahan makanan yang berkhasiat.

Objek-objek pariwisata ini seharusnya dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah di Indonesia khususnya Jawa Barat di sektor pariwisata. Perlu adanya kerjasama untuk mengenalkan objek-objek pariwisata tersebut kepada dunia internasional. Salah satu faktor yang menjadi permasalahan utama Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan potensi pariwisatanya adalah infrastruktur yang belum memadai.¹⁶⁹ Salah satu kerjasama yang dapat dilakukan adalah kerjasama dengan Provinsi Jeollanam-Do, Korea Selatan. Kerjasama ini diusulkan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu Provinsi Jeollanam-Do, lebih tepatnya di Kabupaten Boseong juga memiliki objek wisata yang serupa seperti objek wisata pegunungan dan perkebunan teh yang ada di Provinsi Jawa Barat yang mereka kelola dengan sangat baik.

Menjadi kelebihan yang dimiliki kabupaten Boseong, Jeollanam-Do yaitu di sana dibangun sebuah museum teh dan *green house* yang berisi koleksi spesies tanaman teh dari berbagai negara. Juga hampir semua perkebunan teh di Kabupaten Boseong, Jeollanam-Do ditata dengan sangat menarik sehingga layak dijadikan sebagai tempat agrowisata.

Provinsi/kota di Korea Selatan termasuk Provinsi Jeollanam-Do berusaha dengan maksimal untuk membangun potensi pariwisata yang mereka miliki. Beberapa cara diantaranya yaitu membangun akses infrastruktur yang memadai

¹⁶⁹ <http://bisniswisata.co.id>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017.

seperti jalan, transportasi, dan tempat menginap yang mudah dijangkau oleh pengunjung. Selain itu mereka juga gencar mempromosikan objek wisatanya dengan membuat iklan, dan membuat website khusus yang menyediakan informasi tentang objek wisata lengkap dengan informasi akomodasinya. Contoh website yang menyediakan informasi tersebut bisa diakses di alamat URL <https://www.namdokorea.com>.

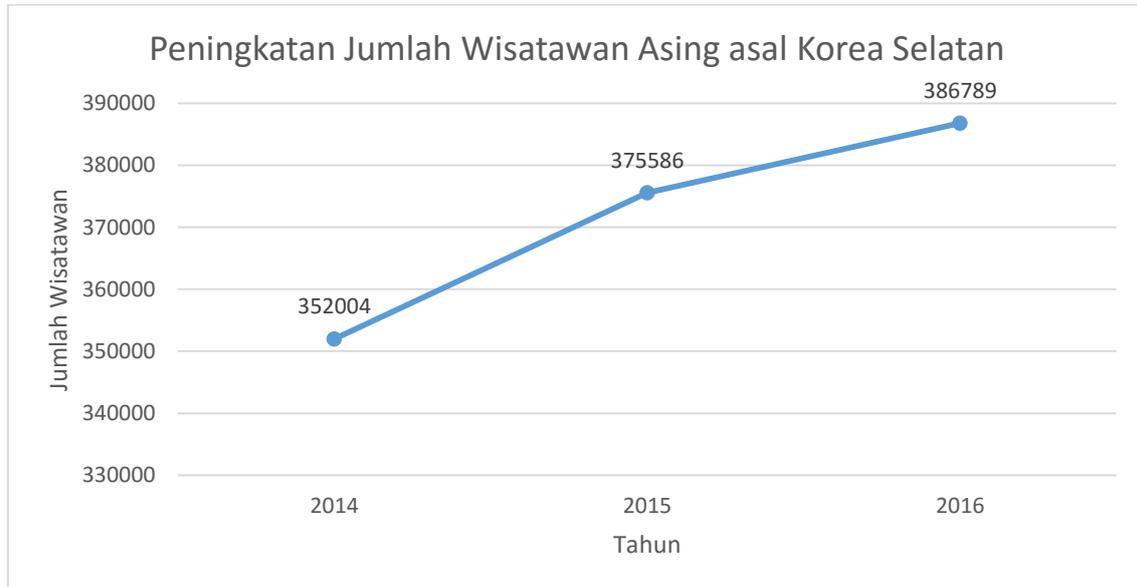
Keberhasilan Jeollanam-Do dalam menarik wisatawan untuk datang ke provinsi tersebut dibuktikan dengan jumlah wisatawan pada tahun 2015 yang saat itu mencapai 8.063.538 wisatawan¹⁷⁰ (domestik dan mancanegara). Sedangkan untuk jumlah wisatawan secara nasional pada tahun yang sama, jumlahnya mencapai 51.538.954 wisatawan (domestik dan mancanegara). Sehingga dengan kata lain Provinsi Jeollanam-Do berhasil menarik sebanyak 15% wisatawan dari jumlah wisatawan nasional.

Selain itu, pertimbangan yang mendasari kerjasama ini yakni jumlah wisatawan asing yang berasal dari Korea Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data terakhir yang didapat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah wisatawan yang berasal dari Korea Selatan yang datang ke Indonesia per tahun 2016 yaitu sebanyak 386.789 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 375.586 orang. Peningkatan jumlah wisatawan asal Korea Selatan tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹⁷⁰ <https://kto.visitkorea.or.kr>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

Gambar 6.20

Peningkatan Jumlah Wisatawan Asing asal Korea Selatan (2014 – 2016)



Peningkatan jumlah wisatawan asing asal Korea Selatan tersebut dapat menjadi acuan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas dan promosi dari tempat-tempat pariwisata yang ada di Jawa Barat. Salah satu pintu masuk wisatawan asal Korea Selatan ke Jawa Barat adalah Bandara Husein Sastranegara. Jumlah wisatawan asal Korea Selatan yang masuk melalui bandara tersebut berjumlah 333 orang¹⁷¹.

Faktor utama yang menjadi kendala dalam mengembangkan potensi pariwisata di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat adalah masalah minimnya infrastruktur, entah itu akses jalan menuju tempat pariwisata yang belum baik, transportasi massal yang kurang memadai, sampai tempat penginapan yang masih sulit ditemukan dan dijangkau wisatawan. Selain itu Provinsi Jawa Barat masih kurang mempromosikan daya tarik apa saja yang ada di tempat-tempat

¹⁷¹ <https://kemenpar.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2017.

pariwisatanya, kurang ada informasi mengenai paket harga dan cara untuk menuju ke lokasi tempat pariwisata tersebut.

Kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi/Kota yang ada di Korea Selatan dalam bidang pariwisata perlu ditingkatkan. Kerja sama tersebut dirasa penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata. Saat ini, Provinsi Jeollanam-Do merupakan salah satu Provinsi dengan populasi penduduk yang cukup besar di Korea Selatan, yakni berjumlah 1.938.136 jiwa dengan total pendapatan domestik 61.095,3 triliun won (2013) dan rata-rata pendapatan per kapita 34,6 juta won (2013). Populasi penduduk yang besar disertai dengan pendapatan yang cukup tinggi, Provinsi Jeollanam-do merupakan pasar potensial bagi Jawa Barat dalam bidang pariwisata.

6.9.1.3.2 Bentuk Kerjasama yang Dapat Dilakukan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jeollanam-Do

Berdasarkan pemaparan data dan fakta di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai potensi kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jeollanam-Do khususnya di sektor pariwisata. Adapun bentuk kerjasama yang dapat dijalin antara lain:

1. Menjalin kerjasama investasi tempat pariwisata kedua pihak untuk membangun infrastruktur dan akses yang baik sehingga dapat meningkatkan potensi wisata kedua provinsi.
2. Mempromosikan bersama tempat-tempat pariwisata di daerah masing-masing kepada.

3. Kerjasama ekspor-impor komoditas tempat pariwisata masing-masing provinsi.
4. Meningkatkan kerjasama pelaku bisnis industri pariwisata dari masing-masing provinsi.

6.9.1.4 *Research and Development (R&D) Energi Terbarukan*

Semenjak dua dekade terakhir dunia internasional mulai peduli dengan sumber energi alternatif yang dapat menggantikan energi yang bersumber dari minyak fosil makhluk hidup. Hal tersebut tentunya dikarenakan cadangan minyak dunia yang kian hari semakin menipis. Jumlah cadangan minyak saat ini sebesar 3,6 miliar barrel dan produksinya 288 juta barrel per tahun. Sedangkan cadangan gas sebesar 98 triliun kaki kubik (tcf) dengan produksi 3 tcf per tahun. Adapun cadangan batubara sebanyak 32,4 miliar ton dengan produksi 393 juta ton per tahun¹⁷². Mengacu data tersebut, maka cadangan gas bumi akan habis sekitar 30 tahun ke depan. Sementara untuk batubara baru habis 100 tahun ke depan. Perlu adanya alternatif energi yang dapat diperbarui agar nantinya krisis energi dapat teratasi.

Untuk Indonesia sendiri, total minyak bumi yang berhasil ditambang pada tahun 2015 yaitu sebanyak 866 barrel per hari. Sedangkan untuk total pemakaiannya di tahun yang sama yaitu sebanyak 1.648 barrel per hari.¹⁷³ Dengan kata lain Indonesia masih harus mengimport minyak bumi dari luar sebanyak 782 barrel per hari. Dengan kata lain sekitar 47% energi minyak bumi yang terpakai di Indonesia merupakan minyak bumi import. Sementara itu untuk batu bara yang

¹⁷² <http://katadata.co.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

¹⁷³ <https://www.eia.gov>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

berhasil diproduksi oleh Indonesia pada tahun 2014 yakni sebanyak 518,7 juta ST (*stone*) atau setara dengan 3,3 juta ton. Sedangkan untuk total baru bara yang dikonsumsi yaitu hanya sebanyak 107 juta ST atau setara dengan 680 ribu ton.

6.9.1.4.1 Perbandingan Kondisi Pengembangan Energi Terbarukan Provinsi Jeollanam-Do dengan Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jeollanam-Do telah melakukan riset-riset dan pengembangan untuk mencari energi alternatif terbarukan. Dengan ilmu pengetahuan yang sudah maju, Jeollanam-Do berhasil mengidentifikasi dan memetakan kondisi geografis wilayahnya yang berpotensi dapat menciptakan energi alternatif terbarukan tersebut. Beberapa potensi tersebut yaitu¹⁷⁴:

- Radiasi Tertinggi di Korea: 5,110 MJ di Mokpo (rata-rata nasional: 4.584 MJ).
- Sumber Daya Angin Bahari Maritim yang cukup: angin yang cukup dengan rata-rata tahunan 7m/s dan potensi tertinggi untuk pembangkit tenaga angin (sekitar 10 GW).
- Arus cepat di Dadohae (Laut dengan banyak pulau): kecepatan maksimum arus di dekat Uldolmok di Jindo dengan jarak 6.5m/s yang potensial untuk pembangkit tenaga air.

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir serta riset dan analisis yang dilakukan secara terus-menerus, Provinsi Jeollanam-Do terus berupaya untuk mencari dan menghasilkan energi dari sumber energi baru terbarukan secara maksimal.

¹⁷⁴ <http://www.jeonnam.go.kr>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

Keberhasilan Provinsi Jeollanam-Do dalam *Research & Development* di bidang Energi Baru Terbarukan ini dibuktikan dengan jumlah produksi yang sangat maksimal. Diperoleh dari data terakhir, Provinsi Jeollanam-Do berhasil memproduksi energi dari sumber energi baru terbarukan untuk seluruh jenis sumber energi, yakni sebesar 1.456.792 toe (*tonne of oil equivalent* = setara ton minyak)¹⁷⁵ dengan tingkat penggunaan sebesar 14,7%. Jumlah tersebut berhasil menempatkan Provinsi Jeollanam-Do pada peringkat teratas skala nasional sebagai provinsi penghasil energi baru terbarukan terbesar se-Korea Selatan. Sebuah hasil yang sangat memuaskan mengingat masih sulitnya mengelola sumber energi baru terbarukan tersebut. Untuk mengetahui secara lebih rinci sumber energi apa saja yang berhasil dikelola oleh Provinsi Jeollanam-Do dan berapa banyak jumlah produksi dari masing-masing sumbernya, berikut ini adalah tabel Status Produksi Energi Baru Terbarukan di Jeollanam-do

Tabel 6.35

Status Produksi Energi baru terbarukan baru di Jeollanam-do.¹⁷⁶

Jenis Energi	Korea (toe)	Jeollanam-Do (toe)	Tingkat Penggunaan	Keterangan
Total	9.879.207	1,456,792	14,7%	No. 1 di Kosel
Tenaga Surya	27.812	2,195	7,9%	
Fotovoltaik	344.451	92,308	26,8%	
Bio Energi	1.558.492	133,549	8,6%	
Tenaga Angin	242.354	5,534	2,3%	
Energi Laut	102.077			

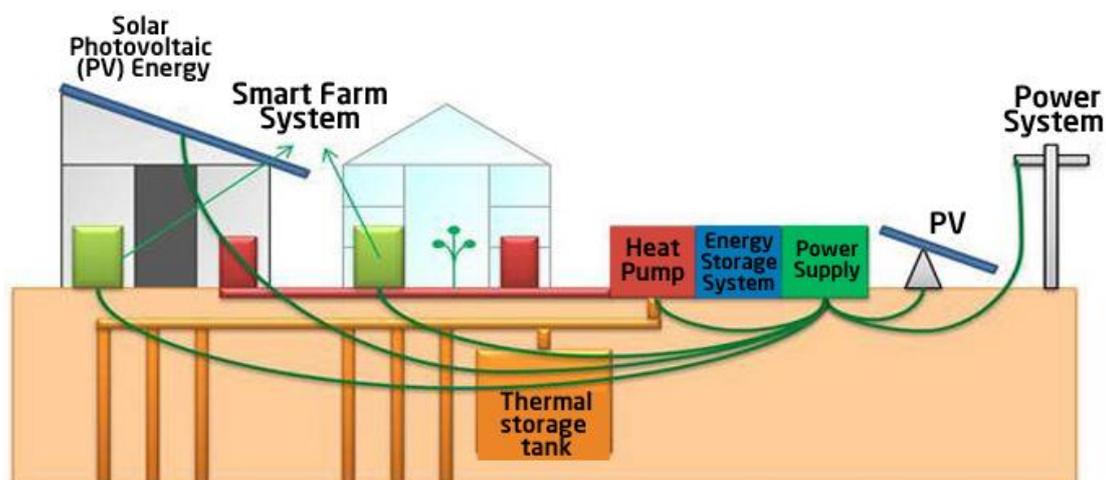
¹⁷⁵ <http://www.jeonnam.go.kr>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

¹⁷⁶ <http://www.jeonnam.go.kr>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.

Tidak hanya produksi energinya yang tinggi, Provinsi Jeollanam-Do juga telah mengaplikasikan penggunaan energi baru terbarukan untuk keperluan pemenuhan energi listrik pada sektor-sektor ekonomi konvensional seperti sektor agrikultur, sektor peternakan dan lain sebagainya. Salah satu contoh, Provinsi Jeollanam-Do telah membuat sebuah pertanian futuristik bertenaga surya. Tidak seperti operasi pertanian konvensional yang didukung oleh minyak dan batu bara, energi matahari akan digunakan untuk memasok listrik dalam menanam tanaman rumah kaca seperti jamur dan tomat. Sisa listrik akan disimpan dalam sistem penyimpanan energi (*Ennergy Storage System*) untuk penggunaan selanjutnya.

Gambar 6.21

Sistem Pemasokan Energi Listrik Tenaga Surya untuk Pertanian di Provinsi Jeollanam-Do¹⁷⁷



Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Penggunaan energi terbarukan saat ini diperkirakan hanya mencapai angka 5% dari total potensi energi baru terbarukan yang ada. Angka tersebut tentu masih kurang

¹⁷⁷ <https://www.investkorea.org>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017.

sepadan dengan kondisi pemakaian energi di Provinsi Jawa Barat ini. Untuk pemakaian energi listrik saja di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015, jumlah pemakaian mencapai 44.071,43 GWh¹⁷⁸. Penggunaan energi listrik tersebut menempati posisi pertama provinsi pengguna energi listrik terbanyak se-Indonesia disusul Provinsi DKI Jakarta dengan pemakaian energi listrik sebanyak 41.328,60 Gwh. Sayangnya pemenuhan sumber energi listrik di Provinsi Jawa Barat tidak sebesar jumlah pemakaiannya. Di tahun yang sama energi listrik yang berhasil dibangkitkan hanya mencapai 20.617,92 GWh.¹⁷⁹ Dengan kata lain terjadi defisit energi listrik yang cukup besar di Provinsi Jawa Barat bahkan di banyak provinsi lain di Indonesia.

Usaha pencarian energi baru terbarukan di Provinsi Jawa Barat saat ini baru memasuki tahap awal. Pemanfaatan tenaga panas bumi dan tenaga mikro hydro yang saat ini baru dapat dikembangkan Provinsi Jawa Barat. Selain itu Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriyawan baru meresmikan Pabrik Pengolahan Bioethanol di Kabupaten Garut pada akhir 2011 lalu. Di balik itu sesungguhnya terdapat potensi EBT (Energi Baru Terbarukan) yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan survey yang dilakukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jabar, kandungan energi panas bumi Jabar sebanyak 22% panas bumi nasional¹⁸⁰.

Potensi energi panas bumi Jawa Barat itu tersebar di 25 titik, di beberapa Kabupaten di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sukabumi. Sekarang baru 5 titik yang sudah

¹⁷⁸ Harsanto, Samudin.2016.Statistik Listrik 2011 – 2015.Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada tanggal 10 Agustus 2017.

¹⁷⁹ Harsanto, Samudin.2016.Statistik Listrik 2011 – 2015.Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada tanggal 10 Agustus 2017.

¹⁸⁰ <https://www.esdm.go.id>. Diakses pada Tanggal 11 Agustus 2017.

eksisting berjalan menghasilkan energi yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, diantaranya adalah Kamojang, Drajat, dan Wayang Windu. Dengan begitu kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) baru mencapai angka 955,44 Mega Watt¹⁸¹. Mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 953,64 Mega Watt. Angka tersebut merupakan kapasitas PLTP terbanyak yang baru bisa terpasang di provinsi-provinsi di Indonesia.

Tentu Provinsi Jawa Barat masih memiliki potensi-potensi sumber energi baru terbarukan yang masih banyak dan bisa dieksploitasi. Namun usaha Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan potensi tersebut tidak dapat terhindarkan dari adanya kendala-kendala yang ada. Menurut Achmad Fadillah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Hulu Bidang Panas Bumi Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, ada beberapa kendala yang membuat belum seluruhnya potensi energi bumi di Provinsi Jawa Barat belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya, diantaranya adalah masalah tumpang tindih aturan, kurang memadainya teknologi, dan minimnya biaya¹⁸².

Kerjasama antara Jeollanam-Do dan Provinsi Jawa Barat khususnya di bidang *Research & Development* Energi Terbarukan perlu dijalin secara berkelanjutan. Kerjasama tersebut dirasa sangat penting untuk meningkatkan jumlah sumber energi baru terbarukan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur penyedia energi baru terbarukan tersebut. Sehingga nantinya Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat dapat mengatasi masalah krisis energi di masa mendatang. Mengingat hasil yang telah dicapai oleh Provinsi Jeollanam-Do yang telah berhasil

¹⁸¹ Harsanto, Samudin. 2016. Statistik Listrik 2011 – 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada tanggal 10 Agustus 2017.

¹⁸² <https://www.jabarprov.go.id>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017.

menempati posisi pertama skala nasional dalam produksi energi yang berasal dari sumber energi baru terbarukan.

6.9.1.4.3 Bentuk-Bentuk Kerja Sama Bidang R&D Energi Terbarukan

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan di atas, berikut ini bentuk-bentuk peluang kerjasama yang dapat dijalin Jeollanam-Do dan Provinsi Jawa Barat khususnya pada bidang *Research & Development* Energi Terbarukan. Peluang-peluang kerjasama tersebut antara lain:

1. Melakukan penelitian bersama (*joint research*) dalam mencari potensi energi baru terbarukan yang ada pada masing-masing provinsi.
2. Pertukaran informasi, baik berupa inovasi maupun teknologi penghasil dan penyedia energi baru terbarukan.
3. Kerjasama investasi pengadaan infrastruktur pembangkit listrik energi baru terbarukan kepada masing-masing provinsi.
4. Kerjasama *business to business* antar industri energi untuk masing-masing provinsi.

BAB VII

KESIMPULAN

Pada Bagian Kesimpulan ini akan disimpulkan Potensi Kerjasama yang dapat dilakukan antara masing-masing Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7.1 WALLONIA REGION, BELGIA

Negara Bagian Wallonia adalah kawasan yang relatif tua dan telah mapan pada masa kemerdekaan Belgia dari Belanda tahun 1830. Belgia, termasuk Wallonia, adalah kawasan tempat berdirinya industri Eropa tak lama berselang setelah Revolusi Industri. Industri Belgia sangat fenomenal pada masanya sehingga banyak berperan dalam pembangunan ekonomi negara yang memiliki tiga bahasa resmi ini. Jalinan hubungan bilateral dengan Indonesia telah terjadi pada awal setelah kemerdekaan Indonesia tatkala Belgia menjadi salah satu negara pertama Eropa yang mengakui proklamasi kemerdekaan 1945. Sebagai sebuah negara relatif kecil dengan populasi kurang lebih sepuluh juta jiwa, Belgia tercatat sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi dan industri yang kuat hingga kini.

Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Wallonia relatif memiliki persamaan dengan Gelderland yaitu: industri dan teknologi pertanian, industri alat-alat kesehatan dan obat-obatan, infrastruktur, teknologi perangkat keras seperti teknologi pertahanan dan militer, pariwisata, industri kreatif beserta unit usaha kecil dan menengah. Jalinan kemitraan dalam kerangka *sister province* cukup beralasan

dengan mengacu pada fakta beberapa similaritas potensi ekonomi, dan ketertarikan Belgia untuk lebih banyak ‘bermain’ di Asia Tenggara dengan perantara Indonesia sebagai titik distribusi.

Dengan memilih Jawa Barat, Belgia, khususnya Wallonia, berarti adanya suatu *sense of trust* untuk bertukar potensi, berinvestasi dan bermitra yang pada gilirannya akan dapat memantik pencapaian positif dalam bidang ekonomi. Dengan potensi teknologi pertanian dan pengolahan pangan, termasuk komoditas agro-wisata, industri medis dan obat-obatan, industri kimia, dan infrastruktur, Wallonia sangat sesuai menjadi mitra ekonomi Jawa Barat dalam bidang-bidang tersebut, termasuk khususnya dalam upaya mendorong sektor usaha kecil dan menengah sebagai mata-rantai terpenting dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Karakteristik Wallonia yang berpindah dari sektor industri berat dan pertambangan menuju sektor ekonomi kreatif yang didukung usaha kecil menengah sangat tepat ditempatkan sebagai salah satu mitra Provinsi Jawa Barat.

7.2 PROVINSI GELDERLAND, BELANDA

Hubungan bilateral Indonesia yang berbasis faktor historis sesungguhnya secara ideal telah menempatkan derajat hubungan yang lebih dalam tak hanya pada tingkatan pemerintah atau birokrasi pusat, namun juga aparatur daerah dalam semangat *people to people relationship*. Dalam banyak sisi, Belanda telah memiliki kapasitas dan pengalaman dalam pengembangan teknologi serta bagaimana memajukan perekonomian mereka sejak berdiri 1648. Hubungan historis dan tradisional hendaknya sudah semestinya dimanfaatkan Indonesia untuk konsultasi dan asistensi dalam memajukan perekonomian di daerah. Kedua negara sungguh

telah saling memahami makna evolusi hubungan hingga pada saatnya terjalin suatu interaksi yang lebih intensif.

Provinsi Gelderland sebagai salah satu wilayah terbesar di Belanda menjadi pilihan tepat bagi Provinsi Jawa Barat sebagai daerah unggulan di tanah air. Konstruksi *sister province* di satu sisi akan memberikan akses dan kemudahan untuk saling bertukar dalam banyak sektor, termasuk investasi yang pada gilirannya akan lebih memicu dan memacu dinamika pertumbuhan ekonomi kedua daerah. Provinsi Jawa Barat dengan potensi dan kapasitas ekonomi idealnya memang menempatkan Gelderland sebagai salah satu target kemitraan, utamanya untuk bidang teknologi pertanian dan pengolahan produksi tanaman pangan, perikanan, industri kimia dan kesehatan, pembangunan infrastruktur laut dan kawasan pantai, pemeliharaan lingkungan hidup, pariwisata, pendidikan-sains dan teknologi.

Secara garis besar, terdapat sejumlah similaritas potensi meskipun pada realitanya Provinsi Jawa Barat akan lebih banyak menjadikan Provinsi Gelderland sebagai acuan dan referensi untuk memacu pembangunan serta kemajuan ekonomi daerah. Pengalaman dan kematangan Gelderland dalam mengelola dan menata daerahnya dalam sektor-sektor terkait seyogianya akan memberikan kesempatan kepada Jawa Barat untuk berbenah dalam rangka meningkatkan daya saing secara nasional maupun global, dan lebih meningkatkan kesejahteraan secara merata di 27 daerah. Khusus dalam hal seputar usaha kecil dan menengah, kedua daerah dapat saling bertukar pandangan untuk bidang pengolahan hasil pertanian dan tanaman pangan, serta pariwisata. Bagi Jawa Barat, penguatan industri kreatif juga menjadi garapan dalam konstruksi *sister province* ini.

7.3 REPUBLIK BASHKORTOSTAN, RUSIA

Sebagai salah satu wilayah paling menonjol di Federasi Russia, potensi Republik Bashkortostan relatif sangat besar untuk ekonomi, perdagangan dan investasi khususnya sektor industri dan manufaktur, pertanian, serta pengembangan riset dan teknologi. Menempati peringkat tinggi dalam berbagai catatan statistik terkait performa ekonomi dan perdagangan menjadi Republik Bashkortostan sebagai sebuah wilayah yang memiliki daya tarik untuk industri dan perdagangan –status ramah dan kondusif untuk investasi, utamanya industri energi-mineral, petrokimia dan industri kimia, dan tentunya industri alat-alat berat. Secara umum, Republik Bashkortostan akan dapat menjadi mitra yang tepat dan sepadan bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat memperkuat kapasitas dalam meningkatkan performanya daerahnya utamanya sektor industri dan manufaktur berbasis teknologi – penerbangan, transportasi dan telekomunikasi, energi-mineral, dan industri pertanian.

Republik Bashkortostan dengan beragam potensinya akan dapat diharapkan memberikan motivasi dan dorongan Jawa Barat untuk menjadi sentra teknologi baik secara domestik atau nasional maupun di tingkat kawasan/ ASEAN. Karakteristik Bashkortostan yang kuat secara ekonomi hendaknya juga dapat meningkatkan dorongan bagi investasi, khususnya pada bidang-bidang tersebut, kepada Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga akan terkait dengan upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan suprastruktur di Jawa Barat melalui upaya kerjasama pendidikan, pelatihan, dan riset untuk bidang-bidang tersebut. Sekalipun tetap ada perbedaan, namun secara menyeluruh bangunan atau konstruksi kemitraan dalam kerangka *sister-province* akan banyak menuai kemanfaatan bagi Jawa Barat. Jawa Barat

hendaknya dapat mengajak dunia akademik dan riset untuk bagaimana bersama-sama memacu peningkatan kapasitas, khususnya dalam melibatkan perguruan tinggi untuk turut menggarap kemitraan ini, dan sekaligus melakukan pertukaran ilmu, pengalaman, dan riset dalam rangka bersama-sama mengupayakan peningkatan kapasitas antara kedua wilayah.

7.4 KHARTOUM, SUDAN

Hubungan bilateral Indonesia dengan Sudan yang berbasis faktor historis, tradisi, kesamaan latar belakang sosial-budaya sebagai sesama bangsa mayoritas umat Islam telah menempatkan derajat hubungan pada semua aktor. Dalam banyak sisi secara relatif, Indonesia lebih memiliki kapasitas dan perekonomian yang lebih baik dari umumnya mitra di kawasan Afrika, termasuk Sudan. Realita ini hendaknya sudah semestinya dimanfaatkan untuk dapat semakin mempererat hubungan dalam semua lini tidak hanya dalam tataran secara praktis terkait peningkatan perdagangan dan hubungan ekonomi, namun juga mekanisme konsultasi dan asistensi dalam upaya untuk saling mendorong dalam memajukan perekonomian.

Sudan saat ini sedang gencar untuk membangun perekonomian setelah fase stabil secara politik mulai diraih pasca usainya perang saudara berkelanjutan. Sebagai salah satu wilayah andalan dan dipandang sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional, negara bagian Khartoum sangat tepat untuk membuka kontak dan membangun hubungan kemitraan dengan dunia luar, termasuk dengan Provinsi Jawa Barat. Konstruksi *sister province* dalam semangat kemitraan dan persaudaraan antara Provinsi Jawa Barat dan Khartoum di satu sisi akan memberikan akses dan kemudahan untuk saling bertukar secara multi-sektor.

Provinsi Jawa Barat dengan potensi dan kapasitas ekonomi idealnya memang dapat memberikan sekaligus membagi pengalamannya dengan Khartoum dalam rangka untuk membantu wilayah tersebut untuk semakin memiliki daya saing dan kapasitas yang mencukupi dalam berkontribusi membangun ekonomi Sudan.

Potensi Khartoum yang menonjol yaitu pertanian, peternakan, dan pertambangan-energi sedikit banyak memiliki perbedaan dengan Jawa Barat. Jalinan kemitraan ke depannya akan lebih tepat terfokus pada bidang pengembangan pertanian dan pangan, serta peternakan sebagai ruang yang juga menjadi konsentrasi Jawa Barat sebagai wilayah unggulan nasional. Pada substansi lain, Jawa Barat mungkin akan lebih bisa menekankan hubungan pada investasi pariwisata, manajemen birokrasi, pemeliharaan lingkungan hidup, dan pendidikan-pelatihan. Dalam hal-hal tersebut, Jawa Barat seyogianya dapat memberikan dukungan dan bantuan lebih kepada negara bagian Khartoum.

7.5 SOUSS MASSA REGION, MAROKO

Hubungan bilateral Indonesia-Marokko yang berbasis faktor tradisi dan historis sesungguhnya secara tepat telah merangkai derajat hubungan yang lebih dalam dalam semua tingkatan. Hubungan ini menjadi *platform* dan *benchmark* bagi semua elemen untuk menjalin kolaborasi pada semua faktor. Mulai dari kunjungan Soekarno hingga pertautan antar daerah seperti yang dilakukan otoritas Jawa Barat dan Sous-Massa menjadi faktor yang mengesampingkan semua kemungkinan hambatan non-substansi. Similaritas dan konvergensi Jawa Barat dan Sous-Massa menjadi faktor penguat untuk bisa membangun kemitraan dengan fokus tiga sektor yaitu pertanian, perikanan dan pariwisata. Kekuatan Jawa Barat dan Sous-Massa

untuk ketiga sektor ini bisa saling disandingkan dan diiteraksikan dalam rangka mengoptimalkan performa ekonomi kedua daerah.

Kepentingan dan ambisi Jawa Barat untuk menjadi daerah percontohan nasional dengan daya saing tingkat kawasan juga dapat disinergikan dengan Sous-Massa yang juga memiliki kepentingan sepadan, terbaik di Marokko, dan bersaing secara global. Proyek nasional 'Marokko Hijau' semestinya dapat menjadi konduktor bagi investasi Jawa Barat terutama di sektor pertanian dengan varian buah-buahan, sayuran, dan bunga sebagai fokus kemitraan. Provinsi Jawa Barat juga dapat saling bertukar ilmu dan pengalaman terkait ketiga sektor tersebut untuk bagaimana meningkatkan produksi, kualitas, memperluas jangkauan pemasaran, dan hal-hal lain terkait pengembangan teknologi serta pembangunan kapasitas. Aparatur kedua wilayah dapat juga saling dipertukarkan untuk lebih dapat menuai upaya saling tahu dan saling memahami yang dapat juga pada gilirannya dilakukan elemen lain, termasuk perguruan tinggi, kelompok profesi dan lainnya.

7.6 KOTA METROPOLITAN INCHEON, KOREA SELATAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan mengenai potensi kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Incheon Metropolitan City, Korea Selatan. Kesimpulan tersebut antara lain:

- 1) Perekonomian Incheon Metropolitan City berkembang pesat seiring transformasi dari kota kecil menjadi kota industri dengan total GRDP US\$ 37.915.7 miliar dan nilai per kapita: ₩ 147.051.000.
- 2) Potensi ekonomi yang ada di Incheon Metropolitan City berasal dari industri manufaktur dan Kawasan Ekonomi Khusus, Icheon Free Economic Zone.

- 3) Potensi kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Incheon Metropolitan City dapat dilakukan pada beberapa sektor ekonomi kreatif, perdagangan, dan investasi.
- 4) Kerja sama ekonomi kreatif meliputi:
 - Membentuk wadah berupa organisasi/badan kerja sama antara Jawa Barat dan Incheon yang menaungi sektor ekonomi kreatif kedua provinsi yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar pelaku ekonomi kreatif.
 - Mempromosikan produk ekonomi kreatif Jawa Barat yang berkualitas tinggi ke Korea Selatan, khususnya Incheon Metropolitan City seperti produk fashion, kuliner, kerajinan tangan dan sebagainya.
 - Mengirimkan petugas teknik bidang ekonomi kreatif untuk mempelajari/mengetahui: Cara pengelolaan usaha ekonomi kreatif serta menghasilkan produk bermutu tinggi; mempelajari penguatan sektor ekonomi kreatif serta tata cara pengelolaan aset, mengetahui usaha-usaha lain yang bisa dilakukan dari sektor ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan nilai tambah penghasilan pelaku ekonomi kreatif.
 - Melakukan kerja sama dalam pengembangan dan penelitian sektor ekonomi kreatif.
- 5) Kerja sama investasi meliputi:
 - Berpartisipasi aktif dalam mencari investor "menjemput bola" dengan mendatangi korporasi-korporasi besar yang memiliki investasi besar dalam investasi global.

- Menyediakan infrastuktur seperti pembangkit listrik, pelabuhan, memberikan insentif untuk menarik minat investor.
- Memberikan layanan khusus berupa pendampingan dengan petugas yang menguasai bahasa Korea Selatan untuk mempermudah komunikasi.
- Mempromosikan West Java Ambassador Forum kepada asosiasi atau perkumpulan investor asal Korea Selatan yang ada di Indonesia.

6) Kerja sama perdagangan meliputi:

- Membentuk badan atau organisasi perdagangan antara Jawa Barat dan Incheon yang membidangi kerja sama perdagangan sebagai jembatan komunikasi antar kedua provinsi mengenai potensi perdagangan yang dapat dilakukan.
- Mempromosikan produk unggulan Jawa Barat non migas yang berkualitas tinggi ke Korea Selatan, khususnya Incheon Metropolitan City diantaranya produk perkebunan seperti teh dan kopi, produk ekonomi kreatif seperti fashion, kuliner, kerajinan tangan dan sebagainya.
- Membuka komunikasi dengan asosiasi importir Korea Selatan yang ada di Indonesia seperti Korea Importers Association (KOIMA).
- Melakukan kerja sama dalam pengembangan dan penelitian sektor perdagangan.

7.7 KOTA METROPOLITAN ULSAN, KOREA SELATAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan mengenai potensi kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Ulsan Metropolitan City, Korea Selatan. Kesimpulan tersebut antara lain:

- 1) Perekonomian Ulsan Metropolitan City berkembang pesat seiring transformasi dari kota kecil menjadi kota industri dengan total GRDP US\$ 40 juta per kapita dan nilai ekspor mencapai US\$ 60 miliar.
- 2) Potensi ekonomi yang menjadi keunggulan Ulsan Metropolitan City antara lain sektor sektor industri dan pariwisata.
- 3) Potensi kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Ulsan Metropolitan City dapat dilakukan pada beberapa sektor seperti pariwisata, industri galangan kapal, dan penataan lingkungan wilayah perindustrian.
- 4) Potensi kerja sama Industri Galangan Kapal meliputi:
 - Menjalin kerja sama dengan perusahaan Korea Selatan yang ada di Ulsan Metropolitan City untuk mengembangkan industri galangan kapal dan perbaikan kapal di Provinsi Jawa Barat.
 - Pertukaran wawasan dan pengalaman dengan industri berorientasi teknologi yang ada di Ulsan Metropolitan City mengenai faktor keberhasilan utama dan tantangan yang dihadapi dalam menembus pangsa pasar global.
 - Menjalin kerja sama kemitraan dengan University College of Ulsan (USU) dan Global Shipbuilding and Offshore Engineering (GSOE) dalam bentuk Research and Development (R&D) mengenai industri perkapalan.

- Kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa program pelatihan khusus dan pertukaran informasi dan teknologi perkapalan.
- Penawaran investasi pendirian galangan kapal di Jawa Barat.

5) Potensi kerja sama Penataan Lingkungan Wilayah Industri meliputi:

- Pertukaran wawasan dan pengalaman dengan Ulsan Metropolitan City mengenai faktor keberhasilan dalam menata lingkungan perindustrian serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam merestorasi kembali sungai-sungai.
- Kerja sama dalam pengelolaan dan pengendalian limbah perindustrian yang mencemari lingkungan dan memulihkan kondisi sungai yang ada di Jawa Barat.
- Pertukaran pegawai, khususnya tenaga ahli dalam bidang lingkungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penataan lingkungan, terutama lingkungan wilayah perindustrian.

6) Kerja sama sektor pariwisata meliputi:

- Pemasaran bersama joint marketing serta memberi kemudahan dalam visa dan permit.
- Pertukaran informasi pariwisata mengenai inovasi serta solusi dalam meningkatkan serta mengembangkan objek wisata yang ada di kedua Provinsi melalui pelatihan dan penelitian.
- Penawaran dan penjajakan investasi pada sektor pariwisata
- Kerjasama business to business antar pelaku sektor pariwisata seperti asosiasi pengusaha travel, hotel, dan agen perjalanan.

7.8 PROVINSI GYEONGSANGBUK-DO

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan mengenai potensi kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Gyeongsanguk-Do, Korea Selatan. Kesimpulan tersebut antara lain:

- 1) Provinsi Gyeongsangbuk-do memiliki luas wilayah seluas 19.440 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.775.890 jiwa (2015). Ibu kota Provinsinya adalah Daegu.
- 2) Potensi ekonomi yang menjadi keunggulan Provinsi Gyeongsanguk-Do antara lain sektor agrikultur, sektor manufaktur dan sektor perikanan.
- 3) Potensi kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Gyeongsangbuk-Do dapat dilakukan pada beberapa sektor seperti sektor agrikultur, sektor pariwisata dan sektor perikanan.
- 4) Bentuk kerja sama pada sektor agrikultur adalah berupa:
 - Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang agrikultur guna meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan daerah masing-masing.
 - Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan sektor agrikultur melalui pertukaran penyuluh pertanian dan perkebunan antara provinsi Jawa Barat dengan provinsi Gyeongsangbuk-Do.
 - Kerjasama dalam pengelolaan dan pemberdayaan wilayah agraria, khususnya komoditas-komoditas unggul yang ada di Jawa Barat seperti kopi, cabe merah, dan teh sehingga terjadi transfer ilmu (knowledge transfer) agar komoditas tersebut bisa bersaing di pangsa pasar internasional.

- Transfer ilmu dan teknologi dalam pengelolaan dan pemberdayaan lahan agrikultur dengan optimal mengingat Provinsi Gyeongsangbuk-do dan Provinsi Jawa Barat memiliki masalah yang sama, yaitu semakin menyusutnya agrikultur akan tetapi, mereka (Provinsi Gyeongsangbuk-Do) mampu menanggulangi masalah tersebut melalui inovasi dan teknologi pertanian.

5) Bentuk kerja sama pada sektor pariwisata meliputi:

- Pemasaran bersama (joint marketing) dalam mempromosikan tempat wisata yang ada di daerah masing-masing.
- Pertukaran informasi pariwisata mengenai kelebihan dan kekurangan daerah wisata yang ada di kedua provinsi.
- Kerjasama investasi pariwisata antara kedua provinsi guna meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata kedua provinsi.
- Peningkatan sumber daya manusia untuk kepentingan pariwisata
- Kerjasama business to business antar industri pariwisata

6) Bentuk kerja sama pada sektor perikanan meliputi:

- Melakukan Penelitian bersama (joint research) dalam mengembangkan potensi perikanan yang ada di daerah masing-masing.
- Pertukaran informasi, baik berupa inovasi maupun teknologi perikanan.
- Kerjasama investasi perikanan antara kedua provinsi guna meningkatkan dan mengembangkan potensi perikanan kedua provinsi.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi seluruh pelaku perikanan, baik penyuluh, tenaga pembina, maupun nelayan yang ada di kedua provinsi.

- Kerjasama *business to business* antar industri perikanan.

7.9 PROVINSI JEOLLANAM-DO

Dari analisis data dan fakta yang telah dipaparkan secara panjang-lebar, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai potensi kerjasama yang dapat dijalin oleh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jeollanam-Do, Korea Selatan.

Kesimpulan tersebut antara lain:

1. Potensi ekonomi yang menjadi keunggulan Provinsi Jeollanam-Do antara lain sektor agrikultur terutama perkebunan teh, sektor Industri: petrokimia; baja; dan industri perkapalan, dan sektor Perikanan.
2. Adapun potensi kerjasama yang dapat dijalin Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jeollanam-Do terdapat pada beberapa sektor seperti sektor agrikultur terutama perkebunan teh, sektor perikanan ikan tangkap, dan pariwisata, dan sektor *research & development* di bidang energi baru terbarukan.
3. Kerja sama sektor perkebunan meliputi:
 - Mempromosikan produk *Black/Red Tea* Jawa Barat yang berkualitas tinggi ke Korea Selatan, khususnya untuk grade OPS (*Orange Pekoe Superior*), OP (*Orange Pekoe*), BS (*Broken Souchon*), BOPF (*Broken Orange Pekoe Fanning*), BOP (*Broken Orange Pekoe*)¹⁸³, mengingat kualitas teh yang biasa diminum mereka sangat baik dan daya beli masyarakatnya yang tinggi,

¹⁸³ Penjelasan pemeringkatan teh dapat dilihat di <https://www.ipb.ac.id/~tepfeta/elearning/media>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

susai dengan permintaan pihak Kabupaten Boseong, Jeolanam-Do.

- Mengirimkan beberapa petani untuk mempelajari cara pengelolaan usaha agrobisnis teh organik serta menghasilkan teh bermutu tinggi, mempelajari penguatan kelembagaan kelompok tani serta tata cara lain yang bisa dilakukan dari agroindustri teh dalam rangka meningkatkan nilai tambah penghasilan petani teh.
- Mengirimkan petugas teknis atau pengelola kelembagaan teh, untuk meningkatkan wawasan pembinaan agribisnis teh, antara lain tentang:
 - Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membangun agroindustri teh;
 - Mekanisme kerja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten dalam pembinaan agroindustri teh;
 - Mekanisme bantuan langsung pemerintah terhadap petani, kelompok tani maupun agroindustri teh;
 - Mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dengan asosiasi/organisasi petani teh;
 - Mekanisme stabilisasi harga pada saat produksi sangat tinggi dan berlebih;
 - Penanganan *Standard Produk Quality* dan *Quality Control Procedure*;

- Mekanisme/prosedur untuk dinyatakan lulus dalam *Quality Control* dan mendapat label resmi dari pemerintah.
4. Kerja sama sektor perikanan tangkap meliputi:
 - Melakukan pertukaran teknologi dan inovasi penangkapan ikan dari masing-masing provinsi.
 - Melakukan kerjasama investasi pada industri sektor perikanan tangkap masing-masing provinsi.
 - Menjalin kerja sama ekspor-impor perikanan tangkap untuk pemasaran internasional.
 - Menjalin Kerjasama business to business antar industri perikanan tangkap.
 5. Kerja sama sektor pariwisata meliputi:
 - Melakukan pertukaran teknologi dan inovasi penangkapan ikan dari masing-masing provinsi.
 - Melakukan kerjasama investasi pada industri sektor perikanan tangkap masing-masing provinsi.
 - Menjalin kerja sama ekspor-impor perikanan tangkap untuk pemasaran internasional.
 - Menjalin Kerjasama business to business antar industri perikanan tangkap.
 6. Kerja sama research and development meliputi:
 - Melakukan penelitian bersama (*joint research*) dalam mencari potensi energi baru terbarukan yang ada pada masing-masing provinsi.

- Pertukaran informasi, baik berupa inovasi maupun teknologi penghasil dan penyedia energi baru terbarukan.
- Kerjasama investasi pengadaan infrastruktur pembangkit listrik energi baru terbarukan kepada masing-masing provinsi.
- Kerjasama *business to business* antar industri energi untuk masing-masing provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL/ARTIKEL

Ali, Muli Takdir *Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional*, 2015

Anima Investment Network – Ensemble pour une Mediteranee Competitive, 2015

Bashkortostan Investment Promotion Agency, 2016

Bashkortostan Development Cooperation – Project of Foundation ‘Roskongress’ – Agency for Strategic Initiatives, 2016

BKPM-RI, Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan II dan Januari–Juni Tahun 2017

Castells, Manuels, 2003. “Global Networks and Local Societies: Cities in the Information Age”, dalam Vertovec, Steven dan Darrell A. Posey (eds), 2003. *Globalization, Globalism, Environments and Environmentalism: Consciousness of Connections*. Oxford: Oxford University Press.

Chandra, Alexander C, 2005, “Indonesia dan Ancaman Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral” *Institute for Global Justice*, Jakarta.

Center of Development Cluster of Bashkiria Republic, 2016

Coster, Michel de, *Les Enjeux des Conflicts Linguistiques*, 2007

Darmayanti, Christy, 2011, Transformasi, Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN, Yogyakarta: Universitas Slamet Riyadi

Destatte, Philippe, *L’identite Wallonie*, 1997

De Villiers, J.C., 2006. “Achieving the Millenium Development Goals through City to City Partnerships: Origins, History and Context of City to City Partnership”, dalam *the 50th Anniversary Conference of Sister Cities International*, 13th July. Washington, D.C

Duchachek, Ivo D., "Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations" dalam Hans J. Michelman dan Panayotis Soldatos (ed), *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*, Clarendon Press, Oxford, 1990.

Geography of Korea. The Academy of Korean Studies. 2016

Gwillim, Law, *Regions of Marocco*, 2015

Gyeongsangbuk-Do Agriculture Research & Extension Service. 2016.

Environmental Policy Division, Ulsan Metropolitan City. 2014

Hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif. Kerjasama Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, 2015

Hasquin, Hervé, *La Wallonie, Son Histoire*, 2009

Hasquin, Hervé, '*Historiographie et Politique en Belgique*', 1995

Harsanto,Samudin. Statistik Listrik 2011 – 2015.Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016

Hong Lijian, 2004, "Chongqing: Opportunities and Risks", *The China Quarterly*, 178: 448-466 Cambridge University Press.

Hong Lijian 2006, "The Dynamics of Urban CG Growth in Three Chinese Cities" (Region to its West, Chongqing Municipality)

Hung-Suck PARK and Jae-Yeon WON. Ulsan Eco-industrial Park Challenges and Opportunities. 2015

Government of South Australia -Department of State Development-, Economic Overview

Institute for Global Justice, Briefing Paper, 2009," Analisa Posisi Indonesia terhadap Special Product/Special Safeguard Mechanism Dalam Perundingan Putaran Doha Paska Chairperson's Text 2008, Jakarta.

Internatinal Herald Tribune, 2005, "China and Indonesia Seal A Strategice Pact, International Herald Tribune, 26 April, tersedia pada situs resmi Herald Tribune: <http://www.iht.com/articles/2005/04/25/indonesia.php>.

- Kern, Kristin, 2009. "Cities in European Setting", dalam *the Conference of Innovation for Good Local and Regional Governance: A European Challenge*, 2-3 April. University of Twente (Erschede).
- Keating, Michael , 2000, *Going Beyond Paradiplomacy ? Adding Historical Institutionalism to Account for regional Policy Competences*, Hyannover: Forum of Federation an International Federalism
- Michelmann, Hans dan Soldatos, Panayotis, 1990, *Federalism and International Relations: The Role of Sun-national units*. oxford ; Clarendon Press
- Morocco Bussiness News –Centre Marocain de Conjoncture, 2016
- Nye, Joseph, 2000, *Governance in A Globalizing World*, Washington : Brookins Instituion Press
- Nofrian, Fachru, 2009,"Pendekatan Ekonomi Heterodoks" *Institute for Global Justice*, Jakarta.
- Oxfam International, Briefing paper "Resep Pembawa Petaka" 2006
Oxfam International, Briefing Paper " A raw deal for rice under DR-CAFTA", 2004.
- Pambudi, Daneil dan Chandra, Alexander C, 2006,"Garuda terbelit Naga" Dampak kesepakatan bebas bilateral ASEAN-China terhadap perekonomian Indonesia,. Institute for Global Justice, Jakarta
- Pascual, Maria Teresa D, 2006," Perjanjian-perjanjain Perdagangan Bebas Bilateral Amerika Serikat di Asia" Asia Pasific network for Food Sovereignty,
- Publication –Ufa State Petroleum Technological University, 2016
- Pusat Data & Sistem Informasi Pertanian Sek. Jenderal - Kementerian Pertanian. 2014
- Portail National des Collectivites Territoriales, 2015
- Project of Foundation 'Roskongress' and the Agency for Strategic Initiatives –Investment Potential of Russian Regions, 2016
- Rosecrance, Richard, 1991."Kebangkitan Negara Dagang, Perdagangan dan Penaklukan di Dunia Modern" Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Russian Defense Industries Directory, 2015-2016

Scott Woo, Wynne Koh . Incheon Metropolitan City_Multi Cultural Family Policy Division, 2015

Solinger Dorothy J. 2006, Book review Revolution, Resistance and Reform - notes on Mrs. Zheng, a shoe-repair woman in the central The book delves into industrialization through the lens of Chongqing, Far Eastern Economic Review www.feer.com/reviews/2006/may/revolution-resistance-and-reform-in-village-china - 82k –

South Australian History, 2004, Oxford University Press.

Solinger, Dorothy J., 1996, Despite Decentralization: Disadvantages, Dependence and Ongoing Central Power in the Inland - The Case of Wuhan *The China Quarterly*, No. 145 (Mar., 1996), pp. 1-34.

Tawaf, Rochadi., dan Achmad Firman. 2005. *Analisis Pembangunan Sektor Peternakan Di Jawa Barat*. Diajukan sebagai bahan makalah untuk Kegiatan Seminar Evaluasi Pembangunan Peternakan Di Jawa Barat. Bandung: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat – Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.

Tian Xiaowen (2000 September) China's Drive To Develop Its Western Region (I): Why Turn To This Region Now? East Asian Institute (EAI) Report No. 71.

Tourism and The Crative Economy © OECD 2014

Wang, Jiangyu. 2005. *Financial Liberalization in East Asia: Lessons from Financial Crises and the Chinese Experience of Controlled Liberalization*. Singapore: NUS Press.

Wolff, Stefan, 2010, Paradiplomacy : Scope, Opportunities and Challenges, Bologna: Bologna Center Journal of International Affairs Vol. 10

B. SITUS INTERNET

<http://english.incheon.go.kr>.

<http://kosis.kr>. <https://m.tempo.co>.

<http://ksp.go.id/iklim-investasi-di-indonesia-saat-ini-positif/>

<https://m.tempo.co/read/news/2017/04/06/299863242/pemprov-jawa-barat-janjikan-kemudahan-kepada-investor>.

<http://bpmppt.jabarprov.go.id>.

<https://bisnis.tempo.co>.

<https://www.bps.go.id>.

<http://www.kemendag.go.id>.

<https://jabar.bps.go.id>.

<https://news.detik.com>

<http://www.ulsan.go.kr>.

<https://www.britannica.com>.

<http://kostat.go.kr>.

<http://investkorea.org>.

<http://english.visitkorea.or.kr>.

<http://ekonomi.kompas.com>.

<http://www.antaraneews.com>.

<http://katadata.co.id>.

<https://www.jurnalbandung.com>.

<https://news.detik.com>.

<http://bisnis.liputan6.com>.

<http://www.ship-technology.com>.

<http://komec.kr>.

<http://nasional.republika.co.id>.

<https://poskoberita.com>.

<http://www.walhijabar.org>.

<http://economy.okezone.com>.

<http://www.urbancikarang.com>.

<https://www.gb.go.kr>.

<http://humas.jabarprov.go.id>.

<http://www.mongabay.co.id/>.

<http://www.pertanian.go.id/>.

<http://bappeda.jabarprov.go.id>.

<https://www.bps.go.id>.

<http://kemenpar.go.id>.

<http://bisniswisata.co.id>.

<http://travel.kompas.com>.

<http://bandung.bisnis.com>.

<https://www.bps.go.id>.

<http://diskanlaut.jabarprov.go.id/>.